

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TA 2020



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Alhamdulillah Puji Syukur kita Panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas segala Limpahan Rahmat dan Karunianya akhirnya BPBD Provinsi Jawa Tengah dapat menyelesaikan tugas penyusunan Buku Laporan Tahunan Penyelenggaraan Program Kerja Tahun Anggaran 2020.

Pada kesempatan ini kami atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya BPBD Prov. Jawa Tengah menyampaikan Ucapan terimakasih kepada:

1. BNPB yang telah memberikan Penguatan bagi BPBD Prov. Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah, khususnya dalam bentuk sarana mobilitas, peralatan, logistik dan anggaran (penguatan kelembagaan, dana siap pakai, maupun dana rehabilitasi dan rekonstruksi) sehingga Penanganan Bencana di Jawa Tengah dapat berjalan dengan sukses.
2. Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bapak Sekda, Bapak Assisten Pemerintahan dan Kesra, Ka. Bappeda Prov Jateng, dan Ka. BPKAD Prov Jateng yang telah memberikan dukungan anggaran, sarana mobilitas, gedung kantor dan personil, serta kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, serta motivasi yang selalu di berikan melalui group whatsapp, rakor dan twitter kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah maupun BPBD Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.
3. DPRD Prov Jawa Tengah terutama Komisi E DPRD Prov Jateng yang membidangi kesejahteraan sosial telah memberikan dukungan anggaran dan sarana pendukung PB melalui alokasi anggaran untuk kebijakan PB sekaligus kunjungan lapangan secara bersama-sama.
4. Unsur pengarah SKPD maupun dari masyarakat profesional atas kerjasama dan koordinasi yang sangat baik dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana, maupun penanganan darurat dan pasca bencana.
5. TNI/POLRI atas kerjasama dalam penanggulangan bencana dan penanganan kejadian bencana baik di lapangan maupun dalam posko.
6. Seluruh Komunitas Relawan yang telah banyak membantu dan berkontribusi langsung dalam penanggulangan bencana yang langsung berhubungan dengan masyarakat terdampak bencana maupun di bidang mitigasi.

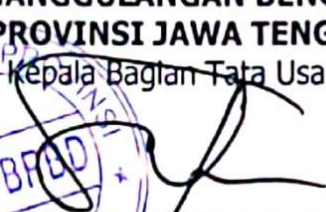
7. Seluruh Pemangku Kepentingan atas kerjasamanya selama ini, sehingga kolaborasi dalam penanggulangan bencana dapat berjalan dengan lancar termasuk dunia usaha melalui CSRnya.

Kami menyadari bahwa usaha dan upaya telah kami lakukan secara maksimal. Apabila masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penanganan bencana di Jawa Tengah, segala bentuk saran dan kritik merupakan masukan yang sangat berharga bagi kami untuk memperbaiki kinerja di tahun mendatang. Sebagai lembaga yang 13 tahun berdiri, kami menyadari bahwa pengalaman dan kekurangan dilapangan merupakan guru terbaik untuk memacu kami agar menjadi lebih baik lagi.

Buku laporan ini dibuat sebagai upaya kami dalam mendokumentasikan seluruh kegiatan dan menjaga akuntabilitas kinerja yang tentunya masih terdapat banyak kekurangan dan masih perlu penyempurnaan. Harapan kami buku ini dapat memberikan gambaran secara utuh tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Prov. Jawa Tengah mulai dari Pra-bencana, Tanggap Darurat, maupun Pasca-bencana serta pelayanan pada masyarakat.

Dengan tersusunnya buku ini mudah-mudahan memberikan manfaat khususnya bagi para pejabat berikutnya, serta berbagai pihak yang berkepentingan sekaligus sebagai pertanggungjawaban terhadap tugas yang sudah dilaksanakan di samping pertanggung jawaban anggaran yang sudah dilaksanakan di BPBD Prov. Jateng. Sekian

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Mengetahui,
Pt. KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Tata Usaha

Ir. SAFRUDIN, M.Si
NIP. 19690603 199403 1 007


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR	9
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang	11
1.1.1 Kondisi Wilayah dan Kebencanaan Jawa Tengah	11
1.1.2 Kajian Risiko Bencana.....	17
2.1 Dasar Hukum	22
3.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	24
3.1.1 Tugas Pokok.....	24
3.1.2 Fungsi.....	25
4.1 Rencana Strategis BPBD.....	26
4.1.1 Visi Jawa Tengah 2018 - 2023.....	26
4.1.2 Misi.....	26
4.1.3 Tujuan.....	27
4.1.4 Sasaran.....	27
5.1 Sumber Anggaran.....	27
6.1 Personel BPBD.....	28
BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN PB 2019	31
3.1 Urusan, Program dan Kegiatan	31
3.2 Tempat Dan Waktu Kegiatan.....	35
3.3 Tahapan dan Rencana Kerja Kegiatan	35
3.4 Metode Kegiatan.....	36
3.5 Sasaran Kegiatan.....	37
BAB III CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN PB	38
3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan	38
3.2 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.....	50
3.2.1 Seksi Pencegahan.....	51

3.2.2	Seksi Kesiapsiagaan	81
3.3	Bidang Penanganan Darurat	123
3.3.1	Seksi Penyelamatan, Evakuasi Dan Penanganan Pengungsi	123
3.3.2	Seksi Sarana dan Prasarana Darurat.....	136
3.4	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	150
3.4.1	Seksi Rehabilitasi	151
3.4.2	Seksi Rekonstruksi	164
3.5	Bidang Logistik dan Peralatan	206
3.5.1	Seksi Logistik.....	206
3.5.2	Seksi Peralatan.....	228
3.6	Bagian Tata Usaha.....	243
3.6.1	Subbagian Umum dan Kepegawaian	245
3.6.2	Subbagian Keuangan	254
3.6.3	Subbagian Program	254

BAB IV PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA JAWA

TENGAH 290

5.1	Kejadian Bencana di Jawa Tengah.....	290
5.2	Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Tahun 2019	291
4.2.1	Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana	291
4.2.2	Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor	293
4.2.3	Gempa Bumi di Jawa Tengah	310
4.2.4	Bencana Kekeringan	312
4.2.5	Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan.....	319
5.3	Hari Kesiapsiagaan Nasional (HKBN) 2019	326
5.4	Dukungan Event Pemangku Kepentingan PB	329
5.5	Alokasi Dana PB di Jawa Tengah.....	334
4.5.1	APBD Provinsi Jawa Tengah.....	334
4.5.2	Bantuan Gubernur Jawa Tengah	336
4.5.3	APBN TA 2019	339
5.6	Data Personel BPBD Kabupaten/Kota	345
5.7	Sinergi Penanggulangan Bencana	346
4.7.1	Bantuan Bencana dari Provinsi Jawa Tengah.....	346

4.7.2	MOU Penyelamatan Danau Rawa Pening.....	354
4.7.3	Ekspedisi Desa Tangguh Bencana Tsunami Selatan Jawa.....	356
4.7.4	Desa dampingan penanggulangan kemiskinan	358
5.8	Prestasi dan Penghargaan 2019	368
4.8.1	Jateng Fair 2019.....	368
4.8.2	Jambore Relawan Bulan PRB Bangka Blitung.....	369
5.9	Tantangan, Permasalahan dan Solusi.....	370
BAB V PENUTUP		373
5.1	Kesimpulan.....	373
5.2	Saran	373
BAB VI LAMPIRAN		375

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daerah Rawan Bencana di Jawa Tengah.....	15
Tabel 2 Indeks Bencana Kabupaten/Kota Se-Jateng	17
Tabel 3 Kelas Bahaya Bencana Jateng	18
Tabel 4 Kelas Kerentanan Bencana Jateng.....	19
Tabel 5 Kelas Kapasitas/Ketahanan Bencana Jateng	21
Tabel 6 Kajian Risiko Bencana Jawa Tengah.....	21
Tabel 7 Tugas Pokok Bagian/Bidang BPBD Prov Jawa Tengah	24
Tabel 8 Fungsi Bagian/Bidang BPBD Prov Jawa Tengah	25
Tabel 9 Anggaran APBD TA 2020	27
Tabel 10 Perbandingan APBD TA 2019 - 2020.....	28
Tabel 11 Jumlah Pegawai Tahun 2020	28
Tabel 12 Pangkat/Golongan PNS di BPBD Prov. Jawa Tengah	29
Tabel 13 Urusan, Program dan Kegiatan Bidang PB	31
Tabel 14 Program dan Kegiatan Pada BPBD Jawa Tengah TA 2020	31
Tabel 15 Realisasi Keuangan APBD TA 2020	38
Tabel 16 Efisiensi Anggaran Kegiatan BPBD TA 2020	40
Tabel 17 Realisasi Keuangan Kegiatan BPBD TA 2019.....	41
Tabel 18 Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2019	43
Tabel 19 Tujuan, Sasaran RPJMD 2018 – 2023.....	43
Tabel 20 Program dan Kegiatan RPJMD 2018 – 2023	45
Tabel 21 Realisasi Indikator Sasaran dan Program	50
Tabel 22 Realisasi Fisik dan Keuangan Seksi Pencegahan	51
Tabel 23 Realisasi Kinerja Bidang Pencegahan	52
Tabel 24 Jadwal dan Kegiatan	52
Tabel 25	55
Tabel 26 Indikator Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.....	64
Tabel 27 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.....	65
Tabel 28 Indikator Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	68
Tabel 29 Indikator Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Kelurahan Jomblang, Kec. Candisari Kota Semarang	70
Tabel 30 Indikator Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Desa Garungwiyoro Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan	72
Tabel 31 Indikator Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Desa Tajemsari, Kec. Tegowanu Kab. Grobogan.....	75
Tabel 32 Realisasi Fisik dan Keuangan Seksi Kesiapsiagaan	81
Tabel 23 Realisasi Kinerja Bidang Pencegahan	81
Tabel 33 Kegiatan Seksi Rehabilitasi Tahun 2019.....	162
Tabel 34 Kegiatan Seksi Rehabilitasi Tahun 2018.....	203
Tabel 35 Kegiatan Seksi Logistik Tahun 2019	226
Tabel 36 Kegiatan Seksi Peralatan Tahun 2019	235

Tabel 37 Inventarisasi ketersediaan Peralatan PB.....	236
Tabel 38 Kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.....	245
Tabel 39 Sarana dan Prasarana Kedinasan Umum Tahun 2019	248
Tabel 40 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019	249
Tabel 41 Kegiatan Subbagian Keuangan.....	254
Tabel 42 Kegiatan Subbagian Program.....	287
Tabel 43 Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Jawa Tengah 2019	290
Tabel 44 Perbandingan Kejadian Bencana 2017-2019	291
Tabel 45 Wilayah Terdampak Banjir Kab. Purworejo	295
Tabel 46 Wilayah Terdampak Banjir Kab. Kebumen	296
Tabel 47 Wilayah Terdampak Banjir.....	298
Tabel 48 Titik Pengungsian Banjir	299
Tabel 49 Dampak Abu Fulkanik Erupsi G. Merapi.....	308
Tabel 50 Dampak Gempa Bumi di Kab. Jepara.....	310
Tabel 51 Daerah Potensi Kekeringan di Jateng	313
Tabel 52 Daerah Terdampak Kekeringan Jawa Tengah.....	317
Tabel 53 Penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan Jawa Tengah	319
Tabel 54 Alokasi Dana PB di Provinsi Jawa Tengah 2019	335
Tabel 55 Alokasi Dana PB Provinsi Jawa Tengah 2013 - 2019	336
Tabel 56 Kriteria dan Nilai Bantuan Bencana (Pergub 77 Tahun 2014)	337
Tabel 57 Bantuan Gubernur Jawa Tengah 2019	337
Tabel 58 Alokasi Dana RR di Kabupaten/Kota Jawa Tengah	341
Tabel 59 Alokasi Dana PB di Kabupaten/Kota Jawa Tengah	342
Tabel 60 Pegawai BPBD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.....	345
Tabel 61 Hasil Intervensi Desa Dampungan	358
Tabel 62 Evaluasi Pengembangan Potensi Desa.....	364
Tabel 63 Evaluasi Perkembangan Karakteristik Masyarakat dengan Tingkat Kesejahteraan Rendah.....	366
Tabel 64 Tantangan Permasalahan dan Solusi PB	371
Tabel 65 Indeks Risiko Bencana Indonesia.....	376

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Indeks Risiko Bencana (BNPB 2018)	16
Gambar 2 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Jawa Tengah.....	30
Gambar 3 Gladi Lapang PB Erupsi Gunung Merapi dan Tsunami.....	56
Gambar 4 Sekolah/Madrasah Aman Bencana.....	63
Gambar 5 Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Masyarakat Tangguh Bencana	Error!
Bookmark not defined.	
Gambar 6 Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Masyarakat Tangguh Bencana	Error!
Bookmark not defined.	
Gambar 7 Pembentukan Unit Lidi Kab. Jepara dan Magelang	80
Gambar 8 Gladi Lapang PB Erupsi Gunung Merapi dan	101
Gambar 9 Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan	105
Gambar 10 Kegiatan Rencana Kontigensi (RENKON) Gunung Api Dieng Gas Beracun	114
Gambar 11 Pemasangan Alat Sistim Pringatan Dini (EWS) tanah Longsor	122
Gambar 12 Bimbingan Teknis Relawan dan Latihan Gabungan SAR Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi (PEPP)	130
Gambar 13 Kegiatan Evaluasi	136
Gambar 14 Posko Radio BPBD Prov Jateng.....	143
Gambar 15 Simulasi Pelajar.....	150
Gambar 16 Acara Pemulihan dan Peningkatan Sosial dan Ekonomi Pasca Bencana Kab. Cilacap dan Magelang.....	157
Gambar 17 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kegiatan Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana Di Jawa Tengah Tahun 2019	162
Gambar 18 Focus Group Discussion (FGD) Dukungan Pembangunan Infrastruktur Pascabencana Di Kab/Kota Se Jawa Tengah	184
Gambar 19 Kegiatan Fgd I Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.....	203
Gambar 20 Pelatihan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana.....	209
Gambar 21 Peningkatan Kapasitas Logistik dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana	213
Gambar 22 Rapat Koordinasi Inventarisasi Kebutuhan dan Ketersediaan Logistik Bencana Provinsi Jawa Tengah	218
Gambar 23 Pekan Raya Pameran Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah dan Pesta Rakyat Jawa Tenga.....	220
Gambar 24 Pesta Rakyat Jawa Tengah	222
Gambar 25 Festival Culinary Jawa Tengah	223
Gambar 26 Pelatihan Penataan Gudang Logistik dan Peralatan PB Provinsi Jawa Tengah.....	226
Gambar 27 Koordinasi Pemetaan dan Monitoring Evaluasi Peralatan	233
Gambar 28 Peningkatan Pengelolaan dan Praktik Peralatan PB.....	235
Gambar 29 Pemohon Informasi Publik.....	247

Gambar 30 Forum OPD Bidang Kebencanaan 2019.....	256
Gambar 31 Forum OPD Bidang Kebencanaan 2019.....	259
Gambar 32 Penyusunan RPB dan RAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023	264
Gambar 33 Bintek Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Bidang Kebencanaan	266
Gambar 34 Rakor Evaluasi Penanganan Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kesiapan Menghadapi Musim Penghujan 2019 – 2020	269
Gambar 35 Workshop dan Bintek dengan tema “Peluang dan Tantangan Penggunaan Media Sosial Dalam Penyediaan Informasi Publik”	271
Gambar 36 Rakor Sinergi Perencanaan Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2020.....	273
Gambar 37 Sosialisasi Keterbukaan Informasi Bencana Untuk Peningkatan Ketangguhan Masyarakat.....	278
Gambar 38 Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Diseminasi Informasi Bencana Serta Peningkatan Kapasitas SDM.....	283
Gambar 39 Pameran Pembangunan pada Event Jateng Fair 2019	287
Gambar 40 Perbandingan Kejadian Bencana Jateng	291
Gambar 41 Banjir 7 Kecamatan di Kabupaten Purworejo	296
Gambar 42 Banjir 9 Kecamatan di Kabupaten Kebumen	298
Gambar 43 Banjir di Kabupaten Pekalonga dan Kota Pekalongan	302
Gambar 44 Banjir di Kabupaten Batang.....	303
Gambar 45 Banjir di Kabupaten Banjarnegara	303
Gambar 46 Erupsi Merapi dan Grafik Seismisitas 14 Okt 2019	305
Gambar 47 Erupsi Merapi dan Grafik Seismisitas 9 Nov 2019	307
Gambar 48 Grafik Nilai IRBI Jateng 2015 - 2018.....	326
Gambar 49 Persiapan dan Peringatan HKBN 2019.....	328
Gambar 50 Stand Pameran PRPP Jateng Fair 2019	330
Gambar 51 Dukungan BPBD untuk Pesta Rakyat Jawa Tengah	331
Gambar 52 Kongres Sampah 2019	333
Gambar 53 Penyerahan Bantuan Jateng Ke Sentani	349
Gambar 54 Bantuan Kemanusiaan BPBD Prov. Jateng untuk warga Halmahela Selatan, Maluku.....	352
Gambar 55 Bantuan Kemanusiaan Korban Gempa Bumi Ambon.....	354
Gambar 56 Penandatanganan Nota Kesepakatan Revitalisasi Danau Rawa Pening	356
Gambar 57 Bantuan Kemanusiaan Korban Gempa Bumi Ambon	357
Gambar 58 Penghargaan Jateng Fair 2019.....	368
Gambar 59 Penghargaan Jambore Relawan (PRB) 2019	369

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Kondisi Wilayah dan Kebencanaan Jawa Tengah

Mendasarkan data BPS tahun 2017 penduduk di Jawa Tengah tercatat sebesar 34.490.835 Jiwa/9.719.925 KK tersebar di 29 Kabupaten, 6 Kota, 573 Kecamatan dan 8.577 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah $\pm$ 32.548 km², atau sekitar 25,04% dari luas Pulau Jawa. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Brebes (2,342 Juta Jiwa), Kabupaten Cilacap (2,227 Juta Jiwa), dan Kabupaten Banyumas (1,953 Juta Jiwa). Sebaran penduduk umumnya terkonsentrasi di pusat-pusat kota, baik kabupaten ataupun kota. Kawasan permukiman yang cukup padat berada di daerah Semarang Raya (termasuk Ungaran dan sebagian wilayah Kabupaten Demak dan Kendal), daerah Salatiga Raya (termasuk wilayah Ambarawa, Bringin, Kopeng, Tenganan dan Suruh), Solo Raya (termasuk sebagian wilayah Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali), serta Tegal-Brebes-Slawi.

Pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,67% per tahun. Pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Demak (1,45% per tahun), sedang yang terendah adalah Kota Pekalongan (0,09% per tahun). Dari jumlah penduduk ini, 47% di antaranya merupakan angkatan kerja. Mata pencaharian paling banyak adalah di sektor pertanian (42,34%), diikuti dengan perdagangan (20,91%), industri (15,71%), dan jasa (10,98%). Pertanian merupakan sektor utama perekonomian Jawa Tengah, di mana mata pencaharian di bidang ini digeluti hampir separuh dari angkatan kerja terserap. Kawasan hutan meliputi 20% wilayah provinsi, terutama di bagian utara dan selatan. Daerah Rembang, Blora, Grobogan merupakan penghasil kayu jati. Jawa Tengah juga terdapat sejumlah industri besar dan menengah. Daerah Semarang-Ungaran-Demak-Kudus merupakan kawasan industri utama di Jawa Tengah. Kudus dikenal sebagai pusat industri rokok. Di Cilacap terdapat industri semen. Solo, Pekalongan, Juwana, dan Lasem

dikenal sebagai kota Batik yang kental dengan nuansa klasik. Blok Cepu di pinggiran Kabupaten Blora (perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah) terdapat cadangan minyak bumi yang cukup signifikan, dan kawasan ini sejak zaman Hindia Belanda telah lama dikenal sebagai daerah tambang minyak.

Menurut Lembaga Penelitian Tanah Bogor tahun 1969, jenis tanah wilayah Jawa Tengah didominasi oleh tanah latosol, aluvial, dan grumusol; sehingga hamparan tanah di provinsi ini termasuk tanah yang mempunyai tingkat kesuburan yang relatif subur. Sedangkan tingkat kemiringan lahan di Jawa Tengah, 38% lahan memiliki kemiringan 0–2%, 31% lahan memiliki kemiringan 2–15%, 19% lahan memiliki kemiringan 15–40%, dan sisanya 12% lahan memiliki kemiringan lebih dari 40%. Kawasan pantai utara Jawa Tengah memiliki dataran rendah yang sempit sedangkan dikawasan Brebes selebar 40 km dari pantai dan di Semarang hanya selebar 4 km bersambung dengan depresi Semarang-Rembang di timur. Gunung Muria pada akhir Zaman Es (sekitar 10.000 tahun SM) merupakan pulau terpisah dari Jawa, yang akhirnya menyatu karena terjadi endapan aluvial dari sungai-sungai yang mengalir.

Kota Demak semasa Kesultanan Demak (abad ke-16 Masehi) berada di tepi laut dan menjadi tempat berlabuhnya kapal. Proses sedimentasi ini sampai sekarang masih berlangsung di pantai Semarang. Di selatan kawasan tersebut terdapat Pegunungan Kapur Utara dan Pegunungan Kendeng, yakni pegunungan kapur yang membentang dari sebelah timur Semarang mulai dari ujung Barat Daya Kota Pati kemudian ke timur hingga perbatasan Lamongan dan Bojonegoro (Jawa Timur). Rangkaian utama pegunungan di Jawa Tengah adalah Pegunungan Serayu Utara dan Serayu Selatan. Rangkaian Pegunungan Serayu Utara membentuk rantai pegunungan yang menghubungkan rangkaian Bogor di Jawa Barat dengan Pegunungan Kendeng di timur. Lebar rangkaian pegunungan ini sekitar 30–50 km di ujung baratnya terdapat Gunung Slamet dan bagian timur merupakan Dataran Tinggi Dieng dengan puncak-puncaknya Gunung Prahu dan Gunung Ungaran.

Antara rangkaian Pegunungan Serayu Utara dan Pegunungan Serayu Selatan dipisahkan oleh Depresi Serayu yang membentang dari Majenang (Kabupaten Cilacap), Purwokerto, hingga Wonosobo. Sebelah timur depresi ini terdapat gunung berapi Sindoro dan Sumbing, dan sebelah timurnya lagi (kawasan Magelang dan Temanggung) merupakan lanjutan depresi yang membatasi Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Pegunungan Serayu Selatan merupakan bagian dari Cekungan Jawa Tengah Selatan yang terletak di bagian selatan provinsi Jawa Tengah. Mandala ini merupakan geoantiklin yang membentang dari barat ke timur sepanjang 100 kilometer dan terbagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh lembah Jatilawang yaitu bagian barat dan timur. Bagian barat dibentuk oleh Gunung Kabanaran (360 m) dan bisa dideskripsikan mempunyai elevasi yang sama dengan Zona Depresi Bandung di Jawa Barat ataupun sebagai elemen struktural baru di Jawa Tengah. Bagian ini dipisahkan dari Zona Bogor oleh Depresi Majenang.

Bagian timur dibangun oleh antiklin Ajibarang (*narrow anticline*) yang dipotong oleh aliran Sungai Serayu. Pada timur Banyumas, antiklin tersebut berkembang menjadi antiklinorium dengan lebar mencapai 30 km pada daerah Lukulo (selatan Banjarnegara-Midangan 1043 m) atau sering disebut tinggian Kebumen (*Kebumen High*). Pada bagian paling ujung timur Mandala Pegunungan Serayu Selatan dibentuk oleh kubah Pegunungan Kulonprogo (1022 m), yang terletak di antara Purworejo dan Sungai Progo. Kawasan pantai selatan Jawa Tengah juga memiliki dataran rendah yang sempit, dengan lebar 10–25 km dan terdapat Kawasan Karst Gombang Selatan. Perbukitan yang landai membentang sejajar dengan pantai, dari Yogyakarta hingga Cilacap pada sebelah timur Yogyakarta merupakan daerah pegunungan kapur yang membentang hingga pantai selatan Jawa Timur.

Sungai-sungai yang bermuara di Laut Jawa di antaranya adalah Bengawan Silugonggo, Kali Pemali, Kali Comal, dan Kali Bodri. Sedangkan, sungai-sungai yang bermuara di Samudra Hindia di antaranya adalah Kali Serayu, Sungai Bogowonto, Sungai Luk Ulo dan Kali Progo. Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa dengan Panjang 572 km dan memiliki mata air di Pegunungan Sewu (Kabupaten Wonogiri), sungai ini

mengalir ke utara melintasi Kota Surakarta dan akhirnya menuju ke Jawa Timur dan bermuara di daerah Gresik (dekat Surabaya). Di antara waduk-waduk (Danau) yang utama di Jawa Tengah adalah Danau Gunung Rowo (Kabupaten Pati), Waduk Gajahmungkur (Kabupaten Wonogiri), Waduk Kedungombo (Kabupaten Boyolali, Grobogan dan Sragen), Danau Rawa Pening (Kabupaten Semarang), Waduk Cacaban (Kabupaten Tegal), Waduk Malahayu (Kabupaten Brebes), Waduk Wadaslintang (perbatasan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo), Waduk Gembong (Kabupaten pati), Waduk Sempor (Kabupaten Kebumen) dan Waduk Mrica (Kabupaten Banjarnegara).

Terdapat 5 gunung berapi yang aktif di Jawa Tengah antara lain adalah Gunung Merapi (di Magelang - Boyolali - Klaten), Gunung Slamet (di Pemalang), Gunung Sindoro (di Temanggung - Wonosobo), Gunung Sumbing (di Temanggung - Wonosobo - Magelang), dan Gunung Dieng (di Banjarnegara). Jawa Tengah memiliki iklim tropis, dengan curah hujan tahunan rata-rata 2.000 meter, dan suhu rata-rata 21-32°C. Daerah dengan curah hujan tinggi terutama terdapat di Nusakambangan bagian barat, dan sepanjang Pegunungan Serayu Utara. Daerah dengan curah hujan rendah dan sering terjadi kekeringan di musim kemarau berada di daerah Blora dan sekitarnya serta di bagian selatan Kabupaten Wonogiri.

Kondisi dan karaktersitik wilayah Jawa Tengah cukup kompleks dari aspek geografis, geologis, hidrologis maupun meteorologis mempunyai potensi dan sumber kekayaan alam yang melimpah. Namun disisi yang lain, kondisi tersebut juga berpotensi untuk menimbulkan ancaman bencana baik bencana alam maupun non alam, serta bencana sosial, seperti ancaman bencana gempabumi, letusan gunung api, tsunami, kebakaran, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan serta gas beracun.

BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menilai potensi ancaman bencana telah melakukan upaya pendataan/inventarisasi daerah rawan

bencana yang meliputi bencana hidrometeorologis, dan bencana lain yang sering terjadi di Jawa Tengah dapat dilihat pada table 1 berikut.

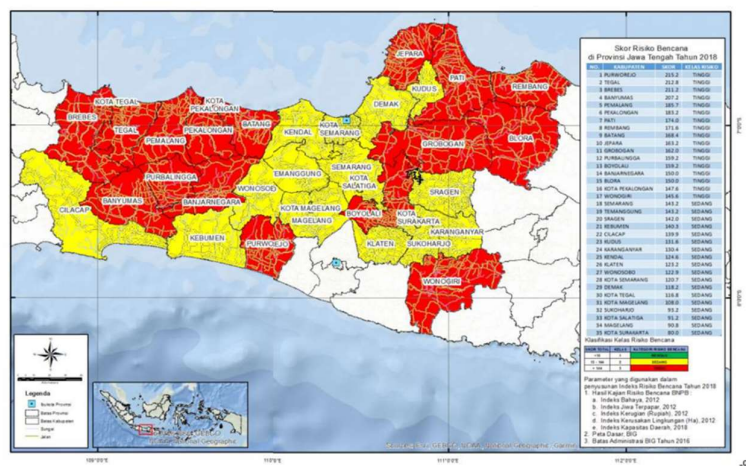
Tabel 1
Daerah Rawan Bencana di Jawa Tengah

No	Bencana	Kab		Kec		Desa/Kel		KK	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Banjir	32	85,71	295	51,5	1.674	19,5	743.264	7,70
2	Longsor	29	82,85	320	55,8	2.136	24,9	642.001	6,4
3	Kekeringan	27	74,28	219	38,2	1.314	15,3	677.952	6,8
4	Angin puting beliung	15	42,85	132	23	752	8,8	282.212	2,9
5	Gempabumi	21	37,14	114	19,9	1.499	17,5	1.416.145	15,1
6	Tsunami	4	11,42	20	3,5	127	1,5	128.186	1,3
7	Gunung api	23	31,42	47	8,2	276	3,2	200.634	2,1
8	Gas Beracun	3	8,57	13	2,3	44	0,5	33.744	1,3
9	Kebakaran Hutan/ Lahan	22	62,85	122	21,3	749	8,7	169.498	1,7

Sumber: BPBD Prov Jateng

Provinsi Jawa Tengah mendasarkan indeks rawan dan risiko bencana yang diterbitkan BNPB termasuk provinsi dengan indeks bencana tinggi. Indeks risiko bencana 2018 Provinsi Jawa Tengah pada urutan ke 17 dengan nilai skor 146,47 dengan kategori tinggi, sedangkan untuk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Kabupaten Purworejo mendapat urutan tertinggi untuk indeks risiko bencana dengan urutan 1 Provinsi dan 4 Nasional. Data pemutakhiran indeks risiko bencana yang dilakukan BNPB tahun 2018, diperoleh bahwa hasil perhitungan indeks risiko bencana menunjukkan 16 provinsi berada pada kelas risiko bencana tinggi dan 18 provinsi berada pada kelas risiko bencana sedang dan tidak ada provinsi yang berada pada risiko bencana rendah. 3 (tiga) provinsi yang berisiko paling tinggi yaitu Banten (skor 173,81), Bengkulu (skor 163,29), dan Sulawesi Barat (skor 162,92). Sementara itu, 3 (tiga) provinsi yang memiliki indeks risiko terendah pada kelas sedang adalah Papua (skor 122,93), Kepulauan Riau (skor 116,40), dan DKI Jakarta (skor 72,12). Dari 514 Kabupaten kabupaten/kota di Indonesia terdapat 259 kabupaten kota yang berada pada kelas indeks risiko tinggi dan 255 yang berada pada kelas indeks risiko sedang. Dengan disusunnya Buku IRBI Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan

gambaran capaian upaya penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Nilai yang tertera dapat menjadi panduan bagi para pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk melakukan prioritas upaya penanggulangan bencana di daerahnya masing-masing guna menurunkan indeks risiko bencana sebagai upaya meningkatkan ketangguhan masyarakat. Upaya-upaya mitigasi terus dilakukan mengingat Jawa Tengah sebagai daerah yang mempunyai tingkat ancaman dan risiko bencana yang tinggi dari berbagai jenis bencana. Tingginya ancaman dan risiko bencana di Jawa Tengah menjadikan provinsi ini sebagai laboratorium bencana. Hal ini dapat menjadikan dasar bahwa upaya penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana dilakukan atas dasar bahwa masyarakat Jawa Tengah banyak yang menempati daerah rawan bencana.



Gambar 1 Indeks Risiko Bencana (BNPB 2018)

Indeks risiko bencana dihitung dari potensi kemungkinan korban dan dampak yang akan ditimbulkan dari kejadian bencana. Perhitungan indeks risiko bencana ditekankan pada potensi kemungkinan dan besarnya dampak yang diukur dari keterpaparan (*exposure*) dari setiap bahaya (*single hazard*) dan gabungan dari beberapa hazard yang ada (*multi hazard*), dengan memperhatikan parameter bahaya, kerentanan, dan kapasitas sebagai penghitungan risiko bencana. Indeks Risiko Bencana 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat terlihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2
Indeks Bencana Kabupaten/Kota Se-Jateng

NO.	KABKOTA	2015	2016	2017	2018	KELAS RISIKO 2018
1	PURWOREJO	215.20	215.20	215.20	215.20	TINGGI
2	TEGAL	212.80	212.80	212.80	212.80	TINGGI
3	BREBES	211.20	211.20	211.20	211.20	TINGGI
4	BANYUMAS	207.20	207.20	207.20	207.20	TINGGI
5	PEMALANG	206.00	206.00	206.00	185.70	TINGGI
6	PEKALONGAN	183.20	183.20	183.20	183.20	TINGGI
7	PATI	174.00	174.00	174.00	174.00	TINGGI
8	REMBANG	171.60	171.60	171.60	171.60	TINGGI
9	BATANG	168.40	168.40	168.40	168.40	TINGGI
10	JEPARA	163.20	163.20	163.20	163.20	TINGGI
11	GROBOGAN	162.00	162.00	162.00	162.00	TINGGI
12	PURBALINGGA	159.20	159.20	159.20	159.20	TINGGI
13	BOYOLALI	159.20	159.20	159.20	159.20	TINGGI
14	BANJARNEGARA	150.00	150.00	150.00	150.00	TINGGI
15	BLORA	150.00	150.00	150.00	150.00	TINGGI
16	KOTA PEKALONGAN	147.60	147.60	147.60	147.60	TINGGI
17	WONOGIRI	145.60	145.60	145.60	145.60	TINGGI
18	SEMARANG	143.20	143.20	143.20	143.20	SEDANG
19	TEMANGGUNG	143.20	143.20	143.20	143.20	SEDANG
20	SRAGEN	142.00	142.00	142.00	142.00	SEDANG
21	KEBUMEN	203.20	165.76	151.08	140.31	SEDANG
22	CILACAP	215.20	175.53	159.77	139.90	SEDANG
23	KUDUS	131.60	131.60	131.60	131.60	SEDANG
24	KARANGANYAR	130.40	130.40	130.40	130.40	SEDANG
25	KENDAL	167.20	156.80	142.49	124.57	SEDANG
26	KLATEN	123.20	123.20	123.20	123.20	SEDANG
27	WONOSOBO	135.20	135.20	135.20	122.94	SEDANG
28	KOTA SEMARANG	183.60	124.72	124.72	120.75	SEDANG
29	DEMAK	183.60	138.20	127.42	118.21	SEDANG
30	KOTA TEGAL	116.80	116.80	116.80	116.80	SEDANG
31	KOTA MAGELANG	108.00	108.00	108.00	108.00	SEDANG
32	SUKOHARJO	93.20	93.20	93.20	93.20	SEDANG
33	KOTA SALATIGA	91.20	91.20	91.20	91.20	SEDANG
34	MAGELANG	143.20	96.86	90.82	90.82	SEDANG
35	KOTA SURAKARTA	80.00	80.00	80.00	80.00	SEDANG

*Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan

Sumber : * = BNPB, BNPB IRBI 2018

1.1.2 Kajian Risiko Bencana

Kajian risiko bencana Jawa Tengah 2016 - 2020 yang difasilitasi BNPB menilai aspek risiko bencana di Jawa Tengah berdasarkan aspek bahaya/ancmana, kerentanan dan kapasitas/ketahanan daerah, dalam bentuk indeks. Indeks pengkajian risiko bencana terdiri dari indeks bahaya, indeks kerentanan, dan indeks kapasitas. Penentuan indeks berdasarkan pada parameter-parameter sebagai alat ukur setiap komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas, kecuali indeks kapasitas daerah didapatkan dari pengambilan data terkait dengan kondisi daerah dalam menghadapi

bencana melalui kesepakatan SKPD provinsi dan SKPD kabupaten/kota di daerah. Masing-masing indeks memiliki nilai indeks dan kelas indeks yang dikelompokkan pada menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Nilai indeks 0-0,333 adalah kelas rendah,
2. Nilai indeks >0,333-0,666 adalah kelas sedang,
3. Nilai indeks >0,666-1 adalah kelas tinggi.

Hasil perhitungan kajian risiko bencana menurut kelas bahaya/ancaman, kerentanan dan kapasitas, adalah sebagai tabel 3 berikut:

Tabel 3
Kelas Bahaya Bencana Jateng

No	Jenis Bencana	Kelas Bahaya
1	Epidemi dan Wabah Penyakit	Sedang
2	Kekeringan	Tinggi
3	Kegagalan Teknologi	Tinggi
4	Cuaca Ekstrem	Tinggi
5	Gempa Bumi	Tinggi
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
7	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Tinggi
8	Banjir	Tinggi
9	Banjir bandang	Tinggi
10	Tanah Longsor	Tinggi
11	Tsunami	Tinggi
12	Letusan Gn Api Sumbing	Sedang
13	Letusan Gn Api Sindoro	Tinggi
14	Letusan Gn Api Merapi	Tinggi
15	Letusan Gn Api Slamet	Tinggi
16	Letusan Gn Api Dieng	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Jateng 2016-2020

Kajian aspek kerentanan berkaitan dengan sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan di suatu kawasan terancam bencana. Sosial budaya merupakan dasar untuk mendapatkan penduduk terpapar, sedangkan fisik, ekonomi, dan lingkungan sebagai dasar perhitungan kerugian. Setiap komponen memiliki variasi di setiap bencana. Pengkajian kerentanan terkait dengan informasi keterpaparan, yang terdiri dari kepadatan penduduk dan kelompok rentan (rasio jenis kelamin, rasio kelompok umur rentan, rasio penduduk miskin, dan rasio orang cacat yang merupakan bagian dari perhitungan komponen sosial budaya dalam

penentuan indeks penduduk terpapar. Hasil kajian kerentanan bencana di Jawa Tengah adalah pada tabel 4 berikut.

Tabel 4
Kelas Kerentanan Bencana Jateng

No	Jenis Bencana	Penduduk Terpapar	Kerugian	Kerusakan lingkungan	Kelas Kerentanan
1	Epidemi dan Wabah Penyakit	Tinggi	-	-	Tinggi
2	Kekeringan	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi
3	Kegagalan Teknologi	Tinggi	-	-	Tinggi
4	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi
5	Gempa Bumi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
6	Kebakaran Hutan & Lahan		Sedang	-	-
7	Gelombang Ekstrem & Abrasi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
8	Banjir	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
9	Banjir bandang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
10	Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
11	Tsunami	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
12	Letusan Gunung Api Sumbing	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
13	Letusan Gunung Api Sindoro	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
14	Letusan Gunung Api Merapi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
15	Letusan Gunung Api Slamet	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
16	Letusan Gunung Api Dieng	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang

Sumber: Kajian Risiko Bencana Jateng 2016-2020

Kapasitas daerah merupakan salah satu dasar untuk upaya pengurangan risiko bencana yang difokuskan kepada institusi pemerintah di kawasan kajian. Upaya pengurangan risiko bencana salah satunya dapat didukung oleh peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Penilaian kapasitas untuk tingkat Provinsi dilihat dari kapasitas masing-

masing daerah. Kapasitas daerah berlaku sama untuk seluruh bencana, yang meliputi:

1. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya;
2. Mengidentifikasi, menilai dan memantau risiko bencana dan meningkatkan sistem peringatan dini untuk mengurangi risiko bencana;
3. Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun ketahanan dan budaya aman dari bencana;
4. Mengurangi faktor-faktor risiko dasar;
5. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana agar timbul respon yang efektif di semua tingkatan bagi masyarakat terancam.

Penilaian kapasitas daerah mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana. Berdasarkan aturan tersebut diketahui proses pengkajian terhadap indeks kapasitas Provinsi Jawa Tengah. Pengkajian kapasitas Provinsi Jawa Tengah mengacu kepada 5 (lima) prioritas program pengurangan risiko bencana. Sedangkan aspek kapasitas daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah termasuk cukup, yaitu indeks 3 (skala 1 s.d 5) .

Hasil kapasitas untuk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tabel di atas memiliki total nilai prioritas 52,31 sehingga berada pada level 3. Pencapaian terhadap level tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta komunitas PB telah memiliki komitmen terkait pengurangan risiko bencana dengan didukung kebijakan sistematis. Namun demikian, capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif bencana.

Tabel 5
Kelas Kapasitas/Ketahanan Bencana Jateng

No	PRIORITAS	NILAI PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS
1	Memastikan Bahwa PRB Menjadi Sebuah Prioritas Nasional dan Lokal Dengan Dasar Kelembagaan Yang Kuat Untuk Pelaksanaannya	58.56	3
2	Mengidentifikasi, Mengkaji Dan Memantau Risiko Bencana Dan Meningkatkan Peringatan Dini	42.88	2
3	Menggunakan Pengetahuan, Inovasi Dan Pendidikan Untuk Membangun Suatu Budaya Keselamatan Dan Ketahanan Di Semua Tingkat	45.52	2
4	Mengurangi Faktor-Faktor Risiko Yang Mendasar	57.26	3
5	Memperkuat Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Demi Respon Yang Efektif Di Semua Tingkat	57.35	3
	Jumlah Total	52.31	
	Indeks Ketahanan Daerah		3

Sumber: Kajian Risiko Bencana Jateng 2016-2020, BNPB 2015

Mendasarkan pada hasil-hasil kajian ancaman, kerentanan dan kapasitas maka diperoleh kajian risiko di Jawa Tengah adalah sebagai berikut pada tabel 6.

Tabel 6
Kajian Risiko Bencana Jawa Tengah

No	BENCANA	KELAS RISIKO
1	Epidemi Dan Wabah Penyakit	Sedang
2	Kekeringan	Tinggi
3	Kegagalan Teknologi	Tinggi
4	Cuaca Ekstrem	Tinggi
5	Gempabumi	Tinggi
6	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Tinggi
7	Gelombang Ekstrem Dan Abrasi	Tinggi
8	Banjir	Tinggi
9	Banjir Bandang	Tinggi
10	Tanah Longsor	Tinggi

No	BENCANA	KELAS RISIKO
11	Tsunami	Sedang
12	A. Letusan Gn Api (Dieng, Merapi, Slamet)	Tinggi
	B. Letusan Gn Api (Sindoro, Sumbing)	Sedang

Sumber: Kajian Risiko Bencana Jateng 2016-2020

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama antara pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota), masyarakat dan lembaga usaha. UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana memberikan amanat untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Tugas pokok BPBD adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah. Oleh sebab itu dalam penanggulangan bencana, BPBD mempunyai tiga fungsi utama, yaitu koordinasi, komando dan pelaksana. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, pemahaman terhadap realitas dan potensi, kerentanan dan kapasitas bencana mutlak diperlukan. Hal ini merupakan modal awal dalam melakukan pengelolaan risiko bencana.

Pengelolaan risiko bencana sebagai upaya penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang memerlukan partisipasi multisektoral serta yang terkoordinasi dari berbagai lapisan, meliputi masyarakat, terdampak bencana sampai dengan para pengambil keputusan dan kebijakan penanggulangan bencana. Hal ini diamanatkan pula dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menegaskan bahwa penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terpadu, sistematis, dan terkoordinasi. Dalam konteks kajian risiko bencana, BNPB telah melakukan kajian risiko bencana 2013 dan diwujudkan dalam bentuk indeks risiko bencana. Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana.

2.1 Dasar Hukum

1. UU RI No.10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. UU RI No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. UU RI No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
5. PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Perpres RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB;
8. Perda Provinsi Jawa Tengah No. 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah;
9. Perda Provinsi Jawa Tengah No. 12 Tahun 2017 tentang APBD Prov Jawa Tengah TA 2018 tanggal 29 Desember 2017;
10. Perda Provinsi Jawa Tengah No. 11 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD Prov Jawa Tengah TA 2018 tanggal 19 Oktober 2018;
11. Perda Provinsi Jawa Tengah No.9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Perda Provinsi Jawa Tengah No 3. Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013- 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 101 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 77 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 78 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata cara pemberian bantuan akibat bencana di Prov Jateng;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 79 tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan APBD Prov Jawa Tengah TA 2018;
18. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/009205 tahun 2015 Tentang Penanganan Darurat Bencana di Jawa Tengah;
19. DPA dan DPPA APBD Prov. Jawa Tengah pada BPBD Jawa Tengah TA 2019;

20. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 360.2/0009274/2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Tetap Gubernur Jawa Tengah Untuk Penanganan Bencana Alam Di Provinsi Jawa Tengah.

3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

3.1.1 Tugas Pokok

Mendasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No: 101 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah. Tugas pokok di bagian/Bidang BPBD Prov Jateng sebagai berikut pada tabel 7.

Tabel 7
Tugas Pokok Bagian/Bidang BPBD Prov Jawa Tengah

No	BAGIAN/BIDANG	TUGAS
1	Bagian Tata Usaha	Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang program, keuangan, umum dan kepegawaian
2	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
3	Bidang Penanganan Darurat	Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi serta penyediaan sarana dan prasarana darurat
4	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi
5	Bidang Logistik dan Peralatan	Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang penyediaan logistik dan peralatan

Selain masing-masing tugas sesuai bagian/bidang tersebut, tiap-tiap bidang/bagian melaksanakan pula tugas-tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1.2 Fungsi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3, Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 101 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Sekretariat BPBD mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bencana.
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penanggulangan bencana.
5. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Gambaran tugas pokok dan fungsi Tata Usaha dan Bidang dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini :

Tabel 8
Fungsi Bagian/Bidang BPBD Prov Jawa Tengah

No	BAGIAN/ BIDANG	FUNGSI
1.	Bagian Tata Usaha	1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program; 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan; 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
2.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan bencana;

No	BAGIAN/ BIDANG	FUNGSI
		2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan bencana
3.	Bidang Penanganan Darurat	1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi; 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan sarana dan prasarana darurat;
4.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi; 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rekonstruksi
5.	Bidang Logistik dan Peralatan	1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan logistik; 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan peralatan

4.1 Rencana Strategis BPBD

Visi dan misi BPBD Provinsi Jawa Tengah sesuai Rencana strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

4.1.1 Visi Jawa Tengah 2018 - 2023

JAWA TENGAH BERDIKARI DAN SEMAKIN SEJAHTERA “(TETEP) Mboten Korupsi. Mboten Ngapusi”.

4.1.2 Misi

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota;
3. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

4.1.3 Tujuan

Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Jawa Tengah dalam Penanggulangan Bencana, dan Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.

4.1.4 Sasaran

1. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana;
2. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana;
3. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana;
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah;
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

5.1 Sumber Anggaran

Pembiayaan program dan kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dana APBD Prov Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 baik melalui mekanisme APBD Murni maupun APBD Perubahan. Pembiayaan belanja daerah (Belanja tidak langsung dan belanja langsung) sebagaimana APBD Perubahan pada TA 2019 adalah sebesar Rp 37.410.538.000,- (tiga puluh tujuh milyar empat ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut pada tabel 9:

Tabel 9
Anggaran APBD TA 2020

Belanja	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
BELANJA	36.747.008.000	22.408.318.000	-14.338.690.000	-39,02
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.947.008.000	6.291.267.000	-1.655.741.000	-20,83
BELANJA PEGAWAI	7.947.008.000	6.291.267.000	-1.655.741.000	-20,83
BELANJA LANGSUNG	28.800.000.000	16.117.051.000	-12.682.949.000	-44,04
BELANJA PEGAWAI	4.383.250.000	2.949.720.000	-1.433.530.000	-32,70

Belanja	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
BELANJA BARANG DAN JASA	22.121.750.000	11.768.655.000	-10.353.095.000	-46,80
BELANJA MODAL	2.295.000.000	1.398.676.000	-896.324.000	-39,06
Jumlah Belanja	36.747.008.000	22.408.318.000	-14.338.690.000	-39,02
Surplus/(Defisit)	-36.747.008.000	-22.408.318.000	14.338.690.000	-39,02

Gambaran perbandingan APBD tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut pada tabel 10:

Tabel 10
Perbandingan APBD TA 2019 - 2020

Belanja	2019	2020	+ / -
BTL	7.810.538.000,-	7.947.008.000,-	+136.470.000
BL	29.600.000.000,-	28.800.000.000,-	- 800.000.000
Jumlah	37.410.538.000,-	36.747.008.000,-	- 663.530.000

6.1 Personel BPBD

Penyelenggaraan program dan kegiatan penanggulangan bencana didukung personel/sumber daya manusia di BPBD Provinsi Jawa Tengah dengan berbagai kualifikasi dan kompetensi. Selain dari unsur PNS/ASN, personel di BPBD Prov Jawa Tengah didukung dengan personel tenaga teknis. Jumlah personel dan tingkat pendidikan sumberdaya manusia (SDM) di BPBD Jawa Tengah adalah sebagai berikut pada tabel 11:

Tabel 11
Jumlah Pegawai Tahun 2020

No	Pegawai	Jumlah		Pendidikan Terakhir							
		Pria	Wanita	S2	S1	D3	D4	SMA	SMP	SD	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PNS	12	2	13	8		1	9	4	1	36
2.	Non PNS										0
	a. Tenaga Teknis	33	18	1	33	3		14			51
	Total	45	20	14	41	3	1	23	4	1	87

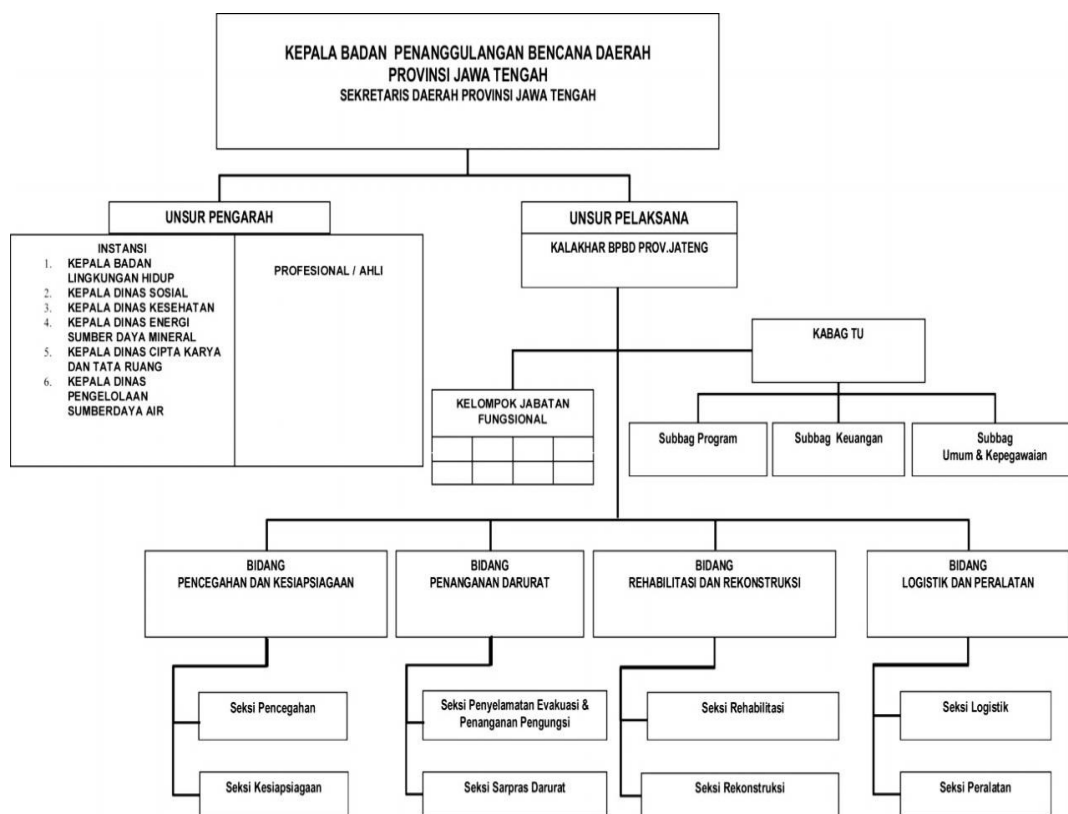
Sumber: Data Pegawai BPBD s.d Desember 2020

Sedangkan sumberdaya manusia yang merupakan Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara (ASN) di BPBD Provinsi Jawa Tengah menurut pangkat dan golongan adalah sebagai berikut pada tabel 12:

Tabel 12
Pangkat/Golongan PNS di BPBD Prov. Jawa Tengah

No	Pangkat / Gol	Jumlah
1	2	3
1	Golongan IV	: 7 orang
a	Pembina Utama Madya (IV/d)	: 0 orang
b	Pembina Utama Muda (IV/c)	: 0 orang
c	Pembina Tk I (IV/b)	: 2 orang
c	Pembina (IV/a)	: 5 orang
2	Golongan III	17 orang
a	Penata Tk I (III/d)	: 7 orang
b	Penata (III/c)	: 4 orang
c	Penata Muda Tk I (III/b)	: 4 orang
d	Penata Muda (III/a)	: 2 orang
3	Golongan II	11 orang
a	Pengatur Tk I (II/d)	: 0 orang
b	Pengatur (II/c)	: 7 orang
c	Pengatur Muda Tk I (II/b)	: 3 orang
d	Pengatur Muda (II/a)	: 1 orang
4	Golongan I	1 orang
a	Juru Tk I (I/d)	: 1 orang
b	Juru (I/c)	: 0 orang
c	Juru Muda Tk I (I/b)	: 0 orang
d	Juru Muda (I/a)	: 0 orang
JUMLAH		: 36 orang

Struktur organisasi, kelembagaan BPDB Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:



Gambar 2 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Jawa Tengah

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN PB 2020

3.1 Urusan, Program dan Kegiatan

BPBD Prov Jawa Tengah menyelenggarakan Sub Urusan wajib bidang penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan urusan bersama, sehingga program dan kegiatan BPBD Prov Jawa Tengah terdapat dalam beberapa urusan pemerintahan. Tahun 2020, terdapat 1 (satu) urusan, 3 (tiga) Program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dikelola BPBD Prov Jawa Tengah, dengan rincian sebagaimana tabel 13 berikut ini.

Tabel 13
Urusan, Program dan Kegiatan Bidang PB

No	Urusan	Non Urusan	Program	Kegiatan
1	Trantibumlinmas		Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	13
2		Non Urusan	Manajemen Administrasi Pelayan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	17
			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2

Sasaran dan keluaran yang dicapai masing-masing program dan kegiatan adalah sebagaimana tabel 14 berikut.

Tabel 14
Program dan Kegiatan Pada BPBD Jawa Tengah TA 2020

No	Program/Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan
I	Manajemen Administrasi Pelayan Umum, Kepegawaian dan Keuangan PD		
1.	Kegiatan Administrasi Pelayan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
2.	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa surat menyurat, atk, cetak penggandaan dan kearsipan perangkat daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah

No	Program/Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan
3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
4.	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
6.	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
7.	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
8.	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
9.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
10.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
11.	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
12.	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah

No	Program/Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan
13.	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
14.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
15.	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
16.	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
17.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional Sekertariat DPRD	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
II. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
18.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD
19.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	
III. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			
20.	Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana	Jumlah desa tangguh bencana terbentuk	Persentase penurunan risiko bencana
21.	Pemetaan dan sinergi pengurangan risiko bencana	persentase upaya PRB Jateng	Persentase penurunan risiko bencana
22.	Pengembangan Alat Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) & Rambu Informasi Bencana Jtg	Jumlah EWS dan rambu yang terpasang	Persentase penurunan risiko bencana
23.	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam kesiapsiagaan/pra bencana	jumlah masyarakat siaga bencana yang terlatih	Persentase penurunan risiko bencana

No	Program/Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan
24.	Peningkatan, pengembangan kapasitas penanganan darurat bagi pemangku kepentingan dan generasi muda	Jumlah pemangku kepentingan /relawan mudayang dilatih	Persentase penanganan darurat kebencanaan
25.	Pengembangan Pusdalops Jateng	Persentase masyarakat terdampak yang tertangani	Persentase penanganan darurat kebencanaan
26.	Evaluasi, Pemantauan, dan Penanganan Darurat Bencana	jumlah sarana dan prasarana darurat yang tersedia/disiapkan	Persentase penanganan darurat kebencanaan
27.	Bintek SAR, Latihan gabungan dan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jateng	jumlah masyarakat/relawan yang terlatih	Persentase penanganan darurat kebencanaan
28.	Penanganan rehabilitasi pasca bencana di Jateng	persentase masyarakat terdampak yang direhab	Persentase rehab rekon pasca bencana
29.	Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan PB dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Jateng	Jumlah tenaga ahli terlatih dalam penghitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana	Persentase rehab rekon pasca bencana
30.	Sinergitas multisektor Penanganan pascabencana jateng	persentase wilayah terdampak bencana yang direhab/rekon pasca bencana	Persentase rehab rekon pasca bencana
31.	Peningkatan kapasitas logistik dan Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana	Jumlah penyediaan logistik (bulan) persentase dapur umum yang dilaksanakan	Persentase pemenuhan logistik bencana
32.	Peningkatan kapasitas pengelolaan peralatan bencana Jateng	Jumlah penyediaan peralatan bencana (unit) persentase pengelolaan peralatan PB yang dilaksanakan	Persentase pemenuhan logistik bencana

3.2 Tempat Dan Waktu Kegiatan

2.2.1 Lokasi Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi 29 kabupaten dan 6 kota, dan untuk koordinasi dan konsultasi disesuaikan dengan kewenangan instansi terkait maupun undangan.

2.2.2 Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu 1 Januari – 31 Desember 2020

3.3 Tahapan dan Rencana Kerja Kegiatan

Tahapan dan rencana kerja kegiatan secara umum dibedakan menjadi persiapan, pelaksanaan serta pelaporan.

2.3.1 Persiapan

1. Penyusunan dan penetapan pelaksana kegiatan melalui Surat Keputusan Kalakhar BPBD Jawa Tengah;
2. Pencermatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran kegiatan;
3. Penyusunan rencana kerja operasional kegiatan selama 1 tahun anggaran;
4. Penyusunan dan pembagian jadwal kegiatan pada masing-masing Bidang/Bagian.

2.3.2 Pelaksanaan Kegiatan

1. Pra pelaksanaan.
 - a. Penyusunan kerangka acuan kerja (KAK) kegiatan;
 - b. Surat undangan narasumber;
 - c. Surat undangan peserta.
2. Pelaksanaan kegiatan dalam berbagai bentuk kegiatan (Sosialisasi, rapat koordinasi, workshop, seminar, dialog interaktif, gladi, loklatih, FGD, dll).
3. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pada masing-masing sasaran kegiatan.

2.3.3 Penyusunan Laporan

1. Laporan kegiatan pada masing-masing sub kegiatan.
2. Laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan keseluruhan kegiatan.

3. Publikasi kegiatan melalui website (www.bpbd.jatengprov.go.id). Media sosial (twitter, facebook, instagram, whatsapp).

3.4 Metode Kegiatan

- 2.4.1 Koordinasi dan pengamatan langsung di Kabupaten/Kota terutama di BPBD Kabupaten/Kota atau SKPD yang membidangi penanggulangan bencana bagi yang belum membentuk BPBD Kabupaten/Kota
- 2.4.2 Konsultasi dan koordinasi dengan instansi pusat, yaitu :
 1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
 2. Kementerian Dalam Negeri cq Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
 3. Kementerian Keuangan RI
 4. Kementerian/Lembaga dan Instansi terkait termasuk instansi vertikal di Jateng (PVMBG, BPPTKG, BMKG, LKPP, BASARNAS, BPKP Jawa Tengah, dll)
 5. TNI/POLRI
- 2.4.3 Koordinasi dengan SKPD terkait dilingkungan Provinsi Jawa Tengah terutama SKPD yang termasuk dalam pengampu kebencanaan
 1. Unsur pengarah dari unsur pemerintah:
 - a. Dinas Sosial (Dinsos),
 - b. Dinas Kesehatan (Dinkes),
 - c. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM),
 - d. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Ciptakarya
 - e. Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air dan Penataan Ruang,
 2. SKPD terkait dengan kebencanaan:

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Badan Kesbangpol, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Jateng, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Prov Jateng.

3.5 Sasaran Kegiatan

1. Unsur Pengarah dari unsur Pemerintah daerah (SKPD) Prov Jateng;
2. SKPD teknis terkait;
3. Data dan informasi bencana Jawa Tengah;
4. BPBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
5. Para pemangku kepentingan PB Jawa Tengah;
6. Masyarakat yang berdomisili di daerah rawan bencana;
7. Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan;
8. Relawan;
9. Pramuka;
10. PMI;
11. PDAM;
12. Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis);
13. Dinas Kebakaran;
14. Satpol PP Kab/Kota Se Jateng.

BAB III

CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN PB

3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan

Capaian realisasi fisik kegiatan BPBD Prov Jateng TA 2020 sebesar 98,11% (Rp 15.811.881.500,-) sedangkan realisasi keuangan sebesar 90,72% (Rp 14.621.847.321,-) dengan rincian, sbb:

Tabel 15
Realisasi Keuangan APBD TA 2020

No	Belanja	Anggaran		Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%	
1.	Belanja Tidak Langsung	7,947,008,000	6,291,267,000	5.729.591.000	91.07	561,676,000
2.	Belanja Langsung	28.800.000.000	16,117,051,000	14.621.847.321	90,72	1,495,203,679
Jumlah		36,747,008,000	22,408,318,000	20,351,438,321	90.82	2,056,879,679

Belanja tidak langsung digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sejumlah 36 orang pegawai. Realisasi keuangan terserap sebesar **Rp 5.729.591.000,- (91,07%)**. Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar **Rp 561,676,000,- (8,92%)**. Efisiensi belanja dipengaruhi oleh jumlah kebutuhan belanja sesuai dengan pegawai di BPBD Prov Jateng.

Alokasi anggaran belanja langsung untuk 3 (tiga) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan **Rp 16,117,051,000,-** secara fisik tercapai **Rp 15.811.881.500,- (98.10%)** dan efisiensi belanja dengan sisa anggaran sebesar **Rp 1,495,203,679,- (0.09%)**. Realisasi fisik yang kurang dari 100% ada 2 (dua) kegiatan, yaitu:

3.1.1 Evaluasi, Pemantauan, dan Penanganan Darurat Bencana

Kegiatan Evaluasi, Pemantauan, dan Penanganan Darurat Bencana memiliki sub kegiatan yang tidak terserap sehingga realisasi fisiknya tidak mencapai 100% adalah dropping air bersih pada musim kekeringan tahun anggaran 2020. Dengan anggaran pagu kegiatan adalah Rp 493,850,000,- tercapai realisasi keuangan sebesar Rp 202,418,500,- (40,99%) dan realisasi fisik sebesar 43,89% (Rp 216,740,500,-). Pada tahun 2020 musim kemarau di Jawa Tengah adalah kemarau basah sehingga persediaan air bersih di

Kabupaten/Kota masih mampu terfasilitasi oleh Kabupaten/Kota sendiri. Hanya ada 1 Kabupaten yang mengusulkan permohonan air bersih untuk 43 Desa sebanyak 200 tangki air bersih.

Permasalahan:

Dropping air bersih hanya terlaksana sebagian, dikarenakan musim kemarau basah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sudah lebih siap.

Upaya:

Merencanakan kegiatan dropping air bersih berdasarkan kebutuhan daerah dari kajian Daerah Rawan Kekeringan (sudah dilakukan) dan kecenderungan musim melalui data Time Series serta mengoptimalkan kemampuan Daerah (Pemerintah Kabupaten/Kota) dalam penyediaan Air Bersih.

3.1.2 Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan PB dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Jateng

Kegiatan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan PB dalam kajian kebutuhan pasca bencana Jateng memiliki 1 (satu) sub kegiatan yang telah di- *refocusing* sepenuhnya sehingga sub kegiatan dimaksud tidak bisa dilaksanakan/tidak mencapai 100%. Kegiatan dengan anggaran pagu awal Rp 400.000.000,- dan di *refocusing* menjadi Rp 109.759.000,- sehingga berkurang sebanyak Rp 290.241.000,- (72,56%) dari anggaran awal.

Dari anggaran pagu perubahan sebesar Rp 109.759.000,- terealisasi keuangan sebesar Rp 70,673,400,- (64,39%) dan terealisasi fisik sebesar 74,43% (Rp 81,699,000,-) sehingga capaian realisasi fisiknya tidak mencapai 100%.

Permasalahan:

Kegiatan Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) tidak terlaksana terkendala *refocusing* anggaran pasca Covid-19 dan Rapat Koordinasi Pasca Bencana tidak terlaksana terkendala pertemuan tatap muka.

Upaya:

Merencanakan pelatihan melalui DARING (dalam jaringan) namun tetap mengoptimalkan capaian yang diinginkan apabila situasi Pandemi belum kembali normal.

Tabel 16
Efisiensi Anggaran Kegiatan BPBD TA 2020

NO	NAMA PROGRAM KEGIATAN	KETERANGAN
A	NON URUSAN	
I	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	
1	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Efisiensi belanja rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Efisiensi belanja Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
3	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Efisiensi belanja Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
II	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Efisiensi belanja Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Efisiensi belanja Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
B	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
III	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
1	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan/Pra Bencana	Efisiensi belanja Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan/Pra Bencana
2	Peningkatan, Pengembangan Kapasitas Penanganan Darurat Bagi Pemangku Kepentingan Dan Generasi Muda	Efisiensi belanja kegiatan Peningkatan, Pengembangan Kapasitas Penanganan Darurat Bagi Pemangku Kepentingan Dan Generasi Muda
3	Evaluasi, Pemantauan, dan Penanganan Darurat Bencana	Efisiensi belanja droping air bersih hanya terlaksana sebagian, dikarenakan musim kemarau basah, dan pemerintah kabupaten/kota sudah lebih siap

NO	NAMA PROGRAM KEGIATAN	KETERANGAN
4	Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan PB Dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Jateng	Efisiensi belanja kegiatan pelatihan kajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna) tidak terlaksana terkendala refocusing anggaran pasca covid-19; dan rapat koordinasi pasca bencana tidak terlaksana terkendala pertemuan tatap muka.
5	Sinergitas Multisektor Penanganan Pascabencana Jateng	Efisiensi belanja Sinergitas Multisektor Penanganan Pascabencana Jateng

Realisasi keuangan pada belanja program/kegiatan dapat dikelompokkan sebagai berikut pada tabel 17.

Tabel 17
Realisasi Keuangan Kegiatan BPBD TA 2019

No	Realisasi Capaian (%)	Jumlah	Ket
1	95.01 – 100	20	Kegiatan
2	90.01 – 95	1	Kegiatan
3	00.00 < 90	11	Kegiatan
TOTAL		32	Kegiatan
			100

Mendasarkan capaian/realisasi keuangan kegiatan pada tabel tersebut, terdapat 10 (sepuluh) kegiatan dengan serapan kurang dari 90%, dan serapan terendah adalah evaluasi, pemantauan, dan penanganan darurat bencana dari nilai pagu anggaran perubahan sebesar Rp 493.850.000,- terealisasi sebesar 40,99% (Rp 202.418.500,-). Kondisi tersebut dipengaruhi dari dropping air bersih hanya terlaksana sebagian, dikarenakan musim kemarau basah, dan pemerintah kabupaten/kota sudah lebih siap dalam menghadapi bencana kekeringan tahun 2020.

Penyelenggaraan program kegiatan penanggulangan bencana di Jawa Tengah telah dititik beratkan pada upaya pengurangan risiko bencana. Dalam konteks penanganan bencana sejak dini (pra bencana), paradigma pengurangan risiko bencana menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan PB. Risiko suatu bencana ditentukan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Oleh sebab itu program dan kegiatan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana dilaksanakan

dengan strategi yaitu mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas.

1. Mengurangi ancaman/bahaya

Ancaman merupakan suatu kondisi yang berpotensi menimbulkan bencana berupa kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Kegiatan ini dilakukan antara lain melalui identifikasi dan sosialisasi daerah rawan bencana, penyusunan peta risiko bencana. Penyusunan Peta risiko bencana dilakukan untuk jenis bencana kekeringan di kabupaten, identifikasi daerah rawan bencana.

2. Mengurangi kerentanan

Sekumpulan kondisi dan atau suatu akibat keadaan (faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan) yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Untuk mengurangi tingkat kerentanan masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana dilakukan dengan membentuk desa siaga bencana, pengembangan budaya sadar bencana, pemantauan dan pelaporan kebencanaan, simulasi dan gladi bencana.

3. Meningkatkan/Penguatan Kapasitas

Suatu kondisi kemampuan sumberdaya dalam menghadapi ancaman atau bahaya, dimana makin tinggi suatu kapasitas akan menurunkan tingkat risiko bencana. Termasuk kapasitas adalah dengan adanya system peringatan dini, kelembagaan BPBD, kelompok relawan, dll.

Program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah tahun 2020 digunakan untuk mencakup penanggulangan bencana baik pra, saat dan pasca bencana. Program dan kegiatan kebencanaan difokuskan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan BPBD Prov Jateng dilaksanakan untuk mendukung capaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah 2018 - 2023. Program prioritas bidang penanggulangan bencana yang dicapai tahun 2020 adalah pada tabel 18 berikut:

Tabel 18
Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2019

No.	Kegiatan Prioritas	Target	Realisasi
1	Pengembangan Desa Tangguh Bencana	2 Desa	3 Desa
2	EWS	1 Unit	1 Unit
3	Rambu	299 Unit	0 Unit
4	Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan Relawan	150 Orang	150 Orang
5	Sosialisasi Daerah Rawan Bencana (IDENSOS)	73 Titik 4.550 Org	73 Titik 4.550 Org
6	Renkon	0 Dok	0 Dok
7	Gladi	1 Kali 150 orang	1 Kali 150 orang
8	Droping Air Bersih	43 Desa 200 Tangki	43 Desa 200 Tangki
9	Pelatihan/Bintek SAR dan TRC	2 Kelompok	2 Kelompok
10	Peningkatan Kapasitas Relawan/Generasi Muda	2 Angkatan	2 Angkatan
11	Sosial Ekonomi Masyarakat Terdampak	4 Lokasi	4 Lokasi
12	Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan PB dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Jateng	25 orang	25 orang
13	Pelayanan Dapur umum	1 Kali	1 Kali
14	Pengadaan Logistik dan Sarpras PB	10 Jenis	10 Jenis
15	Jumlah penyediaan peralatan bencana (unit)	8 Unit	12 Unit

Tabel 19
Tujuan, Sasaran RPJMD 2018 – 2023

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target RPJMD 2018 - 2023	Capaian s.d 2020
I	Meningkatkan ketangguhan masyarakat Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana		Indeks Ketahanan Daerah	3.60	3.54 (98.33%)
1.		Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan	Persentase penambahan kapasitas PB diwilayah	50.00	10.71 (21.42%)

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target RPJMD 2018 - 2023	Capaian s.d 2020
2.		dan pengurangan risiko bencana Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana	rawan bencana Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB	25.00	5.10 (20.40%)
3.		Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana	Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	100.00	100.00 (100%)
4.		Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	100.00	100.00 (100%)
II	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	85.00	82.34 (96.87%)
1.		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	90.00	82.34 (91.49%)
2.		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip BPBD Prov Jateng	70.00	72.26 (103.23%)

Tabel 20
Program dan Kegiatan RPJMD 2018 – 2023

No.	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	Target RPJMD 2018 - 2023	Capaian s.d 2020
I	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	100 (100%)
1.		Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	60	24 (40%)
2.		Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa surat menyurat, atk, cetak penggandaan dan kearsipan perangkat daerah	50	24 (48%)
3.		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	60	24 (40%)
4.		Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	60	24 (40%)
5.		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran	60	24 (40%)

No.	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	Target RPJMD 2018 - 2023	Capaian s.d 2020
6.		Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60	24 (40%)
7.		Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	60	24 (40%)
8.		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	60	24 (40%)
9.		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah	60	24 (40%)
10.		Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah	60	24 (40%)

No.	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	Target RPJMD 2018 - 2023	Capaian s.d 2020
11.		Perangkat Daerah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tangga Perangkat Daerah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan	10	5 (50%)
12.		Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	300	128 (42.67%)
13.		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/ Workshop/ BinteK/Seminar	125	50 (40%)
14.		Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	10	3 (30%)
15.		Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah	60	24 (40%)
16.		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Opsional Sekertariat DPRD	60	24 (40%)
II	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100	100 (100%)
1.		Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat	25	7 (28%)

No.	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	Target RPJMD 2018 - 2023	Capaian s.d 2020
2.		Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Daerah yang disusun Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	25	7 (28%)
III	Penyelenggaraa n Penanggulangan Bencana		Persentase penurunan risiko bencana	8.00	2.00 (25 %)
1.		Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana	Jumlah desa tangguh bencana terbentuk	80	21 (26.25%)
2.		Pemetaan dan sinergi pengurangan risiko bencana	persentase upaya PRB Jateng	30	5.10 (17%)
3.		Pengembangan Alat Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) & Rambu Informasi Bencana Jtg	Jumlah EWS dan rambu yang terpasang	960	246 (25.63%)
4.		Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam kesiapsiagaan/pr a bencana	Jumlah masyarakat siaga bencana yang terlatih	6500	1150 (17.69%)
5.			Persentase penanganan darurat kebencanaan	100	100 (100%)
6.		Peningkatan, pengembangan kapasitas penanganan darurat bagi pemangku kepentingan dan generasi muda	Jumlah pemangku kepentingan /relawan mudayang dilatih	37	9 (24.32%)

No.	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	Target RPJMD 2018 - 2023	Capaian s.d 2020
7.		Pengembangan Pusdalops Jateng	Persentase masyarakat terdampak yang tertangani	100	10 (10%)
8.		Evaluasi, Pemantauan, dan Penanganan Darurat Bencana	Jumlah sarana dan prasarana darurat yang tersedia/disiap kan	24	5 (20.83%)
9.		Bintek SAR, Latihan gabungan dan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jateng	Jumlah masyarakat/rel awan yang terlatih	35	7 (20%)
10.			Persentase rehab rekon pasca bencana	100	100 (100%)
11.		Penanganan rehabilitasi pasca bencana di Jateng	Persentase masyarakat terdampak yang direhab	90	100 (111.11%)
12.		Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan PB dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Jateng	Jumlah tenaga ahli terlatih dalam penghitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana	500	100 (20%)
13.		Sinergitas multisektor Penanganan pascabencana jateng	Persentase wilayah terdampak bencana yang direhab/rekon pasca bencana	90	100 (111.11%)
14.			Persentase pemenuhan logistik bencana	100	100 (100%)

No.	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	Target RPJMD 2018 - 2023	Capaian s.d 2020
15.		Peningkatan kapasitas logistik dan Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana	Jumlah penyediaan logistik (bulan)	50	10 (20%)
16.		Peningkatan kapasitas pengelolaan peralatan bencana Jateng	Jumlah penyediaan peralatan bencana (unit)	50	21 (42%)

3.2 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada tahun anggaran 2020 melaksanakan upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan sasaran dan program:

- Sasaran : Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana

Indikator : Persentase penambahan kapasitas PB diwilayah rawan bencana

- Program : Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Indikator : Persentase penurunan risiko bencana

Tabel 21
Realisasi Indikator Sasaran dan Program

Sasaran/Program	Indikator	Target	Realisasi	Ket
1	2	3	4	5
Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	Persentase penambahan kapasitas PB diwilayah rawan bencana	10%	10.71%	
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase penurunan risiko bencana	2%	2%	

Untuk mendukung capaian sasaran dan program tersebut didukung dengan 4 (empat) kegiatan dengan total anggaran Rp 9.300.000.000,- dan setelah

perubahan menjadi sebesar Rp 2.917.737.000,-. Penyelenggaraan PB pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan merupakan upaya pada pra bencana, yang terdiri dari situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana telah dilakukan oleh BPBD Prov Jawa Tengah. Data dan informasi bencana merupakan dokumen awal dalam upaya melakukan pemahaman dan pendampingan kepada masyarakat baik. Sesuai dengan tugas pokok maupun fungsi bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melakukan upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dengan merangkul para pemangku kepentingan antara lain masyarakat dan dunia usaha. Tahapan dan proses pelaksanaan kegiatan disusun secara runtut dan sistematis, antara lain melalui identifikasi, sosialisasi daerah rawan bencana, peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur serta upaya merangkul sektor non pemerintah (dunia usaha) untuk ikut serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama pengurangan risiko bencana di Jawa Tengah melalui simulasi, gladi dan pembentukan desa tangguh bencana. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh 2 (dua) seksi yaitu seksi pencegahan dan seksi kesiapsiagaan, sebagai berikut:

3.2.1 Seksi Pencegahan

Dalam pelaksanaannya seksi pencegahan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan DPA tahun 2020 dengan hasil realisasi fisik dan keuangan sebagai berikut:

Tabel 22
Realisasi Fisik dan Keuangan Seksi Pencegahan

No.	Progam Kegiatan	Realisasi Fisik	Nilai	Realisasi Keuangan	Nilai
1.	Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana.	330.436.000	100%	292.019.374	88,37%
2.	Pemetaan dan Sinergi Pengurangan Risiko Bencana	2.007.787.000	100%	1.961.048.619	97,67%

Tabel 23
Realisasi Kinerja Bidang Pencegahan

No.	Progam Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Ket
1.	Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana. <i>Jumlah desa tangguh bencana terbentuk</i>	330.436.000	2 Desa	3 Desa	
2.	Pemetaan dan Sinergi Pengurangan Risiko Bencana <i>Persentase upaya PRB Jateng</i>	2.007.787.000	5%	5.10%	

Dengan 4 kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana (MASTANA);
- Pemetaan dan Sinergi Pengurangan Risiko Bencana:
 - Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana;
 - Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB);
 - Unit Layanan Inklusi Disabilitas Penanggulangan Bencana (LIDI).

Dengan jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RKO yang telah direncanakan pasca refocusing tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 24
Jadwal dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Waktu	Jumlah Peserta	Tempat
Seksi Pencegahan				
1.	Pembentukan Kelurahan/Desa Tangguh Bencana di daerah rawan bencana di Kab/Kota di Jawa Tengah.	1. Tanggal 24-28 Februari 2020 di	1 Lokasi 50 Org	Kantor Kelurahan Jomblang, Kec. Candi Kota Semarang
		2. Tanggal 24-28 Februari 2020	1 Lokasi 50 Org	Desa Garungwiyoro Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan
		3. Tanggal 21-23 Oktober 2020	1 Lokasi 30 Org	Balai Desa Tajemsari Kec. Tegowanu Grobogan

No.	Kegiatan	Waktu	Jumlah Peserta	Tempat
2.	Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Inklusi Penanggulangan Bencana (LIDi PB)	Tanggal 12 Maret 2020	1 Kali 50 Org	Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini, Kabupaten Temanggung
3.	Progam Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Tanggal 10-14 Maret 2020 di	1 Sekolah 62 Org	SD 2 Cirongge, Kec. Pandanarum Banjarnegara
4.	Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana (IDENSOS)	November – Desember 2020	73 Titik 4.550 Org	Kab. Semarang, Kota Semarang, Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga, Sukoharjo, Purworejo, Banyumas, Rembang, Wonosobo, Pemalang, Brebes, Pekalongan.

1. Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana

a. Latar Belakang

Letak Provinsi Jawa Tengah dengan segala karakteristik geologi maupun klimatologisnya mempunyai beberapa implikasi, antara lain: rawan terhadap bencana alam baik berupa Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Kekeringan, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, Rob, Kebakaran, letusan gunungapi dengan berbagai intensitas dan frekuensi, serta berbagai jenis bencana lainnya seperti yang terjadi saat ini seperti bencana non alam Covid-19.

Menyadari tingginya ancaman bencana dan kerentanan terhadap bencana serta minimnya sosialisasi, maka perlu dilakukan kegiatan identifikasi dan sosialisasi daerah rawan bencana sebagai bentuk pelaksanaan upaya-upaya pengurangan risiko bencana, serta representasi UU No. 24 Tahun 2007. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Tahun Anggaran 2020 ini melaksanakan kegiatan identifikasi dan sosialisasi daerah rawan bencana dengan maksud

untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.

BPBD Provinsi Jawa Tengah berupaya mewujudkan upaya pengurangan risiko bencana melalui program Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana (Idensos DRB) tahun 2020 dalam Kegiatan Pemetaan dan Sinergi Pengurangan Risiko Bencana.

b. Tujuan

Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur, masyarakat dan dunia usaha dalam menghadapi potensi bencana di daerahnya masing-masing. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana serta meningkatkan Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

c. Saran

Seluruh elemen masyarakat supaya menjadi tangguh dan memiliki kesiapan untuk menghadapi bencana dan memiliki kemampuan untuk mengurangi risiko bencana, antara lain: Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana yang tingkat kerawannya sedang hingga tinggi; Unsur Muspika Kecamatan; Aparatur Kelurahan; Tokoh Masyarakat; Tokoh Agama; Bhabinkamtibmas dan Babinsa; Unsur Perempuan dan Penyandang Disabilitas.

d. Pelaksanaan

Peserta, Materi, Narasumber dan Moderator :

Peserta Kegiatan : Idensos DRB 19 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	Pelaksanaan kegiatan idensos di 19 kabupaten/kota, 59 kecamatan dan 75 desa/kelurahan yang tinggal di Daerah Rawan Bencana, terdiri dari unsur Forkompinca, Aparatur Desa/ Kelurahan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, Masyarakat, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Unsur Perempuan dan Penyandang Disabilitas
--	---

Materi kegiatan : 1. Legislasi Penanggulangan Bencana di Idensos DRB Jawa Tengah;

2. Kebijakan Anggaran Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah masing-masing;

3. Potensi Ancaman dan Upaya Penanggulangan Bencana di wilayah masing-masing;

4. Upaya Mitigasi Bencana di wilayah masing-masing;

5. Peran BPBD Kab/Kota dalam Penanggulangan Bencana di Wilayah masing-masing;

6. Peran Masyarakat dalam Penanganan Bencana.

Narasumber atau : 1. DPRD Provinsi Jawa Tengah;
Pemateri 2. Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah;

3. Kepala OPD/Instansi Terkait;

4. Akademisi;

5. Tokoh Masyarakat;

6. Penggiat Kebencanaan

Moderator : Akademisi, Kelompok masyarakat Kegiatan Idensos Profesional dan Ahli (Praktisi) DRB

Pelaksanaan kegiatan idensos di 19 kabupaten/kota, 59 kecamatan dan 75 desa/kelurahan. Adapun rincian dari pelaksanaan setiap kabupaten dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 25
Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana
Menurut Kabupaten TA 2020

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Banjarnegara	4 kecamatan	4 desa	4 kegiatan

2	Banyumas	1 kecamatan	1 desa	1 kegiatan
3	Batang	7 kecamatan	7 desa	7 kegiatan
4	Brebes	8 kecamatan	8 desa	8 kegiatan
5	Cilacap	3 kecamatan	3 desa	3 kegiatan
6	Demak	1 kecamatan	1 desa	1 kegiatan
7	Purworejo	1 kecamatan	1 desa	1 kegiatan
8	Blora	1 kecamatan	1 desa	1 kegiatan
9	Kebumen	4 kecamatan	4 desa	4 kegiatan
10	Kab. Semarang	4 kecamatan	6 desa	6 kegiatan
11	Kota Semarang	8 kecamatan	16 desa	16 kegiatan
12	Kudus	2 kecamatan	2 desa	2 kegiatan
13	Magelang	3 kecamatan	4 desa	4 kegiatan
14	Pati	2 kecamatan	2 desa	2 kegiatan
15	Pekalongan	2 kecamatan	2 desa	2 kegiatan
16	Pemalang	1 kecamatan	1 desa	1 kegiatan
17	Purbalingga	2 kecamatan	2 desa	2 kegiatan
18	Rembang	5 kecamatan	5 desa	5 kegiatan
19	Sukoharjo	1 kecamatan	1 desa	1 kegiatan
Total		59 kecamatan	75 desa	75 kegiatan

e. Dokumentasi



Gambar 3 Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana

2. Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)

a. Latar Belakang

Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah yang memiliki kerawanan bencana tinggi. Hampir semua bencana yang ada di Indonesia ada di Jawa Tengah seperti gempa bumi, tsunami, banjir,

kekeringan, tanah longsor, angin puting beliung, rob, kebakaran dan sebagainya. Bencana alam dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan dapat menimpa siapa saja. Anak adalah salah satu kelompok paling rentan pada saat terjadi bencana. Bencana dapat menimbulkan berbagai dampak bagi anak, diantaranya dampak pendidikan yaitu bangunan sekolah yang rusak, putus sekolah, terganggunya kegiatan belajar mengajar, kehilangan dokumen bahkan dampak psikososial berupa semangat belajar turun dan trauma.

Menyadari tingginya ancaman bencana, Pemerintah selalu berupaya aktif melakukan upaya pengurangan risiko bencana melalui program-program penanggulangan bencana salah satunya dengan melibatkan dunia pendidikan dan anak usia dini melalui pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Amanat Undang Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, secara jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun situasi terdapat potensi bencana. Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) merupakan sekolah yang menerapkan standar sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya dari bahaya bencana dengan menerapkan 3 pilar yaitu penyediaan fasilitas sekolah yang aman, pengembangan perilaku kesiapsiagaan dengan manajemen bencana di Sekolah dan pemberian pendidikan tentang pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana.

Untuk mewujudkan sekolah aman bencana BPBD Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan Pemetaan dan Sinergi Pengurangan Risiko Bencana melaksanakan Kegiatan Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana dengan lokasi kegiatan sekolah yang berada di daerah rawan bencana pada Kab/kota di Jawa Tengah. Penyusunan Dokumen Satuan Pendidikan Aman Bencana sebagai hasil formal pembentukan SPAB sangat penting bagi warga sekolah dalam upaya

menghadapi segala bentuk ancaman khususnya Bencana Alam Tanah Longsor dan Angin Kencang sebagai ancaman di lokasi pelaksanaan SPAB. Hal hal penting tersebut adalah:

1. Dokumen ini menjadi pegangan dalam menentukan langkah dalam menghadapi bencana baik pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana yang terjadi.
2. Dokumen ini menjadi sumber informasi bagi warga sekolah khususnya dan masyarakat pada umumnya.
3. Dokumen ini menjadi acuan dalam menentukan kebijakan dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah.
4. Dokumen ini untuk menyatukan persepsi, pendapat dan keputusan dalam menghadapi kebencanaan di lingkungan Sekolah.

b. Tujuan

Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Jawa Tengah dilaksanakan dengan tujuan :

1. Memberikan perlindungan kepada peserta didik, guru, tenaga kependidikan dan masyarakat di sekitar sekolah dari ancaman dan dampak bencana;
2. Membangun budaya siaga, budaya aman dan budaya pengurangan risiko bencana di sekolah;
3. Menyebarkan dan mengembangkan pengetahuan kebencanaan ke masyarakat luas melalui jalur pendidikan sekolah;
4. Memberikan informasi kepada pihak terkait tentang kondisi struktur bangunan dan aksesibilitas lingkungan sekolah sebagai upaya pengurangan risiko bencana yang menjangkau semua warga sekolah (inklusif).

c. Pelaksanaan

Pembentukan SPAB di SD Negeri 2 Sirongge, Kec. Pandanarum, Banjarnegara. SD Negeri 2 Sirongge terletak di Dusun Sawangan, Desa Sirongge, Kecamatan Pandanarum, Kab. Banjarnegara. SD ini memiliki luas tanah 870 m² dan luas bangunan

596 m2. Terdiri dari 52 siswa, 9 guru dan 1 penjaga sekolah. Latak geografis SD Negeri 2 Sirongge berada di wilayah paling utara Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 2 Sirongge dilaksanakan seperti sekolah pada umumnya yaitu dimulai dari pagi hari sampai siang hari. Jarak sekolah dengan pusat kecamatan adalah 5 Km. Sedangkan jarak sekolah ke ibukota kabupaten adalah 65 Km. Sekolah terletak di daerah pegunungan, sehingga banyak dijumpai tebing dan bukit. Kontur tanah SD Negeri 2 Sirongge dan sekitarnya memiliki kontur tanah berpasir, dan berlumpur sehingga rawan terjadi bencana alam, seperti tanah longsor. Selain tanah longsor, sekolah dan sekitarnya juga rawan terjadi bencana angin kencang.

Risiko bencana bencana tanah longsor di SD Negeri 2 Sirongge tergolong tinggi, karena wilayah Sirongge berada di pegunungan yang berbukit dengan kemiringan curam dan memiliki tekstur tanah yang berpasir dan berlumpur (labil). Bulan September tahun 2017, SD Negeri 2 Sirongge dan Dusun Sawangan pernah mengalami peristiwa bencana tanah longsor. Akibatnya warga Dusun Sawangan dipindahkan ke tempat pengungsian. Ancaman tanah longsor berdampak pada manusia, lingkungan, infrastruktur dan finansial. Dari peristiwa bencana tersebut menimbulkan berbagai macam penyakit diantaranya diare, ISPA dan hipertensi. Dampak yang timbul terhadap lingkungan yaitu rusaknya mata air, rusaknya sekolah dan pohon tumbang. Infrastruktur sekolah mengalami kerusakan seperti 4 bangunan kelas roboh, 2 WC amblas, dan bangunan lain mengalami keretakan (rusak ringan). Dari peristiwa longsor tersebut sekolah mengalami kerugian sekitar 500 juta.

1) Waktu dan Tempat Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan SPAB Jawa Tengah di SDN Negeri 2 Sirongge berlangsung dari tanggal 10-14 Maret 2020, kegiatan ini diikuti oleh seluruh warga sekolah meliputi Kepala Sekolah, Guru,

Siswa, FPRB Desa Srongge, Masyarakat sekitar sekolah dan Bidan Desa Sirongge.

d. Narasumber dan Fasilitator Kegiatan

Kegiatan SPAB didampingi oleh Tim Fasilitator SPAB dan didampingi oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD Kabupaten Banjarnegara. Sebelum proses fasilitasi pembentukan SPAB, didahului dengan *academic session* sebagai berikut:

1) Narasumber

Suhardi, Sp.Pd, MM; Kepala Seksi Kurikulum SMP Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab. Banjarnegara; Materi Konsep Satuan Pendidikan Aman Bencana.

2) Moderator

Tujono, SIP; Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kab. Banjarnegara.

Dalam pelaksanaan pelatihan dibagi menjadi 2 kelas yaitu kelas Dewasa yang diikuti oleh Kepala Sekolah, Guru, FPRB Desa Srongge, Masyarakat sekitar sekolah dan Bidan Desa Sirongge dan kelas siswa yang diikuti oleh perwakilan siswa dari kelas I-VI.

Materi yang diberikan selama kegiatan yaitu:

- 1) Kajian ancaman dan sejarah bencana di lingkungan sekolah;
- 2) Pemeringkatan ancaman bencana;
- 3) Kajian risiko bencana partisipatif : Identifikasi karakter ancaman, Identifikasi Kerentanan dan Kapasitas dan Analisis risiko bencana;
- 4) Pembuatan denah/peta risiko bencana;
- 5) Penyusunan Rencana Aksi Sekolah;
- 6) Penyepakatan System peringatan dini dan rencana evakuasi sekolah;
- 7) Pembentukan Tim Siaga Bencana Sekolah;
- 8) Penyusunan Rencana Kontijensi Sekolah;
- 9) Table Top Exercise (TTX);
- 10) Strategi Integrasi Pengurangan Risiko Bencana;

- 11)Media Publikasi Sekolah;
- 12)Simulasi Bencana;
- 13)Rencana Tindak Lanjut (RTL); dan
- 14)Evaluasi

e. Hasil Kegiatan

Capaian hasil kegiatan Pembentukan SPAB SDN Negeri 2 Sirongge berlangsung dari tanggal 10-14 Maret 2020 sebagai berikut :

- 1) Tersedianya Dokumen Kajian risiko bencana partisipatif : Identifikasi karakter ancaman, Identifikasi Kerentanan dan Kapasitas dan Analisis risiko bencana;
- 2) Teredianya denah/peta risiko bencana;
- 3) Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Aksi Sekolah;
- 4) Tersedianya system peringatan dini dan rencana evakuasi sekolah;
- 5) Terbentuknya Tim Siaga Bencana Sekolah;
- 6) Tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi Sekolah;
- 7) Terlaksananya kegiatan *Table Top Exercise* (TTX);
- 8) Tersedianya Dokumen Strategi Integrasi Pengurangan Risiko Bencana;
- 9) Media Publikasi Sekolah;
- 10) Terselenggaranta Simulasi Bencana;
- 11) Tersedianya Rencana Tindak Lanjut (RTL);

Hasil kegiatan tersebut didokumentasikan dalam Dokumen Kegiatan Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana SDN 2 Sirongge dan ditanda tangani oleh BPBD Prov. Jawa Tengah, BPBD Kab. Banjarnegara, SDN 2 Sirongge dan Fasilitator, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

f. Kesimpulan

- 1) Jawa Tengah adalah wilayah yang rawan berbagai bencana dengan potensi ancaman: gempa bumi, tsunami, banjir,

kekeringan, tanah longsor, angin puting beliung, rob, kebakaran dan sebagainya.

- 2) Upaya pengurangan risiko bencana sejak dini perlu dilakukan salahsatunya dengan pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana di sekolah-sekolah rawan bencana.
- 3) Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) antara lain memberikan perlindungan kepada peserta didik, guru, tenaga kependidikan dan masyarakat di sekitar sekolah dari ancaman dan dampak bencana, membangun budaya siaga, budaya aman dan budaya pengurangan risiko bencana di sekolah, menyebarkan dan mengembangkan pengetahuan kebencanaan ke masyarakat luas melalui jalur pendidikan sekolah.
- 4) Capaian hasil kegiatan Pembentukan SPAB SDN Negeri 2 Sirongge yaitu; tersedianya Dokumen Kajian risiko bencana; tersedianya denah/peta risiko bencana; tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Aksi Sekolah; tersedianya system peringatan dini dan rencana evakuasi sekolah; terbentuknya Tim Siaga Bencana Sekolah; tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi Sekolah; terlaksananya kegiatan *Table Top Exercise* (TTX); tersedianya Dokumen Strategi Integrasi Pengurangan Risiko Bencana; Adanya Media Publikasi Sekolah; terselenggaranya Simulasi Bencana dan tersedianya Rencana Tindak Lanjut (RTL).

g. Dokumentasi





Gambar 4 Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)

3. Masyarakat Tangguh Bencana (MASTANA)

a. Latar Belakang

Jawa Tengah adalah wilayah yang rawan berbagai bencana. Baik bencana yang disebabkan oleh faktor geografis, geologis dan juga faktor demografi. Hampir semua bencana yang ada di Indonesia juga terwakili oleh Jawa Tengah dari Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Kekeringan, Tanah Longsor, Angin puting beliung, Rob, Kebakaran dan sebagainya. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selalu berupaya aktif melakukan upaya pengurangan resiko bencana melalui program-program penanggulangan bencana. Masyarakat yang berada di desa/kelurahan umumnya adalah penerima dampak langsung dari bencana dan sekaligus pelaku langsung yang akan merespon bencana tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan penanggulangan bencana dengan memanfaatkan semua potensi sumberdaya yang dimiliki, melatih kesiapsiagaan dan mitigasi masyarakat tingkat desa/kelurahan, sehingga risiko korban jiwa, kerugian harta, dan lain lain akan bisa diperkecil dan bahkan dihindari.

Untuk mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang tangguh bencana, sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah, BPBD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana dengan Pembentukan Desa Tangguh di daerah rawan bencana di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Pembentukan Desa Tangguh

Bencana merupakan rangkaian kegiatan berupa lokakarya mengenali lebih baik desanya sendiri, mengembangkan kajian risiko, menyusun rencana-rencana tindakan mengurangi risiko bencana, sosialisasi, musyawarah, kunjungan verifikasi di lapangan dan latihan peningkatan keterampilan-keterampilan penanggulangan bencana. Selain pembentukan Desa Tangguh Bencana, BPBD Provinsi Jawa Tengah juga melaksanakan Rapat Koordinasi pengembangan masyarakat tangguh bencana dengan menghadirkan pengurus Forum PRB desa pada desa-desa yang sudah difasilitasi dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kab/Kota di Jawa Tengah. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan penguatan dan pendampingan dalam penyusunan rencana dan program kerja kegiatan forum, sehingga keberlanjutan kegiatan FPRB Desa sebagai salah satu motor penggeraknya dapat terus berjalan.

– Indikator Desa Tangguh Bencana

Ketangguhan masyarakat dinilai berdasarkan capaian 20 indikator yang dikembangkan dari 6 komponen Sistem Penanggulangan Bencana. Indikator tersebut dicantumkan dalam lampiran Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012, yang kemudian menjadi rujukan bagi BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam mengembangkan program ini. Keseluruhan indikator tersebut ada dalam Tabel 1. dibawah ini.

Tabel 26
Indikator Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Kategori	No	Indikator
Legislasi	1	Kebijakan/Peraturan di Desa/Kel tentang PB/PRB
Perencanaan	2	Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Komunitas, dan/atau Rencana kontingensi
Kelembagaan	3	Forum PRB
	4	Relawan Penanggulangan Bencana
	5	Kerjasama antar pelaku dan wilayah
Pendanaan	6	Dana tanggap darurat
	7	Dana untuk PRB

Kategori	No	Indikator
Pengembangan Kapasitas	8	Pelatihan untuk pemerintah desa
	9	Pelatihan untuk tim relawan
	10	Pelatihan untuk warga desa
	11	Pelibatan/partisipasi warga desa
	12	Pelibatan Perempuan dalam tim relawan
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	13	Peta dan kajian risiko
	14	Peta dan jalur evakuasi serta tempat pengungsian
	15	Sistem peringatan dini
	16	Pelaksanaan mitigasi struktural (fisik)
	17	Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat
	18	Perlindungan kesehatan kepada kelompok rentan
	19	Pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk PRB
	20	Perlindungan aset produktif utama masyarakat

Tabel 27
Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Pembentukan Desa Tangguh
Bencana di Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020

NO	TEMPAT			JENIS ANCAMAN	WAKTU
	KAB	KEC	DESA		
1	Kota Semarang	Candi	Jomblang	Tanah Longsor	24-28 Februari 2020
2	Pekalongan	Kandangserang	Gerungwiyoro	Banjir	24-28 Februari 2020
3	Grobogan	Tegowanu	Tajemsari	Banjir	21-23 Oktober 2020

b. Tujuan

Tujuan Kegiatan Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana melalui Pembentukan Desa Tangguh Bencana adalah:

- 1) Mendorong terwujudnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana yang lebih terarah, terencana, terpadu, dan terkoordinasi.
- 2) Mendorong sinergi dan integrasi seluruh program yang ada di desa/kelurahan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan lembaga usaha.
- 3) Meningkatkan kemandirian masyarakat desa/kelurahan dalam melaksanakan upaya-upaya pengurangan risiko bencana.
- 4) Mendorong integrasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana dalam rencana pembangunan desa.

c. Pelaksanaan

Kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia diatur terutama melalui UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan peraturan-peraturan pemerintah serta peraturan presiden turunan dari UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Di dalam Rancangan RPJMN Tahun 2020 – 2024, dibahas tentang penanggulangan bencana yang mana prioritas di penanggulangan bencana ini masuk kedalam prioritas ke-6 yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Kebijakan penanggulangan bencana dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dasar penanggulangan bencana Provinsi Jawa Tengah yang juga selaras dengan prinsip-prinsip dasar penanggulangan bencana di tingkat Nasional.

Program penanggulangan bencana di dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah masuk kedalam Misi Menjadikan Masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan. Program tersebut dijabarkan melalui program dan

kegiatan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana terutama di daerah rawan bencana.

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana. Desa/kelurahan ini juga mampu memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana. Desa disebut mempunyai ketangguhan terhadap bencana ketika desa tersebut memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisasikan sumber daya masyarakatnya untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Ketangguhan menghadapi bencana ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat.

Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dengan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Masyarakat di dalam desa tangguh bencana aktif terlibat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana bertujuan untuk melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana, meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya

dan teknis bagi pengurangan risiko bencana, meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli. Kegiatan ini diukur berdasarkan nilai ketangguhan atas capaian 20 indikator (Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012).

Tabel 28
Indikator Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Kategori	No	Indikator
Legislasi	1	Kebijakan/Peraturan di Desa/Kel tentang PB/PRB
Perencanaan	2	Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Komunitas, dan/atau Rencana kontingensi
Kelembagaan	3	Forum PRB
	4	Relawan Penanggulangan Bencana
	5	Kerjasama antar pelaku dan wilayah
Pendanaan	6	Dana tanggap darurat
	7	Dana untuk PRB
Pengembangan Kapasitas	8	Pelatihan untuk pemerintah desa
	9	Pelatihan untuk tim relawan
	10	Pelatihan untuk warga desa
	11	Pelibatan/partisipasi warga desa
	12	Pelibatan Perempuan dalam tim relawan
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	13	Peta dan kajian risiko
	14	Peta dan jalur evakuasi serta tempat pengungsian
	15	Sistem peringatan dini
	16	Pelaksanaan mitigasi struktural (fisik)
	17	Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat
	18	Perlindungan kesehatan kepada kelompok rentan
	19	Pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk PRB
	20	Perlindungan aset produktif utama masyarakat

1) Kelurahan Tangguh Bencana Jomblang Kota Semarang

a) Waktu dan Tempat Kegiatan

Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Jomblang Kota Semarang dilaksanakan selama 5 hari, tanggal 24-28 Februari 2020 bertempat di Kantor Kelurahan Jomblang, Kec. Candi Kota Semarang.

b) Peserta, Narasumber dan Fasilitator Kegiatan

Peserta kegiatan sebanyak 50 orang terdiri dari unsur aparatur desa, Karangtaruna, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Relawan PB, Babinsa dan Babinkamtibmas.

Narasumber dan Fasilitator kegiatan berasal dari Lembaga Gerak Pemberdayaan Jawa Tengah dan Forum PRB Jateng.

c) Materi

- Konsep Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
- Penyusunan Kebijakan/Peraturan di Desa/Kel tentang PB/PRB
- Pembentukan Forum PRB Tingkat Kelurahan
- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
- Penyusunan Rencana Aksi Komunitas PRB
- Penyusunan SOP PB
- Penyusunan Sistem Peringatan Dini Desa
- Penyusunan Rencana Evakuasi
- Penyusunan Rencana Kontijensi
- Pembentukan Relawan Tingkat Kelurahan

d) Hasil Kegiatan

Capaian hasil indikator kegiatan Pembentukan Kelurahan/Desa Tangguh Bencana di Kelurahan Jomblang, Kec. Candi Kota Semarang sebagai berikut:

Tabel 29
Indikator Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Kelurahan
Jomblang, Kec. Candisari Kota Semarang

Kategori	No	Indikator	Ket
1	2	3	4
Legislasi	1	▪ Kebijakan/Peraturan di Desa/Kel tentang PB/PRB	2
Perencanaan	2	▪ Rencana Penanggulangan Bencana ▪ Rencana Aksi Komunitas, dan/atau ▪ Rencana kontingensi	2
Kelembagaan	3	▪ Forum PRB	2
	4	▪ Relawan Penanggulangan Bencana	2
	5	▪ Kerjasama antar pelaku dan wilayah	2
Pendanaan	6	▪ Dana tanggap darurat	0
	7	▪ Dana untuk PRB	1
Pengembangan Kapasitas	8	▪ Pelatihan untuk pemerintah desa	2
	9	▪ Pelatihan untuk tim relawan	2
	10	▪ Pelatihan untuk warga desa	2
	11	▪ Pelibatan/partisipasi warga desa	2
	12	▪ Pelibatan Perempuan dalam tim relawan	2
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	13	▪ Peta dan kajian risiko	2
	14	▪ Peta dan jalur evakuasi serta tempat pengungsian	2
	15	▪ Sistem peringatan dini	2
	16	▪ Pelaksanaan mitigasi struktural (fisik)	1
	17	▪ Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat	1
	18	▪ Perlindungan kesehatan kepada kelompok rentan	2
	19	▪ Pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk PRB	0
	20	▪ Perlindungan aset produktif utama masyarakat	1

e) Dokumentasi



Gambar 5 Kegiatan Mastana di Kota Semarang

2) Desa Tangguh Bencana Gerungwiyoro, Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan

a) Waktu dan Tempat Kegiatan

Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Desa Gerungwiyoro, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan dilaksanakan selama 5 hari, tanggal 24-28 Februari 2020 bertempat di Balaidesa Gerungwiyoro.

b) Peserta Narasumber dan Fasilitator Kegiatan

Peserta kegiatan sebanyak 50 orang terdiri dari unsur Aparatur Desa, Karangtaruna, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Relawan PB, Babinsa dan Babinkamtibmas.

Narasumber dan Fasilitator kegiatan berasal dari Lembaga Gerak Pemberdayaan Jawa Tengah dan Forum PRB Jateng.

c) Materi

Materi yang diberikan selama kegiatan yaitu:

- Konsep Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

- Penyusunan Kebijakan/Peraturan di Desa/Kel tentang PB/PRB
- Pembentukan Forum PRB Tingkat Kelurahan
- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
- Penyusunan Rencana Aksi Komunitas PRB
- Penyusunan SOP PB
- Penyusunan Sistem Peringatan Dini Desa
- Penyusunan Rencana Evakuasi
- Penyusunan Rencana Kontijensi

d) Hasil Kegiatan

Capaian hasil indikator kegiatan Pembentukan Kelurahan/Desa Tangguh Bencana di Desa Garungwiyoro Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan sebagai berikut :

Tabel 30
Indikator Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Desa
Garungwiyoro Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan

Kategori	No	Indikator	Ket
1	2	3	4
Legislasi	1	▪ Kebijakan/Peratura di Desa/Kel tentang PB/PRB	1
Perencanaan	2	▪ Rencana Penanggulangan Bencana ▪ Rencana Aksi Komunitas, dan/atau ▪ Rencana kontijensi	1
Kelembagaan	3	▪ Forum PRB	2
	4	▪ Relawan Penanggulangan Bencana	2
	5	▪ Kerjasama antar pelaku dan wilayah	1
Pendanaan	6	▪ Dana tanggap darurat	2
	7	▪ Dana untuk PRB	1
Pengembangan Kapasitas	8	▪ Pelatihan untuk pemerintah desa	1
	9	▪ Pelatihan untuk tim relawan	1
	10	▪ Pelatihan untuk warga desa	1
	11	▪ Pelibatan/partisipasi warga desa	1
	12	▪ Pelibatan Perempuan dalam tim relawan	1

Kategori	No	Indikator	Ket
1	2	3	4
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	13	▪ Peta dan kajian risiko	1
	14	▪ Peta dan jalur evakuasi serta tempat pengungsian	1
	15	▪ Sistem peringatan dini	1
	16	▪ Pelaksanaan mitigasi struktural (fisik)	1
	17	▪ Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat	1
	18	▪ Perlindungan kesehatan kepada kelompok rentan	1
	19	▪ Pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk PRB	1
	20	▪ Perlindungan aset produktif utama masyarakat	1

e) Dokumentasi



Gambar 6 Kegiatan Mastana di Kabupaten Pekalongan

3) Desa Tangguh Bencana Tajemsari, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan

a) Waktu dan Tempat Kegiatan

Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tajemsari, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan dilaksanakan selama 3 hari, tanggal 21-23 Oktober 2020 bertempat di Balai Desa Tajemsari Kec. Tegowanu.

b) Peserta Narasumber dan Fasilitator Kegiatan

Peserta kegiatan sebanyak 30 orang terdiri dari unsur aparat kelurahan, Karangtaruna, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Relawan PB, Babinsa dan Babinkamtibmas.

Narasumber dan Fasilitator kegiatan berasal dari Lembaga Gerak Pemberdayaan Jawa Tengah dan Forum PRB Jateng.

c) Materi

Materi yang diberikan selama kegiatan yaitu:

- Konsep Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
- Penyusunan Kebijakan/Peraturan di Desa/Kel tentang PB/PRB
- Pembentukan Forum PRB Tingkat Kelurahan
- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
- Penyusunan Rencana Aksi Komunitas PRB
- Penyusunan SOP PB
- Penyusunan Sistem Peringatan Dini Desa
- Penyusunan Rencana Evakuasi
- Penyusunan Rencana Kontijensi

d) Hasil Kegiatan

Capaian hasil indikator kegiatan Pembentukan Kelurahan/Desa Tangguh Bencana di Desa Tajemsari, Kec. Tegowanu Kab. Grobogan sebagai berikut:

Tabel 31
Indikator Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Desa
Tajemsari, Kec. Tegowanu Kab. Grobogan

Kategori	No	Indikator	Ket
1	2	3	4
Legislasi	1	▪ Kebijakan/Peraturan di Desa/Kel tentang PB/PRB	1
Perencanaan	2	▪ Rencana Penanggulangan Bencana ▪ Rencana Aksi Komunitas, dan/atau ▪ Rencana kontingensi	1
Kelembagaan	3	▪ Forum PRB	2
	4	▪ Relawan Penanggulangan Bencana	2
	5	▪ Kerjasama antar pelaku dan wilayah	1
Pendanaan	6	▪ Dana tanggap darurat	2
	7	▪ Dana untuk PRB	0
Pengembangan Kapasitas	8	▪ Pelatihan untuk pemerintah desa	2
	9	▪ Pelatihan untuk tim relawan	1
	10	▪ Pelatihan untuk warga desa	0
	11	▪ Pelibatan/partisipasi warga desa	1
	12	▪ Pelibatan Perempuan dalam tim relawan	2
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	13	▪ Peta dan kajian risiko	1
	14	▪ Peta dan jalur evakuasi serta tempat pengungsian	1
	15	▪ Sistem peringatan dini	1
	16	▪ Pelaksanaan mitigasi struktural (fisik)	0
	17	▪ Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat	0
	18	▪ Perlindungan kesehatan kepada kelompok rentan	2
	19	▪ Pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk PRB	2
	20	▪ Perlindungan aset produktif utama masyarakat	0

e) Dokumentasi



Gambar 7 Kegiatan Mastana di Kabupaten Grobogan

4. Unit Layanan Inklusi Disabilitas Penanggulangan Bencana (LIDI)

a. Latar Belakang

Penanggulangan Bencana (PB) bukan hanya urusan satu pihak melainkan urusan yang melibatkan berbagai pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) pada seluruh tahapan, baik pra-bencana, saat bencana/tanggap darurat dan pasca bencana merupakan salah satu upaya kunci meningkatkan ketangguhan masyarakat.

Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dalam pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman. Pasal yang sama juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak akan pendidikan dan pelatihan serta terlibat dalam pengambilan keputusan PB tidak terkecuali kelompok masyarakat rentan. Kelompok berisiko tinggi

atau disebut kelompok rentan dalam pasal 55 ayat (2) terdiri atas bayi, balita dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat (penyandang disabilitas) dan orang lanjut usia. Dalam konteks risiko, penyandang disabilitas juga berhak akan prioritas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mengingat hambatan lingkungan yang dihadapi penyandang disabilitas, baik fisik maupun non fisik, meningkatkan paparan risiko bencana terhadap mereka. Lebih lanjut disabilitas juga merupakan isu lintas sektor, yang mencakup perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia dengan disabilitas.

Perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam PB yang hendaknya menerapkan pendekatan/perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lebih lanjut, pemenuhan akan akomodasi dan aksesibilitas serta partisipasi penyandang disabilitas dalam PB diatur secara khusus dalam Pasal 109 ayat (2) dan (3). Dasar hukum inilah yang kemudian melandasi inisiatif Pemerintah dalam mengedepankan keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam kegiatan PB.

Di Indonesia saat ini berbagai praktik dalam bentuk program dan kegiatan terkait perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana sudah dimulai direncanakan dan dilaksanakan. Berbagai inisiatif dilaksanakan untuk memastikan upaya PB yang lebih inklusif disabilitas. Praktik ini, misalnya dapat diamati di delapan (8) provinsi, yaitu: Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Pelaksanaannya pun beragam bergantung pada prioritas program daerah, misalnya Desa Tangguh Bencana, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, perencanaan-perencanaan PB, pelatihan-pelatihan PB, aksi kemanusiaan/tanggap darurat, upaya pelebagaan PB inklusif, dan sebagainya.

Salah satu praktik yang potensial dikembangkan di daerah untuk menjamin keberlanjutan upaya PB inklusif adalah pelembagaan PB inklusif melalui pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dalam penyelenggaraan PB sebagaimana telah diamanatkan oleh Perka BNPB No. 14 Tahun 2014. Dalam hal ini, Provinsi Jawa Tengah telah mengawalinya dengan mengembangkan model Unit Layanan Inklusi Disabilitas Penanggulangan Bencana” (Unit LIDi PB). Proses pengembangan Unit LIDi PB Jawa Tengah melalui kegiatan konsultasi multi-pihak, studi kelayakan, identifikasi rencana kerja BPBD, penyusunan panduan, dan uji coba panduan dengan melibatkan perwakilan BPBD, Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta lembaga kemanusiaan non pemerintah di Provinsi Jawa Tengah.

Praktik-praktik tersebut perlu didokumentasikan, direview dan didiseminasikan sebagai sebuah pembelajaran yang diharapkan dapat menjadi referensi perluasan penyelenggaraan dan pengembangan kebijakan operasional PB inklusif yang lebih terlembaga ke depannya. Dalam rangka mendukung hal tujuan di atas, maka akan diselenggarakan kegiatan “Pembentukan Unit Layanan Inklusi Disabilitas Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah” yang diharapkan menjadi sebuah langkah yang menginspirasi penyelenggaraan PB Inklusif di berbagai daerah di Indonesia.

Pada saat ini, perlindungan dan partisipasi penyandang dalam penanggulangan bencana sedang giat-giatnya didorong melalui berbagai inisiatif di Jawa Tengah, salah satu upaya pelembagaan PB yang lebih inklusif adalah melalui pembentukan model Unit Layanan Inklusi dalam Penanggulangan Bencana” (LIDi PB) di Provinsi Jawa Tengah yang diikuti dengan terbentuknya unit LIDi di 8 (delapan) Kabupaten, yaitu: Klaten, Wonogiri, Kudus, Rembang, Karanganyar, Sragen, Boyolali dan Grobogan. Sejalan dengan hal tersebut pelibatan penyandang dalam PB makin ditingkatkan, dapat

dilihat partisipasi aktif penyandang dalam kegiatan desa tangguh bencana, penyusunan rencana kontinjensi, dan juga dalam aksi kemanusiaan/tanggap darurat yang makin inklusif.

b. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah memfasilitasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Kabupaten Magelang dan Jepara dengan tujuan untuk memberikan layanan pemenuhan hak dan peran penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di kabupaten tersebut.

Unit LIDi PB yang terbentuk nantinya merupakan bagian dari BPBD dalam rangka memberikan tujuh pelayanan PB inklusif disabilitas, meliputi; Pengelolaan data terpilah disabilitas (usia, gender, jenis disabilitas) untuk lokasi, rawan bencana layanan informasi dan rujukan layanan, kajian kebutuhan dan potensi penyandang disabilitas pada saat penanganan darurat dan pasca bencana, keterlibatan pada perencanaan PB (Rencana Penanggulangan Bencana/RPB, Rencana Kontinjensi/Renkon, Rencana Operasi Darurat Bencana/RODB, Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi/Renaksi RR), Koordinasi penanganan darurat dan pelaksanaan isu disabilitas ke seluruh kluster penanganan darurat dan pemulihan sektor pada pasca bencana Koordinasi keterlibatan penyandang disabilitas. Koordinasi peningkatan kapasitas penyandang disabilitas kegiatan Unit LIDi PB tersebut terintegrasi dan mendukung kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan serta tugas-tugas di bidang-bidang dalam struktur BPBD.

c. Pelaksanaan

Pembentukan Unit Layanan Inklusi Disabilitas PB dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2020 di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini, Kabupaten Temanggung dengan jumlah peserta 50 orang.

d. Hasil Kegiatan

- 1) Unit Layanan Inklusi Disabilitas Kabupaten Temanggung telah berhasil dibentuk dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 2) Perumusan dan penetapan struktur organisasi Unit Layanan Inklusi Disabilitas (LIDi) telah dilakukan dan akan ditinjaulanjuti serta disahkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- 3) Dari segi penanggulangan bencana, Unit Layanan Inklusi Disabilitas (LIDi) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) Menyediakan rekomendasi kebijakan penanganan penyandang disabilitas.
 - b) Melakukan perencanaan serta penganggaran progam dan kegiatan penanganan dan perlindungan penyandang disabilitas.
 - c) Melakukan koordinasi dengan kementerian, lembaga, SKPD dan para pihak terkait dalam hal kebijakan, progam, dan kegiatan.

e. Dokumentasi



Gambar 8 Pembentukan Unit Lidi Kab. Temanggung

3.2.2 Seksi Kesiapsiagaan

Dalam pelaksanaannya sesuai dengan jadwal RKO perubahan dan DPA Perubahan setelah *refocusing* anggaran tahun 2020 seksi kesiapsiagaan berhasil melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 32
Realisasi Fisik dan Keuangan Seksi Kesiapsiagaan

No.	Progam Kegiatan	Realisasi Fisik	Nilai	Realisasi Keuangan	Nilai
1.	Pengembangan alat sistem peringatan dini (EWS/ <i>Early Warning System</i>) dan rambu informasi bencana Jawa Tengah.	198.703.000	100%	195.194.500	98,23%
2.	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan/pra bencana.	380.811.000	100%	280.269.779	73,59%

Tabel 33
Realisasi Kinerja Bidang Pencegahan

No.	Progam Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Ket
1.	Pengembangan alat sistem peringatan dini (EWS/ <i>Early Warning System</i>) dan rambu informasi bencana Jawa Tengah. <u>Jumlah EWS dan rambu yang terpasang</u>	198.703.000	300 Unit (Rambu)	1 Unit (EWS)	Penambahan target 300 unit untuk pemasangan rambu jalur evakuasi G.Merapi tetapi tidak disetujui/batal.
2.	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan/pra bencana. <u>Jumlah masyarakat siaga bencana yang terlatih</u>	380.811.000	150 Org	150 Org	

Dari 2 (dua) kegiatan diatas terbagi lagi menjadi 6 Sub Kegiatan untuk menunjang indikator sasaran sebagai berikut:

- Pengembangan alat sistem peringatan dini (EWS/Early Warning System) dan rambu informasi bencana Jawa Tengah;
- Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan/pra bencana:
 - Pemasangan Early Warning System (EWS) Tanah Longsor;
 - Penyusunan RPB Kawasan Borobudur Tahun 2020-2039;
 - Renops Penanganan Wabah Pandemi Covid-19 Jawa Tengah;
 - Renkon Gas Beracun dan Gunung Api Dieng Tahun 2020;
 - Legislasi Renkon Bencana Tsunami;
 - Review Renkon Erupsi Gunung Merapi Tahun 2018.

1. Pemasangan Alat Sistim Pringatan Dini (EWS) Tanah Longsor

a. Latar Belakang

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya serta berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana merupakan elemen yang sangat penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dengan adanya

sistem peringatan dini, maka masyarakat dapat melakukan respon yang sesuai untuk melakukan penyelamatan diri sehingga dapat menghindari korban jiwa serta mengurangi dampak bencana. Agar berjalan efektif, sistem peringatan dini harus melibatkan masyarakat secara aktif, memfasilitasi pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang risiko yang dihadapi, menyebarluaskan pesan dan peringatan secara efektif, serta menjamin kesiapsiagaan yang selalu terjaga. Tujuan dari pengembangan sistem peringatan dini yang berbasis masyarakat adalah untuk memberdayakan individu dan masyarakat

yang terancam bahaya untuk bertindak dalam waktu yang cukup dan dengan cara-cara yang tepat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korban luka, hilangnya jiwa, serta rusaknya harta benda dan lingkungan. Sistem peringatan dini yang lengkap dan efektif terdiri atas empat unsur yang saling terkait, mulai dari pengetahuan tentang bahaya dan kerentanan, hingga kesiapan dan kemampuan untuk menanggulangi). Pengalaman baik dari sistem peringatan dini juga memiliki hubungan antar-ikatan yang kuat dan saluran komunikasi yang efektif di antara semua elemen tersebut. Keempat elemen tersebut adalah pengetahuan tentang risiko, pemantauan dan layanan peringatan dan penyebarluasan.

b. Tujuan

Tujuh sub-sistem peringatan dini Untuk membangun sistem peringatan dini berbasis masyarakat maka dibutuhkan tujuh sub-sistem utama yang saling terintegrasi. Tujuh sub-sistem tersebut adalah sebagai berikut :

1) Sosialisasi

Sosialisasi merupakan kegiatan awal untuk menyampaikan maksud dan strategi kegiatan dan sekaligus menyerap aspirasi dan informasi dari masyarakat serta pemangku kepentingan di daerah rawan bencana. Seringkali kegiatan sosialisasi awal menjadi penentu keberhasilan program selanjutnya. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman masyarakat tentang bencana khususnya pergerakan tanah serta menyerap aspirasi dari masyarakat. Pemahaman ini meliputi pengertian gerakan tanah, tipe-tipe gerakan tanah, mekanisme kejadian gerakan tanah, faktor pengontrol dan pemicu gerakan tanah, tanda-tanda gerakan tanah dan mitigasi gerakan tanah baik secara struktural maupun non-struktural yang didalamnya termasuk sistem peringatan dini gerakan tanah serta level dan tanda-tanda peringatan. Sosialisasi ini bisa dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan

semua masyarakat. Hasil yang diharapkan dari sosialisasi adalah masyarakat paham tentang bencana longsor baik mekanisme, tanda-tanda dan cara meminimalkan risikonya terutama dengan sistem peringatan dini yang akan dipasang. Selain itu untuk mengidentifikasi orang-orang yang mempunyai komitmen kuat sebagai tim siaga bencana tingkat desa/dusun.

2) Penilaian risiko

Kegiatan penilaian risiko dapat dilakukan dengan cara survei teknis (geomorfologi, geologi, dan geoteknik), kelembagaan, serta sosial-budaya-ekonomi masyarakat. Survei geologi dilakukan untuk mengetahui kondisi geologi daerah rentan gerakan tanah, terutama dalam mengetahui zona rentan bergerak dan zona stabil serta arah dari pergerakan tanah bila terjadi. Survei ini juga untuk mengetahui tanda-tanda pergerakan tanah seperti retakan/amblesan, munculnya mata air, retaknya bangunan struktur dan miringnya pohon/tiang yang akan membantu untuk informasi penempatan alat deteksi dini gerakan tanah. Pada survey geologi dilakukan pengumpulan data terkait jenis maupun persebaran litologi dan tanah penyusun lereng, jenis, persebaran maupun orientasi struktur geologi ataupun retakan terhadap lereng, serta besar kemiringan lereng.

Survei kelembagaan dilakukan guna mengetahui ada atau tidaknya suatu lembaga yang berperan dalam pemantauan dan penanggulangan bencana gerakan tanah pada daerah rawan gerakan tanah. Survei sosial-ekonomi-budaya dilakukan guna mengetahui kondisi masyarakat dari segi pendidikan, finansial, dan budaya, sehingga mempermudah dalam mengenalkan sistem peringatan dini sesuai dengan budaya setempat. Selain itu juga untuk mengetahui potensi jiwa ataupun infrakstruktur yang terancam bila terjadi bencana tanah longsor, sehingga bisa diketahui tingkat kerawanan daerah tersebut. Survei sosial perlu dilakukan untuk mengetahui pemahaman masyarakat akan

kerawanan gerakan tanah. Hal ini akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap risiko bencana gerakan tanah dan teknologi pengurangan risiko bencana gerakan tanah. Motivasi dan keinginan untuk berpartisipasi secara aktif sangat penting untuk mengatur strategi program pengurangan bencana yang cocok dengan kondisi sosial yang ada. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, salah satu aksi pemberdayaan adalah edukasi dan pelatihan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kapasitas dan bekal pengetahuan bagi masyarakat untuk memutuskan apa yang harus dilakukan untuk mencegah dan melindungi diri dari gerakan tanah.

3) Pembentukan tim siaga bencana ditingkat desa/dusun

Tim siaga bencana di tingkat desa/dusun dibentuk berdasarkan rapat masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah desa/dusun. Penunjukan tim ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota terkait dalam upaya kesiapsiagaan, pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pasca bencana gerakan tanah. Pada umumnya, tim siaga terdiri dari ketua dan wakil ketua, penasehat, bidang data dan informasi alat deteksi dini, bidang mobilisasi pengungsi, bidang P3K, bidang logistik dan bidang keamanan. Namun demikian, bidang-bidang tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi suatu daerah. Tim siaga bencana bertugas untuk melakukan seluruh kegiatan kesiapsiagaan, termasuk menggerakkan masyarakat sebagai pendukung sistem teknis secara efektif. Selain itu juga untuk membuat peta kerentanan gerakan tanah yang disertai dengan jalur evakuasi dan titik kumpul yang dibimbing oleh petugas dari BPBD atau ahli terkait serta menggerakkan masyarakat untuk evakuasi bila sebelum terjadi bencana longsor.

4) Pembuatan peta dan rute evakuasi

Peta kerentanan gerakan tanah dan jalur evakuasi harus memberikan informasi mengenai zona yang aman dan zona yang

tidak aman terhadap ancaman gerakan tanah serta jalur evakuasi yang aman bagi warga yang melakukan evakuasi dan lokasi daerah aman (titik kumpul). Peta ini dibuat oleh tim siaga bencana desa/dusun dengan masyarakat didampingi oleh ahli setelah mereka mendapatkan sosialisasi. Peta ini berperan sebagai panduan bagi tim siaga bencana, masyarakat maupun pemangku kepentingan untuk berkumpul di titik kumpul yang aman dan melakukan evakuasi dengan mengikuti jalur yang telah ditentukan. Peta harus memberikan informasi:

- Zona daerah rentan gerakan tanah dan daerah aman;
- Rumah warga, yang dicantumkan nomor pemilik rumah;
- Laporan Akhir Kegiatan Pemasangan Alat Sistem Peringatan Dini (EWS) tanah Longsor TA 2020
- Fasilitas penting, seperti sekolah, masjid, puskesmas, kantor desa ataupun petunjuk penting (landmark);
- Jalan maupun gang;
- Titik pemasangan alat deteksi dini;
- Pos siaga;
- Jalur evakuasi;
- Titik kumpul; dan
- Tempat pengungsian akhir (TPA).

5) Penyusunan prosedur tetap (Protap) evakuasi

Prosedur tetap (protap) berperan sebagai panduan bagi tim siaga untuk mengarahkan masyarakat/warganya dalam menghadapi setiap level ancaman bencana gerakan tanah yaitu Waspada (Level 1) – Siaga (Level 2) – Awas (Level 3). Prosedur tetap mencakup tugas dan posisi masing-masing bidang, siapa melakukan apa-dimana-bagaimana, letak pos siaga, TPS, TPA, dan jalur evakuasi. Prosedur tetap disusun berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan setiap bidang di bawah arahan pemangku kepentingan terkait.

6) Pemantauan, peringatan dini, dan geladi evakuasi

Pemasangan alat deteksi dini gerakan tanah ditempatkan pada daerah yang memiliki risiko paling tinggi dan mempunyai dampak jiwa terpapar paling besar. Penentuan lokasi ini di dasarkan atas identifikasi zona risiko gerakan tanah yang dilakukan oleh tim siaga bencana dengan bimbingan dari ahli terkait. Pemasangan alat dilakukan bersama dengan masyarakat, karena alat tersebut akan dipasang di sekitar tempat tinggal masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Diharapkan dengan melakukan pemasangan alat bersama masyarakat dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggungjawab terhadap kondisi alat hingga menjamin keamanannya. Pemasangan jenis alat deteksi dini dan tingkat/level bahaya harus tepat sesuai dengan kondisi geologi dan luasan wilayahnya. Setelah alat terpasang, tim siaga bencana terbentuk, peta evakuasi tersedia, dan ada prosedur tetap maka dilakukan gladi evakuasi untuk memastikan fungsi alat dan respon masyarakat bila terjadi peringatan dini sesuai dengan prosedur tetap yang ada. Gladi evakuasi dilakukan berdasarkan skenario yang disusun mengikuti prosedur tetap. Gladi evakuasi dilakukan guna melatih kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan tanggungjawab tim siaga bencana apabila masing-masing alat deteksi dini gerakan tanah menunjukkan indikasi pergerakan yang memicu gerakan tanah. Selain itu, gladi evakuasi juga dilakukan guna mengenalkan dan mengakrabkan masyarakat setempat dengan bunyi sirine dari masing-masing alat deteksi dini, serta melatih masyarakat dalam melakukan evakuasi. Gladi evakuasi ini wajib dilakukan minimal satu kali dalam setahun di akhir musim kemarau.

7) Membangun komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengoperasian dan pemeliharaan keseluruhan sistem.

Komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem peringatan dini perlu

untuk dibangun, guna memastikan seluruh tahapan kegiatan yang tercantum dalam prosedur tetap dapat berjalan dengan baik.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 3 – 13 Desember 2020 dengan melaksanakan Survey geologi yang menghasilkan bahwa daerah terdampak yang memiliki kerentanan paling tinggi berada di Dsn. Plakar dan Dsn. Kemambang Kec. Banyubiru Kab. Semarang.

Alat yang dipasang berupa alat *Ekstensometer* 2 Buah dan *Rain gauge* 1 Buah dari pihak Gama Multi Usaha Mandiri Yogyakarta, Universitas Gajah Mada Yogyakarta sebagai penyedia dan diaplikasikan di daerah risiko tinggi bencana tanah longsor di Kab. Semarang (Dsn. Plakar dan Dsn. Kemambang Kec. Banyubiru). Selama kegiatan pemasangan EWS ini, masyarakat yang terlibat sekitar 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari masyarakat sekitar, perangkat desa (kepala desa, kepala dusun, ketua RT dan ketua RW, dan para pemuda). Sebagai gambaran, berikut jadwal pelaksanaan pemasangan EWS tanah longsor:

Tabel 34
Kegiatan Pemasangan EWS Tanah Longsor

No.	Kegiatan	Hasil
1	Kajian dan pemetaan daerah rawan longsor	Daerah terdampak longsor dengan resiko ancaman tinggi berada di Dsn Plakar, Desa Kemambang, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang
2	Koordinasi	1. Koordinasi dilakukan oleh BPBD Prov Jateng di Pemerintah desa Kec. Kemambang didampingi oleh BPBD Kab. Semarang. 2. Koordinasi kepada pihak Gama Multi Usaha Mandiri Yogyakarta sebagai penyedia Alat Sistem Peringatan Dini (EWS) tanah longsor.
3	Pelaksanaan Pemasangan	3. Pemasangan dilaksanakan pada tanggal 3 – 13 Desember 2020 4. Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:

No.	Kegiatan	Hasil
		a. Survey geologi: dihasilkan bahwa daerah terdampak yang memiliki kerentanan paling tinggi beradad di Dsn Plakar dan Dsn. Kemambang b. Pembentukan TSG: Tim Siaga Bencana dibentuk sebagai bentuk kelompok yang berada terdepan dalam penyelamatan, pelaporan dan penolongan jika terjadi longsor c. Pembentukan Protap: Protap penyelamatan dan evakuasi berada dalam tahap Normal, Waspada, Awas d. Pembentukan Peta: Tim TSG desa juga dilatih membentuk peta kerentanaan wilayah, hasilnya akan dipedomani masyarakat untuk dijadikan acuan wilayah mana yang memiliki risiko ancaman tinggi e. Gladi evakuasi : bertujuan untuk melatih kesiapsiagaan masyrakat dan sebagai peningkatan kapasitas terkait penanganan dan pemahaman bencana f. Pemasangan Alat : Pemasangan Alat dilaksanakan di Dsn. Plakar dan Dsn. Kemambang, berupa alat Ekstensometer 2 Buah dan Raingauge 1 Buah g. Lembar Komitmen: lembar komitmen bertujuan sebagai komitmen antara pemerintah desa dengan pihak Gamamulti untuk melaksanakan seluruh protap penanganan kebencanaan dan pemeliharaan alat EWS tersebut.

d. Hasil

- 1) Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana longsor mampu memahami kegunaan dan fungsi peralatan dan sistem peringatan dini yang dipasang di daerah tersebut;
- 2) Meningkatnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana longsor saat bencana datang, sehingga mereka dapat segera mengevakuasi secara mandiri sesuai dengan arah jalur evakuasi ke tempat aman (zona hijau);
- 3) Terwujudnya peningkatan kapasitas masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana longsor untuk mengurangi ancaman dan kerentanan bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana sehingga masyarakat memahami dan mengerti apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana longsor

e. Foto dokumentasi



Gambar 9 Pemasangan Alat Sistem Peringatan Dini (EWS) tanah Longsor

2. Gladi Lapang PB Erupsi Gunung Merapi dan Tsunami

a. Latar Belakang

Salah satu tanggung jawab bidang penanggulangan bencana yang harus dilaksanakan saat kesiapsiagaan adalah Penyelenggaraan Simulasi Kesiapsiagaan. Salah satu simulasi tersebut adalah Uji Lapang. Uji Lapang adalah sebuah kegiatan untuk menguji rencana kontinjensi melalui proses “P Planing” (perencanaan) untuk menjadi sebuah rencana operasi (latihan). Rencana Operasi (latihan) menjelaskan dengan detail posisi para pelaku saat penanggulangan bencana dan kemudian menguji tugas dan fungsi

pelaku tersebut baik koordinasi, pelayanan, dan mobilisasi sumber daya saat kejadian darurat bencana. Uji lapang dilakukan agar para pelaku penanggulangan bencana dapat mengetahui proses dokumen Rencana Kotinjensi menjadi dasar sebuah Rencana Operasi (latihan) melalui proses “P (Planing) (perencanaan tanggap darurat) dan mengetahui kekurangan apa yang ada “seandainya” terjadi kondisi bencana yang mengharuskan tanggap

darurat di daerah tersebut. Pelaksanaan uji lapang harus dapat

direncanakan, disiapkan, dilaksanakan, diawasi dan dikendalikan sertadievaluasi secara terukur. Uji Lapang merupakan salah satu metode latihan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur pelaku sesuai dengan bidang tugasnya dalam SKPDB (Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana) sesuai Perka BNPB No. 3/2016, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan di lapangan. Uji lapang juga sebagai metode untuk menguji PROTAP/SOP dalam tanggap darurat yang telah disepakati, serta koordinasi lintas instansi yang dilaksanakan di daerah

bencana yang diskenariokan mendekati situasi dan kondisi sebenarnya.

b. Tujuan

Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan teknis serta koordinasi dan komando yang lebih baik bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov/Kab/Kota khususnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana yang akan terjadi.

c. Sasaran

Sasaran yang ingin dari Kegiatan Gladi Lapang PB Erupsi Gunung Merapi ini adalah meningkatnya pemahaman tentang Gladi Lapang/Simulasi bencana sebagai bagian pengurangan risiko yang meliputi Kab. Boyolali, Magelang, Wonogiri dan Klaten.

d. Pelaksanaan

1) Penyusunan Rencana Informasi Gladi (RIG) dan Rencana Operasional Gladi (ROG) Gunung Merapi dan Tsunami

Gladi Lapang merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana, yang bertujuan untuk (1) mencegah kehilangan jiwa; (2) memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai risiko, serta (3) Melihat kesiapsiagaan dan respon masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dalam antisipasi saat terjadi bencana. Sebagai bagian dari gladi lapang perlunya penyusunan Rencana Operasional Gladi dan Rencana Informasi Gladi, guna menentukan arah kebijakan dan koordinasi sektoral pada saat terjadi bencana. Secara umum kegiatan kegiatan Penyusunan Rencana informasi Gladi dan Rencana Operasional Gladi bertujuan untuk:

- a) Proses penyusunan skenario uji lapang difasilitasi oleh Tim Substantif dan Tim Perancang dan Pengendali Uji Lapang
- b) Pada tahap ini mulai melibatkan BPBD provinsi dari bidang kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta bidang logistic peralatan dalam persiapan uji lapang ini hingga evaluasi kegiatan (5 orang)
- c) Penyiapan denah lokasi uji lapang
- d) Penyiapan peralatan, perlengkapan, sarana, prasarana
- e) Penyiapan pelaku sesuai skenario dan SKPDB sesuai Perka BNPB No. 3/2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

Pelaksanaan Penyusunan Rencana Operasional Gladi (ROG) dan Penyusunan Rencana Informasi (RIG) dilaksanakan di 3 kabupaten sebagai berikut :

- a) Kabupaten Magelang

Kegiatan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 25 Oktober 2019
 Pukul : 09.00 s/d selesai
 Tempat : Hall Pertemuan Hotel Atria Magelang
 Peserta : 50 Orang dari terdiri unsur SKPD Kabupaten dan Kecamatan/Desa, Tokoh Masyarakat, Aparat TNI /POLRI, PMI, Orari, Dinas Kesehatan, Kepala Desa Deyangan, BPBD Kab. Magelang, Relawan

Materi dan Narasumber

Materi dan Narasumber dalam kegiatan ini adalah :

No	Narasumber	Judul Materi
1	Sekda Kabupaten Boyolali Drs. Masruri	Ancaman Letusan Gunung Berapi di Indonesia
2	Kalaksa BPBD Kab. Boyolali Drs. Bambang Sinungharjo	Antisipasi Letusan Gunung Merapi

b) Kabupaten Boyolali

Kegiatan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 2 Juli 2019
Pukul : 09.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Muria, d'Emmerick Salibputih Hotel
Peserta : 50 Orang dari terdiri unsur SKPD Kabupaten dan Kecamatan/Desa, Tokoh Masyarakat, Aparat TNI/POLRI, PMI, Orari, Dinas Kesehatan, Kepala Desa Deyangan, BPBD Kab. Boyolali, Relawan

Materi dan Narasumber

Materi dan Narasumber dalam kegiatan ini adalah :

No	Narasumber	Judul Materi
1	BPPTKG Yogyakarta Hanik Humaida	Kesiapan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kab.7 Laporan Akhir Kegiatan Gladi Lapang PB Erupsi Gunung Merapi dan Tsunami Boyolali
2	Kalaksa BPBD Kab. Magelang Drs. Edy Susanto	Ancaman Letusan Gunung Merapi di Kab. Boyolali

c) Kabupaten Klaten

Kegiatan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 2 Juli 2019
Pukul : 09.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Muria, d'Emmerick Salibputih Hotel
Peserta : 50 Orang dari terdiri unsur SKPD Kabupaten dan Kecamatan/Desa, Tokoh Masyarakat, Aparat TNI/POLRI, PMI, Orari, Dinas Kesehatan, Kepala Desa Deyangan, BPBD Kab. Boyolali, Relawan

Materi dan Narasumber

Materi dan Narasumber dalam kegiatan ini adalah :

No	Narasumber	Judul Materi
1	Sekda Kab. Klaten Drs. Jaka Wangaldi, M.Si	Kesiapan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kab. Klaten
2	Kalaksa BPBD Kab. Magelang Drs. Doddy Hermanu	Ancaman Letusan Gunung Merapi di Kab. Klaten

d) Kabupaten Wonogiri

Kegiatan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 15 April 2019
Pukul : 09.00 s/d selesai
Tempat : Gedung Pertemuan BPBD Kab.
Wonogiri
Peserta : 50 Orang dari terdiri unsur SKPD
Kabupaten dan Kecamatan/Desa,
Tokoh Masyarakat, Aparat TNI /POLRI,
PMI, Orari, Rapi, Dinas Kesehatan,
Kepala Desa Deyangan, BPBD Kab.
Wonogiri, Relawan

Materi dan Narasumber

Materi dan Narasumber dalam kegiatan ini adalah :

No	Narasumber	Judul Materi
1	BMKG Kelas IIIa Banjarnegara Setyoajie	Analisa dan Proyeksi Cuaca di dalam potensi bencana Jawa Tengah
2	Kalaksa BPBD Kab. Drs. Bambang Haryanto, M.Si	Antisipasi Ancaman Tsunami di Kabupaten Wonogiri

**2) Pelaksanaan Gladi Lapang PB Erupsi Gunung Merapi
Dan Tsunami**

a) Kabupaten Wonogiri

Kegiatan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 28 April 2019
Pukul : 08.00 s/d selesai
Tempat : Pantai Nampu Desa Gunturharjo Kec.
Paranggupito Kab. wonogiri

Peserta : 210 Peserta terdiri dari, Dinas Sosial Prov Jateng, PMI Jateng, Dinas Kesehatan Prov Jateng, Dinas BPBD Kab. Wonogiri, Orari, Rapi, TNI, Polres, LPBNU, MDMC, Masyarakat desa Gunturharjo

Materi dan Narasumber

Materi dan Narasumber dalam kegiatan ini adalah :

No	Narasumber	Judul Materi
1	Sekda Kab. Wonogiri Suharno, SH., M.Si	(Pengarahan Apel Siaga) Penignkatan Kapasitas Menghadapi Bencana Tsunami Kab. Wonogiri
2	Kalaksa BPBD Kab. Wonogiri Drs. Bambang Haryanto, M.Si	Ancaman Bencana Tsunami Kab. Wonogiri

Skenario :

Gempa terjadi di Kabupaten Wonogiri pada hari Minggu pada tanggal 28 April 2019 di Kabupaten Wonogiri, BMKG merilis Magnitudo gempa sebesar 8 SR di kedalam 10 Km dari pusat gempa. Peringatan Tsunami pun dikeluarkan oleh BMKG. Pada kejadian yang sama di Desa Gunturharjo Kec. Paranggupito terjadi keadaan panik dari para pengunjung maupun para warga di pantai nampu setelah mengetahui akan ada ancaman Tsunami dari para warga. terjadi beberapa korban yang mengalami reruntuhan maupun tumpah tindih dari pengunjung lain. Penyelamatan pertama dilakukan oleh tim FPRB desa gunturharjo adalah mengevakuasi korban menuju titik aman (Lapangan) , diwaktu yang sama air laut surut dan terlihat gelombang ombak yang akan menghantam pantai. OPD dan dinas terkait langsung menuju lokasi dengan estimasi waktu selama 1 jam dari kota wonogiri menuju lokasi desa gunturharjo. FPRB

desa dengan didampingi perangkat desa dan Polisi melakukan koordinasi cepat dengan OPD terkait serta melakukan evakuasi cepat kepada korban. Selang beberapa waktu bantuan medis serta tanggap darurat dinyatakan oleh Bupati Wonogiri untuk bencana Tsunami Wonogiri. BPBD berkoordinasi dengan dinas lain segera membentuk pengungsian bagi warga dan penyaluran bantuan habis pakai bagi para warga.

b) Kabupaten Klaten

Kegiatan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 23 April 2019
 Pukul : 08.00 s/d selesai
 Tempat : Shelter TEA Kebondalem Lor
 Kecamatan
 Prambanan Kabupaten Klaten
 Peserta : 210 Peserta terdiri dari, Dinas Sosial
 Prov Jateng, PMI Jateng, Dinas
 Kesehatan Prov Jateng, Dinas
 Laporan Akhir Kegiatan Gladi Lapang
 PB Erupsi Gunung Merapi dan
 Tsunami BPBD Kab. Wonogiri, Orari,
 Rapi, TNI, Polres, LPBNU, MDMC,
 Masyarakat Desa Manisrenggo

Materi dan Narasumber

Materi dan Narasumber dalam kegiatan ini adalah :

No	Narasumber	Judul Materi
1	Sekda Kab. Klaten Drs. Jaka Wangaldi	(Pengarahan Apel Siaga) Peningkatan Kapasitas Menghadapi Bencana Gunung Merapi di Kab. Klaten
2	Kalaksa BPBD Kab. Klaten Drs. Doddy Hermanu	Ancaman Letusan Gunung Merapi di Kab. Klaten

Skenario:

Status Siaga Gunung Merapi dikeluarkan oleh BPPTKG pada tanggal 23 April 2019 pukul 04.00, yang menandakan aktivitas Gunung Merapi muncul aktivitas

Seismik, dan Vulkanik. BPBD Kabupaten Klaten berkoordinasi dengan Posko induk balerante, kepala desa, serta aparat pengamanan TNI maupun Polres untuk segera mengkondisikan warga agar mengungsi dan menjauhi KRB I dan II gunung Merapi. Pada pukul 08.00 BPPTKG merilis perubahan status merapi ke Awas yang menandakan Gunung dalam keadaan kritis dan siap meletus. Aktivitas kawah menjadi tinggi diiringi dengan hujan abu. Bupati Klaten sebagai Incident Commander mengambil langkah sigap menyatakan Status tanggap darurat merapi. OPD dan dinas terkait segera mengambillangkah cepat untuk melakukan evakuasi kepada para korban khususnya di desa balerante. BPBD, dinas kesehatan dan OPD terkait segera melakukan evakuasi ke titik aman ke Shelter Tea Kebondalem Lor Kec. Prambanan untuk para pengungsi, sampai menunggu status aman Gunung Merapi.

c) Kabupaten Boyolali

Kegiatan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juli 2019
Pukul : 08.00 s/d selesai
Tempat : Desa Tlogolele Kec. Selo Kab. Boyolali
Peserta : 10 Peserta terdiri dari, Dinas Sosial Prov Jateng, PMI Jateng, Dinas Kesehatan Prov Jateng, Dinas BPBD Kab. Boyolali, Orari, Rapi, TNI, Polres, LPBNU, MDMC, Masyarakat Desa Tlogolele

Materi dan Narasumber

Materi dan Narasumber dalam kegiatan ini adalah :

No	Narasumber	Judul Materi
1	Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Boyolali	(Pengarahan Apel Siaga) Peningkatan Kapasitas Menghadapi Bencana Gunung Merapi di Kab. Boyolali

No	Narasumber	Judul Materi
2	Kalaksa BPBD Kab. Boyolali Drs. Bambang Sinungharjo, M.Si	Kesiapsiagaan Menghadapi letusan Gunug Merapi dan arahan uji renkon gunung merapi

Skenario:

Status Siaga Gunung Merapi dikeluarkan oleh BPPTKG pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 06.00, yang menandakan aktivitas Gunung Merapi muncul aktivitas Seismik, dan Vulkanik. BPBD Kabupaten Boyolali berkoordinasi dengan Pos Pengamatan Jarak kepala desa, serta aparat pengamanan TNI maupun Polres untuk segera mengkondisikan warga agar mengungsi dan menjauhi KRB I dan II gunung Merapi. Pada pukul 10.00 BPPTKG merilis perubahan status merapi ke Awas yang menandakan Gunung dalam keadaan kritis dan siap meletus. Aktivitas kawah menjadi tinggi diiringi dengan hujan abu. Bupati Boyolali sebagai Incident Commander mengambil langkah sigap menyatakan Status tanggap darurat merapi. OPD dan dinas terkait segera mengambil langkah cepat untuk melakukan evakuasi kepada para korban khususnya di desa Tlogolele untuk ditempatkan di desa Sawangan sebagai desa sister village sebagai desa aman dari letusan gunung merapi. Berikut juga OPD terkait dan BPBD telah membentuk dapur umum dan tenda darurat untuk para pengungsi.

d) Kabupaten Magelang

Kegiatan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 30 Oktober 2019
Pukul : 08.00 s/d selesai
Tempat : Desa Deyangan Kec. Mertoyudan
Kab. Magelang

Peserta : 300 Peserta terdiri dari, Dinas Sosial Prov Jateng, PMI Jateng, Dinas Kesehatan Prov Jateng, Dinas BPBD Kab. Magelang, Orari, Rapi, TNI, Polres, LPBNU, MDMC, Masyarakat Desa Krinjing, Relawan FPRB Desa Krinjing

Materi dan Narasumber

Materi dan Narasumber dalam kegiatan ini adalah :

No	Narasumber	Judul Materi
1	Kalaksa BPBD Kabupaten Magelang	(Pengarahan Apel Siaga) Uji Lapang Gunung Merapi di Kabupaten Magelang

Skenario:

Pada pukul 08.00 tanggal 10 juli 2019 BPPTKG merilis aktivitas Siaga gunung merapi yang sebelumnya berstatus waspada level II. Yang menandakan morvologi kubah telah berubah dan adanya pergerakan sesimik maupun vulkanik dari gunung merapi. BPBD segera berkoordinasi dengan BPPTKG dan Pos Pengamatan Desa Krinjing kec. Dukun Kab. Magelang. Pada status ini KRB I dan II segera diungsikan dan OPD terkait Kabupaten magelang segera melakukan koordinasi untuk melaukan evakuasi warga. Pada pukul 10.00 BPPTKG kembali merilis status merapi menjadi Awas. Sehingga Gunung merapi siap dalam kondisi meletus. Evakuasi warga pun dilakukan dengan tim FPRB, BPBD, Dinas terkait dan pengamanan oleh TNI, Polres Kab. Boyolali. Evauasi warga dilakukan ke desa deyanan sebagai desa penyangga/Sister village sebagai tempat evakuasi akhir dari ancaman letusan gunung merapi.

e. Hasil

Capaian Kegiatan Gladi Lapang Tsunami dan Merapi adalah meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan

pengurangan di 4 (Empat) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan aparat dalam rangka pencegahan dan pengurangan resiko bencana serta terkoordinasinya mekanisme sistem komando dan pengendalian tanggap darurat penanggulangan bencana risiko bencana di Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Kegiatan Gladi Lapang Bencana Tsunami dan Merapi dengan peserta sebanyak 300 peserta yang terdiri dari unsur masyarakat, aparat desa/kecamatan, TNI/Polri dan organisasi kemasyarakatan. Pada Kegiatan Gladi ini dilaksanakan Gladi ini terkait dengan draft rencana kontijensi bencana Merapi di Kab. Klaten, Boyolali, Magelang dan Renkon Tsunami Wonogiri yang sudah disusun sebelumnya. Draft Rencana Kontijensi ini disetujui dan ditandatangani serta menjadi komitmen bersama dan dilegiasi dengan Peraturan Bupati. Rencana kontijensi ini dibuat sebagai acuan kebijakan dan strategi serta landasan operasional bagi semua dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana khususnya bencana Merapi Kab. Boyolali, Klaten, Magelang dan Tsunami Wonogiri sebagai. Proyeksi kebutuhan yang masih belum bisa tersedia kiranya dapat dipenuhi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

f. Dokumentasi



Gambar 10 Gladi Lapang PB Erupsi Gunung Merapi dan

3. Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Di Jawa Tengah

a. Latar Belakang

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahNya Kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah telah terselenggara. Tantangan terbesar untuk membangun provinsi/ kabupaten/kota yang tangguh adalah mengurangi risiko bencana dari kejadian ekstrim terkait iklim dan ancaman-ancaman hidro-meteorologis serta respon cepat dari seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana. Perubahan iklim merupakan permasalahan global yang berimplikasi besar pada lingkungan hidup, sosial, ekonomi, politik dan menimbulkan bencana. Strategi tepat, terpadu dan terencana dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat diperlukan bila ingin membuat pembangunan menjadi berkelanjutan/tangguh terhadap bencana. Gubernur Jawa Tengah sejak Tahun 2015 telah melakukan berbagai upaya membangun Provinsi/Kabupaten/Kota Tangguh Bencana dan menggalakkan Budaya dan Gerakan Pengurangan Risiko Bencana atau Ketangguhan terhadap Bencana berbasis komunitas/masyarakat di Jawa Tengah. Ketangguhan akan tercapai dengan dukungan, komitmen dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan serta Kesiapan dan kecepatan dalam penanganan bencana oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta kemampuan para relawan yang terampil menjadi tolok ukur ketangguhan dalam penanggulangan bencana.

b. Tujuan

- 1) Membangun koordinasi antara Provinsi/Kabupaten/Kota dengan pelibatan pemangku kepentingan dalam PRB melalui pengarustamaan PRB dalam RPJMD;

- 2) Meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan aparaturnya pemerintah daerah menuju Provinsi/Kabupaten/Kota Tangguh Bencana;
- 3) Upaya menggalakkan Gerakan Pengurangan Risiko Bencana atau Ketangguhan terhadap Bencana berbasis komunitas/masyarakat di Jawa Tengah;
- 4) Koordinasi lintas sector antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mencapai pengurangan risiko bencana di Jawa Tengah;
- 5) Terselenggaranya dukungan, komitmen dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam PRB seluruh pemerintah di Jawa Tengah;
- 6) Terwujudnya kesiapan dan kecepatan Pemangku kepentingan dalam penanganan bencana oleh seluruh aparaturnya pemerintah daerah;
- 7) Percepatan Informasi mengenai kebencanaan sesuai dengan arahan Bapak gubernur tentang penanggulangan kebencanaan dan pengurangan risiko bencana.

c. Pelaksanaan

Laporan Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Jawa Tengah sebagai berikut :

1) Kegiatan dilaksanakan pada

Hari/Tanggal : Kamis - Jumat, 14-15 November 2019
 Pukul : 09.00 s/d selesai
 Tempat : Hall Pertemuan Hotel Syariah Solo
 Peserta : 280 Peserta terdiri dari unsur Kodam SeJateng, Polres se Jateng, BPBD Kab se Jateng, Dinkes Jateng, PU Bina Marga & Cipta Karya, BBWS, RSUD – RSJD Prov Jateng, DLHK, Dinsos, PMI, Baznas, MDMC, Lazis

2) Materi dan Narasumber dalam kegiatan ini adalah :

Direktorat Kesiapsiagaan : Sosialisasi Penyusunan
 BNPB (Ir. Medi Harlianto, RPKB dan Rencana
 C E S,MM) Kontingensi

BMKG	: Prakiraan Cuaca di Wilayah Jawa Tengah
BPPTKG (Ir. Hanik Humaida, MM)	: Karakteristik dan Perkembangan Aktivitas Gunung Api di Jawa Tengah
Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Lilik Kurniawan, S.T., M.Si)	: Kesiapsiagaan dalam menghadapi Banjir Longsor
PVMBG	: Potensi Gempa dan Gerakan Tanah di Jawa Tengah
Dirjen Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKL) Kementerian LHK Letjend. TNI Doni Monardo	: Kebijakan Pelestarian Hutan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan
Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin	: Sambutan dan Pembukaan

d. Hasil

- 1) Tantangan terbesar untuk membangun Provinsi/ kabupaten/ kota yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim adalah mengurangi risiko bencana dan kejadian ekstrim terkait iklim. Membangun Jawa Tengah yang tangguh terhadap bencana, jelas membutuhkan seperangkat strategi yang tepat bila ingin membuat pembangunan menjadi aman, produktif dan berkelanjutan melalui Gerakan Pengurangan Risiko Bencana atau Ketangguhan terhadap Bencana berbasis komunitas/ masyarakat. Kesiapan dan kecepatan dalam penanganan bencana oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta kemampuan para relawan yang terampil menjadi tolok ukur ketangguhan dalam penanggulangan bencana;

- 2) Peserta koordinasi diharapkan dapat menyampaikan kepada masyarakat di lingkungan kerja dan lingkungan rumahnya tentang upaya pengurangan risiko bencana;
- 3) Diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggalakkan dan melakukan peningkatan Gerakan Pengurangan Risiko Bencana atau Ketangguhan terhadap Bencana berbasis komunitas/masyarakat di Jawa Tengah;
- 4) Agar dukungan, komitmen dan partisipasi Kepala Daerah dalam PRB makin lebih ditingkatkan dengan mengalokasikan anggaran yang besar untuk berbagai kegiatan atau gerakan Pengurangan Risiko Bencana atau Ketangguhan terhadap Bencana berbasis komunitas/masyarakat;

e. Foto dokumentasi



Gambar 11 Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Di Jawa Tengah

4. Rencana Kontigensi (RENKON) Gunung Api Dieng Gas Beracun

a. Latar Belakang

Kabupaten Banjarengara, Batang dan Wonsobo merupakan sebagian daerah yang memliki topologi daerah yang masuk dalam kawasan gunung aktif vulkanik yakni dataran tinggi Dieng. Yang mana daerah di kawasan banjarnegara terbagi atas daerah Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo terbagi atas daerah Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo dan terakhir Batang yakni desa pranten kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Kejadian meletusnya kawah sikunir pada tahun 2018 menandakan kawasan gas beracun dieng masih harus menjadi prioritas utama daerah rawan bencana. Pasalnya total 11 orang meninggal dunia di daerah Desa Kepakisan Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. Untuk menghadapi ancaman gas beracun gunung api dieng, maka pemerintah Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Batang melalui BPBD Provinsi jawa tengah menyusun dokumen rencana kontigensi. Dokumen rencana kontigensi ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman pemerintah Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara dan Batang dan para pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan kegiatan saat pra bencana maupun tanggap darurat. Dokumen rencana kontigensi ini memuat kebijakan dan strategi serta langkah-langah operasional dalam menghadapi sistuasi darurat bagi para pemangku kepentingan. Dengan demikian pada saat situasi darurat, para pemangku kepentingan yang ada di kabupupaten dapat mengetahui peran, tugas dan fungsi mereka masing-masing dalam melakukan tanggap darurat sehingga penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat akan lebih terpadu dan terkoodinir dengan baik serta mampu memberikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk yang terdampak sebagi perwujudan dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam

memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat dari bencana.

b. Tujuan

- 1) Membuat dokumen rencana kontigensi (RENKON) Gas Beracun Gunung Api Dieng di Kabupaten Wonosobo, Batang, Banjarnegara untuk membantu para pemangku kepentingan/stackholder dalam pengambilan suatu kebijakan dan keputusan dalam Rencana Opreasional (RENOPS) Tanggap Darurat.
- 2) Karena risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, kehilangan harta dan aspek sosial masyarakat. Maka perlu disusun sebuah dokumen dalam perencanaan kontigensi Gas Beracun Gunung Api Dieng

c. Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Renkon Di Kabupaten Wonosobo

Kegiatan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 25 Oktober 2019
Pukul : 09.00 s/d selesai
Tempat : Hall Pertemuan Hotel Atria Magelang
Peserta : 50 Orang dari terdiri unsur SKPD Kabupaten dan Kecamatan/Desa, Tokoh Masyarakat, Aparat TNI 4Laporan Akhir Kegiatan Rencana Kontigensi (RENKON) Gunung Api Dieng Gas Beracun Tahun 2019/POLRI, PMI, Orari, Dinas Kesehatan, Kepala Desa Kejajar, BPBD Kab. Wonsobo, Orari, Rapi

Materi dan Narasumber dalam kegiatan Penyusunan Rencana Kontigensi Sebagai Berikut:

PVMBG Bandung : Dampak Gempa Bumi dan
Drs. Mamay Setiawan, Potensi aktifitas Gunung Api
M.Si Dieng terhadap ancaman

bencana Gas Beracun di Kab. Wonosobo

Kalaksa BPBD Kabupaten Wonsobo Dr. Prayitno, S.Sos. M.Si : Kesiapan Pemerintah Kabupaten Wonsobo menghadapi ancaman bencana Gas Beracun Gunung Api Dieng

Fasilitator

Naibul Umam : Penentuan Kejadian dan Skenario, Penentuan Kebijakan dan Strategi

Mulyadi : Penentuan Sektor dan Rencana Tindak lanjut

Sultoni : Koordinator wilayah

2) Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Renkon Di Kabupaten Banjarnegara

Kegiatan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 15 Juli 2019

Pukul : 08.00 s/d selesai

Tempat : Hall Pertemuan Pikas Homestay Banjarnegara

Peserta : 50 Orang dari terdiri unsur SKPD Kabupaten dan Kecamatan/Desa, Tokoh Masyarakat, Aparat TNI /POLRI, PMI, Orari, Dinas Kesehatan, Kepala Desa Batur, BPBD Kab. Banjarnegara, Orari, Rapi

Materi dan Narasumber dalam kegiatan Penyusunan Rencana Kontigensi Sebagai Berikut:

PVMBG Bandung Surip : Dampak Gempa Bumi dan Potensi aktifitas Gunung Api Dieng terhadap ancaman bencana Gas Beracun di Kab. Banjarnegara

Kalaksa BPBD Kabupaten Banjarnegara Drs. Arif Rahman, M.Si : Kesiapan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menghadapi ancaman bencana Gas Beracun Gunung Api Dieng

Fasilitator

Naibul Umam : Penentuan Kejadian dan Skenario, Penentuan Kebijakan dan Strategi

Mulyadi : Penentuan Sektor dan Rencana Tindak lanjut
Sultoni : Koordinator wilayah

3) Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Renkon Di Kabupaten Batang

Kegiatan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu 17 Juli 2019
Pukul : 08.00 s/d selesai
Tempat : Hall Pertemuan Hotel Dewi Ratih Kab. Batang
Peserta : 50 Orang dari terdiri unsur SKPD Kabupaten dan Kecamatan/Desa, Tokoh Masyarakat, Aparat TNI /POLRI, PMI, Orari, Dinas Kesehatan, Kepala Desa Pranten, BPBD Kab. Batang, Orari, Rapi

Materi dan Narasumber dalam kegiatan Penyusunan Rencana Kontigensi Sebagai Berikut:

PVMBG Bandung : Dampak Gempa Bumi dan Surip Potensi aktifitas Gunung Api Dieng terhadap ancaman bencana Gas Beracun di Kab. Batang
Kalaksa BPBD Kabupaten : Kesiapan Pemerintah Kabupaten Batang menghadapi ancaman Banjarnegara bencana Gas Beracun Gunung Api Ulul Azmi Dieng

Fasilitator

Naibul Umam : Penentuan Kejadian dan Skenario, Penentuan Kebijakan dan Strategi
Mulyadi : Penentuan Sektor dan Rencana Tindak lanjut
Ulul Azmi : Koordinator wilayah

4) Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Renkon Dan TTX (Top Table Exercise) Gas Beracun Gunung Api Dieng

Kegiatan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu 24 Juli 2019
Pukul : 08.00 s/d selesai
Tempat : D'emmerick Salibputih Hotel

Peserta : 100 Peserta terdiri dari KODIM; POLRES; BPBD; DINAS SOSIAL; DINAS KESEHATAN; BAPPEDALITBANG; PMI; FORUM PRB; Dinas Kesehatan Prov, Dishub Prov Jateng, Bappeda Prov Jateng, TNI, POLRI, Kejaksaan

Materi dan Narasumber dalam kegiatan Rencat Koordinasi Persiapan Penyusunan Renkon dan TTX (Top Table Exercise) Gas Beracun gunung api dieng sebagai Berikut :

Deputi 1 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan : Dampak Gempa Bumi dan Potensi aktifitas Gunung Api Dieng terhadap ancaman bencana Gas Beracun di Kab. Batang

Kepala PVMBG Badan Geologi Drs, Mamay Setiawan, M.Si : Potensi dan Ancaman Gas Beracun dari Dampak Aktifitas Gunung Api Dieng

Fasilitator

Naibul Umam : Penentuan Kejadian dan Skenario, Penentuan Kebijakan dan Strategi

Mulyadi : Penentuan Sektor dan Rencana Tindak lanjut

Ulul Azmi : Koordinator Wilayah Kabupaten Batang

Sultoni : Koordinator Wilayah Kabupaten Wonsosobo

Edy Purwanto :

5) Pelaksanaan Penyusunan Renkon dan TTX Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu 5-6 Agustus 2019

Pukul : 08.00 s/d selesai

Tempat : D'emmerick Salibputih Hotel

Peserta : 100 Peserta terdiri dari KODIM; POLRES; BPBD; DINAS SOSIAL; DINAS KESEHATAN; BAPPEDALITBANG; PMI; FORUM PRB; Dinas Kesehatan Prov, Dishub Prov Jateng, Bappeda Prov Jateng, TNI, POLRI, Kejaksaan

Materi dan Narasumber dalam kegiatan Rencat Koordinasi Persiapan Penyusunan Renkon dan TTX (Top Table Exercise) Gas Beracun gunung api dieng Sebagai Berikut :

Direktur Topografi TNI AD (Letkol Ctp. Ir. Hasto Atmoko)	: Top Table Exercise dalam penyusunan Renkon
PVMBG (Dr. Mamay, Ph.D)	: Potensi Bahaya Gunung Api Dieng

Fasilitator

Naibul Umam	: Penentuan Kejadian dan Skenario, Penentuan Kebijakan dan Strategi
Mulyadi	: Penentuan Sektor dan Rencana Tindak lanjut
Ulul Azmi	: Koordinator Wilayah Kabupaten Batang
Sultoni	: Koordinator Wilayah Kabupaten Wonsosobo
Edy Purwanto	: Koordinator Wilayah Kabupaten Banjarnegara

6) Finalisasi Penyusunan Renkon Gas Beracun Gunung Api Dieng Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal	: Selasa-Rabu, 3-4 Desember 2019
Pukul	: 08.00 s/d selesai
Tempat	: Hotel Horison Pekalongan
Peserta	: 50 Peserta Polda Jateng; Kodam IV Diponegoro; Dinas Kesehatan Prov. Jateng; Dinas Sosial Prov. Jateng; Bappeda Prov. Jateng; Dinas Perhubungan Prov. Jateng; Ka. Disperakim Prov. Jateng; Ka. DLHK Prov. Jateng; Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Jateng; Disporapar Prov. Jateng; Diskominfo Prov. Jateng; Dinas ESDM Prov. Jateng; DPU Cipta Karya dan Bina Marga Prov. Jateng; Dinas PSDA Prov. Jateng; Dinas Pendidikan Prov. Jateng; PMI Jateng; FPRB Prov. Jateng; BPBD Kab. Banjarnegara, Wonosobo dan Batang

Materi dan Narasumber dalam kegiatan Rencat Koordinasi Persiapan Penyusunan Renkon dan TTX (Top Table Exercise) Gas Beracun gunung api dieng Sebagai Berikut :

Direktur Topografi TNI AD (Letkol Ctp. Ir. Hasto Atmoko)	: Top Table Exercise dalam penyusunan Renkon
PVMBG (Dr. Mamay, Ph.D)	: Potensi Bahaya Gunung Api Dieng

Fasilitator

Naibul Umam	: Penentuan Kejadian dan Skenario, Penentuan Kebijakan dan Strategi
Mulyadi	: Penentuan Sektor dan Rencana Tindak lanjut
Ulul Azmi	: Koordinator Wilayah Kabupaten Batang
Sultoni	: Koordinator Wilayah Kabupaten Wonsosobo
Edy Purwanto	: Koordinator Wilayah Kabupaten Banjarnegara

d. Hasil

- 1) Format Dokumen Renkon Kabupaten menggunakan format lama, karena launching Pedoman Penyusunan Rencana Kontinjensi Menghadapi ancaman Bencana (Edisi ke-4) dilaksanakan setelah dokumen renkon kabupaten tersusun;
- 2) Walaupun rencana kontinjensi kabupaten sudah diselesaikan di level kabupaten, akan tetapi ada beberapa masukan dari OPD Pemerintah Prov Jateng;
- 3) Dalam keadaan darurat bencana Provinsi Jawa Tengah menjadi Koordinator Pendamping, sedangkan ketika Kabupaten sudah tidak mampu dalam penanganan darurat bencana gas beracun, Provinsi Jawa Tengah akan berubah mengambil alih penanganan darurat bencana atau menjadi komandan SKPDB;

- 4) Lokasi Pos Pendamping dan Pos Komando Prov Jateng diharapkan dekat dengan lokasi kejadian untuk memudahkan komunikasi, koordinasi dan/atau komando;
- 5) Peran Media Center dalam SKPDB Prov Jateng harus ada, guna kemudahan pemberian informasi 1 (satu) pintu, disepakati coordinator media center Prov Jateng adalah Dinas Kominfo Prov Jateng;
- 6) Dampak ekonomi menjadi hal yang penting apabila terjadi bencana, melihat pengalaman Erupsi Gunung Merapi.. Kemudian disepakati koordinator kaji cepat ekonomi gas beracun adalah Disperdag atau Dispartan Prov Jateng;
- 7) Adanya kesepahaman dan kesediaan OPD Pemerintah Prov Jateng untuk mengisi gap/kesenjangan yang ada di kabupaten, khususnya logistic permakanan;
- 8) SKPDB Jawa Tengah harus mampu menyiapkan untuk kebutuhan pengungsi 3 (tiga) kabupaten terdampak sebanyak 20.589 jiwa dan relawan penanggulangan bencana sebanyak 4.510 jiwa apabila menjadi pos komando.

e. Foto dokumentasi



Gambar 12 Kegiatan Rencana Kontigensi (RENKON) Gunung
Api Dieng Gas Beracun

5. Kegiatan Pemasangan Alat Sistem Peringatan Dini (EWS) Tanah Longsor

a. Latar Belakang

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya serta berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana merupakan elemen yang sangat penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dengan adanya sistem peringatan dini, maka masyarakat dapat melakukan respon yang sesuai untuk melakukan penyelamatan diri sehingga dapat menghindari korban jiwa serta mengurangi dampak bencana. Agar berjalan efektif, sistem peringatan dini harus melibatkan masyarakat secara aktif, memfasilitasi pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang risiko yang dihadapi, menyebarluaskan pesan dan peringatan secara efektif, serta menjamin kesiapsiagaan yang selalu terjaga. Tujuan dari pengembangan sistem peringatan dini yang berbasis masyarakat adalah untuk memberdayakan individu dan masyarakat yang terancam bahaya untuk bertindak dalam waktu yang cukup dan dengan cara-cara yang tepat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korban luka, hilangnya jiwa, serta rusaknya harta benda dan lingkungan. Sistem peringatan dini yang lengkap dan efektif terdiri atas empat unsur yang saling terkait, mulai dari pengetahuan tentang

bahaya dan kerentanan, hingga kesiapan dan kemampuan untuk menanggulangi). Pengalaman baik dari sistem peringatan dini juga memiliki hubungan antar-ikatan yang kuat dan saluran komunikasi yang efektif di antara semua elemen tersebut. Keempat elemen tersebut adalah pengetahuan tentang risiko, pemantauan dan layanan peringatan dan penyebarluasan.

b. Tujuan

Tujuh sub-sistem peringatan dini Untuk membangun sistem peringatan dini berbasis masyarakat maka dibutuhkan tujuh sub-sistem utama yang saling terintegrasi. Tujuh sub-sistem tersebut adalah sebagai berikut :

8) Sosialisasi

Sosialisasi merupakan kegiatan awal untuk menyampaikan maksud dan strategi kegiatan dan sekaligus menyerap aspirasi dan informasi dari masyarakat serta pemangku kepentingan di daerah rawan bencana. Seringkali kegiatan sosialisasi awal menjadi penentu keberhasilan program selanjutnya. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman masyarakat tentang bencana khususnya pergerakan tanah serta menyerap aspirasi dari masyarakat. Pemahaman ini meliputi pengertian gerakan tanah, tipe-tipe gerakan tanah, mekanisme kejadian gerakan tanah, faktor pengontrol dan pemicu gerakan tanah, tanda-tanda gerakan tanah dan mitigasi gerakan tanah baik secara struktural maupun non-struktural yang didalamnya termasuk sistem peringatan dini gerakan tanah serta level dan tanda-tanda peringatan. Sosialisasi ini bisa dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan semua masyarakat. Hasil yang diharapkan dari sosialisasi adalah masyarakat paham

tentang bencana longsor baik mekanisme, tanda-tanda dan cara meminimalkan risikonya terutama dengan sistem peringatan dini yang akan dipasang. Selain itu untuk mengidentifikasi orang-orang yang mempunyai komitmen kuat sebagai tim siaga bencana tingkat desa/dusun.

9) Penilaian risiko;

Kegiatan penilaian risiko dapat dilakukan dengan cara survei teknis (geomorfologi, geologi, dan geoteknik), kelembagaan, serta sosial-budaya-ekonomi masyarakat. Survei geologi dilakukan untuk mengetahui kondisi geologi daerah rentan gerakan tanah, terutama dalam mengetahui zona rentan bergerak dan zona stabil serta arah dari pergerakan tanah bila terjadi. Survei ini juga untuk mengetahui tanda-tanda pergerakan tanah seperti retakan/amblesan, munculnya mata air, retaknya bangunan struktur dan miringnya pohon/tiang yang akan membantu untuk informasi penempatan alat deteksi dini gerakan tanah. Pada survey geologi dilakukan pengumpulan data terkait jenis maupun persebaran litologi dan tanah penyusun lereng, jenis, persebaran maupun orientasi struktur geologi ataupun retakan terhadap lereng, serta besar kemiringan lereng.

Survei kelembagaan dilakukan guna mengetahui ada atau tidaknya suatu lembaga yang berperan dalam pemantauan dan penanggulangan bencana gerakan tanah pada daerah rawan gerakan tanah. Survei sosial-ekonomi-budaya dilakukan guna mengetahui kondisi masyarakat dari segi pendidikan, finansial, dan budaya, sehingga mempermudah dalam mengenalkan sistem peringatan dini sesuai dengan budaya setempat. Selain itu juga untuk mengetahui potensi jiwa ataupun infrastruktur yang terancam bila terjadi bencana tanah longsor, sehingga bisa

diketahui tingkat kerawanan daerah tersebut. Survei sosial perlu dilakukan untuk mengetahui pemahaman masyarakat akan kerawanan gerakan tanah. Hal ini akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap risiko bencana gerakan tanah dan teknologi pengurangan risiko bencana gerakan tanah. Motivasi dan keinginan untuk berpartisipasi secara aktif sangat penting untuk mengatur strategi program pengurangan bencana yang cocok dengan kondisi sosial yang ada. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, salah satu aksi pemberdayaan adalah edukasi dan pelatihan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kapasitas dan bekal pengetahuan bagi masyarakat untuk memutuskan apa yang harus dilakukan untuk mencegah dan melindungi diri dari gerakan tanah.

10) Pembentukan tim siaga bencana ditingkat desa/dusun;

Tim siaga bencana di tingkat desa/dusun dibentuk berdasarkan rapat masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah desa/dusun. Penunjukan tim ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota terkait dalam upaya kesiapsiagaan, pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pasca bencana gerakan tanah. Pada umumnya, tim siaga terdiri dari ketua dan wakil ketua, penasehat, bidang data dan informasi alat deteksi dini, bidang mobilisasi pengungsi, bidang P3K, bidang logistik dan bidang keamanan. Namun demikian, bidang-bidang tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi suatu daerah. Tim siaga bencana bertugas untuk melakukan seluruh kegiatan kesiapsiagaan, termasuk menggerakkan masyarakat sebagai pendukung sistem teknis secara efektif. Selain itu juga untuk membuat peta kerentanan gerakan tanah yang disertai dengan jalur evakuasi dan titik kumpul yang dibimbing oleh petugas dari BPBD atau ahli

terkait serta menggerakkan masyarakat untuk evakuasi bila sebelum terjadi bencana longsor.

11) Pembuatan peta dan rute evakuasi;

Peta kerentanan gerakan tanah dan jalur evakuasi harus memberikan informasi mengenai zona yang aman dan zona yang tidak aman terhadap ancaman gerakan tanah serta jalur evakuasi yang aman bagi warga yang melakukan evakuasi dan lokasi daerah aman (titik kumpul). Peta ini dibuat oleh tim siaga bencana desa/dusun dengan masyarakat didampingi oleh ahli setelah mereka mendapatkan sosialisasi. Peta ini berperan sebagai panduan bagi tim siaga bencana, masyarakat maupun pemangku kepentingan untuk berkumpul di titik kumpul yang aman dan melakukan evakuasi dengan mengikuti jalur yang telah ditentukan. Peta harus memberikan informasi:

- a) Zona daerah rentan gerakan tanah dan daerah aman;
- b) Rumah warga, yang dicantumkan nomor pemilik rumah;Laporan Akhir Kegiatan Pemasangan Alat Sistim Pringatan Dini (EWS) tanah Longsor TA 2019 6
- c) Fasilitas penting, seperti sekolah, masjid, puskesmas, kantor desa ataupun petunjuk penting (landmark);
- d) Jalan maupun gang;
- e) Titik pemasangan alat deteksi dini;
- f) Pos siaga;
- g) Jalur evakuasi;
- h) Titik kumpul; dan
- i) Tempat pengungsian akhir (TPA).

12) Penyusunan prosedur tetap (Protap) evakuasi;

Prosedur tetap (protap) berperan sebagai panduan bagi tim siaga untuk mengarahkan masyarakat/warganya dalam menghadapi setiap level ancaman bencana gerakan tanah

yaitu Waspada (Level 1) – Siaga (Level 2) – Awas (Level 3). Prosedur tetap mencakup tugas dan posisi masing-masing bidang, siapa melakukan apa-dimana-bagaimana, letak pos siaga, TPS, TPA, dan jalur evakuasi. Prosedur tetap disusun berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan setiap bidang di bawah arahan pemangku kepentingan terkait.

13) Pemantauan, peringatan dini, dan geladi evakuasi;

Pemasangan alat deteksi dini gerakan tanah ditempatkan pada daerah yang memiliki risiko paling tinggi dan mempunyai dampak jiwa terpapar paling besar. Penentuan lokasi ini di dasarkan atas identifikasi zona risiko gerakan tanah yang dilakukan oleh tim siaga bencana dengan bimbingan dari ahli terkait. Pemasangan alat dilakukan bersama dengan masyarakat, karena alat tersebut akan dipasang di sekitar tempat tinggal masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Diharapkan dengan melakukan pemasangan alat bersama masyarakat dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggungjawab terhadap kondisi alat hingga menjamin keamanannya. Pemasangan jenis alat deteksi dini dan tingkat/level bahaya harus tepat sesuai dengan kondisi geologi dan luasan wilayahnya. Setelah alat terpasang, tim siaga bencana terbentuk, peta evakuasi tersedia, dan ada prosedur tetap maka dilakukan gladi evakuasi untuk memastikan fungsi alat dan respon masyarakat bila terjadi peringatan dini sesuai dengan prosedur tetap yang ada. Gladi evakuasi dilakukan berdasarkan skenario yang disusun mengikuti prosedur tetap. Gladi evakuasi dilakukan guna melatih kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan tanggungjawab tim siaga bencana apabila masing-masing alat deteksi dini gerakan tanah menunjukkan indikasi pergerakan yang memicu

gerakan tanah. Selain itu, gladi evakuasi juga dilakukan guna mengenalkan dan mengakrabkan masyarakat setempat dengan bunyi sirine dari masing-masing alat deteksi dini, serta melatih masyarakat dalam melakukan evakuasi. Gladi evakuasi ini wajib dilakukan minimal satu kali dalam setahun di akhir musim kemarau.

- 14) Membangun komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengoperasian dan pemeliharaan keseluruhan sistem.

Komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem peringatan dini perlu untuk dibangun, guna memastikan seluruh tahapan kegiatan yang tercantum dalam prosedur tetap dapat berjalan dengan baik.

c. Pelaksanaan

- 1) Dusun Kemiren, Dusun Pekoso, dan Dusun Karangrejo, Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- 2) Ds Pangonan, Desa Gunungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
- 3) Dusun Kesongo, Desa Gempolan, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah
- 4) Dusun Waru dan Dusun Bugelan, Desa Bugelan, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah
- 5) Dusun Gedangan, Desa Windusari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
- 6) Desa Dermasuci, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah
- 7) Dusun Pedagung, Desa Tundagan, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah

- 8) Dusun Curugmuncar dan Dusun Watugajah, Desa Curugmuncar, Kecamatan Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
- 9) Desa Gerlang, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
- 10) Dusun Sudimampir, Desa Hanum, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
- 11) Desa Sirau, Kecamatan Karangmoncol. Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah
- 12) Dusun Jombret, Desa Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah
- 13) Dusun Bendan, Desa Kebonsari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
- 14) Dusun Prumasan, Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah
- 15) Dusun Kambangan, Desa Menawan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah

d. Hasil

- 4) Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana longsor mampu memahami kegunaan dan fungsi peralatan dan sistem peringatan dini yang dipasang di daerah tersebut;
- 5) Meningkatnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana longsor saat bencana datang, sehingga mereka dapat segera mengevakuasi secara mandiri sesuai dengan arah jalur evakuasi ke tempat aman (zona hijau);
- 6) Terwujudnya peningkatan kapasitas masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana longsor untuk mengurangi ancaman dan kerentanan bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana sehingga masyarakat memahami dan mengerti apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana longsor

e. Foto dokumentasi



Gambar 13 Pemasangan Alat Sistim Pringatan Dini (EWS) tanah Longsor

3.3 Bidang Penanganan Darurat

Kegiatan Bidang Penanganan Darurat diselenggarakan oleh 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi dan Seksi Sarana dan Prasarana Darurat. Dengan dukungan anggaran sebesar Rp 2.920.000.000,-. Bidang Penanganan Darurat melaksanakan 4 kegiatan meliputi:

1. Peningkatan, pengembangan kapasitas penanganan darurat bagi pemangku kepentingan dan generasi muda
2. Pengembangan Pusdalops Jateng
3. Evaluasi, Pemantauan, dan Penanganan Darurat Bencana
4. Bintek SAR, Latihan gabungan dan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jateng

Dengan Program dan Kegiatan antara lain:

- Sasaran : Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana
Indikator : Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB
- Program : Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Indikator : Persentase penanganan darurat kebencanaan

3.3.1 Seksi Penyelamatan, Evakuasi Dan Penanganan Pengungsi

1. Bimbingan Teknis Relawan dan Latihan Gabungan SAR Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi (PEPP)

a. Gambaran kegiatan

Bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Dalam penanggulangan bencana perlu adanya koordinasi dan penanganan yang cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel, agar korban jiwa dan kerugian harta benda dapat diminimalisir.

Melalui Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 11 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah, BPBD Provinsi Jawa Tengah hadir di tengah-tengah Masyarakat sebagai perwakilan Negara yang hadir dengan penuh tulus ikhlas membantu meringankan beban Masyarakat serta mewujudkan peran pemerintah daerah terkait penanggulangan bencana. Salah satu cara menanggulangi kebencanaan adalah adanya partisipasi aktif masyarakat terutama sebelum terjadinya bencana. Berbagai tahapan untuk penanggulangan bencana yang dilakukan adalah pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi).

Tanggap darurat menjadi bagian yang paling banyak disorot oleh berbagai kalangan. Dan salah satu hal yang menjadi pokok perhatian dalam tahapan tanggap darurat adalah Tugas Pokok dan Fungsi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi (Tupoksi P.E.P.P). Tupoksi P.E.P.P sesuai dengan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 101 Tahun 2008 yang terutama adalah melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi, meliputi :

- 1) Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaksanaan kegiatan bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi;
- 2) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
- 3) Penentuan status keadaan darurat bencana;
- 4) Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban terdampak bencana;
- 5) Perlindungan terhadap kelompok rentan;
- 6) Pemulihan sarana dan prasarana vital.

Didalam perjalanannya, Tupoksi P.E.P.P ini telah memberikan banyak manfaat kepada berbagai pihak yang terlibat dalam proses Penanggulangan Bencana (PB) mulai dari Relawan, Aparat BPBD, Aparat TNI/POLRI hingga Kalangan Dunia Usaha dengan memberikan pelatihan-pelatihan SAR, bimbingan teknis dan bekal ilmu pengetahuan lainnya tentang Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi (P.E.P.P). Salah satu kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Seksi P.E.P.P adalah Kegiatan Bintek SAR, Latihan Gabungan dan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bidang Penanganan Darurat Pada Tahun Anggaran 2019 ini, terdapat 4 (empat) kali pelaksanaan Kegiatan Latgab P.E.P.P dan 1 (satu) kali Kegiatan Pengembangan TRC PB Jateng.

b. Tujuan

Kegiatan ini adalah mendapatkan masukan dan mengkritisi eksistensi/keberadaan BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan darurat bencana.

c. Pelaksanaan

- 1) Kegiatan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi (P.E.P.P) Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Grobogan.

Hari/tanggal : Rabu -Kamis, tanggal 21 - 22 Maret 2019
Tempat : Aula Hotel 21 Purwodadi, Jl. MT. Haryono No. 137 Purwodadi
Peserta : 100 (seratus) orang
1. BPBD Kabupaten Grobogan;
2. TRC BPBD Kabupaten Grobogan;
3. Kwarcab Pramuka Kabupaten Grobogan;
4. PMI Kabupaten Grobogan;
5. SAR Kabupaten Grobogan;
6. TAGANA Kabupaten Grobogan;
7. FKAM Kabupaten Grobogan;
8. SAR MTA Kabupaten Grobogan;
9. SATPOL PP Kabupaten Grobogan;
10. RAPI Kabupaten Grobogan;
11. DAMKAR Kabupaten Grobogan;
12. MDMC Kabupaten Grobogan;
13. FKAM Purwodadi;
14. ORARI Kabupaten Grobogan;
15. KORAMIL 01/Purwodadi;
16. DINKES Kabupaten Grobogan;
17. POLRES Kabupaten Grobogan.

Narasumber dan Instruktur

1. BBWS Pemali Juwana
2. BAPPEDA Kabupaten Grobogan
3. BPBD Kabupaten Grobogan
4. KODIM 0717 Grobogan;
5. Damkar Kabupaten Grobogan;
6. Dinas Sosial (TAGANA) Kab. Grobogan;
7. Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan;

Materi

1. Paparan Teori dalam kelas oleh Narasumber dan Instruktur dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi;
2. Praktek Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana;
3. Praktek Pemadaman Kebakaran;
4. Praktek Dapur Umum/manajemen logistik;
5. Praktek Pertolongan Pertama pada Korban Bencana;
6. Praktek Evakuasi Korban Bencana;

7. Simulasi Penanganan Darurat Bencana.

2) Kegiatan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi (P.E.P.P) Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Pati.

Hari/tanggal : Rabu-Kamis, tanggal 17 - 18 Juli 2019
Tempat : Aula Hotel NEW MERDEKA, Jl. Pangeran Diponegoro No. 69 Pati.
Peserta : 100 (seratus) orang
Peserta berasal dari unsur Relawan Pramuka se – Karisidenan Pati.

Narasumber

1. BBWS Pemali Juwana
2. BAPPEDA Kabupaten Grobogan
3. BPBD Kabupaten Grobogan
4. KODIM 0717 Grobogan;
5. Damkar Kabupaten Grobogan;
6. Dinas Sosial (TAGANA) Kab. Grobogan;
7. Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan;

Materi

1. Paparan Teori dalam kelas oleh Narasumber dan Instruktur dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi;
 2. Praktek Bongkar Pasang Tenda Pengungsi;
 3. Praktek Pemadaman Kebakaran;
 4. Praktek Pertolongan Pertama pada Korban Bencana;
 5. Praktek Dapur Umum;
 6. Simulasi Penanganan Darurat Bencana.
- ### 3) Kegiatan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi (P.E.P.P) Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Temanggung.

Hari/tanggal : Rabu-Kamis, tanggal 24 - 25 Juli 2019
Tempat : Hotel Indraloka Jl. Suwandi Suwardi No.3, Kauman, Kowangan Kab. Temanggung
Peserta : 100 (seratus) orang
Peserta berasal dari unsur Karang Taruna, PMI, PRAMUKA, Komunitas Relawan Penanggulangan Bencana di wilayah Kabupaten Temanggung

Narasumber

1. ESDM Prov. Jateng
2. BAPPEDA Kabupaten Temanggung
3. BPBD Kabupaten Temanggung
4. ORARI Kabupaten Temanggung;
5. SATPOL PP (damkar) Kabupaten Temanggung;
6. Dinas Sosial (TAGANA) Kab. Temanggung;
7. PMI Kabupaten Temanggung;
8. BPBD Kabupaten Temanggung

Materi

1. Paparan Teori dalam kelas oleh Narasumber dan Instruktur dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi;
 2. Praktek Komunikasi Darurat Bencana;
 3. Praktek Pemadaman Kebakaran;
 4. Praktek Dapur Umum/manajemen logistik;
 5. Praktek Pertolongan Pertama pada Korban Bencana;
 6. Praktek Evakuasi Korban Bencana;
 7. Simulasi Penanganan Darurat Bencana.
- 4) Kegiatan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi (P.E.P.P) Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Karanganyar.

Hari/tanggal : hari Kamis - Jumat, tanggal 17 – 18 Oktober 2019

Tempat : Hotel Tamansari Karanganyar, Jalan Lawu No. 98 (Papahan) Karanganyar.

Peserta : 100 (seratus) orang

1. BPBD Kab. Boyolali
2. BPBD Kab. Klaten
3. BPBD Kab. Sukoharjo
4. BPBD Kab. Wonogiri
5. BPBD Kab. Sragen
6. BPBD Kab. Karanganyar
7. BPBD Kota Surakarta

Narasumber

1. BBWS Bengawan Solo;
2. BASARNAS Semarang;
3. BPBD Kab.Karanganyar;
4. BPBD Kab. Karanganyar;
5. PMI Kab. Karanganyar.

Materi

1. Paparan Teori dalam kelas oleh Narasumber dan Instruktur dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi;

2. PraktekWater Rescue;
 3. PraktekWater Treatment;
 4. PraktekDapurUmum;
 5. Praktek PPGD PMI.
- 5) Kegiatan Latihan Tim Reaksi Cepat Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Pemalang.
- Hari/tanggal : Rabu - Kamis, tanggal 11 - 12 September 2019
- Tempat : R-Gina Hotel Pemalang, Jalan Raya Pantura KM. 6 No. 10, Petarukan, Pemalang.
- Peserta : 50 (lima puluh) orang
1. TRC BPBD Kabupaten Kendal;
 2. TRC BPBD Kabupaten Batang;
 3. TRC BPBD Kabupaten Pekalongan;
 4. TRC BPBD Kabupaten Pemalang;
 5. TRC BPBD Kabupaten Tegal;
 6. TRC BPBD Kabupaten Brebes;
 7. TRC BPBD Kota Pekalongan;
 8. TRC BPBD Kota Tegal.

Narasumber

1. BASARNAS Semarang;
2. BPBD Kabupaten Pemalang;
3. BPBD Provinsi Jawa Tengah;
4. ORARI Lokal Pemalang
5. BPBD Kota Tegal

Materi

1. Paparan Teori dalam kelas oleh Narasumber dan Instruktur dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi;
2. Praktek Operasional Tenda Pengungsi
3. Praktek Komunikasi Darurat Bencana
4. Praktek Operasional Drone dan Penggunaan Sistem Aplikasi InDRA (Indonesian Disaster Rapid Assesment)
5. Praktek Operasional GPS (Global Positioning System)

d. Hasil

- 1) Kegiatan Bintek SAR, Latihan Gabungan dan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh elemen aparat Penanggulangan Bencana di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dalam masa Tahun Anggaran 2019, Kegiatan ini

telah dilaksanakan di 5 (lima) Kabupaten, yaitu Kabupaten Grobogan, Pati, Temanggung, Karanganyar dan Pemalang. Kegiatan ini memerlukan dukungan dari segenap Relawan dan aparat Pemerintahan yang bergerak di bidang Penanggulangan Bencana;

- 2) Proses pemberian materi dan pelatihan oleh Narasumber dan Instruktur telah berjalan sesuai dengan tujuan awal kegiatan serta jumlah sasaran peserta juga telah memenuhi sasaran kegiatan.

e. Dokumentasi



Gambar 14 Bimbingan Teknis Relawan dan Latihan Gabungan SAR Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi (PEPP)

2. Kegiatan Laporan Evaluasi

a. Gambaran kegiatan

Jawa Tengah terletak pada 50 40' dan 80 30' Lintang Selatan dan antara 1080 30' dan 1110 30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 Km dan dari Utara ke Selatan 226 Km (tidak termasuk pulau Karimunjawa). Secara administratif Provinsi Jawa

Tengah terbagi menjadi 29 wilayah kabupaten dan 6 wilayah Kota, yang terdiri dari 565 wilayah kecamatan dan 8.568 desa/kelurahan.

Luas Wilayah Jawa Tengah sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas pulau Jawa. Penggunaan lahannya berupa Sawah seluas 1,00 juta hektar (30,80 persen) dan 2,25 juta hektar (69,20 persen) bukan lahan sawah. Luas kawasan hutan pada PT. Perhutani (Persero) Unit I Jawa Tengah 636 ribu hektar atau 19,55 % dari total luas Jawa Tengah. Menurut fungsinya, hutan tersebut terbagi menjadi suaka alam/hutan wisata (1,16 %), hutan lindung (12,21 %) dan hutan produksi (86,63 %). Pada tahun 2009, produksi kayu jati (pertukangan) tercatat sebanyak 171 ribu meter kubik, naik sebesar 4.89 persen dibanding tahun 2008. Demikian pula dengan produksi kayu rimba yang mengalami kenaikan sebesar 5,70 persen, yaitu dari 73 ribu kubik di tahun 2008 menjadi hanya 77 ribu kubik di tahun 2009.

b. Tujuan

Terjalinnnya komunikasi terarah melalui rapat koordinasi dan pendistribusian kebutuhan penanganan darurat kekeringan.

c. Pelaksanaan

1) Rapat Koordinasi Antisipasi Dampak Musim Kemarau Tahun 2019

Hari/tanggal	: Kamis – Jum’at / 23 – 24 Mei 2019
Pukul	: 17.00 s/d selesai
Tempat	: Hotel Lor In Syariah, Jl. Adisucipto No. 47 Surakarta
Peserta	: 120 orang, terdiri dari : Kepala Pelaksana dan Kabid/Kasi Kedaruratan Logistik se Jawa Tengah, PMI Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan instansi di lingkungan Pemprov. Jawa Tengah

Narasumber

1. Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB;

2. Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Tengah; dan
3. Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah

2) Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Darurat Bencana Tahun 2018 dan Antisipasi Dampak Musim Kemarau Tahun 2019

Hari/tanggal : Senin – Selasa / 24 – 25 Juni 2019
 Pukul : 17.00 s/d selesai
 Tempat : Kyriad Grand Master Hotel, Jalan Gajah Mada No. 10 Purwodadi
 Peserta : 105 orang, terdiri dari : Kepala Pelaksana, Sekretaris dan Kabid/Kasi Kedaruratan Logistik se Jawa Tengah

Narasumber

1. Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB;
2. Biro APBJ Prov. Jawa Tengah;
3. Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah;
4. Dinas PUSDATARU Prov. Jawa Tengah.

3) Rapat Koordinasi Menghadapi Dampak Musim Hujan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2020

Hari/tanggal : Selasa, 12 November 2019
 Pukul : 09.00 s/d selesai
 Tempat : Ruang Rapat BPBD Prov. Jateng Gd.A Lt.IV, Jl. Imam Bonjol No.1F, Semarang
 Peserta : 100 orang, terdiri dari : BPBD Kab/Kota, Kodam/Polda, OPD terkait dan Organisasi Kebencanaan

Narasumber

1. Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB;
2. Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Tengah;
3. Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.

4) Sosialisasi Dan Sinkronisasi Kesiapan Penanganan Bencana Banjir, Longsor Dan Angin Puting Beliung Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2020

Hari/tanggal : Senin/ 16 Desember 2019
 Pukul : 09.00 s/d selesai
 Tempat : Ruang Rapat BPBD Prov. Jateng Gd.A Lt.IV, Jl. Imam Bonjol No.1F, Semarang
 Peserta : 150 orang, terdiri dari :

BPBD Kab./Kota Se-Jawa Tengah,
OPD Prov. Jateng terkait, Relawan PB,
Organisasi Kebencanaan serta Petugas
Posko Siaga serta Karyawan/
Karyawati BPBD Provinsi Jawa Tengah

Narasumber

1. Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Jateng;
2. Rumah Zakat Jawa Tengah.

5) Fasilitasi Dropping Air Bersih

Dalam rangka penanganan darurat bencana kekeringan/kekurangan air bersih di Provinsi Jawa Tengah, BPBD Prov. Jawa Tengah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan air bersih dengan kerjasama dengan PDAM kabupaten/kota di Jawa Tengah. Mekanismenya pelaksanaannya adalah dengan bekerjasama dengan BPBD Kabupaten/Kota dan atau dengan PDAM Kabupaten/Kota.

Sampai dengan akhir musim kekeringan Tahun 2019, sebanyak 9 (sembilan) kabupaten telah mengajukan permohonan untuk dilaksanakan dropping air bersih, sebagai berikut :

- a) Kabupaten Temanggung melalui Surat Kepala Pelaksana BPBD, tanggal 30 April 2019, Nomor: P/365/151/IV/2019 dan tanggal 13 September 2019 Nomor : P/365/329/IX/2019, perihal Permohonan Bantuan Dropping Air Bersih Tahun 2019;
- b) Kabupaten Wonogiri melalui Surat Kepala Pelaksana BPBD, tanggal 24 Juni 2019, Nomor: 360/4105 dan tanggal 13 Agustus, Nomor : 360/580, perihal Permohonan Bantuan Dropping Air Bersih Tahun 2019;
- c) Kabupaten Pati melalui Surat Kepala Pelaksana BPBD, tanggal 1 Juli 2019, Nomor: 360/228 dan tanggal 10 September 2019, Nomor : 360/ 339, perihal Permohonan

Bantuan Droning Air Bersih Tahun 2019;

- d) Kabupaten Banjarnegara melalui Surat Kepala Pelaksana BPBD, tanggal 20 Juli 2019, Nomor: 360/0223/BPBD/2019, perihal Permohonan Bantuan Droning Air Bersih Tahun 2019;
- e) Kabupaten Sragen melalui Surat Kepala Pelaksana BPBD, tanggal 5 Agustus 2019, Nomor: 360/395-038/2019, perihal Permohonan Bantuan Droning Air Bersih Tahun 2019;
- f) Kabupaten Grobogan melalui Surat Kepala Pelaksana BPBD, tanggal 9 September 2019, Nomor: 365/1.125.2, perihal Permohonan Bantuan Droning Air Bersih Tahun 2019;
- g) Kabupaten Semarang melalui Surat Kepala Pelaksana BPBD, tanggal 10 September 2019, Nomor: 360/251, perihal Permohonan Bantuan Droning Air Bersih Tahun 2019;
- h) Kabupaten Rembang melalui Surat Kepala Pelaksana BPBD, tanggal 18 September 2019, Nomor: 360/237/2019 dan tanggal 28 Oktober 2019, Nomor : 360/ 275/ 2019, perihal Permohonan Bantuan Droning Air Bersih Tahun 2019;
- i) Kabupaten Kendal melalui Surat Kepala Pelaksana BPBD, tanggal 30 September 2019, Nomor: 360/1378, perihal Permohonan Bantuan Droning Air Bersih Tahun 2019.

BPBD Prov. Jawa Tengah menindaklanjuti dengan menyurati Kepala PDAM setempat perihal permohonan kerjasama untuk memberikan dukungan bantuan air bersih ke wilayah terdampak dimaksud. Penandatanganan Naskah Kerjasama dilakukan antara BPBD Prov. Jawa Tengah dengan PDAM/BPBD Kabupaten setempat pada Bulan

Agustus – November 2019, dengan mempertimbangkan percepatan pelaksanaan dan kemudahan akses.

Hasil kegiatan Fasilitasi Dropping Air Bersih Tahun 2019, bahwa Sesuai dengan alokasi yang diberikan dan kemampuan armada Kabupaten terdampak, maka alokasi jumlah pengiriman air bersih sebagai berikut: Kabupaten Wonogiri sebanyak 100 tangki, Kabupaten Kendal sebanyak 300 tangki, Kabupaten Banjarnegara sebanyak 100 tanki, Kabupaten Grobogan sebanyak 100 tangki, Kabupaten Sragen sebanyak 100 tangki, Kab. Semarang sebanyak 100 tangki, Kab. Temanggung sebanyak 100 tangki, Kab. Pati sebanyak 300 tangki, Kab. Rembang sebanyak 286 tangki.

d. Hasil

- 1) Kerjasama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/ Kota serta Organisasi Kebencanaan sangat penting mengingat setiap unsur mempunyai kemampuan masing-masing untuk saling mendukung dalam mengantisipasi dan mengatasi bencana khususnya di Jawa Tengah;
- 2) Peningkatan koordinasi antara BNPB dengan BPBD serta pemangku kepentingan lain (PDAM dan PMI Jawa Tengah) sangat penting dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih untuk menanggulangi dampak bencana kekeringan di Jawa Tengah.
- 3) Dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi Risiko Bencana belum menjadi perhatian yang serius sehingga saat terjadi bencana seringkali menimbulkan permasalahan baru yang menyebabkan pelaksanaan pembangunan menjadi terhambat;

e. Foto dokumentasi



Gambar 15 Kegiatan Evaluasi

3.3.2 Seksi Sarana dan Prasarana Darurat

1. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Data dan Informasi Bencana

a. Gambaran kegiatan

Ditinjau dari kondisi geografis, geologis maupun hidrometeorologis wilayah Indonesia dapat digolongkan sebagai wilayah rentan terkena bencana baik bencana yang disebabkan oleh alam, ulah manusia ataupun gabungan keduanya. Gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran hutan/lahan hingga semburan/luapan lumpur panas telah menghias wajah negeri ini yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Ibu kotanya adalah Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.548 km², atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga

meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.

Total penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 adalah 33,26 juta jiwa. Data tersebut diketahui dari angka sementara proyeksi sensus penduduk (SP) 2010 yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 atau sekitar 13,92 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk juga dijadikan sebagai perhitungan jumlah penduduk terpapar berdasarkan kondisi jiwa pada wilayah rentan setiap bencana yang berpotensi di Provinsi Jawa Tengah.

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desa/kelurahan. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jawa Tengah juga terdiri atas 3 kota administratif, yaitu Kota Purwokerto, Kota Cilacap, dan Kota Klaten. Namun sejak diberlakukannya Otonomi Daerah tahun 2001 kota-kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah kabupaten.

Menyusul otonomi daerah, 3 kabupaten memindahkan pusat pemerintahan ke wilayahnya sendiri, yaitu Kabupaten Magelang (dari Kota Magelang ke Mungkid), Kabupaten Tegal (dari Kota Tegal ke Slawi), serta Kabupaten Pekalongan (dari Kota Pekalongan ke Kajen).

Menurut tingkat kemiringan lahan di Jawa Tengah, 38% lahan memiliki kemiringan 0-2%, 31% lahan memiliki kemiringan 2-15%, 19% lahan memiliki kemiringan 15-40%, dan sisanya 12% lahan memiliki kemiringan lebih dari 40%.

Kawasan pantai utara Jawa Tengah memiliki dataran rendah yang sempit. Di kawasan Brebes selebar 40 km dari pantai, dan di Semarang hanya selebar 4 km. Dataran ini bersambung dengan depresi Semarang-Rembang di timur. Gunung Muria pada akhir Zaman Es (sekitar 10.000 tahun SM) merupakan pulau terpisah dari Jawa, yang akhirnya menyatu karena terjadi endapan aluvial dari sungai-sungai yang mengalir. Kota Demak semasa Kesultanan Demak (abad ke-16 Masehi) berada di tepi laut dan menjadi tempat berlabuhnya kapal. Proses sedimentasi ini sampai sekarang masih berlangsung di pantai Semarang.

Di selatan kawasan tersebut terdapat Pegunungan Kapur Utara dan Pegunungan Kendeng, yakni pegunungan kapur yang membentang dari sebelah timur Semarang hingga Lamongan (Jawa Timur).

Rangkaian utama pegunungan di Jawa Tengah adalah Pegunungan Serayu Utara dan Serayu Selatan. Rangkaian Pegunungan Serayu Utara membentuk rantai pegunungan yang menghubungkan rangkaian Bogor di Jawa Barat dengan Pegunungan Kendeng di timur. Lebar rangkaian pegunungan ini sekitar 30–50 km; di ujung baratnya terdapat Gunung Slamet dan bagian timur merupakan Dataran Tinggi Dieng dengan puncak-puncaknya Gunung Prahu dan Gunung Ungaran. Antara rangkaian Pegunungan Serayu Utara dan Pegunungan Serayu Selatan dipisahkan oleh Depresi Serayu yang membentang dari Majenang (Kabupaten Cilacap), Purwokerto, hingga Wonosobo. Sebelah timur depresi ini terdapat gunung berapi Sindoro dan Sumbing, dan sebelah timurnya lagi (kawasan Temanggung dan Magelang) merupakan lanjutan depresi yang membatasi Gunung Merapi dan Gunung Merbabu.

Pegunungan Serayu Selatan merupakan bagian dari Cekungan Jawa Tengah Selatan yang terletak di bagian selatan provinsi Jawa Tengah. Mandala ini merupakan geantiklin yang membentang dari barat ke timur sepanjang 100 kilometer dan terbagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh lembah Jatilawang yaitu bagian barat dan timur. Bagian barat dibentuk oleh Gunung Kabanaran (360 m) dan bisa dideskripsikan mempunyai elevasi yang sama dengan Zona Depresi Bandung di Jawa Barat ataupun sebagai elemen struktural baru di Jawa Tengah. Bagian ini dipisahkan dari Zona Bogor oleh Depresi Majenang.

Bagian timur dibangun oleh antiklin Ajibarang (narrow anticline) yang dipotong oleh aliran Sungai Serayu. Pada timur Banyumas, antiklin tersebut berkembang menjadi antiklinorium dengan lebar mencapai 30 km pada daerah Lukulo (selatan Banjarnegara-Midangan 1043 m) atau sering disebut tinggian Kebumen (Kebumen High). Pada bagian paling ujung timur Mandala Pegunungan Serayu Selatan dibentuk oleh kubah Pegunungan Kulonprogo (1022 m), yang terletak di antara Purworejo dan Sungai Progo.

Kawasan pantai selatan Jawa Tengah juga memiliki dataran rendah yang sempit, dengan lebar 10–25 km. Selain itu terdapat Kawasan Karst Gombong Selatan. Perbukitan yang landai membentang sejajar dengan pantai, dari Yogyakarta hingga Cilacap. Sebelah timur Yogyakarta merupakan daerah pegunungan kapur yang membentang hingga pantai selatan Jawa Timur.

b. Tujuan

Demi terciptanya sistem komando yang terarah, terkoordinasi dan komprehensif melibatkan semua unsur pemangku kepentingan serta mendapatkan masukan dan mengkritisi

eksistensi/keberadaan BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan darurat bencana.

c. Pelaksanaan

1) Pelaksanaan Posko Radio

Kegiatan ini adalah sebagai penghubung antara kebutuhan informasi BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD Kabupaten Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, kegiatan Posko Radio tersebut diharapkan menjadi filter informasi bencana yang nantinya hasil dari kegiatan tersebut yaitu laporan informasi bencana dapat digunakan sebagai bahan pengambil keputusan/kebijakan penanganan darurat bencana.

Petugas posko radio memiliki beberapa kewajiban untuk:

- a) Melakukan Roll Call atau panggilan melalui alat komunikasi radio dengan BPBD Kabupaten Kota di Jawa Tengah sedikitnya 2 x dalam waktu 1 hari;
- b) Mencatat setiap informasi kebencanaan yang ada di setiap kabupaten dan kota di Jawa Tengah;
- c) Mendukung dan Memperkuat informasi bencana Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BPBD Provinsi Jawa Tengah;
- d) Melaporkan kejadian bencana secara tertulis kepada pimpinan.

Waktu	: Setiap hari (24 jam) dengan durasi waktu tugas dibagi menjadi 2 shift yaitu pagi Pukul 17.00 s/d 19.00 WIB dan malam Pukul 19.00 s/d 07.00 WIB.
Personl	: Untuk petugas jaga setiap shift nya berjumlah 3 personil terdiri dari unsur Relawan di wilayah Jawa Tengah
Tempat	: Ruang Radio BPBD Prov. Jateng Gd.B Lt.II, Jl. Imam Bonjol No.1F, Semarang

2) Pelatihan Sistem Informasi Dan Manajemen Database Bencana

Latihan Sistem Informasi Dan Manajemen Database Bencana ini dimaksudkan sebagai sarana memperkenalkan Prosedur Sistem Informasi dan Manajemen Database Bencana kepada BPBD Kab/kota di wilayah Jawa Tengah, dalam mengelola informasi dan data kebencanaan secara terstruktur, sistematis dan akuntabel.

Maksud dilaksanakannya Kegiatan ini adalah membangun kesamaan pemahaman dan persepsi tentang kebijakan sistem manajemen penanganan darurat bencana di Jawa Tengah dan mengembangkan iklim yang kondusif dan dialogis dalam rangka meningkatkan sinergitas diantara para stakeholders melalui implementasi sistem manajemen penanganan darurat bencana di Jawa Tengah;

3) Pelatihan Sistem Informasi dan Manajemen Database Bencana dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin - Selasa/ 1 – 2 April 2019
Pukul : 08.00 s/d selesai
Tempat : Hotel Lorin D'wangsa, Jalan Adi Sucipto No.47, GonilanKec. Kartasura, Kota Surakarta.
Peserta : sebanyak 100 orang, terdiri dari petugas Pusdalops BPBD Kabupaten / Kota di wilayah Jawa Tengah.

Narasumber/Instruktur

1. Kepala Pusat Data dan Humas BNPB;
2. Kepala Bidang Data BNPB;
3. Kasubid Pengelolaan Data Spasial BNPB;
4. DISKOMINFO JATENG.

4) Pelatihan Kluster Informasi Bencana

Pada saat tanggap darurat bencana terdapat berbagai permasalahan antara lain waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak dan berbagai kesulitan

koordinasi antara lain yang disebabkan karena banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana, kompetisi dalam pengerahan sumberdaya, otonomi yang berlebihan dan ketidakpercayaan kepada instansi pemerintah. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi di masing-masing petugas, Relawan PB maupun yang lain akan lebih terkoordinir, efektif dan efisien melalui Kluster Informasi Bencana.

Tujuan pelaksanaan kegiatan Latihan Kluster Informasi Bencana adalah mempercepat sistem pelaporan dan menjelaskan kepada aparat pemerintah Siapa berbuat apa pada saat kejadian darurat bencana, termasuk bagaimana membentuk Sistem Rantai Komando Penanganan Darurat Bencana yang melibatkan lintas sektor.

Sasaran pelaksanaan kegiatan Kluster Informasi Bencana adalah :

- a) Unsur Kelompok Petugas Pusdalops/RelawanBPBD Kab/Kota se – Jawa Tengah;
- b) Dinas Terkait se – wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pelaksanaan Latihan Kluster Informasi Bencanapada :

Hari/Tanggal : Kamis – Jumat, 24 – 25 Oktober 2019
Pukul : 08.00 s/d selesai
Tempat : Hotel Amantis, Jalan Lingkar Demak-Kudus Km. 24 Demak – Jawa Tengah.
Peserta : Peserta Kegiatan Kluster Informasi Bencana sebanyak 100 orang, dengan Peserta berasal dari Staf PUSDALOPS BPBD dan Relawan PB di wilayah Jawa Tengah.

Narasumber/Instruktur

- 1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- 2. BPBD Kabupaten Demak.

d. Hasil

Pemerintah telah memahami dengan baik bahwa upaya pencegahan bencana, dan pengurangan resiko bencana perlu dimulai dengan penyebaran informasi dan pengetahuan. Upaya membangun kesadaran komunitas, dan pendidikan merupakan langkah awal menuju tindakan yang nyata. Pendidikan menjadi prioritas dalam rangka membangun budaya siaga bencana.

Dukungan terhadap Pengembangan kapasitas, pengalaman, keterampilan maupun pengetahuan sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan penanganan bencana di Jawa Tengah. Berdasarkan hal tersebut maka sangat diperlukan Pelatihan – Pelatihan nyata pada pelaku penanganan bencana dalam hal ini Petugas BPBD, Relawan, Masyarakat dll.

e. Foto dokumentasi



Gambar 16 Posko Radio BPBD Prov Jateng

2. Kegiatan Peningkatan, Pengembangan Kapasitas Penanganan Darurat Bagi Pemangku Kepentingan dan Generasi Muda.

a. Latar Belakang

Provinsi Jawa Tengah termasuk daerah yang sering mengalami kejadian bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun

faktor non alam, bahkan faktor manusia yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta dan dampak psikologis. Disamping itu karena karakteristik yang dipengaruhi kondisi geografis, geologis, dan demografi. Jenis bencana di Provinsi Jawa Tengah seperti Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Kekeringan, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, Rob (air pasang), Kebakaran, Gunung meletus, Gas beracun, dan lain sebagainya.

Kejadian bencana bisa terjadi kapan saja dan tidak dapat diprediksi, yang akhirnya menimbulkan keadaan darurat yang ditandai dengan terancamnya keselamatan serta kesejahteraan masyarakat, hampir semua jenis kejadian bencana menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan rusaknya sarana dan prasarana.

Selanjutnya dalam situasi yang tidak menentu akibat kejadian bencana, sering terjadi kurangnya akurasi data dan informasi data korban maupun kerusakan yang timbul akibat bencana, sehingga mempersulit pengambilan keputusan/kebijakan penanganan darurat bencana. Pelaksanaan tanggap darurat bencana juga kurang saling mendukung, tentang pendistribusian bantuan ataupun pelayanan kepada korban kurang cepat, kurang merata, dan sulit terpantau dengan baik, sehingga hasil penanganan korban pada masa tanggap darurat kurang bisa terukur secara obyektif, situasi tersebut disebabkan karena kurangnya koordinasi antar instansi terkait dan lembaga/ Organisasi peduli bencana lainnya.

Kegiatan Peningkatan, Pengembangan Kapasitas Penanganan Darurat bagi Pemangku Kepentingan dan Generasi Muda merupakan salah satu program latihan dan simulasi kepada kelompok Pelajar, dan Masyarakat yang berada di wilayah Rawan Bencana. Dengan latihan dan simulasi ini diharapkan terciptanya

kesamaan perspektif, pemahaman konsep, visi dan misi, kesatuan gerak serta terbentuknya jaring komunikasi dan koordinasi antar komponen penyelenggara penanggulangan bencana.

b. Tujuan

untuk memfasilitasi latihan dan simulasi dalam penanganan darurat bencana untuk kelompok pelajar, dan Masyarakat di wilayah Rawan bencana dalam rangka meminimalisasi tingkat resiko yang ditimbulkan akibat bencana.

c. Pelaksanaan

Kegiatan Simulasi Penanganan Darurat bagi Pelajar

N o.	Kab/kota	Waktu dan Peserta	Narasumber dan Instruktur
1	Kota Pekalongan	21 Februari 2019 Aula SMK Negeri 3 Kota Pekalongan, Jl. Perintis Kemerdekaan No.30, Kramatsari, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan diikuti oleh 300 (tiga ratus) orang berasal dari unsur Pelajar SMK Negeri 1, SMK Negeri 2, SMK Negeri 3 Kota Pekalongan	Pemateri/ Narasumber berasal dari : 1. BPBD Kota Pekalongan; 2. Dinas Kebakaran Kota Pekalongan. Instruktur berasal dari : 1. BPBD Kota Pekalongan; 2. Dinas Sosial (TAGANA) Kota Pekalongan; 3. Dinas Kebakaran Kota Pekalongan; 4. PMI Kota Pekalongan.
2	Kabupaten Pati	27 Maret 2019 Aula SMU Negeri 2 Kabupaten Pati, Jl. A.	Pemateri/ Narasumber berasal dari : 1. BPBD Kabupaten Pati; 2. BBWS Pemali Juwana. Instruktur berasal dari : 1. BPBD Kabupaten Pati;

N o.	Kab/kot a	Waktu dan Peserta	Narsum dan Instruktur
3	Kabupat en Demak	Yani No. 4 Winong, Kecamatan Pati diikuti oleh 300 peserta berasal dari SMK Negeri 1 Pati, SMK Negeri 2 Pati, SMK Negeri 3 Pati, SMU Negeri 1 Pati, SMU Negeri 2 Pati, SMU Negeri 3 Pati 27 Februari 2019 Aula SMU Negeri 2 Kabupaten Demak, Jl. Demak – Kudus Km 182 diikuti oleh 300 (tiga ratus) orang berasal dari unsur Pelajar SMK/SMU Negeri di wilayah Kabupaten Demak	2. Dinas Sosial 3. (TAGANA)Pati; 4. Dinas Kesehatan 5. SATPOL PP (DAMKAR). Pemateri/ Narasumber berasal dari : 1. BPBD Kabupaten Demak; 2. Dinas Kebakaran Kabupaten Demak. Instruktur berasal dari : 1. BPBD Kabupaten Demak; 2. Dinas Sosial (TAGANA) Kabupaten Demak; 3. Dinas Kebakaran Kabupaten Demak; 1. PMI Kabupaten Demak.
4	Kabupat en Sragen	12 September 2019 Aula SMK Negeri 2 Kabupaten Sragen, Jl. Dr. Sutomo no.4, Sragen diikuti oleh 300 (tiga	Pemateri/ Narasumber berasal dari : 1. BPBD Kabupaten Sragen; 2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Instruktur berasal dari : 1. BPBD Kabupaten Sragen; 2. Dinas Sosial (TAGANA) Kabupaten Sragen; 3. PMI Kabupaten Sragen

N o.	Kab/kot a	Waktu dan Peserta	Narsum dan Instruktur
5	Kabupat en Kebume n	ratus) orang berasal dari unsur Pelajar SMK/SMU Negeri di wilayah Kabupaten Sragen 29 April 2019 Aula Dinas Pendidikan, Kecamatan Sadeng diikuti oleh 150 (Seratus lima puluh) orang berasal dari unsur RT/Rw, Perangkat Desa/Kelura han, Bidan Desa, Karang Taruna, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat di wilayah Desa Seboro, Kecamatan Sadeng, Kabupaten Kebumen	Pemateri/ Narasumber berasal dari : 1. BPBD Kabupaten Kebumen; 2. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Instruktur berasal dari : 1. BPBD Kabupaten Kebumen; 2. Dinas Sosial (TAGANA) Kabupaten Kebumen; 3. SATPOL PP (DAMKAR) Kabupaten Kebumen; 4. PMI Kabupaten Kebumen.
6	Kabupat en Kendal	20 Juni 2019 Aula Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal diikuti oleh 150 (Seratus lima puluh) orang berasal dari unsur RT/Rw,	Pemateri/ Narasumber berasal dari : 1. BPBD Kabupaten Kendal; 2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Instruktur berasal dari : 1. BPBD Kabupaten Kendal; 2. SATPOL PP (DAMKAR) Kabupaten Kendal; 3. PMI Kabupaten Kendal.

N o.	Kab/kot a	Waktu dan Peserta	Narsum dan Instruktur
7	Kabupat en Tegal	Perangkat Desa/Kelura han, Karang Taruna, PKK, Bidan Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat di sekitar hutan wilayah Kabupaten Kendal 26 September 2019 Balai Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal diikuti oleh 150 (seratus lima puluh) orang berasal dari unsur RT/RW, Perangkat Desa/Kelura han, Karang Taruna, PKK, Bidan Desa, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat di sekitar wilayah hutan Kabupaten Tegal	Pemateri/ Narasumber berasal dari : 1. BPBD Kabupaten Kendal; 2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Instruktur berasal dari : 1. BPBD Kabupaten Kendal; 2. SATPOL PP (DAMKAR) Kabupaten Kendal; 3. PMI Kabupaten Kendal;
8	Kabupat en Brebes	16 Oktober 2019	Pemateri/ Narasumber berasal dari : 1. BPBD Kabupaten Brebes;

N o.	Kab/kot a	Waktu dan Peserta	Narsum dan Instruktur
9	Kota Tegal	Aula Kantor Kecamatan Brebes, Jl MT Haryono No. 70, Kabupaten Brebes diikuti oleh 100 (seratus) orang berasal dari TNI, POLRI, SATGAS Penanggulangan Bencana, PMI, PRAMUKA, dan Komunitas Relawan Penanggulangan Bencana di wilayah Kabupaten Brebes 29 Oktober 2019 Pendopo Balai Kota Tegal, Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal diikuti oleh 100 (seratus) orang berasal dari TNI, POLRI, SATGAS Penanggulangan Bencana, PMI, PRAMUKA, dan Komunitas Relawan	2. BMKG Kota Tegal; 3. PMI Kabupaten Brebes. Pemateri/ Narasumber berasal dari : 1. BPBD Kota Tegal; 2. BMKG Kota Tegal; 3. PMI Kota Tega

N o.	Kab/kota	Waktu dan Peserta	Narsum dan Instruktur
		Penanggulangan Bencana di wilayah Kota Tegal	

d. Hasil

Kegiatan Peningkatan, Pengembangan Kapasitas Penanganan Darurat bagi Pemangku Kepentingan dan Generasi Muda, merupakan kegiatan teknis guna meningkatkan kemampuan masyarakat yang berlatar belakang Pelajar maupun masyarakat dalam situasi keadaan darurat bencana, yang sasarannya adalah unsur pelajar dan pengajar Sekolah Menengah Kejuruan dan atau sederajat serta masyarakat yang berada pada Daerah Rawan Bencana di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

e. Dokumentasi



Gambar 17 Simulasi Pelajar

3.4 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2019 melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dengan sasaran dan program:

- Sasaran : Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana
Indikator : Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi
- Program : Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Indikator : Persentase rehab rekon pasca bencana

Dengan anggaran Rp 1.750.000.000,- bidang rehabilitasi dan rekonstruksi melaksanakan 3 (tiga) kegiatan antara lain:

1. Penanganan rehabilitasi pasca bencana di Jateng
2. Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan PB dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Jateng
3. Sinergitas multisektor Penanganan Pasca Bencana Jateng

3.4.1 Seksi Rehabilitasi

Kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi rehabilitasi antara lain adalah:

1. Sosialisasi dan Pelatihan Alat Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pascabencana

- a. Gambaran kegiatan

Pemberdayaan masyarakat terdampak guna menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan terdampak bencana, dimana BPBD Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan sosialisasi dan pelatihan alat sosial ekonomi masyarakat pasca bencana.

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan alat sosial ekonomi masyarakat pasca bencana di Jawa Tengah dilaksanakan berdasarkan pada proposal permohonan bantuan BPBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Diharapkan pemerintah Kabupaten/kota yang sudah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ikut menjaga dan memelihara bantuan tersebut, dan selanjutnya untuk pengembangan hasil produksi pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pasca bencana disinergikan dengan OPD terkait (Dinas Sosial, Dispermades, Disnaker, Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag, dan OPD yang serumpun dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.

- b. Tujuan

- 1) Mengurangi resiko/dampak yang ditimbulkan oleh bencana khususnya bagi penduduk, seperti korban jiwa (kematian), kerugian ekonomi (economy cost) dan kerusakan sumber daya alam, melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat;
- 2) Meningkatkan pengetahuan masyarakat (public awareness) dalam menghadapi serta mengurangi dampak/resiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman (safe);
- 3) Membantu meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan dan pengoperasian alat yang diberikan;
- 4) Membantu meningkatkan nilai tambah perekonomian masyarakat di daerah pasca bencana melalui kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayahnya;
- 5) Tindak lanjut Visi Misi Gubernur Jawa Tengah yaitu memujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera.

c. Pelaksanaan

Pelatihan Pengoperasian alat dilaksanakan setelah pemberian bantuan alat. Pelatihan dilaksanakan di 6 (enam) kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap, Magelang, Karanganyar, Banjarnegara, Pemalang dan Klaten. Pengadaan alat dilaksanakan dengan mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Pelaksanaan dilaksanakan sebagai Kegiatan Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi Pascabencana 2019 dilaksanakan sebagai berikut:

1) Kabupaten Cilacap

Pelatihan dan Pemberdayaan di kabupaten Cilacap dilaksanakan bersama BPBD kabupaten Cilacap. Pelatihan Pembuatan Batu Bata dilaksanakan pada:

Hari/ : Selasa s.d Rabu, 18 s.d 19 Juni 2019
Tanggal

Pukul : 08.00 s.d selesai
 Tempat : Balai Desa Bangunreja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.
 Peserta : Sebanyak 40 (empat puluh) peserta yang terdiri dari warga Desa terdampak Bencana, Perangkat Desa Bangunreja, Ormas Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan PKK.
 Narasumber : 1. Kalaksa BPBD Cilacap dengan Materi Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana ~ Drs. Tri Komarasidhy S W M.M.
 2. Konsultan PLUT KUMKM Kabupaten Cilacap dengan materi ~ Manajemen Keuangan UKM pengrajin Pembuat Bata ~ Fathur Rozi, S.E.
 3. Ketua Paguyuban Manunggal Karso Pelatih Pembuatan Batu Bata ~ Rusmanto.
 Moderator : Kabid RR BPBD Cilacap ~ Drs. Purnomo Hermawan, M.Si.
 Bantuan peralatan : Mendasarkan proposal permohonan dari kelompok masyarakat/pemerintah desa di ketahui BPBD Kabupaten Cilacap berupa Alat Pembuat Batu Bata.

2) Kabupaten Magelang

Pelatihan dan Pemberdayaan di kabupaten Magelang dilaksanakan bersama BPBD kabupaten Magelang.

Pelatihan Pembuatan Slondok dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis s/d Jum`at, 20 s/d 21 Juni 2019
 Pukul : 08.00 s/d selesai
 Tempat : Balai Desa Desa Kalirejo Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang.
 Peserta : Sebanyak 40 (empat puluh) peserta yang terdiri dari warga Desa Terdampak Bencana, Perangkat Desa Bantar, Ormas Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan PKK.
 Narasumber : 1. Kabid RR BPBD Kabupaten Magelang dengan Materi Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana ~ Drs. Jayadi Imam Nugroho.

2. Disperindagkop Kabupaten Magelang dengan materi ~ Manajemen Keuangan UKM pengrajin Pembuat Slondok ~ Suryanto.

3. Pelatih Pembuatan Slondok ~ Ngadenan.

Moderator : Putra.

Bantuan peralatan : Mendasarkan proposal permohonan dari kelompok masyarakat/pemerintah desa di ketahui BPBD Kabupaten Magelang berupa alat Pembuat Slondok.

3) Kabupaten Karanganyar

Pelatihan dan pemberdayaan di kabupaten Karanganyar dilaksanakan bersama BPBD kabupaten Karanganyar. Pelatihan Pembuatan Keripik Singkong dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Senin s/d Selasa, 29 s/d 30 Juli 2019.

Pukul : 08.00 s/d selesai.

Tempat : Desa Balong Dusun Puri sari Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar.

Peserta : Sebanyak 40 (empat puluh) peserta yang terdiri dari warga Desa terdampak Bencana, Perangkat Desa Balong, Ormas Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan PKK.

Narasumber : Sekretaris BPBD Kabupaten Karanganyar dengan Materi Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana ~ Hendro.
Kasi Perimbangan UMKM Disperindagkop Kabupaten Karanganyar dengan materi ~ Manajemen Keuangan UKM pengrajin Kripik Singkong ~ Widodo.
Pelatih Pembuatan Kripik Singkong ~ Suyono.

Moderator : Kasi RR BPBD Kab Karanganyar Renggo Buono, S.T., M.T.

Bantuan peralatan : Mendasarkan proposal permohonan dari kelompok masyarakat/pemerintah desa di ketahui BPBD Kabupaten Karanganyar berupa Alat Pembuat Keripik Singkong.

4) Kabupaten Banjarnegara

Pelatihan pemberdayaan di kabupaten Banjarnegara dilaksanakan bersama BPBD kabupaten Banjarnegara.

Pelatihan Pembuatan Keripik Singkong dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa s/d Rabu, 13 s/d 14 Agustus 2019
 Pukul : 08.00 s/d selesai
 Tempat : Balai Desa Bantar Kec. Wanayasa- Banjarnegara.
 Peserta : Sebanyak 40 (empat puluh) peserta yang terdiri dari warga Desa Terdampak Bencana, Perangkat Desa Bantar, Ormas Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan PKK.
 Narasumber : 1. Kalaksa BPBD Banjarnegara dengan Materi Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana ~ Drs. Arief Rahman, S.T, M.Si.
 2. Penyuluh Disperindagkop Kabupaten Banjarnegara dengan materi~Manajemen Keuangan UKM pengrajin Kripik Singkong~Prayogo.
 3. Pelatih Pembuatan Kripik Singkong ~ Kuswoyo.
 Moderator : Kasi RR ~ Eko Setio Budi, S.Sos
 Bantuan peralatan : Mendasarkan proposal permohonan dari kelompok masyarakat/pemerintah desa di ketahui BPBD Kabupaten Banjarnegara berupa Alat Pembuat Keripik Singkong.

5) Kabupaten Pemalang

Pelatihan pemberdayaan di kabupaten Pemalang dilaksanakan bersama BPBD kabupaten Pemalang. Pelatihan Pembuatan Kerupuk dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa s.d Rabu, 17 s .d 18 September 2019.
 Pukul : 08.00 s/d selesai.
 Tempat : Balai Desa Cikadu. Watukumpul – Pemalang.
 Peserta : Sebanyak 40 (empat puluh) peserta yang terdiri dari warga Desa Terdampak Bencana, Perangkat Desa Cikadu, Ormas Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan PKK.
 Narasumber : 1. Kalaksa BPBD Pemalang dengan Materi Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana ~ Drs. Wismo, M.Pd.
 2. KASI Agro dan Perikanan Bidang Industri Kabupaten Pemalang dengan materi ~Manajemen Keuangan UKM

pengrajin Pembuat Krupuk ~ Suratno, S.P, M.M.

3. Pelatih/ Teknisi Maksindo Pembuatan Krupuk ~ Muhammad Ridwan.

Moderator : Kabid RR BPBD ~ Suyanto, S.Pd, M.Pd.

Bantuan peralatan : Mendasarkan proposal permohonan dari kelompok masyarakat/pemerintah desa di ketahui BPBD Kabupaten Pemalang berupa Alat Pembuat Kerupuk.

6) Kabupaten Klaten

Pelatihan pemberdayaan di kabupaten Klaten dilaksanakan bersama BPBD kabupaten Pemalang. Pelatihan Pembuatan Kopi dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa s.d Rabu, 15 s.d 16 Oktober 2019.

Pukul : 08.00 s.d selesai.

Tempat : Balai Desa Balerante Kecamatan Kemalang.

Peserta : Sebanyak 40 (empat puluh) peserta yang terdiri dari warga Desa Terdampak Bencana, Perangkat Desa Balerante, Ormas Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan PKK.

Narasumber : 1. Kalaksa BPBD Klaten dengan Materi Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana ~ Sip Anwar IB, M.Si.
2. Kasi Pem. Disperindagkop Kabupaten Klaten dengan materi ~ Manajemen Keuangan UKM pengrajin Pembuat/Penggiling Kopi ~ Sudirman.
3. Pelatih/ Teknisi Maksindo Pembuatan Krupuk ~ Muhammad Ridwan

Moderator : Kasi Rehab BPBD Klaten ~ Edi Eka S.

Bantuan peralatan : Mendasarkan proposal permohonan dari kelompok masyarakat/pemerintah desa di ketahui BPBD Kabupaten Klaten berupa Alat Pembuat Kopi.

d. Hasil

1) Kegiatan Pemulihan dan Peningkatan Sosial dan Ekonomi Pascabencana bertujuan dapat membantu meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan dan pengoperasian alat yang diberikan serta dapat meningkatkan nilai tambah perekonomian masyarakat didaerah pasca

bencana melalui kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang ada diwilayahnya;

- 2) Capaian dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pemulihan dan Peningkatan Sosial dan Ekonomi Pascabencana melalui kegiatan pemberian Bantuan Alat dan Pelatihan kepada kelompok masyarakat. Alokasi Bantuan Alat dan Pelatihan Kegiatan Pemulihan Dan Peningkatan Sosek Pascabencana 2019 diberikan kepada 6 (enam) kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap, Magelang, Karanganyar, Banjarnegara Pemalang dan Klaten.

e. Foto dokumentasi



Gambar 18 Acara Pemulihan dan Peningkatan Sosial dan Ekonomi Pasca Bencana Kab. Cilacap dan Magelang

2. Rapat Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana

a. Gambaran kegiatan

Kegiatan rapat Koordinasi bertujuan untuk mendapatkan masukan, saran, data dan informasi dalam rangka penyusunan kegiatan Renaksi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana. Rapat dimaksud melibatkan pejabat Struktural di lingkungan BPBD Kabupaten/Kota Se- Jawa tengah dengan narasumber para ahli di bidang penanggulangan bencana (Khususnya bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana).

b. Tujuan

Untuk membangun komitmen dan kesepakatan bersama antara BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD Kab/kota dan menempatkan kegiatan rehabilitasi pasca bencana khususnya pemulihan sosial ekonomi masyarakat menjadi hal prioritas yang harus dikawal bersama untuk diprogramkan dan dilaksanakan.

c. Pelaksanaan

1) Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana sebagai berikut :

Hari/Tanggal	: Rabu s.d Kamis, 20 s.d 21 Februari 2019.
Tempat	: Hotel Atria Kota Magelang.
Peserta	: Kalaksa BPBD Kab/Kota se Jawa Tengah.
Narasumber	: 1. Kebijakan BNPB Dalam Pemulihan Sosek Masyarakat Pasca Bencana disampaikan oleh Direktur Pemulihan Sosial Ekonomi BNPB (Dr.Ir.Taufik Kartiko, M.Si). 2. Perencanaan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana disampaikan oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah (Agung Koenmarjono). 3. Alternatif Kegiatan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana disampaikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah (Hatta Hatnansya Yunus).
Fasilitasi Peserta	: Konsumsi, Seminar Kit, dan Uang Harian.
Hal-Hal substansial	: 1. Selama ini penanggulangan bencana (<i>pasca bencana</i>) belum mendapatkan porsi yang maksimal itu terlihat dari minimnya alokasi anggaran BPBD Provinsi dan Kabupaten/kota yang diperuntukan untuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; 2. Kedepan Salah satu kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian maksimal dari BPBD Provinsi dan Kabupaten/kota adalah penanganan

rehabilitasi dan rekonstruksi, salah satunya adalah penyediaan lahan untuk relokasi masyarakat terdampak bencana dan kegiatan peningkatan social ekonomi masyarakat dalam wujud bantuan alat produksi dan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat terdampak bencana;

3. Persyaratan usulan dana Rehabilitasi dan Renkonstruksi sector social dan sector ekonomi ke BNPB dipandang oleh daerah masih terlalu sulit oleh karena itu pihak BNPB perlu penyederhanaan persyaratan;
4. BPBD Provinsi dan Kab/kota perlu menggali potensi dana Rehabilitasi dan Renkonstruksi sector social dan sector ekonomi dari dana Corporate Social Responsibility (CSR);
5. Bappeda diharapkan mempunyai peran lebih untuk mengakomodir kebutuhan anggaran BPBD Provinsi dan kab/kota untuk mendukung kegiatan Rehabilitasi dan Renkonstruksi sector social dan sector ekonomi;
6. BPBD Provinsi kab/kota akan bekerjasama dengan Dinas Koperasi Dan UKM dalam hal pemberdayaan ekonomi produktif melalui pelatihan keterampilan masyarakat pasca bencana;
7. Standar pelayanan minimum (SPM) perlu dijadikan acuan dalam pemulihan peningkatan social ekonomi masyarakat pasca bencana.

2) Pelaksanaan Kegiatan Rapat Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana dan Rencana Aksi Pascabencana (Rehabilitasi Pasna):

Hari/Tanggal	:	Selasa s.d Rabu/ 21 s.d 22 Mei 2019
Tempat	:	Hotel Atria Kota Magelang
Peserta	:	Kalaksa dan Kabid/Kasi RR BPBD Kab/Kota se Jawa Tengah.
Narasumber	:	1. Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di

- Kabupaten Purworejo
disampaikan oleh Kalaksa BPBD
Kabupaten Purworejo
(Drs.Sutrisno,M.Si);
2. Best Practise Penanganan
Bencana di Kabupaten Magelang
disampaikan oleh Kalaksa BPBD
Kabupaten Magelang (Drs.Edy
Susanto);
- Moderator Jamroni, S.Pd M.Pd (Plt Kabid RR
BPBD Kabupaten Tegal) dan Drs.
Jayadi Imam Nugroho, MT (Kabid RR
kabupaten Magelang);
- Fasilitasi : Konsumsi, Seminar Kit, dan Uang
Peserta Harian.
- Hal-Hal : 1. Perencanaan Pembangunan
substansial kembali Daerah terdampak pasca
bencana perlu adanya
perhitungan kebutuhan yang
detail dan teliti;
2. Kegiatan Rehabilitasi suatu
Daerah terdampak bencana perlu
adanya dari berbagai pihak yaitu
Pemerintah Masyarakat dan Pihak
Swasta yang ada di sekitar daerah
terdampak bencana;
3. Pemberdayaan perekonomian
Masyarakat pasca bencana akan
lebih mudah dilaksanakan jika
mengedepankan kearifan lokal
yang ada di Daerah tersebut dan
mengembangkannya;
4. Pelaksanaan Relokasi suatu
Daerah terdampak bencana
sebelum dilaksanakan harus
menyiapkan semua kelengkapan
dokumen dan berkoordinasi
dengan semua OPD teknis serta
masyarakat yang akan direlokasi.
- 3) Rapat Koordinasi Rencana Aksi Pemulihan Pasca Bencana
Kegiatan Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana:
Hari/Tanggal : Rabu s.d Kamis, 23 s.d 24 Oktober
2019
Tempat : Hotel Nugraha Wisata di Kabupaten
Semarang.

Peserta	:	Kalaksa dan Kabid/Kasi RR BPBD Kab/Kota se Jawa Tengah.
Narasumber	:	1. BNPB dengan materi Tantangan dan Solusi Pengurangan Resiko Bencana Saat Pasca Bencana di kawasan terdampak bencana; 2. TGUPP dengan materi Strategi Pembangunan Ekonomi Pasca Bencana di Jawa Tengah (Ketahanan Ekonomi yang Tangguh Bencana); 3. Ketua Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah dengan materi Kebijakan Keuangan Berkelanjutan OJK dlm mendorong pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan (Berkaitan Pasca Bencana); 4. Kepala BPR BKK Jawa Tengah dengan Materi Kebijakan dan strategi dlm peningkatan ekonomi yg tangguh bencana.
Fasilitasi Peserta	:	Konsumsi, Seminar Kit, dan Uang Harian.
Hal-Hal substansial	:	1. BPBD Kabupaten Tegal mengusulkan agar kegiatan rakor ini dibuatkan surat rekomendasi kepada Gubenur di tujukan ke Bupati dan Wali kota agar anggaran BPBD di Kabupaten/Kota di perhatikan dan penekanan CSR bagi dunia usaha, mampu menjadikan relokasi bagi masyarakat korban; 2. BPBD Banyumas mengusulkan agar peserta Rakor melibatkan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) terkait peminjaman modal terdampak bencana.

d. Hasil

- 1) Kegiatan rapat Koordinasi bertujuan untuk mendapatkan masukan, saran, data dan informasi dalam rangka penyusunan kegiatan Renaksi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana. Rapat dimaksud melibatkan pejabat Struktural di

lingkungan BPBD Kabupaten/Kota Se- Jawa tengah dengan narasumber para ahli di bidang penanggulangan bencana (Khususnya bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana);

- 2) Adapun Capaian yang diharapkan adalah terwujudnya rekomendasi guna pelaksanaan kegiatan Renaksi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana dan peningkatan kapasiatas aparatur pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana serta tersusunnya rencana tindak lanjut Renaksi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di tahun selanjutnya.

e. Foto dokumentasi



Gambar 19 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kegiatan Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana Di Jawa Tengah Tahun 2019

Tabel 35
Kegiatan Seksi Rehabilitasi Tahun 2019

No.	KEGIATAN / Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
1.	Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jateng			
a	Rapat Koordinasi Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Bencana di Jawa Tengah	20-21 Februari 2019	Hotel Atria Kota Magelang	50

No.	KEGIATAN / Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
b	Rapat Pengkajian Kebutuhan dan Penyusunan Rencana Aksi Pascabencana	21-22 Mei 2019	Hotel Atria Kota Magelang	60
c	Rapat Pelaksanaan Rapat Koordinasi Rencana Aksi Pemulihan Pasca Bencana Kegiatan Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana Di Bandungan Kabupaten Semarang	23-24 Oktober 2109	Hotel Nugraha Wisata Bandungan Kab. Semarang	46
d	Pelatihan Alat Sosek Pasca Bencana Pembuatan Batu Bata di Cilacap	18 -19 Juni 2019	Desa Bangunreja Kec. Kedungreja Kab Cilacap	40
e	Pelatihan Alat Sosek Pasca Bencana Pembuatan Krupuk di Magelang	20-21 Juni 2019	Desa Kalirejo Kec Salaman, Kab. Magelang	40
f	Pelatihan Alat Sosek Pasca Bencana Pembuatan Krupuk di Banjarnegara	13-14 Agustus 2019	Desa Bantar Kec Wanayasa Kab. Banjarnegara	40
g	Pelatihan Alat Sosek Pasca Bencana Pembuatan Krupuk di Karanganyar	29-30 Juli 2019	Desa Balong Kec. Jenawi Kab. Karanganyar	40
h	Pelatihan Alat Sosek Pasca Bencana Pembuatan Krupuk di Pemalang	17-18 September 2019	Desa Cikadu Kec. Watukumpul Kab Pemalang	40
i	Pelatihan Alat Sosek Pasca Bencana Pembuatan Kopi di Klaten	15-16 Oktober 2019	Desa Baleranto Kec Kemalang Kab. Klaten	40
JUMLAH				396 Org

3.4.2 Seksi Rekonstruksi

1. FGD (Forum Group Discussion) dan Pelatihan Kebutuhan Pascabencana (JITU PASNA).

a. Gambaran kegiatan

Peningkatkan kapasitas dalam kajian kebutuhan pascabencana para pemangku kepentingan penanggulangan bencana diharapkan dapat mengidentifikasi atau mengkaji penghitungan kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi, dan peningkatan resiko yang menyangkut aspek fisik dan non fisik meliputi pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor. Termasuk dampak psikologis korban bencana, hal ini dikarenakan jiwa dan lingkungan yang sudah tergoncang akibat bencana perlu pemulihan agar tidak berdampak pada trauma yang berkepanjangan. Oleh karena itu semua unsur penanggulangan bencana perlu memahami dan mengimplementasikan perspektif dukungan psikososial yang mendorong perilaku pengurangan risiko bencana dan menumbuhkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Kegiatan ini dimaksudkan akan menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana cara melakukan kajian kebutuhan pasca bencana di lokasi bencana, karena ketangguhan tidak hanya dibutuhkan pada saat terjadi bencana, tapi juga penanganan yang tepat dan pemulihan pasca bencana. Tujuannya adalah untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) pada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga mempunyai pemahaman yang sama mengenai pengkajian kebutuhan pascabencana serta mampu menyusun dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, melalui kegiatan Forum Group Discussion (FGD), Pelatihan Jitu Pasna dan Pelatihan dukungan dan pendampingan dalam upaya pemulihan psikososial pasca

bencana oleh sebab itu kegiatan ini melibatkan pihak terkait yaitu BNPB sebagai Narasumber utama, Dinas PU SDA TARU, Dinas Bina Marga dan Cipkataru, Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman, BPKP Perwakilan Jawa Tengah dan Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah, Pusat Studi Bencana UNNES) Semarang dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait kebencanaan dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedangkan untuk pelatihan dukungan dan pendampingan dalam upaya pemulihan psikososial melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial disamping melibatkan Lemabaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Mennonite Diakonia Service (MDS) Surakarta yang punya pengalaman dikegiatan pemulihan psikososial korban-korban bencana di Indonesia sebagai fasilitator-fasilitator dalam pelatihan serta dengan keterlibatan langsung BPBD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah sebagai peserta sangatlah penting untuk dilaksanakan terlebih untuk tahun – tahun berikutnya.

b. Tujuan

- 1) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menganalisa, menghitung, merumuskan dampak kerusakan akibat bencana, sehingga didapatkan jumlah nilai kerusakan baik alam, manusia, dan infrastruktur, sehingga mempercepat proses pemulihan pascabencana;
- 2) Meningkatkan kapasitas aparatur BPBD/SKPD teknis terkait kebencanaan dalam pemahaman yang baik tentang Jitu pasna dan mampu melakukan pengkajian kebutuhan yang baik dan benar, sehingga dapat membuat perencanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi pascabencana sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku;

- 3) Meningkatkan penyampaian informasi yang berbasis pada bukti-bukti akurat dalam menyusun rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi pascabencana;
- 4) Meningkatkan pemahaman yang sama bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan penilaian akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan pascabencana;
- 5) Meningkatkan sumber daya manusia yang handal dalam pengkajian kebutuhan pascabencana dan perencanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi pascabencana;
- 6) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penanganan kerusakan infrastruktur pasca bencana, antara lain meliputi sektor perumahan dan pemukiman, jalan dan jembatan, bangunan sumber daya air, perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan sarana prasarana pemerintahan;
- 7) Meningkatkan pemahaman dampak psikososial bencana dan prinsip-prinsip dukungan psikososial terkait penanggulangan bencana;
- 8) Meningkatkan pemahaman kebijakan dan implementasi program dukungan psikososial dalam penanggulangan bencana;
- 9) Mengaplikasikan perspektif ketangguhan masyarakat melalui peran perguruan tinggi dalam masyarakat;
- 10) Meningkatkan peserta dalam pemahaman berbagai indikator keberhasilan untuk program pemulihan psikososial pasca bencana;
- 11) Memfasilitasi dan penyamanan persepsi dengan kabupaten/kota se Jawa Tengah tentang pengkajian kebutuhan pascabencana, dukungan dan pendampingan dalam upaya pemulihan psikososial pascabencana serta cara atau mekanisme pengajuan usulan kebutuhan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana
di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

c. Pelaksanaan

1) *Focus Group Discussion (FGD)* ke 1

- Hari/Tanggal : Kamis, 21 Maret 2019.
Pukul : 08.00 s/d selesai.
Tempat : Ruang Rapat Lt. IV Gedung A
Kantor BPBD Provinsi Jawa Tengah
Jl. Imam Bonjol 1 F Semarang.
- Peserta : 70 (Tujuh Puluh) orang terdiri dari :
1. 33 Kepala Pelaksana dan Kepala Bidang RR/Kepala Seksi Rekontruksi BPBD Kab/Kota se Jawa Tengah sejumlah 66 (enam puluh enam) orang.
 2. 2 (dua) orang Utusan dari Kota Magelang dan Kota Salatiga, sejumlah 4 (empat) orang.
- Narasumber dan Materi : 1. Swasono P. Rahardjo (Kepala Seksi Infentarisasi Fisik BNPB), dengan materi Manajemen Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana dan E-Proposal Rehabilitasi Rekontruksi;
2. Agus Purwanto (Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah) dengan materi Penanganan Infrastruktur Sumber Daya Air Pascabencana;
3. Purhatmanto (Dinas PU BINMARCIPKA Provinsi Jawa Tengah) dengan materi: Penanganan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Pascabencana pada Jalan Provinsi jawa Tengah.
- Moderator : Tatag Wibisono, MT dari BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.
- Metode : 1. Diskusi Terfokus, bukan diskusi bebas. Tidak hanya terfokus pada interaksi dan dinamika kelompok, namun pula terfokus pada tujuan diskusi;
2. Pengumpulan informasi mengenai suatu masalah tertentu yang sangat spesifik untuk didiskusikan;

3. Narasumber atau Moderator mendorong peserta secara aktif untuk berbicara terbuka dan spontan tentang hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan topik/tema.

Fasilitas Peserta : Konsumsi, Kaos, Seminar Kit dan Uang Harian.

2) Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA)

Hari/Tanggal : Selasa s.d Kamis, 25 s.d 27 Juni 2019.

Pukul : 08.00 s.d selesai.

Tempat : Syariah Hotel Solo,
Jl Adi Sucipto Nomor 47 Surakarta .

Peserta : 50 (Lima Puluh) orang terdiri dari :
1. 33 orang BPBD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
2. 17 orang dari Unit LIDI PB di Jawa Tengah (Provinsi, Kabupaten Boyolali, Klaten, Kudus, Karanganyar, Magelang, Sukoharjo dan Wonogiri).

Fasilitator dan Materi : 1. SUNARJA, Amd, dengan materi : Konsep Dasar Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITU PASNA) dalam Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
2. BAMBANG HERY PURWANTO, ST dengan materi : Simulasi Pengkajian Kebutuhan Pascabencana : Perumusan Ruang Lingkup dan Instrumen;
3. ZEIN MUFARRIH, SIP., MIKom, dengan materi : Simulasi Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITU PASNA) : Praktek Tabulasi Data Lapangan;
4. RURID RUDIANTO, ST, dengan materi : Pengantar Instrumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;
5. MART WIDIARTO, Amd, dengan materi : Analisis Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Simulasi/Praktek Identifikasi Akibat Bencana :
a. Perumusan Lingkup dan Instrumen Jitu Pasna;

- b. Praktek Penggunaan Instrumen Jitu Pasma;
- c. Praktek Tabulasi Data Lapangan;
- d. Kesimpulan dan Pembelajaran.

- Metode : 1. Ceramah interaktif dan tanya jawab : Suatu cara memberikan informasi kepada peserta yang berfungsi untuk menjelaskan sesuatu. Pengumpulan informasi mengenai suatu masalah tertentu yang sangat spesifik untuk didiskusikan;
2. Diskusi : Berfungsi sebagai arena saling bertukar informasi dan memecahkan masalah serta arena daya cipta dan daya analisa.
3. Pemanasan/ice breaking : Metode ini berfungsi untuk bina suasana yang hangat dan gembira namun serius untuk menarik perhatian peserta terhadap materi pelatihan.
4. Curah pendapat : Berfungsi membangkitkan keberanian peserta untuk mengungkapkan pendapat dan analisanya.
- Fasilitas : Akomodasi/Penginapan, Konsumsi, Kaos, Seminar Kit dan Uang Harian.
- Peserta : 1. Pelatihan ini menggunakan dasar Perka BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana, yang bertujuan untuk menjalankan proses penilaian atas kerusakan dan kerugian serta kebutuhan yang bersifat komprehensif baik aspek fisik maupun aspek kemanusiaan akibat bencana. Ruang lingkup pelatihan ini meliputi aspek Perumahan dan Pemukiman; infrastruktur; Sosial Ekonomi dan Lintas Sektor;
- Hasil : 2. Metode pelatihan yang digunakan adalah pelatihan orang dewasa (andragogi) dengan komposisi 60% teori dan 40% praktek studi kasus (kerja kelompok);
3. Pembahasan Pengkajian Pelatihan Kebutuhan Jitu Pasma antara lain :

- a) Kerusakan (dampak langsung) adalah dampak atas Perubahan bentuk pada aset fisik dan infrastruktur milik pemerintah, masyarakat, keluarga dan badan usaha sehingga terganggu fungsinya secara parsial atau total sebagai akibat langsung dari suatu bencana. Perkiraan itu harus memperhitungkan tingkat kerusakan (apakah aset masih bisa dipulihkan/ diperbaiki, atau sudah sama sekali hancur tidak dapat diperbaiki);
 - b) Kerugian (dampak tidak langsung) adalah aliran yang akan terkena dampak, seperti pendapatan yang berkurang, pengeluaran yang bertambah, dll selama periode waktu hingga asset dipulihkan. Semua itu akan dijumlahkan berdasarkan nilai sekarang. Penentuan periode waktu sangat penting. Jika pemulihan berlangsung lebih lama daripada yang diharapkan kerugian bisa meningkat secara signifikan;
 - c) Gangguan Akses adalah Hilang atau terganggunya akses individu, keluarga dan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasarnya akibat suatu bencana;
 - d) Gangguan Fungsi adalah Hilang atau terganggunya fungsi kemasyarakatan dan pemerintahan akibat suatu bencana, terganggu atau terhentinya fungsi-fungsi pelayanan dasar;
 - e) Peningkatan Resiko adalah Meningkatnya kerentanan dan atau menurunnya kapasitas individu, keluarga, masyarakat, pemerintah dan badan usaha sebagai akibat dari suatu bencana, setelah bencana akan terjadi bencana susulan.
4. Dalam praktek studi kasus (kerja kelompok), peserta dibagi dalam 5

(lima) kelompok, masing-masing kelompok diberi tugas untuk menyelesaikan studi kasus dalam bentuk pengkajian diskusi, kelompok 1 (satu) membahas dan mengerjakan perhitungan kerusakan dan kerugian sektor perumahan dan permukiman, kelompok 2 (dua) membahas dan mengerjakan perhitungan kerusakan dan kerugian sektor infrastruktur, kelompok 3 (tiga) membahas dan mengerjakan perhitungan kerusakan dan kerugian sektor ekonomi, kelompok 4 (empat) membahas dan mengerjakan perhitungan kerusakan dan kerugian sektor sosial kemanusiaan, kelompok 5 (lima) membahas dan mengerjakan perhitungan kerusakan dan kerugian sektor lintas sektor. Hasil kerja masing-masing kelompok sebagaimana terlampir.

5. Indikator Pencapaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah :
 - a) Tujuan : Memulihkan daerah terdampak bencana;
 - b) Sasaran : Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pascabencana
 - c) Prinsip : Membangun kembali yang lebih baik dan aman berbasis pengurangan risiko bencana (*Build back better and saver*).

Hasil : 1. Hal-hal substansial pada sambutan Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, sebagai berikut :

- a. *Forum Group Discussion* (FGD) ini sangat penting untuk meningkatkan koordinasi, menyatukan langkah dan tindakan kita baik tingkat pemerintahan pusat, Provinsi maupun Kab/Kota serta semua pihak yang terkait dengan

- pembangunan infrastruktur pascabencana di Jawa Tengah;
- b. Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dan memperhatikan aspirasi masyarakat.
2. Point Pemaparan Materi disampaikan BNPB sebagai berikut :
- a. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi menurut Perka No 6 Tahun 2017 Pasal 4 :
- 1) Pengkajian kebutuhan pascabencana;
 - 2) Penyusunan rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - 3) Pengalokasian sumber daya dan dana;
 - 4) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - 5) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan.
- b. Indikator Pencapaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah
- 1) Tujuan : Memulihkan daerah terdampak bencana;
 - 2) Sasaran : Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat pascabencana;
 - 3) Prinsip : Membangun kembali yang lebih baik dan aman berbasis pengurangan risiko bencana;
 - 4) Indikator : Persen (%) peningkatan indeks pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.
- c. Implementasi e-proposal diperlukan dengan tujuan :
- 1) Penerimaan proposal melalui satu pintu;
 - 2) Hanya proposal yang memenuhi persyaratan yang akan mendapatkan nomor registrasi dalam sistem informasi terkait kekurangan persyaratan proposal

- dapat segera diketahui oleh pengirim;
- 3) Efisiensi biaya perjalanan dinas, dimana berkas proposal cukup di kirim via pos setelah lengkap dan ter-registrasi dalam sistem;
 - 4) Sebagai e-arsip/database elektronik.
3. Point Pemaparan Materi Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
- a. Pengelolaan Sumber Daya Air
Berdasarkan Wilayah Sungai (WS) di Jawa Tengah Dibagi Dalam 10 Wilayah Sungai (WS) :
 - 1) 2 (Dua) Wilayah Sungai Strategis Nasional :
 - a) Wilayah Sungai Jratun Seluna : 69 DAS
 - b) Serayu Bogowonto : 15 DAS
 - 2) 4 (Empat) Wilayah Sungai Lintas Provinsi:
 - a) Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung : 5 DAS
 - b) Wilayah Sungai Citanduy : 20 DAS
 - c) Wilayah Sungai Progo Opak Serang : 1 DAS
 - d) Wilayah Sungai Bengawan Solo : 1 DAS

Kewenangan Pemerintah (Pusat) :
 $84 + 27 = 111$ DAS

 - b. 2 (Dua) Wilayah Sungai Lintas Kabupaten :
 - 1) Wilayah Sungai Pemali Comal : 32 DAS
 - 2) Wilayah Sungai Bodri Kuto : 12 DAS

Kewenangan Provinsi : 44 DAS

 - c. 2 (Dua) Wilayah Sungai Kabupaten :
 - 1) Wilayah Sungai Wiso Gelis : 27 DAS
 - 2) Wilayah Sungai Karimunjawa : 20 DAS

Kewenangan Kab. Jepara : 47 DAS.

4. Point Pemaparan Materi Dinas PU BINMAR CIPKA Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

A. Penanganan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Pasca Bencana Pada Jalan Provinsi Jawa Tengah :

- 1) Program : Perencanaan Dan Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan Dan Keciaptakaryaan;
- 2) Kegiatan : Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Dan Penggantian Jembatan Provinsi;
- 3) Keluaran : Penanganan Kerusakan Khusus Jalan Dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah.

B. Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan :

- 1) Longsoran pada bahu jalan karena pengaruh pergerakan tanah yang berakibat pada terganggunya pelayanan lalu lintas, dan Rusaknya dinding penahan jembatan akibat tergerus arus banjir;
- 2) Perkiraan biaya yang timbul untuk penanganan kerusakan pada point di atas tidak dapat tercukupi oleh pagu anggaran kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Balai Pelaksana Teknis Jalan;
- 3) Ada surat keterangan kejadian bencana alam yang diterbitkan oleh Bupati / Walikota / Instansi terkait di wilayah terjadinya kerusakan khusus jalan dan jembatan provinsi.

5. Diskusi

- a. E-Proposal merupakan salah satu perwujudan reformasi birokrasi dengan membangun dan mengembangkan sistem elektronik pemerintah;
- b. Terkait kejadian longsor yang sering terjadi di jalur Selo-Magelang di harapkan Kabupaten Boyolali agar membuat usulan pengadaan

- peralatan untuk menanggulangi longsor yang kejadiannya terus menerus;
- c. BPBD Kabupaten Purworejo dalam re-lokasi terhadap rumah agar diperhatikan. BPBD agar memperhatikan kegiatan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS), BSPS yang terbaru terbagi menjadi 2 (Dua) berupa Pembangunan Baru (PB) dan Peningkatan Kualitas (PK);
 - d. Penyebab banjir di jalan pantura disebabkan 3 Hal :
 - 1) Sungai yang meluap dan terdampak di Desa-deso Kabupaten Batang, Pekalongan;
 - 2) Jalan Pantura menyebabkan air tidak bisa melintas dengan baik;
 - 3) Air terhalang oleh jalan Tol dari barat sampai ketimur yang dulunya air mudah meresap dan banyak masuk ke tanah sekarang susah untuk meresap.
Solusi : BPBD ikut berpartisipasi pada saluran air agar tidak terjadi banjir.
 - e. BPBD Kab/Kota agar memfasilitasi dan mengkoordinasikan penanganan kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

3) *Focus Group Discussion (FGD) ke 2*

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Agustus 2019
 Pukul : 08.00 s.d selesai
 Tempat : Ruang Rapat Lt. IV Gedung A
 Kantor BPBD Provinsi Jawa Tengah
 Jl. Imam Bonjol 1 F Semarang.
 Peserta : 80 (Tujuh Puluh) orang terdiri dari

1. 33 (tiga puluh tiga) Kepala Pelaksana dan Kepala Bidang RR/Kepala Seksi Rekontruksi BPBD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah sejumlah 66 (enam puluh enam) orang;

	2. 2 (dua) orang Utusan dari Kota Magelang dan Kota Salatiga, masing-masing 1 (satu) orang; 3. 12 (dua belas) orang dari Unit LIDI PB di Jawa Tengah (Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali, Grobogan, Karanganyar, Klaten, Kudus, Magelang, Rembang, Sragen, Surakarta dan Wonogiri.
Narasumber dan Materi	1. Melinda Irfiani, S.Psi (Kepala Seksi Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan BNPB), dengan materi : Kebijakan dan Implementasi Program Dukungan Psikososial Dalam Upaya Pemulihan Pascabencana Yang Lebih Baik; 2. Taufik Akbar, S.ST (Fungsional Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah) dengan materi : Penanganan dan Dukungan Psikososial Pascabencana Bagi Korban Bencana dan Pengiat Kebencanaan; 3. Andi Irwan Benardi, M.PD (Pusat Studi Bencana UNNES) Semarang) dengan materi : Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Upaya Pemulihan Pasca Bencana.
Moderator	: Tatag Wibisono, MT dari BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.
Metode	1. Diskusi Terfokus, bukan diskusi bebas. Tidak hanya terfokus pada interaksi dan dinamika kelompok, namun pula terfokus pada tujuan diskusi; 2. Pengumpulan informasi mengenai suatu masalah tertentu yang sangat spesifik untuk didiskusikan; 3. Narasumber atau Moderator mendorong peserta secara aktif untuk berbicara terbuka dan spontan tentang hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan topik/tema.
Fasilitas Peserta	: Konsumsi, Kaos, Seminar Kit dan Uang Harian.
Hasil	1. Dukungan Psikososial dalam Upaya Pemulihan Pasca Bencana antara lain : 1) Layanan Dukungan Psikososial (LDP) merupakan rangkaian upaya pemulihan yang masuk didalam

- rencana rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 2) Kegiatan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) merupakan upaya mengembalikan aktivitas dan kehidupan masyarakat dan daerah pasca bencana. Layanan Dukungan Psikososial dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat;
 - 3) Layanan Dukungan Psikososial (LDP) bagi korban/penyintas dan penggiat kebencanaan merupakan salah satu siklus penanganan bencana yang cukup penting untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial;
 - 4) Melalui proses LDP yang terarah, terencana dan sistematis serta terstruktur diharapkan para korban/penyintas dan penggiat kebencanaan mampu mengembalikan kemampuannya untuk menjalankan peran sosialnya secara memadai dan berkelanjutan.
2. Prinsip “Build Back Better” dalam Pemulihan Psikososial :
- 1) Jangan melakukan hal yang berbahaya: belajarlah dari masa lalu dan hindarilah kerusakan yang tidak perlu demi pemulihan selanjutnya;
 - 2) Para pelaku harus bertanggung jawab terhadap orang-orang yang mereka bantu;
 - 3) Masyarakat terdampak bencana harus menjadi pengambil keputusan;
 - 4) Pemulihan ekonomi lokal dan mata pencaharian harus menjadi prioritas;
 - 5) Upaya-upaya rehabilitasi dan rekonstruksi harus mengakui adanya keragaman;
 - 6) Masyarakat harus diperkenankan untuk sedapat mungkin

- menggunakan sumber daya mereka sendiri;
- 7) Rekonstruksi harus memperhatikan bahaya dan resiko di waktu kemudian.
3. Sedangkan prinsip Pemulihan Psikososial adalah 3 L :
- 1) Penerimaan proposal melalui satu pintu;
 - ✓ Perhatikan rasa aman
 - ✓ Perhatikan kebutuhan dasar
 - ✓ Perhatikan orang yang membutuhkan dukungan khusus
 - 2) Listen (dengarkan) :
 - ✓ Pendekatan pada orang yang membutuhkan dukungan
 - ✓ Bertanya tentang kebutuhan
 - ✓ Dengarkan dan bantu untuk merasa lebih nyaman
 - 3) Link (rasakan/jalin hubungan) :
 - ✓ Menghubungkan dengan dukungan sosial
 - ✓ Beri informasi yang dibutuhkan
 - ✓ Fasilitasi mengelola masalah.
- 4) *Pelatihan Dukungan Psikososial Dalam Upaya Pemulihan Pasca Bencana:*
- Hari/ Tanggal : Senin s.d Rabu, 28 s.d 30 Oktober 2019
- Pukul : 08.00 s/d selesai
- Tempat : Grand HAP Hotel Surakarta
Jl Brigjend Slamet Riyadi No.331,
Surakarta.
- Peserta : 50 (Lima Puluh) orang terdiri dari :
1. 33 (tiga puluh tiga) Kepala Bidang RR/Kepala Seksi Rekontruksi/ Staf yang berkompeten BPBD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, masing-masing 1 (satu) orang;
 2. 4 (empat) orang Utusan dari Kota Magelang dan Kota Salatiga, masing-masing 2 (dua) orang;
 3. 13 orang dari Unit LIDI PB di Jawa Tengah (Provinsi Jawa Tengah,

Kabupaten Boyolali, Grobogan,
Karanganyar, Klaten, Kudus,
Magelang, Sragen, Surakarta dan
Wonogiri).

- Fasilitator dan Materi : a. Joko Supriyanto (Trainer MDS),
dengan materi
- 1) Dampak bencana terhadap kondisi psikososial individu dan komunitas;
 - 2) Ragam implementasi kegiatan psikososial;
 - 3) Kaitan kebijakan dan implementasi program dukungan psikososial dalam penanggulangan bencana;
 - 4) Praktek-praktek dukungan psikososial dalam penanggulangan bencana di Indonesia.
- b. Kuriake Kharismawan (Trainer MDS),
dengan materi :
- 1) Konsep dasar dukungan psikososial dalam situasi bencana;
 - 2) Kebijakan program dukungan psikososial dalam penanggulangan bencana;
 - 3) Ketangguhan masyarakat dan kelompok rentan bencana.
- c. Setyawan Judha K (Trainer MDS),
dengan materi :
- 1) Teknik penyusunan laporan situasi psikososial bencana;
 - 2) Rencana Tindak Lanjut;
 - 3) Building Learning Commitment.
- Metode : a. Pre dan Post-test :
Kegiatan ini bertujuan untuk melihat sejauhmana tingkat pemahaman dan pengetahuan peserta pelatihan tentang Psikososial dan bagaimana mengkoordinasikannya. Test ini dilakukan pada saat sebelum dan setelah kegiatan dilakukan dan sekaligus sebagai bahan evaluasi;
- b. Pemanasan/ice breaking :
Metode ini berfungsi untuk bina suasana yang hangat dan gembira namun serius untuk menarik perhatian peserta terhadap materi pelatihan. Narasumber atau Moderator

mendorong peserta secara aktif untuk berbicara terbuka dan spontan tentang hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan topik/tema.

- c. Ceramah interaktif dan tanya jawab:
Suatu cara memberikan informasi kepada peserta yang berfungsi untuk menjelaskan sesuatu.
- d. Diskusi Kelompok :
Berfungsi sebagai arena saling bertukar informasi dan memecahkan masalah serta arena daya cipta dan daya analisa.
- e. Bermain peran:
Berfungsi sebagai penumbuh spontanitas dan ekspresi serta mengembangkan daya analisa dan pengamatan peserta.
- f. Simulasi :
Berfungsi sebagai ekspresi spontanitas peserta dan penumbuh daya analisa.
- g. Curah pendapat :
Berfungsi membangkitkan keberanian peserta untuk mengungkapkan pendapat dan analisisnya.

Fasilitas Peserta : Akomodasi / Penginapan, Konsumsi, Kaos, Seminar Kit dan Uang Harian.

- Hasil : a. Hal-hal Substansial :
- 1) Perka BNPB No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana dalam salah satu ruang lingkup pelaksanaan pemulihan dalam Rehabilitasi dan Rekontruksi adalah pemulihan sosial psikologis yang ditujukan untuk membantu kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana, dengan memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana;
 - 2) Metode pelatihan yang digunakan adalah pelatihan orang dewasa (andragogi) dengan komposisi 60%

teori dan 40% praktek studi kasus (kerja kelompok).

b. Dalam praktek studi kasus (kerja kelompok), peserta dibagi dalam 6 (enam) kelompok. Masing-masing kelompok diberi tugas untuk menyelesaikan studi kasus dalam bentuk pengakajian diskusi. Kelompok 1 (satu) membahas dampak dan solusi psikologis pada anak-anak saat emergency, Kelompok 2 (dua) membahas dampak dan solusi kejadian pada anak-anak pascabencana, Kelompok 3 (tiga) membahas dampak dan solusi kejadian pada orang dewasa saat emergency, Kelompok 4 (empat) membahas dampak dan solusi psikologis pada orang dewasa pasca bencana, Kelompok 5 (lima) membahas dampak dan solusi psikologis pada komunitas saat emergency, kelompok 6 (enam) membahas dampak dan solusi psikologis pada komunitas saat pasca bencana;

c. Pembahasan Dukungan Psikososial antara lain:

1) Dukungan Psikososial adalah proses membangun kesejahteraan atau *well being* dengan sumber daya individu atau komunitas.

2) Piramida dukungan psikososial adalah penggambaran kebutuhan psikososial dalam piramida empat tingkat. Semakin tinggi tingkat semakin spesifik kebutuhan, semakin sedikit yang membutuhkan dan semakin membutuhkan keahlian dalam menyediakannya yaitu :

➤ Kebutuhan dasar : makanan, kesehatan, tempat tinggal, keamanan;

➤ Sistem sosial berfungsi positif : kegiatan komunitas, ritual budaya, tatanan sosial;

- Gangguan psikis menengah : kecemasan, kesedihan mendalam, gangguan tidur, gelisah;
 - Gangguan psikis parah : membutuhkan psikolog klinis atau psikiatris.
- 3) Fungsi Dukungan Psikososial :
- Pra Bencana : Meningkatkan ketangguhan psikologis masyarakat sehingga mampu menghadapi bencana di masa depan;
 - Saat Bencana : Mencegah dampak psikologis yang lebih parah dari bencana;
 - Paska Bencana : Memampukan masyarakat bekerja dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi serta membangun resiliensi.
- 4) Dukungan psikososial dapat dilakukan dengan :
- Bantuan konseling dan konsultasi : Pemberian pertolongan pada individu atau keluarga untuk melepaskan ketegangan dan beban psikologis;
 - Pelatihan : Pelatihan untuk pemuka komunitas, relawan dan pihak-pihak yang ditokohkan/mampu dalam masyarakat untuk memberikan dukungan psikologis pada masyarakatnya;
 - Kegiatan psikososial : Kegiatan mengaktifkan elemen-elemen masyarakat agar dapat kembali menjalankan fungsi sosial secara normal.
5. Terapi dukungan psikososial dapat dilakukan pada :
- Kelompok besar berupa latihan nafas dalam, latihan relaksasi progresif, latihan berfokus pada lima jari, latihan membangun interaksi, dan melakukan ibadah;

- Kelompok dewasa berupa latihan bercakap cakap tentang perasaan, harapan, keinginan, hal hal positif yang main dapat disyukuri;
- Kelompok remaja berupa olahraga, musik, tari, menulis dan aktivitas sosial;
- Kelompok anak berupa terapi bermain, menggambar, menyanyi, menari, bercerita, dan menonton film anak anak;
- Kelompok Lansia berupa bercakap cakap dengan perasaan, memberikan informasi tentang kegiatan yg dilakukan, berbagi pengalaman masa lalu, melakukan pendampingan untuk masalah dan kebutuhan manusia.

d. Hasil

- 1) Memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) pada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga mempunyai pemahaman yang sama mengenai pengkajian kebutuhan pascabencana serta mampu menyusun dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- 2) Diharapkan dapat mengidentifikasi atau mengkaji penghitungan kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi, dan peningkatan resiko yang menyangkut aspek fisik dan non fisik meliputi pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor. Termasuk dampak psikologis korban bencana.

e. Foto dokumentasi



Gambar 20 Focus Group Discussion (FGD) Dukungan Pembangunan Infrastruktur Pascabencana Di Kab/Kota Se Jawa Tengah

2. Rapat Koordinasi dan FGD (Forum Group Discussion) Kegiatan Sinergitas Multisektor Penanganan Pasca Bencana Jateng

a) Gambaran Kegiatan

Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh dana hibah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pengelolaan dana hibah ini dilaksanakan pada tahun 2019 oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk monitoring dan evaluasi pada 2 (dua) kabupaten penerima hibah yaitu Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri.

Dana hibah masuk pada Kegiatan Sinergitas Multi Sektor Pasca Bencanadi Jawa Tengah dengan melibatkan pihak terkait yaitu Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, Dinas Bina Marga dan Cipkataru, BPKP Perwakilan Jawa Tengah dan Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta BPBD Kabupaten Penerima Hibah untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi

pengelolaan dana hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Jawa Tengah.

Secara umum kegiatan ini dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman dalam tahapan pemulihan dan rekonstruksi kembali sarana dan prasarana umum terdampak bencana perlu inventarisasi dan dokumentasi guna mengukur keberhasilan dengan cara koordinasi, konsultasi dan evaluasi dengan para pemangku kepentingan penanggulangan bencana, yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Provinsi Jawa Tengah berkewajiban untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai komando untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan sinergitas multi sektor pasca bencana dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan dalam bentuk rapat koordinasi ataupun forum diskusi terfokus sebagai wadah sosialisasi, monitoring dan evaluasi guna menyelesaikan tantangan/masalah ataupun sharing pengalaman dalam pengelolaan dana hibah daerah yang diperoleh pada masing-masing pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan melibatkan semua pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Jawa Tengah.

Kegiatan sinergitas multi sektor pasca bencana di Jawa Tengah, juga merupakan sharing pendanaan APBD Provinsi Jawa Tengah untuk pendampingan pengelolaan pelaksanaan dana hibah daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Jawa Tengah dan kegiatan.

b) Tujuan

- 1) Melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta menginventarisasi pelaksanaan pemulihan dan peningkatan infrastruktur pascabencana di Jawa Tengah.
- 2) Mengetahui keberhasilan dan kekurangan pengelolaan pelaksanaan dana hibah daerah yang diterima beberapa pemerintah daerah di Jawa Tengah dilihat dari jenis bencana yang berbeda beda sehingga dapat dirumuskan persamaan ataupun perbedaan penanganan pemulihan dan rekonstruksi guna meningkatkan kualitas dan normalisasi fungsi infrastruktur yang lebih baik daripada sebelum kejadian bencana.

c) Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) ke – 1
Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) ke – 1 (satu) dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal	: Senin s.d Selasa, 15 s.d 16 April 2019
Waktu	: 14.00 WIB s.d selesai
Tempat	: Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo, Slamet Riyadi No. 437, Sondakan, Laweyan 57147.
Tema	: Focus Group Discussion (FGD) Kegiatan Sinergitas MultiSektor Pascabencana Tahun Anggaran 2019 dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Jawa Tengah.
Peserta	: ± 35 orang dari BPBD Kabupaten Wonogiri dan Klaten (PA/KPA, PPTK, Tim Teknis Kegiatan, Penyediaan Barang/Jasa) serta tim Pendamping Teknis Provinsi Jawa Tengah.
Materi, Narasumber	: 1. Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi

	dan Rekonstruksi Pascabencana, Oleh BNPB.
	2. Akuntabilitas Pelaporan Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
	3. Mekanisme Bantuan Perumahan Untuk Masyarakat Korban Bencana di Provinsi Jawa Tengah, oleh Disperakim Prov. Jateng.
Moderator	Kalaksa BPBD Wonogiri dan Sitopo Kaibon dari BNPB.
Hal-Hal Substansial	1. Kabupaten Klaten mendapatkan anggaran hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebesar Rp 15.675.000.000,- (Lima Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). 2. Anggran BPBD Kab Klaten terbagi menjadi 2 Tempat yaitu - a.Lokasi jembatan berada di Desa Talang Kecamatan Bayat. Jembatan yang akan dibangun menggunakan konstruksi Rangka Baja Tipe B dengan panjang 45 m dan lebar 7m dengan pagu anggaran Rp 10.100.000.000,00 (sepuluh miliar seratus juta rupiah). - b.Lokasi jembatan berada di Desa Ngandong Kecamatan Gantiwarno. Jembatan

yang akan dibangun menggunakan konstruksi beton composite dengan panjang 25 m dan lebar 7m dengan pagu anggaran Rp 4.594.150.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).

3. Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Klaten telah sampai pada tahap pelelangan pengumuman lelang dan penentuan pemenang lelang) diharapkan pekerjaan fisik bisa dimulai pada akhir bulan Mei atau awal Juni.
4. Kabupaten Wonogiri mendapatkan anggaran hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebesar Rp. 33.433.900.000,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan telah teralokasikan pada RKUD Kabupaten Wonogiri pada tanggal 28 Desember 2018.
5. Pembangunan Hunian Tetap bagi masyarakat di daerah potensi bencana sebanyak 374 KK, terdiri dari :
 - a. Desa Dlepih, Kecamatan Tirtomoyo : 355 (tiga ratus lima puluh lima) KK

- b. Desa Kepuhsari,
Kecamatan Manyaran
: 19 (sembilan belas)
KK
- 6. Permasalahan : Banyak warga yang menolak pembangunan hunian tetap dikarenakan sudah merasa aman dan nyaman dengan kondisi yang sekarang, terkait masalah ladang sebagai tempat mencari nafkah mereka, keputusan tentang adanya relokasi dirasa warga terlalu lama, sehingga banyak dari warga yang telah mendirikan rumah di lahan mereka yang lama.
- 7. Pembangunan Infrastruktur akan dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri
Pembangunan dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi sebagai berikut :
 - a. Jembatan Pidekso, Proses perencanaan sudah selesai
 - b. Talud Jembatan Geneng, Proses perencanaan sudah selesai
 - c. Talud Jalan Tileng
- 8. Telah dikerjakan dengan dana APBD, akan dilakukan pergantian tempat dan diajukan dalam perubahan RKA.
- 9. Kabupaten Wonogiri akan melakukan Perubahan RKA, Karena ada pekerjaan Yang telah dilaksanakan dengan anggaran APBD. Sampai saat ini proses pelelangan

untuk pekerjaan belum dilaksanakan karena masih proses verifikasi lapangan terkait kesediaan masyarakat untuk relokasi.

2) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kegiatan Sinergitas Multisektor Penanganan Pascabencana.

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kegiatan Sinergitas Multisektor Penanganan Pascabencana, dilaksanakan pada :

- | | |
|-----------------------|---|
| Hari/ Tanggal | : Kamis s.d Jumat, 2 s.d 3 Mei 2019. |
| Waktu | : 14.00 WIB s.d. selesai. |
| Tempat | : Grand HAP Hotel Surakarta, Jl. Slamet Riyadi No.331, Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57142. |
| Tema | : Pemulihan Pascabencana Sektor Perumahan/Permukiman Di Jawa Tengah. |
| Peserta | : ± 70 orang dari (Tujuh Puluh) Orang dari BPBD Kab/Kota Se Jawa Tengah. |
| Materi dan Narasumber | : 1. Mekanisme Pendanaan dan Bantuan Perumahan Korban Bnecana untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana” disampaikan oleh Staff Deputy Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (H Ali Bernadus, SKM, MA) BNPB.
2. Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Bantuan Perumahan Masyarakat Korban Bencana di Provinsi Jawa Tengah disampaikan oleh Kepala Seksi Perumahan Umum (Suprpta). |
| Moderator | : Hastu Damarseto dari BNPB. |
| Hal-hal Substansial | : 1. <i>Forum Group Discussion</i> (FGD) dibuka oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Jawa Tengah dan menyampaikan <i>point</i> sambutan sebagai berikut :
a. Rapat Koordinasi ini sangatlah penting untuk meningkatkan |

- koordinasi, menyatukan langkah dan tindakan kita baik tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kab/Kota Serta semua pihak yang terkait dengan peningkatan pascabencana di Jawa Tengah.
- b. Dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dan memperhatikan aspirasi masyarakat.
 - c. Langkah preventif dalam penanggulangan bencana perlu dilakukan melalui kegiatan yang fungsinya sebagai inventarisasi sebelum datangnya bencana.
2. Point pemaparan materi dari BNPB sebagai berikut :
- a. Pembangunan perumahan merupakan skala prioritas yang harus lebih baik dan aman sesuai dengan standar rumah tahan/aman bencana.
 - b. Sektor terdampak bencana antara lain :
 - 1) Sektor Permukiman.
 - 2) Sektor Infrastruktur.
 - 3) Sektor Ekonomi Produktif.
 - 4) Sektor Sosial.
 - 5) Lintas Sektor.
 - c. Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana adalah perbaikan rumah rusak berat, rumah rusak sedang, dan rumah rusak ringan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Prasarana, sarana

dan utilitas umum (PSU) untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur perumahan.

- d. Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi perumahan pascabencana terbagi menjadi 2 (dua) sektor yaitu :
 - 1) Bencana Berdampak Besar perencanaan melalui Renaksi dan Verifikasi Renaksi.
 - 2) Bencana Sektor Tertentu perencanaan melalui Dok. Perencanaan RR/Proposal dan Verifikasi Proposal.

3. Point pemaparan materi dari DISPERAKIM sebagai berikut :

- a. Masyarakat yang rumahnya terkena bencana akan mendapat bantuan penyediaan atau rehabilitasi rumah, penyediaan rumah dapat berupa Pembangunan rumah baru mandiri dan pembangunan rumah relokasi bencana (@50 Juta) sedangkan rehabilitasi rumah berupa rehabilitasi rumah rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat (@Rp.12 Juta)
- b. Penyediaan rumah terbagi menjadi 2 (dua) bantuan yaitu masyarakat yang memiliki lahan dan masyarakat yang tidak memiliki lahan.
- c. Masyarakat yang memiliki lahan akan mendapatkan bantuan Stimulan Pembangunan Baru: Bansos (Dasar Hukum : Pergub Bansos stimulan pembangunan rumah baru).
- d. Masyarakat yang tidak memiliki lahan akan mendapatkan bantuan Lahan disediakan oleh Kabupaten berupa hamparan relokasi

(dasar hukum : Pergub Bankeukab
terkait pembangunan penyediaan
rumah dan PSU relokasi bencana).

3) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Sinergitas Multisektor
Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Sinergitas Multisektor
Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
TA.2019, dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal	: Rabu s.d Kamis, 28 s.d 29 Agustus 2019
Waktu	: 14.00 WIB s.d. selesai.
Tempat	: Hotel Grand Wahid, Jl. Jend. Sudirman No.2, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.
Tema	: Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jawa Tengah.
Peserta	: ± 70 (tujuh puluh) orang dari BPBD Kab/Kota se-Jawa Tengah.
Materi dan Narasumber	: 1. Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Sosialiasi Peraturan BNPB No. 06 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, oleh Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB. 2. Sharing Pengalaman Teknik dan Strategi Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Temanggung, oleh Plt. Kalaksa BPBD Kab. Temanggung. 3. Sharing Pengalaman Teknik dan Strategi Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Kegiatan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi
Pascabencana di
Kabupaten Kebumen,
oleh Kalaksa BPBD Kab.
Kebumen.

Moderator : Kepala Dinas PU SDA Taru
Provinsi Jawa Tengah.

Hal-hal Substansial : 1. Komitmen penentuan
kebijakan di Kabupaten
sangat menentukan
dalam rangka penyediaan
anggaran untuk pasca
bencana yang bersumber
dari APBD.

2. Dalam upaya
peningkatan dan
percepatan layanan
rehabilitasi dan
rekonstruksi di
masyarakat maka perlu
adanya terobosan yang
inovatif dan kreatif.

3. Pemulihan sektor fisik
prasarana sangat
dibutuhkan sebagai
bentuk upaya awal
terhadap pemulihan
sektor lainnya.

4. Dalam dinamika politik
daerah, kegiatan
pemulihan pasca
bencana dapat
diintegrasikan kedalam
visi dan misi kebijakan
Kepala Daerah baru.

5. BPBD Kabupaten/Kota
sesuai dengan urusan
kewenangannya
mengoordinasikan dan
melaksanakan kegiatan
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Pascabencana dengan
melibatkan perangkat
daerah terkait yang
ditetapkan dalam Tim
Teknis.

6. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Setiap pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten/Kota diharapkan untuk menyampaikan laporan kepada Pemangku Kepentingan dengan tembusan Kalakhar BPBD Provinsi dan BNPB.

4) Focus Group Discussion (FGD) Monev. Pengelolaan Dana Hibah RR.

Focus Group Discussion (FGD) Monev. Pengelolaan Dana Hibah RR, dilaksanakan pada :

- | | |
|-----------------------|---|
| Hari/ Tanggal | : Rabu s.d Kamis, 25 s.d 26 September 2019. |
| Waktu | : 14.00 WIB s.d. selesai. |
| Tempat | : Grand HAP Hotel Surakarta Jl. Slamet Riyadi No.331, Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57142. |
| Tema | : <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. |
| Peserta | : ± 35 (Tiga Puluh Lima) Orang dari BPBD Kabupaten Wonogiri dan Klaten. |
| Materi dan Narasumber | : 1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paska Bencana di Provinsi Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Kasi |

Rehabilitasi Fasilitas Sosial
Kedeputan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi BNPB (Ria
Watiningsih, M.Si.)

2. Penanganan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Pasca Bencana pada Jalan Provinsi Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Kepala Bidang Rancangbangun dan Pengawasan DPU BINMARCIPKA Provinsi Jawa Tengah (Ir. Rudi Widiatmanto, MT).
3. Akuntabilitas Kebijakan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana, yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI (Ananta Sugiyarto).

Moderator : SIP Anwar, SE, M.Si dari BPBD Kabupaten Klaten dan Desnaini Azra Nasution, S.Kom dari BNPB.

Hal-hal Substansial : 1. Kab. Wonogiri telah melaksanakan koordinasi dalam bentuk ekspose kegiatan terkait perubahan RKA yang diajukan pada tanggal 17 September 2019 di Graha BNPB Ruang Rapat Lt. 7.

2. Alokasi Anggaran Dana Hibah di Kab. Klaten terdapat sisa anggaran dari proses lelang yang akan dimanfaatkan untuk perkuatan konstruksi jembatan berupa penambahan sayap jembatan, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut.

3. Ketentuan perubahan RKA sebagai berikut :

- a. Dilakukan karena adanya keputusan untuk mengubah atau mengganti satu atau beberapa kegiatan yang sudah disusun dalam RKA sebelumnya dengan kegiatan baru yang masih dalam lingkup renaksi yang telah di-verifikasi.
 - b. Dilakukan untuk optimalisasi pemanfaatan sisa tender untuk paket-paket kegiatan yang terdapat dalam renaksi/proposal yang telah di-verifikasi yang karena keterbatasan anggaran belum dialokasikan atau kegiatan yang sama dalam RKA yang sudah ditetapkan.
4. Ketentuan perpanjangan waktu :
- a. Perpanjangan waktu diajukan kepada BNPB paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan berakhir.
 - b. Perpanjangan waktu diajukan kepada Kemenkeu paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum kegiatan berakhir.
 - c. Jika diperlukan perpanjangan, agar segera menyampaikan usulan perpanjangan waktu kepada DJPK paling lambat 15 hari sebelum berakhirnya masa berlaku hibah dengan disertai surat persetujuan

perpanjangan waktu dan kajian atas persetujuan tersebut yang telah ditandatangani oleh Kepala BNPB atau yang dikuasakan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Dalam perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan yang melebihi 12 bulan, maka pemerintah daerah penerima hibah harus menyediakan biaya operasional dalam APBD untuk melanjutkan kegiatan dan pemerintah Provinsi harus menyediakan anggaran dalam APBD untuk kegiatan monitoring dan evaluasi.
 6. Dalam hal kegiatan telah selesai dan output telah tercapai, namun masih terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut disetorkan ke kas negara menggunakan aplikasi SIMPONI.
 7. Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari hibah.
- 5) Rapat Koordinasi Sinergitas Multisektor Pasca Bencana.

Rapat Koordinasi Sinergitas Multisektor Pasca Bencana, dilaksanakan pada :

Hari,Tanggal : Rabu s.d Kamis, 20 s.d 21 November 2019
Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai.
Tempat : Griya Persada Hotel, Jl Gintungan Utara No. 77 Bandungan, Kab. Semarang – 50614.
Tema : Rapat Koordinasi Sinergitas Multisektor Pasca Bencana.

- Peserta : ± 70 (Tujuh Puluh) orang dari BPBD Kab/Kota se-Jawa Tengah.
- Materi dan Narasumber : 1. Strategi dan Kebijakan berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur di daerah rawan bencana, oleh Kepala Subdit Estimasi Pembiayaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB (Agus Riyanto ST MM).
 2. Akuntabilitas dan transparansi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana, oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah (Agung Budi Nugroho).
 3. Manajemen dan strategi mengatasi konflik sosial pasca bencana di sampaikan oleh Badan KESBANGPOL Provinsi Jawa Tengah (Drs. Suwondo, M.Si).
- Moderator : Disperakim Provinsi Jawa Tengah.
- Hal-hal Substansial : 1. BNPB :
 a. Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana pembangunan yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan hidup yang harus diterapkan secara sinergis oleh pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
 b. Internalisasi PRB dalam pembangunan, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat diimplementasikan secara berkesinambungan oleh semua pemangku kepentingan.
2. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah :
 a. Prinsip-Prinsip dalam Penanggulangan Bencana adalah Cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non diskriminatif dan nonproletisi.
 b. Perinsip Dasar :
 1. Tertip

2. Transparan
 3. Akuntabilitas
 - c. Dana Penanggulangan Bencana menurut PMK nomor 105/PMK.05/2013 meliputi :
 1. Dana Kontijensi Bencana.
 2. Dana Siap Pakai.
 3. Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - d. Pengembalian Sisa Dana
 Jika terdapat sisa dana yang tidak terpakai, BPP wajib menyetorkan kembali ke kas Negara dengan menggunakan SSPB (Surat Setor Pengembalian Belanja) dan dilaporkan kepada BNPB (fotokopi SSPB, bukti setor Bank/kantor Pos dan validasi SSPB), baik manual maupun secara elektronik melalui SIMPONI.
3. Badan KESBANGPOL Provinsi Jawa Tengah.
- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
 - b. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum.
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi.
- 6) Focus Group Discussion (FGD) Monev. Pengelolaan Dana Hibah RR

Focus Group Discussion (FGD) Monev. Pengelolaan Dana Hibah RR, dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa s.d Rabu, 26 s.d 27 November 2019.

Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Syariah Hotel Solo, Jl. Jl. Adi Sucipto No.47, Gonilan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 5717.

Tema : FGD Monev Dana Hibah RR Pasca Bencana.

Peserta : ± 35 (Tiga Puluh Lima) Orang dari BPBD Kabupaten Wonogiri dan Klaten.

Materi dan Narasumber.	1. Optimalisasi Pemanfaatan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Pasca Bencana, serta Monev Pelaksanaan RR Pasca Bencana di Jawa Tengah” disampaikan oleh Kasubdit Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasum Kedeputan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB (Drs. Gatot Satria Wijaya, M.Si). 2. Pemanfaatan dan Pelaksanaan Kegiatan RR Pasca Bencana serta Progres Report di Kabupaten Klaten disampaikan oleh Kalaksa BPBD Kabupaten Klaten (SIP ANWAR SE. M.Si). 3. Pemanfaatan dan Pelaksanaan Kegiatan RR Pasca Bencana serta Progres Report di sampaikan oleh Kalaksa BPBD Kabupaten Wonogiri (Drs. Bambang Haryanto MM).
Moderator	Disperakim Provinsi Jawa Tengah.
Hal-hal Substansial	1) BNPB a. Usulan perubahan RKA harus masih dalam ruang lingkup Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). b. Apabila output telah tercapai, maka sisa dana hibah RR wajib disetorkan ke Kas Negara sesuai ketentuan (PMK 224/2017 dan Perban 3/2019). c. Jika terdapat perpanjangan waktu, maka belanja dukungan operasional harus disediakan melalui APBD (Perban 3/2019 dan Juklak). 2) BPBD Kabupaten Klaten : a. Jembatan Desa Talang Kecamatan Bayat dengan Progres Fisik selesai 100 % dengan Progres Keuangan sebesar Rp. 6.833.309.400,00 (79% dari nilai Kontrak Rp. 8.611.795.000,00). b. Jembatan Desa Ngandong Kecamatan Gantiwarno dengan Progres Fisik selesai 100 % dengan Progres Keuangan sebesar Rp. 4.290.190.587,00 (88 % dari nilai kontrak Rp. 4.290.190587).

- c. BPBD Klaten mengusulkan perubahan RKA dan perpanjangan waktu untuk pemanfaatan sisa hasil tender.
 - d. Perlu adanya justifikasi teknis dan izin prinsip dari BWS Kemen PU-PR dikarenakan tanggul yang diusulkan pada Rencana Rehab-Rekon (R3P) merupakan kewenangan BWS Kemen PU-PR.
- 3) BPBD Kabupaten Wonogiri :
- a. Progres Fisik (<50%) dan Keuangan (<50%), dikarenakan adanya masyarakat yang menolak untuk di relokasi (Permasalahan pada Huntap Dlepih dari 355 KK yang direncanakan untuk direlokasi, hanya 5 KK yang bersedia untuk direlokasi.
 - b. Terdapat pekerjaan fisik yang telah selesai 100 % yaitu Pembangunan Jembatan Pidekso, Desa Giriwoyo, Kecamatan Giriwoyo.
 - c. BPBD Wonogiri mengusulkan perubahan RKA dan perpanjangan waktu dikarenakan masyarakat menolak untuk di relokasi.
- 4) BNPB menyarankan kabupaten/kota yang mendapatkan anggaran hibah agar mempedomani RKA dan dipertanggungjawabkan.
- 5) Komitmen penentu kebijakan di Kabupaten sangat menentukan dalam rangka penyediaan anggaran untuk pasca bencana yang bersumber dari APBD dan APBN.
- 6) Pelaksanaan kegiatan RR harus berprinsip *build back better and safer*, serta harus akuntabel. Laporan triwulanan (hardcopy dan E-Proposal), serta laporan akhir termasuk setoran sisa dana menjadi prasyarat utama kegiatan RR yang akuntabel.

d) Hasil

- 1) Pelaksanaan Kegiatan Sinergitas Multisektor pascabencana di Jawa Tengah berjalan dengan baik sesuai rencana dan

mendukung pengelolaan dana hibah daerah dari pemerintah pusat (Kementrian Keuangan RI) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka bantuan pendanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekosntruksi di Provinsi Jawa Tengah

2) sharring pendanaan APBD Provinsi Jawa Tengah untuk pendampingan pengelolaan pelaksanaan dana hibah daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Jawa Tengah dan kegiatan.

e) Foto dokumentasi



Gambar 21 Kegiatan Fgd I Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Tabel 36
Kegiatan Seksi Rehabilitasi Tahun 2018

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
1.	Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jateng			
a	Rapat Koordinasi Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Bencana di Jawa Tengah	20-21 Februari 2019	Hotel Atria Kota Magelang	50
b	Rapat Pengkajian Kebutuhan dan Penyusunan Rencana Aksi Pascabencana	21-22 Mei 2019	Hotel Atria Kota Magelang	60
c	Rapat Pelaksanaan Rapat Koordinasi Rencana Aksi Pemulihan Pasca Bencana Kegiatan Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana Di Bandungan Kabupaten Semarang	23-24 Oktober 2109	Hotel Nugraha Wisata Bandungan Kab. Semarang	46
d	Pelatihan Alat Sosek Pasca Bencana Pembuatan Batu Bata di Cilacap	18 -19 Juni 2019	Desa Bangunreja Kec. Kedungreja Kab Cilacap	40
e	Pelatihan Alat Sosek Pasca Bencana Pembuatan Krupuk di Magelang	20-21 Juni 2019	Desa Kalirejo Kec Salaman, Kab. Magelang	40
f	Pelatihan Alat Sosek Pasca Bencana Pembuatan Krupuk di Banjarnegara	13-14 Agustus 2019	Desa Bantar Kec Wanayasa Kab. Banjarnegara	40
g	Pelatihan Alat Sosek Pasca Bencana Pembuatan Krupuk di Karanganyar	29-30 Juli 2019	Desa Balong Kec. Jenawi Kab. Karanganyar	40
h	Pelatihan Alat Sosek Pasca Bencana Pembuatan Krupuk di Pemalang	17-18 September 2019	Desa Cikadu Kec. Watukumpul Kab Pemalang	40

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
i	Pelatihan Alat Sosek Pasca Bencana Pembuatan Kopi di Klaten	15-16 Oktober 2019	Desa Baleranto Kec Kemalang Kab. Klaten	40
JUMLAH				396 Org

3.5 Bidang Logistik dan Peralatan

Bidang Logistik dan Peralatan melaksanakan penanggulangan bencana dengan sasaran dan program antara lain:

- Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana

Indikator : Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi

- Program : Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Indikator : Persentase pemenuhan logistik bencana

Dengan nilai anggaran Rp 4.760.000.000,- bidang logistik dan peralatan memiliki 2 kegiatan antara lain:

1. Peningkatan kapasitas logistik dan Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana
2. Peningkatan kapasitas pengelolaan peralatan bencana Jateng

3.5.1 Seksi Logistik

1. Pelatihan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana

- a. Gambaran kegiatan

Ancaman bencana yang ada di Jawa Tengah terdiri dari banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran pemukiman, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, gunung api, abrasi, kebakaran lahan dan hutan, gagal teknologi, konflik sosial, epidemi dan wabah penyakit. Hampir semua jenis bencana yang ada ini terjadi dan berpotensi terjadi di wilayah Jawa Tengah. Maka tidak heran wilayah Jawa Tengah merupakan supermarketnya bencana. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah teknis yang strategis guna kesiapsiagaan, pencegahan, tanggap darurat, pengurangan sumber daya, rehabilitasi dan rekonstruksi. Bidang Logistik yang merupakan unsur penting bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana juga harus direncanakan dengan baik. Penetapan perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat terdampak bencana harus dijabarkan secara detil dalam rencana kontinjensi.

Pada saat terjadi bencana, pemenuhan logistic dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana menjadi penentu bagi pelayanan korban bencana. Hal ini juga merupakan indikator keberhasilan dalam meminimalkan korban bencana. Namun banyak kendala dan hambatan yang timbul dalam memenuhi kebutuhan dasar korban bencana. Hambatan yang muncul dapat berupa hambatan teknis dan non teknis. Hambatan teknis dapat berupa jarak yang ditempuh, masalah sarana transportasi yang dipakai sampai dengan hambatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan. Seperti contoh pada saat terjadi tanah longsor, akses jalan menuju lokasi tertutup material longsor, maka dapat mengganggu arus distribusi barang logistic ke lokasi bencana.

Hambatan non teknis dapat berupa kurang mampunya petugas yang mengelola logistik tidak memiliki pengetahuan teknis pemenuhan kebutuhan korban bencana. Kurangnya ketrampilan dalam mengoperasikan peralatan pendukung pemenuhan logistic korban bencana dapat menghambat pelayanan kepada korban bencana, Seperti kemampuan teknis mengoperasikan Dapur Umum, Peralatan *Water Treatment* dan peralatan lainnya. hal ini mengakibatkan pelayanan menjadi terhambat. Apabila terjadi keterlambatan pelayanan tentu korban bencana tidak tertangani dengan baik.

Dengan kondisi karakteristik wilayah Jawa Tengah, BPBD Provinsi Jawa Tengah memandang pentingnya petugas pengelola logistic bencana, khususnya pegawai BPBD Kabupaten/Kota perlu dilatih intensif dan ditingkatkan ketrampilannya dalam mengoperasikan peralatan pendukung pelayanan korban bencana untuk mengatasi hambatan-hambatan teknis dan non

teknis. Dengan trampilnya mengoperasikan peralatan pendukung ini diharapkan pelayanan kepada korban bencana dapat optimal. Pada tahun 2019 BPBD Privinsi Jawa Tengah melaksanakan pelatihan pelayanan korban bencana berupa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dapat efektif dan efisien.

b. Tujuan

- 1) Peningkatan kapasitas petugas pelaksana pemenuhan logistik dan pemenuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
- 2) Peningkatan kemampuan dan ketrampilan petugas dan masyarakat dalam mengelola dan mengoperasikan dapur umum lapangan.
- 3) Peningkatan kemampuan dan ketrampilan petugas dan masyarakat dalam mengelola dan mengoperasikan peralatan penyedia air bersih dan air minum.

c. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 - 12 September 2019, bertempat di BPBD Kabupaten Blora Jalan Raya Blora - Cepu KM. 5 Blora dengan 80 orang peserta yang berasal dari 17 Kab/Kota di Jateng dan BPBD Prov. Jateng.

1) Materi yang disampaikan oleh :

- a) Direktorat Logistik BNPB;
- b) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jawa Tengah.
- c) Universitas Diponegoro Semarang
- d) BPBD Provinsi Jawa Tengah
- e) BPBD Kab. Blora.

2) Metode Penyampaian Materi pembentukan klaster logistik ini menggunakan metode :

- a) Paparan dari Narasumber;

- b) Praktek pengoperasian peralatan pendukung logistic.
- c) Diskusi dan Tanya jawab;
- d) Paparan hasil diskusi.

d. Hasil

1) Output

- a) Setelah pelatihan diharapkan peserta memiliki pengetahuan dan ketrampilan :
- b) Mengelola Logistik di tingkat Kabupaten/Kota dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
- c) Mengoperasikan peralatan pendukung, yaitu Dapur Umum dan Water Treatmen untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.

2) Outcome.

- a) Terselenggaranya Pelatihan Pengoperasian Peralatan Pendukung Pemenuhan Logistic Dan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana.
- b) Adanya pengetahuan dan ketrampilan petugas pengelola lgostik bencana dalam mengoperasikan Dapur Umum dan Water Treatment.

e. Foto dokumentasi



Gambar 22 Pelatihan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana

2. Peningkatan Kapasitas Logistik dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana

a. Gambaran kegiatan

Ancaman bencana yang ada di Jawa Tengah terdiri dari banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran pemukiman, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, gunung api, abrasi, kebakaran lahan dan hutan, gagal teknologi, konflik sosial, epidemi dan wabah penyakit. Hampir semua jenis bencana yang ada ini terjadi dan berpotensi terjadi di wilayah Jawa Tengah. Maka tidak heran wilayah Jawa Tengah merupakan supermarketnya bencana. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah teknis yang strategis guna kesiapsiagaan, pencegahan, tanggap darurat, pengeralahan sumber daya, rehailitasi dan rekonstruksi. Bidang Logistik yang merupakan unsur penting bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana juga harus direncanakan dengan baik. Penetapan perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana harus dijabarkan secara detil dalam rencana kontinjensi.

Pada saat terjadi bencana, pemenuhan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana menjadi penentu bagi pelayanan korban bencana. Hal ini juga merupakan indikator keberhasilan dalam meminimalkan korban bencana. Namun banyak kendala dan hambatan yang timbul dalam memenuhi kebutuhan dasar korban bencana. Hambatan yang muncul dapat berupa hambatan teknis dan non teknis. Hambatan teknis dapat berupa jarak yang ditempuh, masalah sarana transportasi yang dipakai sampai dengan hambatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan. Seperti contoh pada saat terjadi tanah longsor, akses jalan menuju lokasi tertutup material longsor, maka dapat mengganggu arus distribusi barang logistik ke lokasi bencana.

Hambatan non teknis dapat berupa kurang mampunya petugas yang mengelola logistik tidak memiliki pengetahuan teknis pemenuhan kebutuhan korban bencana. Kurangnya ketrampilan dalam mengoperasikan peralatan pendukung pemenuhan logistic korban bencana dapat menghambat pelayanan kepada korban bencana, Seperti kemampuan teknis mengoperasikan Dapur Umum, Peralatan Water Treatmen dan peralatan lainnya. hal ini mengakibatkan pelayanan menjadi terhambat. Apabila terjadi keterlambatan pelayanan tentu korban bencana tidak tertangani dengan baik.

Dengan kondisi karakteristik wilayah Jawa Tengah, BPBD Provinsi Jawa Tengah memandang pentingnya petugas pengelola logistic bencana, khususnya pegawai BPBD Kabupaten/Kota perlu dilatih intensif dan ditingkatkan ketrampilannya dalam mengoperasikan peralatan pendukung pelayanan korban bencana untuk mengatasi hambatan-hambatan teknis dan non teknis. Dengan trampilnya mengoperasikan peralatan pendukung ini diharapkan pelayanan kepada korban bencana dapat optimal. Pada tahun 2019 BPBD Privinsi Jawa Tengah melaksanakan pelatihan pelayanan korban bencana berupa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dapat efektif dan efisien.

b. Tujuan

- 1) Peningkatan kapasitas petugas pelaksana pemenuhan logistik dan pemenuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
- 2) Peningkatan kemampuan dan ketrampilan petugas dan masyarakat dalam mengelola dan mengoperasikan dapur umum lapangan.
- 3) Peningkatan kemampuan dan ketrampilan petugas dan masyarakat dalam mengelola dan mengoperasikan peralatan penyedia air bersih dan air minum.

c. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21-22 Juni 2019, bertempat di Pendopo Kabupaten Kebumen dan Bumi Perkemahan Widoro Kebumen dengan 80 orang peserta yang berasal dari 10 Kab/Kota di Jawa Tengah dan BPBD Provinsi Jawa Tengah.

1) Materi yang disampaikan oleh :

- a) Direktorat Logistik BNPB;
- b) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jawa Tengah.
- c) Universitas Diponegoro Semarang
- d) BPBD Provinsi Jawa Tengah
- e) BPBD Kab. Kebumen.

2) Metode Penyampaian Materi pembentukan klaster logistik ini menggunakan metode :

- a) Paparan dari Narasumber;
- b) Praktek pengoperasian peralatan pendukung logistic;
- c) Diskusi dan Tanya jawab;
- d) Paparan hasil diskusi.

d. Hasil

1) Output :

Setelah pelatihan diharapkan peserta memiliki pengetahuan dan ketrampilan :

- a) Mengelola Logistik di tingkat Kabupaten/Kota dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
- b) Mengoperasikan peralatan pendukung, yaitu Dapur Umum dan *Water Treatment* untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.

2) Outcome :

- a) Terselenggaranya Pelatihan Pengoperasian Peralatan Pendukung Pemenuhan Logistik Dan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana.
- b) Adanya pengetahuan dan ketrampilan petugas pengelola logistik bencana dalam mengoperasikan Dapur Umum dan *Water Treatment*.

e. Foto dokumentasi



Gambar 23 Peningkatan Kapasitas Logistik dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana

3. Rapat Koordinasi Inventarisasi Kebutuhan dan Ketersediaan Logistik Bencana Provinsi Jawa Tengah

a. Gambaran singkat kegiatan

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 10 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah.

Penanggulangan bencana pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat namun pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat berkewajiban untuk memfasilitasinya. Penanggulangan bencana perlu dilaksanakan secara holistik multi sektor, terkoordinasi, bertahap dan diiringi dengan sikap ketekunan, pantang menyerah, koordinasi yang baik lintas sektor dan lintas kewilayahan.

Pengelolaan logistik bencana yang sistematis, pelayanan yang cepat, tepat sasaran, efektif dan efisien penyelenggaraan dan akuntabel menjadi salah satu penentu penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana. Dengan adanya sifat kedinamisan bencana, yaitu :

- 1) Tingkat ketidakpastian yang tinggi, sulit diprediksi (kapan, di mana, berapa besar intensitasnya);
- 2) Keunikan/spesifik (bencana tidak pernah persis sama maka harus ditangani dengan khusus tidak bisa dilaksanakan sebagai kegiatan rutin);
- 3) Dinamis dan kompleks, tidak pernah terjadi karena sebab tunggal ada interaksi multi pihak (alam dan manusia serta lingkungan).
- 4) Harus menggunakan Pendekatan multi disiplin, multi pihak dan multi keahlian;
- 5) Borderless, tidak mengenal batas wilayah administrasi;
- 6) Berdampak pada pihak-pihak yang luas (Rantai pasokan, ekonomi global);
- 7) Bencana merupakan urusan bersama.

Tantangan perspektif teknis bidang logistik adalah adanya permintaan/kebutuhan tidak terduga, lokasi pemberian

bantuan berubah-ubah, infrastruktur yang ada kadang mengalami kerusakan, harus dieksekusi dalam waktu yang singkat dan keterbatasan sumber daya serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya kondisi demikian Pengelolaan Logistik Bencana bukan merupakan pekerjaan yang sepele dan hanya sekedar menyampaikan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.

Penanggulangan bencana pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat namun pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat berkewajiban untuk memfasilitasinya. Penanggulangan bencana perlu dilaksanakan secara holistik multi sektor, terkoordinasi, bertahap dan diiringi dengan sikap ketekunan, pantang menyerah, koordinasi yang baik lintas sektor dan lintas kewilayahan. Dukungan logistik dan peralatan bencana merupakan aspek vital dalam rangka pelaksanaan penanganan darurat bencana, baik pada masa pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana. Pengelolaan logistik dan peralatan yang baik dan akuntabel akan memperlancar pelaksanaan penanganan darurat bencana.

Dikeluarkannya Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal di bidang kebencanaan menimbulkan banyaknya pertanyaan dari pelaksana PB di Kabupaten/Kota. Dalam Permendagri 101/2018 bahwa Standar Pelayanan Minimal terdiri dari 3 kegiatan, yaitu : Layanan Informasi Rawan Bencana, Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pada kondisi demikian BPBD hanya bertugas sebagai koordinator, sedangkan pelaksana penanganan darurat hanya terbatas pada penyelamatan dan evakuasi.

Dibidang logistik yaitu pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana menjadi tanggungjawannya OPD lain. Hal ini menimbulkan polemik dimana BPBD sebagai ujung tombak penanganan darurat disamping memberikan pelayanan penyelamatan dan evakuasi, juga memiliki tanggungjawab terhadap penanganan pengungsi, dimaka pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana menjadi prioritas utama pada saat setelah terjadi bencana. Hal ini membutuhkan penjelasan teknis dan mendalam dari Kementerian Dalam Negeri dan BNPB sebagai induk semang bagi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Oleh sebab itu rapat koordinasi ini difokuskan kepada pembahasan Permendagri 101 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permenkesos nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal di bidang Sosial yang dipadukan dengan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh BNPB.

b. Tujuan

- 1) Tujuan laporan hasil pelaksanaan Rapat Koordinasi Inventarisasi dan Ketersediaan Logistik Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 adalah :
- 2) Tersosialisasikannya produk-produk hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 3) Adanya pembahasan tentang Permendagri 101 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permenkesos nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal di bidang Sosial Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
- 4) Sebagai bahan referensi bagi seluruh pejabat struktural maupun pegawai di lingkungan BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana.

5) Terdokumentasikannya semua rangkaian acara kegiatan Rapat Koordinasi Inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan logistik Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

c. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal Rabu-Kamis 27-28 Maret 2019, bertempat di Ruang Pertemuan Arjuna Hall Lantai II Balai Pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan Provinsi Jawa Tengah (Eks Bakorwil I Surakarta) di Jalan Jl. Slamet Riyadi No. 1 Surakarta dengan 80 orang peserta yang berasal dari 33 BPBD Kabupaten/Kota (masing-masing 2 orang) yaitu Kepala Pelaksana BPBD Kab/Kota, Kepala Seksi Logistik dan Petugas Pengelola Logistik.

1) Materi yang disampaikan oleh :

- a) Deputi Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- b) Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
- c) BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.
- d) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
- e) Kepala Pelaksana BPBD Kab. Kebumen.

2) Metode Penyampaian Materi pembentukan kluster logistik ini menggunakan metode :

- a) Paparan dari Narasumber;
- b) Diskusi dan Tanya Jawab.

d. Hasil

1) Output

Hasil yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah :

- a) Terinventarisasi kebutuhan dan ketersediaan logistik sebagai dasar perencanaan logistik
- b) Pemahaman terhadap Permendagri 101 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kebencanaan.
- c) Dilaksanakannya pemetaan kondisi real kebutuhan lapangan dan terinventarisasikannya permasalahan-

permasalahan yang muncul pada pengelolaan logistika bencana.

2) Outcome

- a) Para Penyelenggara Penanggulangan Bencana di BPBD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Terhindarnya praktek-praktek penyimpangan dalam pengelolaan Logistik bencana.
- c) Adanya prosedur tetap dan mekanisme yang baku sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas bagi para pelaksana penanggulangan bencana di lapangan.

e. Dokumentasi



Gambar 24 Rapat Koordinasi Inventarisasi Kebutuhan dan Ketersediaan Logistik Bencana Provinsi Jawa Tengah

4. Dukungan event Regional/Nasional

a. Pekan Raya Pameran Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah dan Pesta Rakyat Jawa Tengah

1) Penyelenggara :

Penyelenggaraan sama dengan yang dilaksanakan di PRPP dengan sistem kupon. Pesta Rakyat Jawa Tengah dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 23 Agustus 2019 - 25 Agustus 2019 dengan setiap hari Layanan Dapur Umum menyelenggarakan penyajian masakan sejumlah lk.2.000-2.500 porsi.

Pada kegiatan ini BPBD Provinsi Jawa Tengah melibatkan berbagai pihak, utamanya adalah BPBD Kabupaten/Kota yang memiliki Tim Dapur Umum dan Mobil Unit Dapur Umum, OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, organisasi relawan, komunitas dan masyarakat.

2) Pelaksanaan (waktu dan tempat) :

a) Waktu : 28 Juni s.d. 14 Juli 2019

b) Tempat : PRPP Jateng.

3) Bentuk dukungan :

a) Disamping itu BPBD Provinsi Jawa Tengah juga memberikan Layanan dapur umum dan menyajikannya kepada masyarakat /pengunjung.

b) Mekanisme penyelenggaraanya adalah menempatkan Mobil Dapur umum dekat dengan stand pameran.

4) Hasil

Petugas dapur umum akan memasak dan menyajikan makanan secara gratis kepada pengunjung.

5) Mekanisme pelaksanaan adalah :

a) Petugas Dapur Umum akan memasak dan menyajikan dalam bentuk bungkusan. Pengunjung yang hendak mencicipi sajian makanan maka harus menggunakan kupon.

- b) Untuk sajian makanan yang akan dibagikan secara gratis dengan persyaratan khusus. Persyaratan yang dikenakan adalah mengunjungi stand BPBD prov. Jawa Tengah, selanjutnya mengisi buku tamu dan memberikan kesan dan pesan.
 - c) Masakan yang disajikan setiap saat berganti menu dengan tujuan agar menjadi ajang pelatihan tim Dapur Umum untuk menyajikan masakan yang cepat, tepat dan bercita rasa tinggi.
 - d) Setiap kali menyajikan masakan, jumlah porsi yang dimasak yaitu 350-400 bungkus.
 - e) Tim Dapur Umum yang terlibat pada kegiatan ini adalah Tim dari BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Tim dari BPBD Kota Semarang; yang terdiri dari para pegawai dan relawan yang ditunjuk.
- 6) Petugas yang ikut dalam kegiatan pengerahan dapur umum di PRPP adalah Tim Dapur Umum BPBD Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 10 orang dengan tugas :
- a) 3 Orang sebagai petugas penyiapan bahan
 - b) 2 Orang sebagai Koki
 - c) 3 Orang sebagai Penyaji
 - d) 2 Orang sebagai Petugas sarana dan prasarana pendukung.
- 7) Dokumentasi



Gambar 25 Pekan Raya Pameran Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah dan Pesta Rakyat Jawa Tengah

- b. Pesta Rakyat Jawa Tengah
- 1) Penyelenggara :
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 - 2) Pelaksanaan (waktu dan tempat) :
 - a) Waktu : 23 - 25 Agustus 2019
 - b) Tempat : GOR Giri Mandala dan alun-alun Pendopo Kab. Wonogiri

3) Bentuk dukungan :

a) Stand Pameran.

Event Pesta Rakyat Jawa Tengah adalah kegiatan rutin tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna menyemarakkan Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Event Pesta Rakyat Jawa Tengah ini dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Penyelenggaraan dilaksanakan secara bergilir di Kabupaten/Kota. Pada tahun 2019 penyelenggaraan Pesta Rakyat Jawa Tengah dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri, tepatnya di GOR Giri Mandala dan alun-alun Pendopo Kab. Wonogiri.

b) Dapur Umum Lapangan

Event Pesta Rakyat Jawa Tengah ini dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Penyelenggaraan dilaksanakan secara bergilir di Kabupaten/Kota. Pada tahun 2019 penyelenggaraan Pesta Rakyat Jawa Tengah dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri, tepatnya di GOR Giri Mandala dan alun-alun Pendopo Kab. Wonogiri.

4) Hasil

Pada event ini sama seperti tahun yang sudah berjalan. BPBD Provinsi Jawa Tengah berpartisipasi membuka stand pameran peralatan Penanggulangan Bencana dan Layanan Dapur Umum. Mekanisme penyelenggaraan sama dengan yang dilaksanakan di PRPP dengan sistem kupon. Pesta Rakyat Jawa Tengah dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 23 Agustus 2019 - 25 Agustus 2019 dengan setiap hari Layanan Dapur Umum menyelenggarakan penyajian masakan sejumlah lk.2.000-2.500 porsi.

Pada kegiatan ini BPBD Provinsi Jawa Tengah melibatkan berbagai pihak, utamanya adalah BPBD Kabupaten/Kota yang memiliki Tim Dapur Umum dan Mobil Unit Dapur Umum, OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, organisasi relawan, komunitas dan masyarakat.

5) Dokumentasi



Gambar 26 Pesta Rakyat Jawa Tengah

c. Layanan DU pada Event Khusus lainnya

1) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Layanan Dapur Umum adalah :

a) Festival Culinary Jawa Tengah.

Kegiatan ini adalah kegiatan memfasilitasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah yang mengadakan Event Festivas Culinary Tingkat Jawa Tengah tahun 2019 di Kawasan Banjir Kanal Barat. Kegiatan ini adalah Layanan pada UMKM di bidang Kuliner. Pada kegiatan ini BPBD Provinsi Jawa Tengah memberikan layanan dapur umum melayani para tamu undangan dan petugas dengan menyediakan 600 porsi untuk makan siang dan makan malam.

b) Dukungan kegiatan Penanaman Mangrove di Kawasan Pantai Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Kegiatan "Mageri Segoro" Penanaman Mangrove di Kawasan Pantai Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak diprakarsai oleh Direktorat

Kepolisian Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Sesuai dengan permohonan Ditpolair Polda Jateng nomor B/429/VIII/IPP.3.3.9/Ditpolairud tanggal 12 Agustus 2019 dan Disposisi fasilitasi oleh Bapak Kalakhar BPBD Prov. Jateng, layanan dapur umum pada event ini adalah memberikan layanan masakan kepada peserta penanaman pohon mangrove di kawasan pantai Semarang-Demak. Pada event ini tim dapur umum menyediakan 350 porsi makanan siap santap.

2) Hasil

- a) Terbentuknya tim pelayanan dapur umum yang handal dan memiliki pengetahuan ketrampilan dalam melayani masyarakat secara masal.
- b) Terselenggaranya kegiatan pemasyarakatan pembangunan di bidang Penanggulangan bencana.
- c) Adanya pendidikan serta pelatihan baik kepada petugas maupun masyarakat tentang pelayanan pemenuhan logistic dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
- d) Media informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- e) Media inventarisasi masukan dan saran bagi penyempurnaan program kerja.

3) Dokumentasi



Gambar 27 Festival Culinary Jawa Tengah

5. Pelatihan Penataan Gudang Logistik dan Peralatan PB Provinsi Jawa Tengah

- a. Penyelenggara :
BPBD Provinsi Sulawesi Tengah
- b. Pelaksanaan (waktu dan tempat) :
 - 1) Waktu : 22 - 23 Juli 2019
 - 2) Tempat : BPBD Kab. Magelang Jln. Soekarno Hatta No. 7A Kota Mungkid Kabupaten Magelang.
 - 3) Peserta : 80 orang yang terdiri Aparatur BPBD Kab/Kota dan Relawan dari 13 Kab/Kota di Jateng
 - 4) Narasumber:
 - a) Direktorat Logistik BNPB;
 - b) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Regional Jawa Tengah dan DIY.
 - c) Kepala Pelaksana BPBD Kab. Magelang.
 - d) BPBD Provinsi Jawa Tengah
 - 5) Metode Penyampaian:
 - a) Paparan dari Narasumber;
 - b) Praktek pengoperasian peralatan pendukung logistic.
 - c) Diskusi dan Tanya jawab;
 - d) Paparan hasil diskusi.
 - 6) Bentuk dukungan :

Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Gudang ini diawali dengan pembekalan materi di Ruang Pertemuan pendopo BPBD Kab. Magelang dan dibuka oleh Bapak Kepala Bidang Logistik dan Peralatan BPBD Provinsi Jawa Tengah dengan jadwal kegiatan terlampir. materi yang diberikan pada pelatihan ini adalah :

 - a) Kebijakan dan strategi Pengelolaan logistik pada saat tanggap darurat, oleh Kasubdit Pengadaan dan Inventarisasi, Direktorat Logistik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Materi yang disampaikan adalah :
 - Kebijakan Pengelolaan Logistik Bencana.

- Mekanisme Pengelolaan Logistik pada saat tanggap darurat.
 - Strategi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
 - Manajemen logistik pada saat tanggap darurat.
- b) Pengelolaan Gudang yang efektif dan efisien oleh Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Regional Jawa Tengah dan DIY. Materi yang disampaikan adalah :
- Prinsip-prinsip pengelolaan gudang logistik niaga.
 - Penataan Gudang yang efektif.
 - Strategi Pemeliharaan barang logistik
 - Pendistribusian barang logistik.
 - Pengadministrasian pergudangan logistik.
- c) Penyelenggaraan penanganan darurat bencana di Kabupaten Magelang dengan narasumber dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. Magelang. Materi yang disampaikan adalah :
- Potensi bencana di wilayah Kab. Magelang.
 - Kebijakan Penyelenggaraan Penanganan Darurat bencana.
 - Mekanisme pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
 - pemeliharaan barang logistik.
- d) Pemetaan Gudang Logistik. Materi yang disampaikan adalah :
- Identifikasi gudang logistik dan sarana prasarana pendukung.
 - Identifikasi barang logistik.
 - Pemetaan penempatan barang.
 - Pemeliharaan dan Perawatan

- Administrasi pergudangan
- e) Pemetaan Gudang Peralatan. Materi yang disampaikan adalah :
 - Identifikasi gudang peralatan dan sarana prasarana pendukung.
 - Identifikasi peralatan Penanggulangan Bencana.
 - Pemetaan penempatan barang.
 - Pemeliharaan dan Perawatan.
 - Administrasi pergudangan.
- c. Hasil
 - a) Meningkatnya kapasitas petugas pelaksana pemenuhan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
 - b) Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan petugas dan masyarakat dalam mengelola Gudang di Pos Komando Lapangan.
 - c) Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan petugas dan masyarakat dalam menerima, menyimpan, memelihara dan mendistribusikan barang logistik bencana.
 - d) Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan petugas dalam melaksanakan administrasi pengelolaan logistik dan pergudangan
- d. Dokumentasi



Gambar 28 Pelatihan Penataan Gudang Logistik dan Peralatan PB Provinsi Jawa Tengah

Tabel 37
Kegiatan Seksi Logistik Tahun 2019

No	KEGIATAN /Sub kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
a	Pelatihan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana	11 - 12 September 2019	BPBD Kabupaten Blora Jalan Raya Blora - Cepu KM. 5 Blora	80
b	Peningkatan Kapasitas Logistik dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana	21-22 Juni 2019	Pendopo Kabupaten Kebumen dan Bumi Perkemahan Widoro Kebumen	80
c	Rapat Koordinasi Inventarisasi Kebutuhan dan Ketersediaan Logistik Bencana Provinsi Jawa Tengah	27-28 Maret 2019	Ruang Pertemuan Arjuna Hall Lantai II Balai Pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan Provinsi Jawa Tengah (Eks Bakorwil I Surakarta) di Jalan Jl. Slamet Riyadi No. 1 Surakarta	80
d	Pekan Raya Pameran Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah dan Pesta Rakyat Jawa Tengah	23 - 25 Agustus 2019	PRPP Jateng	-
e	Pesta Rakyat Jawa Tengah	23 - 25 Agustus 2019	GOR Giri Mandala dan alun-alun Pendopo Kab. Wonogiri	-
f	Layanan DU pada Event Khusus lainnya			
g	Pelatihan Penataan Gudang Logistik dan Peralatan PB	22 - 23 Juli 2019	BPBD Kab. Magelang Jln. Soekarno Hatta No. 7A Kota	80

No	KEGIATAN /Sub kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
	Provinsi Jawa Tengah		Mungkid Kabupaten Magelang	

3.5.2 Seksi Peralatan

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Operasional Peralatan Penanggulangan Bencana

- a. Gambaran kegiatan

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di tengah Pulau Jawa. Karakteristik fisik Provinsi Jawa Tengah mempunyai bentuk bervariasi yang tidak lepas dari proses pembentukannya. Dampak dari tumbukan lempeng tektonik adalah terjadinya pengangkatan dan pelipatan lapisan geologi pembentuk pulau sehingga membentuk geomorfologi yang bervariasi seperti gunung berapi, perbukitan, dataran tinggi dan dataran landai. Kondisi yang demikian menjadikan Provinsi Jawa Tengah mempunyai potensi ancaman bencana alam. Gempa bumi di Klaten, tsunami di pantai selatan Jawa, erupsi gunung berapi Merapi dan tanah longsor di Banjarnegara, Brebes, merupakan sebagian bukti kebencanaan yang pernah terjadi di Provinsi Jawa Tengah.

Kondisi iklim tropis Provinsi Jawa Tengah yang terletak antara 5o40'-8o30' LS dan antara 108o30'-111o30' BT menjadikan potensi dan ancaman bencana. Dampak dari bahaya iklim tersebut adalah banjir, kekeringan, kebakaran lahan dan angin puting beliung.

Perilaku manusia juga menjadi pemicu terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor di Provinsi Jawa Tengah. Perubahan keseimbangan lingkungan akibat ulah manusia seperti : membuang sampah ke sungai, mendirikan bangunan

di bantaran sungai, permukiman di daerah kerentanan gerakan tanah yang tinggi, alih fungsi lahan dan penggundulan hutan, sehingga lahan menjadi kritis dan rentan terhadap bahaya banjir dan tanah longsor di musim hujan.

Berbagai kejadian bencana di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa daerah ini merupakan wilayah yang mempunyai potensi ancaman bencana. Pada hakekatnya semua jenis bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non alam dan bencana sosial selalu berpotensi mengancam kehidupan seperti timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis bagi masyarakat. Mengingat kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis Provinsi Jawa Tengah, maka diperlukan suatu upaya yang menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik ketika bencana itu sedang terjadi, sudah terjadi maupun bencana yang berpotensi terjadi dimasa yang akan datang. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melindungi segenap warga dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan atas korban bencana, kesemuanya itu dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 10 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Kepala Pelaksana Harian (KALAKHAR) Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

Penanggulangan bencana pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat namun pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat berkewajiban untuk memfasilitasinya.

Penanggulangan bencana perlu dilaksanakan secara holistik multi sektor, terkoordinasi, bertahap dan diiringi dengan sikap ketekunan, pantang menyerah, koordinasi yang baik lintas sektor dan lintas kewilayahan. Sistem peralatan penanggulangan bencana merupakan suatu sistem yang menjelaskan tentang peralatan yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana baik pada masa pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana.

Dalam rangka melakukan pencegahan, pengurangan resiko bencana, mitigasi bencana, peringatan dini, kesiapsiagaan pada pra-bencana, maupun pencarian, pertolongan dan evakuasi, pemulihan darurat pada saat terjadi bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca-bencana, diperlukan peralatan-peralatan yang memadai dan sesuai dengan kejadian bencananya. Khususnya pada saat tanggap darurat kebutuhan peralatan yang tepat jumlah dan spesifikasinya dan dapat tersedia dengan cepat untuk melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi menjadi sangat penting, agar tujuan penanggulangan bencana untuk penyelamatan dan mengurangi penderitaan korban bencana dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Ancaman bencana di satu daerah dengan daerah lain di Indonesia diyakini tidak sama dan mempunyai ancaman yang berbeda-beda, oleh sebab itu peralatan untuk kesiapsiagaan

menghadapi bencana berbeda-beda pula. Pemerintah Pusat, pemerintah daerah Provinsi dan kabupaten/kota akan lebih tepat bila terlebih dahulu melakukan kajian ancaman bencana pada daerahnya masing-masing (dapat melalui perencanaan kontijensi). Sehingga dapat diketahui kebutuhan peralatan yang mendesak bila terjadi bencana.

Dukungan pemenuhan kebutuhan logistik permakanan dan dukungan peralatan pada saat keadaan darurat bencana sangat dibutuhkan. Yaitu digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi serta kegiatan penyelamatan, pertolongan pencarian dan penanganan pengungsi. Imbasnya, dibutuhkan jenis kendaraan untuk mengangkut logistik dan peralatan dimaksud dengan kekuatan yang cukup memadai. Kendaraan jenis truk dengan spesifikasi khusus menjadi solusi untuk mendistribusikan logistik dan peralatan pada masa keadaan darurat bencana.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diadakan evaluasi dan sosialisasi peralatan bencana melalui Kegiatan BinteK Operasional Peralatan PB di Jawa Tengah. Dengan kegiatan ini diharapkan pelaksana penanganan bencana di Kabupaten/Kota memiliki kepekaan akan tugas dan tanggungjawab, serta kemampuan mengoperasikan peralatan PB.

b. Tujuan

Membekali pihak-pihak yang terkait dengan pengelola peralatan kebencanaan serta memfasilitasi peningkatan kapasitas personil terutama Tim Reaksi Cepat di Kabupaten/Kota terkait penggunaan peralatan PB yang tepat guna.

c. Pelaksanaan

1) Waktu Pelaksanaan kegiatan BinteK Operasional Peralatan PB di Jawa Tengah Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Pengelolaan Peralatan Bencana di Jawa Tengah, pada tanggal 23 - 25 September 2019, bertempat di Hotel Grand Dian Slawi Kabupaten Tegal.

2) Dengan Peserta Kegiatan Bintek Operasional Peralatan PB di Jawa Tengah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana di Jawa Tengah sebanyak 70 orang, terdiri dari BPBD Kabupaten Kota se-Jawa Tengah dan BPBD Provinsi Jawa Tengah.

3) Narasumber dan Instruktur Bintek Operasional Peralatan PB di Jawa Tengah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana di Jawa Tengah di Kabupaten Tegal adalah :

- a) Direktorat Peralatan BNPB;
- b) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tegal;
- c) PT. TELNUSA INTRAKOM;
- d) BPBD Kab. Banjarnegara

d. Hasil

Bintek Operasional Peralatan PB di Jawa Tengah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, merupakan kegiatan Teknis guna membangun kesamaan pemahaman dan persepsi tentang kebijakan sistem manajemen penanganan darurat bencana di Jawa Tengah dan mengembangkan iklim yang kondusif dan dialogis dalam rangka meningkatkan sinergitas diantara para stakeholders melalui implementasi sistem manajemen penanganan darurat bencana di Jawa Tengah, yang sasarannya adalah unsur Aparat Pemerintah dan Petugas Lapangan di Provinsi Jawa Tengah.

e. Foto dokumentasi



Gambar 29 Koordinasi Pemetaan dan Monitoring Evaluasi Peralatan

2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jawa Tengah

a. Gambaran kegiatan

Guna memenuhi standar ketersediaan peralatan penanggulangan bencana sesuai dengan Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana maka setiap tahun dilakukan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jawa Tengah. Fokus kegiatan tersebut adalah Pengenalan Teknis Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah, pengadaan berbagai macam peralatan penanggulangan bencana seperti : Chainsaw, Drone dan Handy Transciver (HT). Disamping itu juga dilakukan kegiatan fasilitasi petugas/penjaga repeater, fasilitasi BPBD Kabupaten/Kota dalam memperoleh bantuan peralatan dari BNPB, pemeliharaan dan perawatan peralatan dan kendaraan penanggulangan bencana serta melakukan fasilitasi dukungan peralatan penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota.

b. Tujuan

- Pengadaan peralatan/sarana penanggulangan bencana untuk penanganan tanggap darurat bencana di Jawa Tengah.
- Memfasilitasi petugas/penjaga Repeater BPBD Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Gunung Telomoyo, Gunung Prahur dan Sendang Tawangmangu.
- Fasilitasi BPBD Kab/Kota dalam rangka memperoleh bantuan hibah peralatan penanggulangan bencana dari BNPB.
- Pemeliharaan dan perawatan peralatan dan kendaraan penanggulangan bencana yang dimiliki BPBD Prov Jateng
- Pengenalan Teknis Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah.
- Melakukan fasilitasi dukungan peralatan penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota.

c. Pelaksanaan

No	Lokasi	Waktu	Jumlah Peserta
1.	Semarang	27-28 Maret 2019	100 orang dari aparat pemerintah

d. Hasil

- 1) Telah dilaksanakan Pengadaan Peralatan PB pada tahun 2019 yaitu Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek, Peralatan Kerja, Kendaraan Bermotor Angkutan Barang.
- 2) Serapan keuangan sampai dengan Bulan Desember 2019 sebesar Rp. 1.343.634.812,- (65,2 %) dari pagu sebesar Rp. 2.060.000.000,- dengan progress fisik sebesar 65,9 %.
- 3) Rendahnya serapan keuangan akibat :
 - a) Kegagalan lelang (putus kontrak) pengadaan kendaraan bermotor angkutan barang (truk bak terbuka dan tertutup)
 - b) Sisa lelang (selisih antara pagu dan nilai kontrak) permakanaan tahap II

e. Foto Dokumentasi



Gambar 30 Peningkatan Pengelolaan dan Praktik Peralatan PB

Tabel 38
Kegiatan Seksi Peralatan Tahun 2019

No	KEGIATAN	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
1	Koordinasi Pemetaan dan Monitoring Evaluasi Peralatan PB			
a	Rakor Inventarisasi Kebutuhan dan Ketersediaan Peralatan PB Prov. Jateng	27-28 Maret	Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus Wilayah III Prov. Jateng (Eks Bakorwil II Surakarta)	100
2	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jawa Tengah			
a	Bintek Pengelolaan dan Pengenalan Peralatan	23 – 25 April 2019	Surakarta	70
		16 – 18 Juli 2019	Banyumas	70
		23 – 25 September 2019	Tegal	70
b	Pengadaan Peralatan PB		Semarang	-

**Tabel 39 Inventarisasi ketersediaan Peralatan PB
Di BPBD Provinsi Jawa Tengah**

Status : Bulan Des 2019

NO	KODE	JENIS PERALATAN	SATUAN	BPBD Jateng
1	2	3	4	5
I	01	Alat Transportasi		
		1 Mobil Ambulance	unit	3
		2 Mobil Tangki BBM	unit	
		3 Mobil Evakuasi	unit	
		4 Mobil Pemadam Kebakaran	unit	
		5 Helikopter	unit	
		6 Mobil Komando	unit	1
		7 Mobil Patroli	unit	
		8 Mobil Jelajah	unit	
		9 Mobil Operasional	unit	9
		10 Mobil Komunikasi	unit	1
		11 Mobil Rescue	unit	10
		12 Motor Ops	unit	14
		13 Motor Trail	unit	12
		14 Motor Damkar	unit	1
		15 Damkar Mini	unit	2
		16 Pick Up	unit	1
		17 Mobil Logpal	unit	1
		18 Truk Serbaguna	unit	1
		19 Mobil Dapur Lapangan	unit	1
		20 Truk Logistik	unit	1
		21 Truk Tangki Air	unit	5
		22 Truk Urinoir MCK	unit	2
		23 Mobil Water Treatmen	unit	1
		24 Truk bak terbuka	unit	2
		25 Kapal Motor	unit	
		26 Mini Bus Elf	unit	1
		27 Mobil Klik	unit	
		Jumlah		69
II	02	Alat Komunikasi dan Informasi		
		1 Sistem Komunikasi Cepat	paket	
		2 Portable Communication Mobile	unit	
		3 HT	unit	63
		4 RIG	unit	6

NO	KODE	JENIS PERALATAN		SATUAN	BPBD Jateng
1	2	3		4	5
		5	GPS	unit	3
		6	Telpon Internet Satelit	unit	
		7	Alat Deteksi Dini dan Peringatan Dini	unit	
		8	SSB/RPP	unit	3
		9	Drone	unit	4
		10	Wireless	unit	
		11	Megaphone	unit	3
		12	Repiter / Antena	unit	4
		13	Video Shooting	unit	
		14	Camera Digital	unit	4
		15	Handycam	unit	2
		16	Power Supply	unit	2
		Jumlah			55
III	03	Alat Pencarian Penyelamatan dan Evakuasi			
		1	Alat Pemotong Baja dan Beton	unit	5
		2	Rompi	unit	
		3	Life Jacket/Rompi Pelampung	unit	48
		4	Lifebouy	unit	8
		5	Perahu Karet 12 org	unit	
		6	Perahu Karet 10 org	unit	14
		7	Perahu Karet 8 org	unit	2
		8	Perahu Karet 6 org	unit	1
		9	Masker Full Face	unit	6
		10	Perahu Lipat	unit	1
		11	Trailer	unit	2
		12	Rescue Jetski	unit	
		13	Mesin Perahu 40 PK	unit	5
		14	Mesin Perahu 25 PK	unit	5
		15	Mesin Perahu 18 PK	unit	5
		16	Mesin Perahu 15 PK	unit	1
		17	Dolphin / speed boat	unit	2
		18	Peralatan Selam	unit	7
		19	Vertical Rescue	unit	6
		20	Teropong / Teleskop	unit	4
		23	Chain Saw	unit	51
		24	Helm SAR	unit	4

NO	KODE	JENIS PERALATAN		SATUAN	BPBD Jateng
1	2	3		4	5
		25	Pulay	unit	10
		26	Breathing Appars	unit	2
		27	Life Detector	unit	
		28	Alat/Paket Pemadam Kebakaran	unit	
		29	Pakaian Tahan Panas	unit	2
		30	Pompa Perahu	unit	14
		31	Rak Tempat Perahu Karet	unit	5
		32	Selang BBM	unit	14
		33	Sandaran Mesin Tempel	unit	4
		34	Perahu Alumunium	unit	
		35	Jangkar	unit	
		36	Ring Buoy	unit	
		37	Tali PP 10 mm	unit	
		38	Tangki BBM	unit	14
		39	Dayung	unit	20
		40	Pakaian Tahan Api	unit	
		41	Helm Tahan Panas	unit	
		42	Sepatu	unit	
		43	Sarung Tangan	unit	
		44	Helm Biasa	unit	
		45	Perahu Polyetheline	unit	2
		46	Bidai Spinal	unit	2
		47	Perahu Amphibi	unit	1
			Jumlah		268
IV	04	Alat Pemenuhan Kebutuhan Dasar			
		1	WTP 250 lt	unit	2
		2	WTP 500 lt	unit	
		3	WTP mini	unit	2
		4	Dapur Lapangan/Umum	unit	
		5	Fleksible Tank 2000 lt	unit	2
		6	Fleksible Tank 1000 lt	unit	2
		7	Toilet Lapangan	unit	
		8	Tenda Posko	unit	13
		9	Tenda Keluarga	unit	100
		10	Tenda Regu	unit	30
		11	Tenda Pleton	unit	24
		12	Tenda Pengungsi	unit	5

NO	KODE	JENIS PERALATAN		SATUAN	BPBD Jateng
1	2	3		4	5
		13	Tenda Sekolah	unit	
		14	Tenda Lapangan	unit	
		15	Tenda RS Lapangan	unit	
		16	Tenda Individu	unit	2
		17	Tenda Doom	unit	
		18	Tandu Lipat	unit	6
		19	Echosounder	unit	2
		20	Velbed	unit	125
		21	Tandon Air Plastik	unit	
		22	Tandon Air Fiber Glas	unit	1
		23	Tenda Dapur Umum	unit	
		24	Tenda Terpal Plastik	unit	
		25	Jas Hujan	unit	
		26	MCK Komunal	unit	
		Jumlah			316
V	05	Alat Berat			
		1	Scope Loader	unit	
		2	Back Hoe	unit	
		3	Truck W Crane 3 Ton	unit	
		4	Tandem Vibration Roller 4 Ton	unit	
		5	Crane on Wheel 15 Ton	unit	
		6	Wheel Looder 1,2 - 1,5 M3	unit	
		7	Head Tractor & trailer	unit	
		8	Loader	unit	
		9	Exavator	unit	
		10	Dump Truck	unit	
		11	Grader	unit	
		12	Bulldoser	unit	
		13	Ponton	unit	
		14	Vibro Hammer	unit	
		15	Wheel Loader	unit	
		16	Ulhanor Roller	unit	
		Jumlah			0
VI	06	Alat Penerangan dan Kelistrikan			
		1	Senter	unit	9
		2	Solar Sel Generator	unit	
		3	Lampu Senter HID	unit	2
		4	Lampu Srt Halogen	unit	3
		5	Lampu Badai	unit	

NO	KODE	JENIS PERALATAN		SATUAN	BPBD Jateng
1	2	3		4	5
		6	Genset 5 KVA	unit	2
		7	Genset 10 KVA	unit	1
		8	Genset 1,2 KW	unit	4
		9	Genset 1000 watt	unit	6
		10	Solar Handle Lamp	unit	60
		11	Lampu Penerangan (Solar Cell)	unit	7
		12	Light Tower Port	unit	2
		13	Lampu senter HID Seacrh Light	unit	4
		14	Kabel	roll	3
		15	Tiang Lampu Lapangan	unit	
		16	Lampu Lapangan (Sport Light)	unit	4
		17	Senter Besar	unit	
		18	Lampu Rotator	unit	
		19	Lampu Sorot	unit	
		20	Emergency Lamp	unit	6
		Jumlah			113
VII	7	Alat Pergudangan			
		1	Froklift	unit	2
		2	Hand Froklift	unit	1
		3	Gerobak Sorong	unit	
		4	Trolley	unit	2
		5	Rak Gondola	unit	
		6	Palka	unit	100
		7	Safety Equipment	unit	
		8	Tenda Gudang	unit	
		9	Water Closed	unit	
		10	Tabung Gas 12 Kg	unit	
		11	Tabung Gas 3 Kg	unit	
		12	Selang	unit	
		13	Helm Kerja / PMK	unit	
		14	Topi Proyek	unit	
		Jumlah			105
VIII	8	Alat Lainnya			
		1	Pompa air	unit	6
		2	Kawat Bronjong	unit	
		3	Karung Plastik	unit	
		4	Garpu Sampah	unit	
		5	Dirgen 40 L	unit	

NO	KODE	JENIS PERALATAN		SATUAN	BPBD Jateng
1	2	3		4	5
		6	Hand Sprayer	unit	
		7	Knock Down Closet	unit	
		8	Mesin Fogging	unit	
		9	Drag Bar	unit	
		10	Water furifier	unit	
		11	CCTV	unit	
			Jumlah		6
			<i>Jumlah Total</i>		880

3.6 Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha melaksanakan penanggulangan bencana dengan sasaran dan program antara lain:

- Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah
Indikator : Nilai kepuasan masyarakat
- Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Indikator : Nilai Sakip BPBD Prov Jateng
- Program : Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
Indikator : Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
- Program : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator : Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD

Dengan anggaran sejumlah Rp 10.910.000.000,- bagian tata usaha melaksanakan 19 (Sembilan belas) kegiatan dari 2 (dua) program dengan indikator antara lain:

I Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah

- | | |
|--|--|
| 1. Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | Indikator : Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) |
| 2. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | Indikator : Jumlah bulan terpenuhinya Jasa surat menyurat, atk, cetak penggandaan dan kearsipan perangkat daerah |
| 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah | Indikator : Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah |
| 4. Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | Indikator : Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah |
| 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Indikator : Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah |
| 6. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | Indikator : Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dan |

	konsultasi ke dalam dan luar daerah
7. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Indikator : Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Indikator : Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah	Indikator : Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah
10 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Indikator : Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
11 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Indikator : Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah
12 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Indikator : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan
13 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Indikator : Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan
14 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Forma	Indikator : Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/ Workshop/ Bintek/ Seminar
15 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Indikator : Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah
16 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Indikator : Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah
17 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Indikator : Jumlah Bulan Terpeliharanya Kendaraan

II Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 18 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun
Indikator : Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun
- 19 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator : Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah

3.6.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi antara lain penyediaan, pemeliharaan serta pelayanan aktivitas perkantoran seluruh bagian/bagian seperti Surat menyurat, pemeliharaan (gedung, mobil, sarana dan prasarana Kantor), pelayanan tamu, dll. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi subbagian ini adalah sbb.

Tabel 40
Kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian

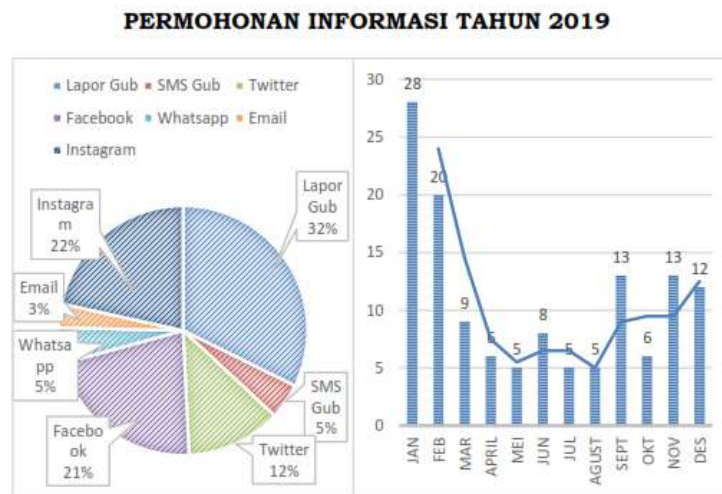
No	KEGIATAN	Pelaksanaan Kegiatan	
		tanggal	Lokasi
1	2	3	4
1	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	Jan - Des	Kota Semarang
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, Listrik	Jan – Des	Kota Semarang
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jan – Des	Kota Semarang
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	Jan – Des	Kota Semarang
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jan – Des	Kota Semarang
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jan – Des	Kota Semarang
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jan - Des	Kota Semarang
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jan – Des	Kota Semarang
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jan – Des	Kota Semarang

No	KEGIATAN	Pelaksanaan Kegiatan	
		tanggal	Lokasi
1	2	3	4
10	Penyediaan Makanan Minuman	Jan – Des	Kota Semarang
11	Penyediaan Sarana Kesehatan	Jan – Des	Kota Semarang
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jan – Des	Kota Semarang
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jan – Des	Kota Semarang
14	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jan – Des	Kota Semarang
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan RT	Jan – Des	Kota Semarang
16	Peningkatan Sarana Prasarana Kantor	Jan – Des	Kota Semarang
17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Maret	Kota Semarang
18	Peningkatan Kapasitas SDM	Jan – Des	Kota Semarang

Dalam rangka memenuhi kewajiban keterbukaan informasi public dalam hal penyampaian informasi publik, BPBD Prov Jawa Tengah melalui website (bpbddjateng.info bpbdd.jatengprov.go.id) telah menyediakan berbagai informasi tentang BPBD Prov Jawa Tengah, memanfaatkan media sosial. Adapun media sosial yang digunakan BPBD Prov Jawa Tengah antara lain adalah:

email		bpbdd@jatengprov.go.id , bpbdd_jateng@yahoo.com poskoaju.bpbddjateng@gmail.com
websiter		www.bpbddjateng.info www.bpbdd.jatengprov.go.id
Whatsapp		08813809409
Twitter		@bpbddjateng
facebook		BPBD Provinsi Jawa Tengah
Instagram		@bpbddjateng

Melalui berbagai media tersebut, komunikasi dengan masyarakat menjadi lebih terbuka dan interaktif. Sebagai implementasi komunikasi tersebut, beberapa pihak (para pemangku kepentingan) memerlukan data dan informasi terkait penanggulangan bencana di Jawa Tengah. Jumlah pemohon data dan informasi masyarakat ke BPBD Prov Jawa Tengah adalah sebagai berikut.



Gambar 31 Pemohon Informasi Publik

Mendasarkan gambar tersebut, permohonan informasi publik tahun 2019 banyak (61%) adalah aplikasi Lapor Gub. Berbagai hal terkait kejadian bencana dan penanganan bencana menjadi bahan pertanyaan atau aduan, sehingga mensikapi hal tersebut, BPBD Prov Jateng terus berupaya untuk tetap memberikan layanan data dan informasi dari media sosial.

Selain pelayanan, surat menyurat, data informasi, tugas pokok dan fungsi subbagian umum kepegawaian adalah pengelolaan aset. Data pengelolaan aset BPBD Prov Jateng tahun 2019, disajikan pada tabel 49 berikut.

Perubahan asset baik dari pengadaan barang maupun limpahan asset dari OPD berpengaruh terhadap jumlah total asset di BPBD Prov Jateng. Belanja barang mempengaruhi penambahan jumlah

aset dan sangat berarti dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Jawa Tengah. Rekapitulasi data aset menurut kategori barang adalah sbb.

Tabel 41
Sarana dan Prasarana Kedinasan Umum Tahun 2019

No	Nama Bidang	31 Des 2018		31 Des 2019	
		Jml	Harga (Rp)		
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	2	3.100.000.000	2	3,100,000,000.00
	Tanah	2	3.100.000.000	2	3,100,000,000.00
2	Peralatan Dan Mesin				
	Alat-alat besar	35	2.972.653.000	35	2,972,653,000.00
	Alat-alat Angkutan	127	14.436.497.543	127	14,436,497,543.00
	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	11	374.850.000	11	374,850,000.00
	Alat-alat Pertanian / Peternakan	-	-	-	-
	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	2.133	4.658.085.079	2,233	5,103,330,233.00
	Alat-alat Studio dan Komunikasi	576	1.625.556.949	588	1,714,356,949.00
	Alat-alat Kedokteran	-	-	-	-
	Alat-alat Laboratorium	-	-	-	-
	Alat-alat Keamanan	289	1.561.776.003	289	1,561,776,003.00
	Alat Komputer	297	1,943,784,892	337	2,196,035,738.00
	Alat Metrologi dan Geofisika/Alat Ukur	-	-	-	-
	Alat Olah Raga	-	-	-	-
3	Gedung Dan Bangunan	4	8.523.869.968	4	8,523,869,968.00
	Bangunan Gedung	4	8.523.869.968	4	8,523,869,968.00
4	JALAN, DAN IRIGASI				
	Jalan dan Jembatan			-	-
	Bangunan Air / Irigasi	7	89,000,000	-	-
	Instalasi	1	91,433,000	7	89,000,000.00
	Jaringan			1	91,433,000.00
5	ASET TETAP LAINNYA				
	Buku Perpustakaan	503	55.083.955	503	55,083,955.00

No	Nama Bidang	31 Des 2018		31 Des 2019	
		Jml	Harga (Rp)		
1	2	3	4	5	6
	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	7	875.000	6	750,000.00
	Hewan Ternak dan Tumbuhan				
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
	JUMLAH	3.992	39.433.465.389	4,143	40,219,636,389.00

Sumber: Jurnal Mutasi Barang Desember 2019

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Subbag Umum dan Kepegawaian tingkat ketercapaian kinerja output pada 16 kegiatan rutin pelayanan perkantoran hanya 1 (satu) kegiatan yang memiliki tingkat ketercapaian kinerja outputnya 0%. Dari total pagu anggaran tahun 2019 pada Subbag Umum Kepegawaian adalah Rp 10.910.000.000,- dengan realisasi fisiknya 91.39% dan realisasi keuangannya mencapai 87.88% seperti terlihat pada table berikut:

Tabel 42
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	DPPA TA 2019		Pelaksanaan APBD	
			Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
A	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
1	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah			300.000.000	100%	97,09%
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya Jasa surat menyurat, atk, cetak penggandaan dan kearsipan perangkat daerah</i>	Bulan	12			

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	DPPA TA 2019		Pelaksanaan APBD	
			Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah			580.000.000	100%	97,69%
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah</i>	Bulan	12			
3	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah			250.000.000	100%	87,27%
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah</i>	Bulan	12			
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah			535.000.000	100%	95,22%
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah</i>	Bulan	12			
5	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah			1.500.000.000	100%	99,14%
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah</i>	Bulan	12			
7	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah			200.000.000	100%	94,23%

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	DPPA TA 2019		Pelaksanaan APBD	
			Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah</i>	Bulan	12			
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan PD			30.000.000	100%	93,93%
	<i>Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah</i>	Bulan	12			
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah			1.250.000.000	100%	99,81%
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah</i>	Bulan	12			
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah			500.000.000	100%	95,76%
	<i>Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah</i>	Bulan	12			

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	DPPA TA 2019		Pelaksanaan APBD	
			Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor			1.450.000.000	100%	98,30%
	<i>Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah</i>	Jenis	10			
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			1.003.000.000	6,38%	6,23%
	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan</i>	Unit	2			
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas			32.000.000	100%	98,44%
	<i>Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan</i>	Unit	60			
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal			100.000.000	100%	69,48%
	<i>Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/ Workshop/ Bimbingan Tek/ Seminar</i>	Orang	25			
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah			630.000.000	100%	97,94%
	<i>Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah</i>	Laporan	2			
	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100.000.000	100%	97,98%
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah</i>	Bulan	12			
	Kegiatan Pemeliharaan			720.000.000	100%	95,11%

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	DPPA TA 2019		Pelaksanaan APBD	
			Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
	Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional					
	<i>Jumlah Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Sekertariat DPRD</i>	Bulan	12			
	Total			10.910.000.000	91,39	87,88

Untuk **tingkat** ketercapaian kinerja output yang kurang dari 0% adalah kegiatan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan indikator Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan dengan realisasi fisik 6,38% dan realisasi keuangan adalah 6,23%. Hal ini terjadi karena Gagal pelaksanaan (Putus kontrak) dengan detail rincian:

1. Triwulan I

Pada triwulan I barang pesanan belum tayang/tampil di *e-catalog* Prov. Jateng dan tindak lanjut yang telah BPBD Prov. Jateng lakukan adalah mencari informasi ke beberapa penyedia dan koordinasi dengan Biro PBJ Setda Prov Jateng.

2. Triwulan II

Pada triwulan II, barang pesanan sudah tersedia untuk di pesan penyedia akan tetapi BPBD Prov. Jateng harus melakukan pergeseran kode rekening anggaran/menyesuaiakn dengan pagu barang dipasaran dan tindak lanjut yang kami lakukan adalah melakukan penyesuaian pergeseran kode rekening.

3. Triwulan III

Pada triwulan III, lelang dinyatakan gagal/tidak ada penawaran yang sesuai sehingga BPBD Prov. Jateng kembali melakukan Proses lelang ulang, survei terhadap calon penyedia/pemenang.

4. Triwulan IV

Pada triwulan IV, Gagal pelaksanaan (Putus kontrak). Hingga 50 hari kerja dimulai dari tanggal 17 Oktober hingga 6 Desember 2019 pihak penyedia tidak dapat menyediakan barang yang sudah dipesan. Sehingga tindak lanjut yang telah BPBD Prov. Jateng laksanakan adalah dengan Pengecekan akhir kelokasi dan berkonsultasi dengan Biro BPJ, BPKAD dan Inspektorat bahwa SPK dinyatakan Gagal pelaksanaan atau putus kontrak.

3.6.2 Subbagian Keuangan

Subbagian keuangan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi meliputi kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, jasa pelayanan perkantoran. Pelaksanaan ketiga kegiatan tersebut sebagaimana tabel berikut.

Tabel 43
Kegiatan Subbagian Keuangan

No	KEGIATAN	Pelaksanaan Kegiatan		
		tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di luar Daerah	Jan – des	35 kab/kota Jakarta	Pejabat dan Staf BPBD
2	Jasa Pelayanan Perkantoran	Jan - des	Semarang	

3.6.3 Subbagian Program

Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi subbagian program adalah sebagai berikut.

1. Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
 - a. Forum Perangkat Daerah Bidang Kebencanaan
 - 1) Gambaran kegiatan
BPBD harus mampu berperan sebagai “Pawang Kebencanaan” dan mengkomunikasikan terhadap OPD yang terkait dengan Kebencanaan. Forum Perangkat Daerah Bidang Kebencanaan BPBD Provinsi Jateng untuk

mengakomodir usulan/masukan dari BPBD Kabupaten/ Kota serta OPD terkait dalam rangka menyusun perencanaan Program /Kegiatan BPBD tahun 2021.

2) Tujuan

Maksud dan tujuan untuk menyusun perencanaan Program/Kegiatan Bidang Kebencanaan tahun 2021 dengan menyusun sekala prioritas.

3) Pelaksanaan

Waktu Jumat, 8 Maret 2019
Tempat : Ruang Rapat Kantor Badan
 Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
 Provinsi Jawa Tengah
Peserta : 150 orang, dari OPD Unsur :
 1. Pengarah BPBD Prov. Jateng
 2. BPBD Kab/Kota se Jateng
 3. PSB Perguruan Tinggi se Jateng
 4. CSR Perwakilan dan Penggiat
 Kebencanaan

4) Narasumber

Biro Perencaanaan : Sinergitas dan Sharing
BNPB Pendanaan Prioritas Nasional
 untuk Pembangunan Daerah di
 Jawa Tengah Tahun 2020
Komisi E DPRD : Peran DPRD dalam mendukung
Prov. Jateng Pembangunan Daerah Tahun
 2020 Bidang Penanggulangan
 Bencana
BAPPEDA Prov. Jtg : Prioritas Pembangunan Daerah
 Tahun 2020 di Bidang PB
BAPPEDA Prov. Jtg Moderator

5) Hasil

- a) Forum ini diharapkan bisa mensinkronisasikan dan mensinergikan perencanaan kebencanaan antar wilayah.
- b) Dana Kebencanaan Kabupaten/Kota juga bisa memperjuangkan pencapaian ideal anggaran kebencanaan daerah sebesar 1 persen dari total APBD.
- c) Edukasi masyarakat di daerah bencana tentang kebencanaan untuk lebih diaktifkan agar mereka bisa paham dan mengerti dalam menyelamatkan diri saat terjadi bencana.

6) Foto dokumentasi



Gambar 32 Forum OPD Bidang Kebencanaan 2019

b. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Program Kegiatan Penanggulangan Bencana Tahun 2020

1) Gambaran kegiatan

Sejak tahun 2018 hingga awal 2019 beberapa bencana besar telah melanda Indonesia, baik bencana yang murni disebabkan oleh alam seperti bencana gempa bumi dan

tsunami di Lombok, Palu, Banten, sampai bencana hidrometeorologi karena cuaca ekstreem hingga bencana hidrometeorologi yang masih dimungkinkan/diduga akibat campur tangan ulah manusia, seperti banjir bandang di Sentani, Papua.

Peristiwa bencana tersebut hendaknya menjadi pelajaran dan instropeksi khususnya bagi kita aparaturnya pemerintah yang bertugas di lembaga yang berkewajiban dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu BPBD.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 8 tentang Tanggung Jawab dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, salah satunya disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.

Berdasarkan amanat tersebut, Pemerintah Daerah hendaknya secara terencana dan terstruktur menyusun program dan kebijakan terkait anggaran PB yang sudah dialokasikan dalam APBD dimaksud.

2) Tujuan

- a) Meningkatkan koordinasi dan saling keterbukaan dalam perencanaan program kegiatan PB antar daerah;
- b) Mengumpulkan informasi dan data melalui diskusi terarah dan sharing permasalahan PB antar daerah;
- c) Menyusun dan mendokumentasikan data serta hasil diskusi dalam sebuah dokumen perencanaan dan evaluasi PB.

3) Pelaksanaan

Waktu : Kamis, 28 Maret 2019
Tempat : Hotel Lor In Syariah Kota Surakarta
Peserta : 100 orang, terdiri BPBD Kab/Kota se
Jateng (Sekretaris, Kasubbag Program
dan Staf Subbag
Program/Perencanaan)

4) Hasil

Setelah kegiatan ini, diharapkan dapat tersusunnya sebuah dokumen perencanaan Program Kegiatan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah Tahun 2019. Dalam kegiatan FGD ini disampaikan beberapa usulan dari BPBD Kab/Kota se-Jawa Tengah untuk rencana program kegiatan PB tahun 2020 yang difasilitasi dari APBD Provinsi. Adapun rata-rata usulan tersebut adalah :

- a) Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di daerah rawan bencana, karena BPBD Kab/Kota rata-rata memiliki target untuk membentuk 2 Destana setiap tahunnya;
- b) Pembentukan Unit LIDi dan pelatihan PB untuk disabilitas;
- c) Penambahan transportasi dalam rangka peningkatan sarpras PB;
- d) Pemasangan Early Warning System (EWS) dan rambu jalur evakuasi di daerah rawan bencana.

5) Dokumentasi



Gambar 33 Forum OPD Bidang Kebencanaan 2019

c. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Rpb) Dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

1) Gambaran kegiatan

Provinsi Jawa Tengah dilihat dari aspek kebencanaan dapat dikategorikan sebagai laboratoriumnya bencana. Mengapa? karena di Provinsi Jawa Tengah terjadi banyak jenis bencana baik bersifat geologis, hidrologis, meteorologis, maupun hidrometeorologis seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran, letusan gunung api, gempa bumi, dll.

Kejadian-kejadian bencana tersebut pada umumnya ada yang dapat diprediksi dan ada yang tidak dapat diprediksi. Bencana hidrometeorologis pada umumnya dapat diprediksi kapan waktu terjadinya karena terkait 2 (dua) periode musim di Indonesia, namun untuk ancaman geologis, waktu dan tempatnya tidak dapat

diprediksi meskipun wilayah berpotensi sudah terpetakan baik di wilayah darat maupun laut.

Mengingat tingginya ancaman bencana dan frekuensi bencana yang di Jawa Tengah, maka kesiapsiagaan merupakan kunci utama yang harus dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Jawa Tengah.

Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mengamanatkan bahwa, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Para pemangku kepentingan PB di Jawa Tengah harus satu visi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan demikian, upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan terencana. Rencana-rencana tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen sebagai dasar dan rujukan bagi Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada periode ini melaksanakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD periode 2018 – 2023. Dengan visi MENUJU JATENG SEJAHTERA & BERDIKARI “TETEP MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI” bidang penanggulangan bencana melaksanakan misi ke 4, yaitu MENJADIKAN RAKYAT JATENG LEBIH SEHAT, LEBIH PINTAR, LEBIH BERBUDAYA DAN MENCINTAI LINGKUNGAN.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Tanggungjawab Pemerintah dalam

penanggulangan bencana bukan hanya pada BPBD namun juga melekat pada perangkat daerah lain sesuai dengan fungsi masing-masing.

BPBD Prov. Jawa Tengah sebagaimana amanat UU No. 24 Tahun 2007 serta Perda No. 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, terdapat 3 fungsi utama BPBD yaitu Komando, Pelaksana dan Koordinator. Pada saat tidak terjadi bencana, maka aktivitas utama adalah koordinasi, bersinergi dan ikut melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana, namun dalam keadaan darurat agar penanganan darurat teratasi maka fungsi komando BPBD selaku insiden commander dilaksanakan bersama-sama.

Hasil identifikasi awal kami, terdapat 23 (dua puluh tiga) perangkat daerah yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana baik secara langsung maupun tidak langsung. OPD yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana diharapkan untuk saling berbagi tentang data dan informasi kegiatan. Selanjutnya data tersebut akan dikompilasi sebagai dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) di Jawa Tengah.

Rencana Penanggulangan Bencana merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang disusun berdasarkan hasil Analisis Risiko Bencana. Upaya-upaya penanggulangan bencana dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 tahun,

dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi kebencanaan.

Pada dokumen Rencana Penanggulangan Bencana periode 2014 – 2018 yang ditetapkan berdasarkan Pergub No. 44 Tahun 2014, beberapa perangkat daerah terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana baik pra, saat dan pasca bencana.

Dari aspek pendanaan program dan kegiatan yang terkait penanggulangan bencana dari tahun ke tahun mengalami kenaikan namun secara persentase terhadap APBD cenderung sama yaitu 0,4 – 0.5 % dari APBD Prov. Jateng. Sebagai contoh tahun 2016 dengan total dana PB sebesar Rp. 96,21 Milyar, persentase terhadap APBD 0,46% dan total anggaran pada tahun 2017 naik menjadi Rp. 134, 23 Milyar dan persentase 0.56%.

2) Tujuan

- a) Mempersiapkan perencanaan yang terarah, terpadu, dan terkoordinasi dalam rangka pengurangan risiko bencana, serta meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi dalam penanggulangan bencana, agar dapat melindungi masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dari bencana;
- b) Membantu para pengambil kebijakan dalam menyusun langkah yang terbaik yang perlu dilakukan dan memungkinkan analisis yang tepat dalam menentukan sumber daya yang diperlukan dalam penanganan kejadian bencana di Provinsi Jawa Tengah.

3) Pelaksanaan

Kegiatan : Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023.

Waktu kegiatan

- Hari, tanggal : Selasa, 17 September 2019.
- Pukul : 09.00 WIB s/d selesai (sesuai jadwal).

Tempat : Ruang Rapat Gedung A Lt. IV BPBD Prov. Jateng
Jl. Imam Bonjol No. 1 F,
Semarang.

Peserta kegiatan : 1. OPD Provinsi Jawa Tengah;
2. Instansi Vertikal.

4) Narasumber

- a) BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah (Nanang Dwi Saputro, SE) dengan tema materi Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 s.d. 2023;
- b) PSB FIS UNNES (Aprillia Findayani, M.GES) dengan tema materi Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di Daerah;
- c) PSB FIS UNNES (Dr. Ir. Ananto Aji, MS) dengan tema materi Data dan Teknis Penyusunan RPB dan RAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 s.d. 2023;
- d) PSB FIS UNNES (Andi Irwan Benardi, M.Pd) dengan tema materi Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk PRB dan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah

5) Hasil

Dalam menyusun Dokumen RPB dan RAD Jawa Tengah diperlukan adanya koordinasi dengan para pemangku kepentingan PB (OPD dan Instansi Vertikal) dan

membutuhkan identifikasi kebutuhan secara cermat dan teliti berdasarkan azas manfaat, ketepatan, efektif dan efisien untuk setiap pelaksanaan kegiatan serta harus ditentukan fokusnya (pada upaya pengurangan risiko bencana, tanggap darurat atau pemulihan pasca bencana) sehingga dapat terlihat fokus tugas sesuai tupoksi masing-masing.

6) Dokumentasi



Gambar 34 Penyusunan RPB dan RAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023

d. Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Bidang Kebencanaan Tahun 2019

1) Gambaran Kegiatan

Kegiatan Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Bidang Kebencanaan Tahun 2019 dibuka oleh Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah (Drs. Sudaryanto, M.Si) dan menyampaikan point sambutan sebagai berikut :

- a) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek keberhasilan yang perlu

diperhatikan dalam PB untuk perlindungan terhadap masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;

- b) Kerjasama antar Pemda, Dunia Usaha dan Masyarakat perlu dilakukan untuk menyikapi keterbatasan keuangan/alokasi anggaran daerah yang akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk PB;
- c) Perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan BPBD salah satunya dengan menyusun dokumen perencanaan PB yang menjadi acuan dan pedoman bagi para pemangku kepentingan PB untuk menyamakan langkah dan upaya dalam penanggulangan bencana;
- d) Diperlukan koordinasi penyusunan pelaporan SPM bidang kebencanaan untuk mengatasi kendala terkait implementasi di daerah.

2) Tujuan

- a) Mempersiapkan perencanaan yang terarah, terpadu, dan terkoordinasi dalam rangka pengurangan risiko bencana, serta meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi dalam penanggulangan bencana;
- b) Membantu para pengambil kebijakan dalam menyusun langkah yang terbaik dalam PB
- c) Menyusun dokumen evaluasi kinerja sesuai standar pelayanan minimal.

3) Pelaksanaan

Kegiatan : BINTEK Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Bidang Kebencanaan

Waktu kegiatan

Hari, tanggal : Rabu – Kamis tanggal 2 – 3 Oktober 2019

Pukul : 14.00 WIB s/d selesai. (sesuai jadwal).

Tempat : Hotel Grand Wahid Salatiga Jl. Jend. Sudirman No.2, Salatiga

Peserta kegiatan : 70 orang, dari BPBD Kab/Kota Se Jawa Tengah, terdiri :

- Sekretaris/Ka Sub Bag Tata Usaha
- Ka Sub bag Perencanaan / Program atau Staf Perencanaan/Program

4) Narasumber

- a) Kedeputan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB
- b) BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
- c) Biro Otda Dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah;
- d) PSB Fakultas Ilmu Sosial UNNES.

5) Hasil

Setelah kegiatan ini, diharapkan Seluruh Pelaku Penanggulangan Bencana wajib menyelaraskan program dan kegiatan dengan rencana Penanggulangan Bencana.

6) Dokumentasi



Gambar 35 Bintang Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Bidang Kebencanaan

e. Rakor Evaluasi Penanganan Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kesiapan Menghadapi Musim Penghujan 2019 – 2020

1) Gambaran Kegiatan

Musim kemarau 2019 diprediksi akan berlangsung lebih lama dan BMKG menghimbau untuk waspada kekeringan ekstrim pada daerah yang lebih dari 60 hari tidak hujan dan waspada potensi kebakaran serta melakukan efisiensi penggunaan air. BMKG memprediksikan awal musim hujan 2019-2020 akan mundur 1-3 dasarian dan prakiraan secara umum awal musim hujan 2019-2020 pada Bulan November 2019. Pada Dasarian III November 2019 diprediksi curah hujan wilayah Jawa Tengah umumnya dalam kriteria rendah, dan yang termasuk dalam kriteria menengah adalah wilayah Pemalang bagian timur, Pekalongan, Batang, Kendal bagian barat, Banjarnegara bagian utara, Sragen, Grobogan bagian selatan, Karanganyar bagian utara dan Boyolali bagian timur.

Perum Perhutani Jawa Tengah melaporkan :

5 KPH tertinggi kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 ada di wilayah KPH Pekalongan Barat (+ 329 ha), KPH Kedu Utara (+ 246 ha), KPH Surakarta (+ 222 ha), KPH Banyumas Timur (+ 93 ha) dan KPH Pekalongan Timur (+ 79 ha). Sering terjadi kebakaran di wilayah jalan Tol Trans Marga (Semarang-Bawen-Solo) yang mengalami kendala/ kesulitan akses jalan masuk ke wilayah terbakar untuk melakukan pemadaman dan untuk upaya penanganan akan dikirimkan surat ke Trans Marga perihal kerjasama dalam penanganan kebakaran.

2) Tujuan

- a) Melakukan evaluasi penanganan bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan tahun 2019.

b) Mengkoordinasikan kesiapan pemerintah dalam menghadapi ancaman bencana banjir dan longsor pada musim penghujan 2019-2020.

3) Pelaksanaan

Kegiatan : Rakor Evaluasi Penanganan Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kesiapan Menghadapi Musim Penghujan 2019 – 2020

Waktu kegiatan

Hari, tanggal : Minggu-Senin tanggal 20-21 Oktober 2019

Tempat : Hotel Guciku Kabupaten Tegal

Peserta kegiatan : 33 orang terdiri dari Kepala Pelaksana BPBD Kab/Kota se Jawa Tengah dengan narasumber dari Stasiun Klimatologi Semarang, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, BPBD Kab. Tegal dan Moderator dari BPBD Kab. Tegal.

4) Hasil

a) BPBD telah melakukan dropping air bersih selama musim kemarau 2019 dan untuk ke depan perlu kerjasama khusus terkait kebakaran hutan dan lahan karena melibatkan instansi lain seperti Perhutani, DLHK, BKSDA dan BPDAS;

b) BMKG memprediksikan puncak musim hujan bervariasi antara bulan Januari dan Februari 2020;

c) Dalam rangka menghadapi musim penghujan 2019-2020 BPBD Kab/Kota se Jawa Tengah diminta untuk melakukan upaya dan pemutakhiran data terkait PB.

5) Dokumentasi



Gambar 36 Rakor Evaluasi Penanganan Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kesiapan Menghadapi Musim Penghujan 2019 – 2020

f. Workshop dan Bintek dengan tema "Peluang dan Tantangan Penggunaan Media Sosial Dalam Penyediaan Informasi Publik"

1) Gambaran kegiatan

Keberadaan media sosial sangat membantu proses penyebaran informasi yang dibutuhkan untuk mengatasi kejadian bencana, karena dapat mendukung keselamatan publik melalui desiminasi informasi yang cepat, tepat, dan tentunya harus akurat.

Media sosial memiliki peran penting dalam menciptakan kepercayaan publik kepada penyelenggara penanggulangan bencana yang dalam hal ini adalah pemerintah ketika dalam situasi tanggap darurat, dimana media sosial berfungsi untuk memberikan informasi yang positif dan proporsional tentang situasi kritis yang sedang terjadi.

Fungsi dan peran media sosial dalam memberikan informasi bencana tidak hanya saat tanggap darurat

saja, dalam hal pra bencana juga memiliki fungsi dan peran yang penting untuk mengedukasi masyarakat melalui informasi mitigasi bencana yang disebarkan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman bencana di Jawa Tengah dan memahami cara penanggulangannya.

2) Tujuan

Meningkatkan pengelolaan informasi publik pada bidang penanggulangan bencana yang bertujuan untuk memberikan fasilitas yang lebih baik kepada masyarakat terhadap kebutuhan informasi dan edukasi tentang bencana di Jawa Tengah.

3) Pelaksanaan

Kegiatan : Workshop dan Bintek dengan tema
“Peluang dan Tantangan
Penggunaan Media Sosial Dalam
Penyediaan Informasi Publik”

Waktu kegiatan

Hari, tanggal : Kamis/28 Nopember 2019

Tempat : 09.00 WIB-selesai (sesuai jadual)

Peserta : Ruang Rapat Lt. IV BPBD Prov.
kegiatan Jateng

4) Narasumber Kegiatan :

a) Dicky Adinurwanto, S.Sos, MM (Kepala Seksi Opini
Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Jawa Tengah);

b) Habibi Kurniawan (Staf Khusus Gubernur Jawa
Tengah/Wakil Ketua GRMS Jawa Tengah).

5) Hasil

Pengelolaan media sosial perlu untuk direncanakan dan dianggarkan pada Renja Perangkat Daerah mulai dari sarana prasarana dan pelatihan untuk admin media

sosial yang memiliki target dan sasaran guna mengoptimalkan fungsi media sosial pemerintah.

6) Dokumentasi



Gambar 37 Workshop dan Bintel dengan tema “Peluang dan Tantangan Penggunaan Media Sosial Dalam Penyediaan Informasi Publik”

g. Rapat Koordinasi Sinergi Perencanaan Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2020

1) Gambaran kegiatan

Penyusunan program kerja/kegiatan di daerah sebaiknya berdasarkan kepada permasalahan/tantangan di daerah tersebut, sehingga diharapkan dapat meyakinkan TAPD, Kepala Daerah dan DPRD untuk dapat menyetujui program kerja/kegiatan dan anggaran dimaksud. Prinsip penyelenggaraan PB dengan berpedoman pada tata kelola keuangan yang baik hendaknya tidak menghambat kinerja kemanusiaan yang harus cepat dan tepat, namun tetap dilaksanakan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana PB harus dilakukan secara benar, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan yang berlaku, apabila terdapat keraguan Pemda/BPBD dapat meminta pendampingan dari Perwakilan BPKP Provinsi.

2) Tujuan

Mewujudkan sinergitas kinerja pemerintah khususnya BPBD Provinsi dan Kab/Kota se Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, melalui akuntabilitas dan perencanaan yang terintegrasi antar dokumen, serta pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan tepat guna/manfaat serta tepat mutu.

3) Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Kamis-Jumat/5-6 Desember 2019
Pukul : 15.00 WIB-selesai (sesuai jadual)
Tempat : Hotel Pandanaran Inn Semarang
Jl. Pandanaran No. 40 Pekunden,
Semarang
Peserta : $\pm$ 35 orang yang terdiri dari
Sekretaris/Kepala Sub Bagian Tata
Usaha BPBD Kab/Kota se Jawa
Tengah.

4) Narasumber

- a) Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II
Sekretariat Utama BNPB (Nugroho Retno, ST, M.Si);
- b) Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengembangan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Muharyo Indro Yulianto, S.Kom, M.Ak);
- c) Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda
Provinsi Jawa Tengah (Drs. Danang Cahya Permadi,
MM).

5) Hasil

Sementara ini belum ada dasar hukum/pedoman resmi terkait penetapan peraturan tentang organisasi dan tata kerja yang baru untuk menerapkan Transformasi Jabatan Struktural ke Fungsional dalam rangka penataan SDM bidang penanggulangan bencana, maka struktur organisasi yang sudah berjalan tetap berlaku sampai ada pedoman resmi. Untuk mengatasi adanya kesenjangan kompetensi individu dan jabatannya yang berhubungan dengan peningkatan angka kredit, maka Biro Organisasi dan BKD akan bekerjasama dalam membahas usulan ke pusat (KEMENPAN RB RI) untuk ditetapkan pola kerja yang tidak hanya meningkatkan angka kredit.

6) Dokumentasi



Gambar 38 Rakor Sinergi Perencanaan Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2020

2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a) Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Gambaran kegiatan

Sebagai laboratorium bencana, Indonesia khususnya di Jawa Tengah terjadi banyak jenis bencana baik yang bersifat hidrologis, meteorologis, hidrometeorologis maupun geologis. Bencana hidrologis, meteorologis maupun hidrometeorologis umumnya sudah dapat diprediksi waktu terjadinya, namun untuk ancaman geologis, waktu dan tempatnya tidak dapat diprediksi meskipun wilayah potensinya sudah terpetakan.

Wilayah yang mempunyai ancaman bencana geologis seperti gempa bumi sudah terpetakan baik akibat adanya sesar maupun patahan baik di darat maupun laut. Mengingat kapan dan detilnya tidak dapat diprediksi secara tepat, maka upaya kesiapsiagaan patut ditingkatkan untuk menghadapi ancaman bencana tersebut.

Salah satu kunci meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana adalah dengan meningkatkan sarana pemantauan dan peringatan dini bencana, sosialisasi kepada masyarakat dan simulasi/ gladi bencana. Alat pemantauan dan peringatan dini bencana telah banyak dikembangkan dan untuk bencana gempa bumi alat tersebut dikembangkan pemerintah melalui BMKG. Pada tahun ini BMKG akan memasang alat EWS di 15 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Pemasangan tersebut diupayakan agar mampu mendeteksi secara cepat potensi terjadinya bencana sehingga dampak bencana dapat diminimalisasikan.

Selain kecepatan mendeteksi potensi bencana, para pemangku kepentingan juga diamanatkan untuk

meningkatkan kecepatan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, yang bertujuan agar informasi tersebut segera sampai dan masyarakat melakukan upaya kesiapsiagaan/penyelamatan serta menangkal informasi yang salah/hoax yang dapat membingungkan masyarakat. Bercermin dari peristiwa bencana yang sudah dialami, aparat pemerintah bertanggungjawab untuk segera memberikan informasi kepada publik dan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat korban bencana. Semua informasi tentang kebencanaan, baik peristiwa bencana sampai dengan kemampuan pemerintah (dari anggaran hingga sumber daya manusia sampai dengan sarana dan prasarana) dituntut untuk secara cepat dapat di akses oleh berbagai pihak terutama masyarakat yang terkena dampak bencana.

Oleh sebab itu, diperlukan ASN yang handal dan berintegritas, mampu menelaah secara cepat informasi yang diperlukan baik Pemerintah, Masyarakat, maupun pihak lain yang berkepentingan.

Pengelolaan data dan informasi tersebut merupakan bagian dari tugas rutin aparat BPBD sehingga seyogyanya tanpa ada perintah ataupun permintaan data dan informasi tersebut sudah terdokumentasi dengan baik sesuai dengan kaidah dan prosedur yang benar. Pengelolaan data dan informasi dasar kebencanaan akan memudahkan aparat BPBD dalam hal pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan sekaligus pelayanan untuk kebutuhan audit/pemeriksaan, baik pemeriksaan kinerja maupun pertanggungjawaban anggaran.

Pemerintah Prov. Jawa Tengah pada kesempatan kali ini sedang menjadi tuan rumah Tim Ekspedisi Destana

Tsunami. Start Ekspedisi Destana Tsunami yang dimulai tanggal 18 Juli 2019 di Banyuwangi, telah memasuki Jawa Tengah yaitu :

- a) Kab. Wonogiri pada tanggal 24 Juli 2019;
- b) Kab. Purworejo pada tanggal 29 Juli 2019;
- c) Kab. Kebumen pada tanggal 30 – 31 Juli 2019;
- d) Kab. Cilacap pada tanggal 1 Agustus 2019; dan

selanjutnya tim akan menuju ke Jawa Barat.

Kegiatan Ekspedisi Destana Tsunami bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kebencanaan tsunami bagi masyarakat yang terpapar/terdampak tsunami di wilayah Pantai Selatan Jawa termasuk Jawa Tengah. Sehubungan dengan kegiatan Ekspedisi Destana Tsunami, kegiatan sosialisasi ini sekaligus merupakan bagian dari sharing pengalaman dan evaluasi terhadap pelaksanaan Ekspedisi Destana Tsunami di Jawa Tengah yang sebentar lagi akan bergerak ke Cilacap dan dilanjutkan ke Jawa Barat.

2) Tujuan

- a) Meningkatkan kapasitas sumber daya ASN BPBD dalam bidang pelaporan kebencanaan terutama kecepatan untuk penyampaian informasi kepada masyarakat;
- b) Meningkatkan kapasitas sumber daya ASN BPBD dalam mengelola informasi bencana yang akan disampaikan kepada masyarakat untuk menangkal informasi yang salah/hoax yang dapat membingungkan masyarakat.

3) Pelaksanaan

Kegiatan : Sosialisasi Keterbukaan Informasi
Bencana Untuk Peningkatan
Ketangguhan Masyarakat

Waktu
kegiatan
Hari,tanggal : Selasa, 30 Juli 2019

Pukul : 12.00 WIB s/d selesai (sesuai jadwal)
Tempat : Mexolie Hotel Kebumen
Jl. Merak II No. 8, Panjer, Kebumen
Peserta : 1) Kepala Pelaksana BPBD Kab/Kota se-
kegiatan Jawa Tengah
2) Kepala Bidang/Seksi Pencegahan dan
Kesiapsiagaan BPBD Kab/Kota se-
Jawa Tengah

4) Narasumber dan Materi Kegiatan :

- a) Kepala Stasiun Geofisika Banjarnegara dengan tema materi Potensi Gempa Bumi-Tsunami di Pulau Jawa dan Mitigasinya;
- b) Kepala Pelaksana BPBD Kab. Cilacap dengan tema materi Strategi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana Tsunami di Kabupaten Cilacap;
- c) Kepala Pelaksana BPBD Kab. Purworejo dengan tema materi Kebijakan dan Langkah-Langkah yang sudah Diambil Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Ancaman Tsunami di Kabupaten Purworejo;
- d) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kebumen dengan tema materi Strategi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana Tsunami di Kabupaten Kebumen;
- e) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Wonogiri dengan tema materi Strategi Pengurangan Risiko Bencana Tsunami di Kabupaten Wonogiri.

5) Hasil

Keterbukaan dalam penyampaian informasi bencana bukan hanya akan memudahkan aparatur BPBD dan Pemerintah Daerah dalam hal pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, namun sekaligus merupakan pelayanan untuk kebutuhan pemeriksaan,

baik pemeriksaan kinerja maupun pertanggungjawaban anggaran dalam melaksanakan tugas kemanusiaan.

Pelaksanaan langkah-langkah penanggulangan bencana yang telah dirancang oleh BPBD dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat secara langsung adalah merupakan bentuk keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat dalam penyampaian informasi kebencanaan yang diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat terhadap ancaman bencana dan meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

6) Dokumentasi



Gambar 39 Sosialisasi Keterbukaan Informasi Bencana Untuk Peningkatan Ketangguhan Masyarakat

3. Pelayanan Informasi Perangkat Daerah

a. Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Diseminasi Informasi Bencana serta Peningkatan Kapasitas SDM

1) Gambaran Kegiatan

Sejak Bulan Januari sampai dengan Pertengahan Tahun 2019 beberapa bencana baik besar ataupun sedang telah

melanda Indonesia termasuk di dalamnya yaitu di Provinsi Jawa Tengah. Baik bencana yang belum dapat diprediksi sebelumnya seperti gempa bumi di Cilacap, sampai bencana hidrometeorologi yang saat ini masih kita alami yaitu kekeringan di 10 (sepuluh) Kab/Kota seperti: Cilacap, Purbalingga, Purworejo, Klaten, Grobogan, Temanggung, Pemalang, Tegal, Kota Semarang dan Banyumas.

Berdasarkan informasi BMKG Kota Semarang, tentang prediksi musim kemarau dan dampak kekeringan di Jawa Tengah, bahwa musim kemarau Tahun 2019 dimulai pada awal Bulan Juni, sedangkan puncak kekeringan pada awal Bulan September dan akan berakhir pada awal Bulan Desember.

Belajar dari peristiwa bencana yang sudah terjadi, dan sebagian besar secara tiba-tiba atau tidak terduga, maka yang harus kita persiapkan adalah pemerintah dapat segera memberikan informasi kepada publik dan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat korban bencana. Oleh sebab itu, diperlukan ASN yang handal dan berintegritas, mampu menelaah secara cepat informasi yang diperlukan baik Pemerintah, Masyarakat maupun pihak lain yang berkepentingan.

Saat ini adalah Era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan berkembangnya *Internet of/for Things* yang menjadi tantangan bagi semua kalangan, termasuk di dalamnya yaitu dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam hal ini, semua informasi tentang kebencanaan baik peristiwa bencana sampai dengan kemampuan pemerintah (dari anggaran hingga sumber daya manusia sampai dengan sarana dan prasarana) dituntut untuk secara cepat

dapat di akses oleh berbagai pihak terutama masyarakat yang terkena dampak bencana.

Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini kami mendorong dan mendukung BPBD Kab/Kota sebagai wakil kehadiran pemerintah di daerah segera melengkapi data antara lain:

- a) Peralatan;
- b) Logistik;
- c) Kejadian Bencana;
- d) Sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana;
- e) Kapasitas Penanggulangan Bencana;
- f) Update data yang disajikan dalam bentuk peta.

Pengelolaan data dan informasi tersebut merupakan bagian dari tugas rutin aparat BPBD sehingga seyogyanya tanpa ada perintah ataupun permintaan data dan informasi tersebut sudah terdokumentasi dengan baik sesuai dengan kaidah dan prosedur yang benar.

Pengelolaan data dan informasi dasar kebencanaan akan memudahkan aparat BPBD dalam hal pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan sekaligus pelayanan untuk kebutuhan audit/pemeriksaan, baik pemeriksaan kinerja maupun pertanggungjawaban anggaran.

Sebagaimana kita ketahui, beberapa waktu yang lalu beberapa BPBD Kab/Kota di Jawa Tengah menjadi sampel untuk pemeriksaan BPK terkait kepatuhan dalam penangana bencana khususnya pra bencana. Sedangkan pemeriksaan internal oleh inspektorat pada umumnya audit pertanggungjawaban anggaran menjadi rutinitas pemeriksaan. Kedua audit tersebut baik kinerja maupun pertanggungjawaban anggaran harus disikapi dengan baik dan segera ditindaklanjuti sesuai dengan temuan dan rekomendasi tim pemeriksa. Oleh sebab itu kami mengajak

seluruh yang terlibat agar jangan menunda tindak lanjut rekomendasi tim pemeriksa untuk mewujudkan good government dan clean government.

Selanjutnya, untuk mewujudkan good government dan clean government tersebut, perlu dibangun budaya kerja yang baik di masing-masing Kabupaten/Kota. Budaya kerja seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, berani, bertanggung jawab dan kerja keras (JUPE MANDI SIBEDIL) harus terus ditumbuhkembangkan di lingkungan aparat BPBD agar tetap semangat dalam melaksanakan tugas kemanusiaan yang sangat mulia.

2) Tujuan

- a) Meningkatkan kapasitas sumber daya ASN BPBD dalam bidang pelaporan kebencanaan;
- b) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam bidang pelaporan kebencanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

3) Pelaksanaan

Kegiatan : Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Diseminasi Informasi Bencana serta Peningkatan Kapasitas SDM

Waktu kegiatan

Hari,tanggal : Kamis, 11 Juli 2019

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai (sesuai jadwal)

Tempat : Ruang Rapat Lt. 4 Gd. A, Kantor BPBD Prov. Jateng
Jl. Imam Bonjol No. 1 F, Semarang

Peserta kegiatan : 1) Karyawan/Karyawati di Lingkungan BPBD Prov. Jateng
2) Kepala Pelaksana BPBD Kab/Kota se-Jawa Tengah
3) Pejabat/Staf BPBD Kab/ Kota se-Jawa Tengah yang menangani data bencana dan media sosial

4) Narasumber

- a) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan tema materi Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Desiminasi dan Publikasi Data Bencana;
- b) Universitas Dian Nuswantoro Semarang dengan tema materi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelaporan Kebencanaan;
- c) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan tema materi Budaya Kerja.

5) Hasil

Perkembangan teknologi informasi memang sangat membantu dalam penanganan bencana, tapi pada saat tertentu tetap harus ada cadangan alat komunikasi dengan media konvensional seperti Handy Talkie, Radio dll untuk menjaga tetap sampainya informasi kepada masyarakat secara cepat, karena jika hanya mengandalkan media sosial saja yang tergantung adanya sinyal internet dan paket data, masih berisiko adanya masalah jaringan.

Budaya kerja (coporate culture) saat ini menjadi isu besar pada lembaga pemerintahan yang ingin terus hidup berkembang, sehingga harus diterapkan seperangkat kebijakan dan manajemen ASN yang berpijak pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dikemas untuk tujuan keadilan dan kewajiban terhadap sistem kerja ASN, karena dengan konsep ini diharapkan kinerja ASN bisa optimal sebab bidang yang dioperasikan sesuai dengan kompetensinya.

6) Dokumentasi



Gambar 40 Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Diseminasi Informasi Bencana Serta Peningkatan Kapasitas SDM

b. Pameran Pembangunan “Glorious Borobudur” (Event Jateng Fair 2019)

1) Gambaran Kegiatan

Dalam rangka memeriahkan Event Jateng Fair 2019 dengan tema “Glorious Borobudur” BPBD Provinsi Jawa Tengah ikut serta dalam Pameran Pembangunan Jawa Tengah yang diselenggarakan di PRPP Jawa Tengah mulai tanggal 28 Juni s.d. 14 Juli 2019. Tema yang ditampilkan dalam keikutsertaan BPBD yang ke-5 pada Pameran kali ini adalah “Ekspedisi Desa Tangguh Bencana Tsunami”. BPBD Provinsi Jawa Tengah mengusung tema “Ekspedisi Desa Tangguh Bencana Tsunami” adalah untuk memberitahu kepada masyarakat Jawa Tengah yang tinggal di daerah rawan bencana tsunami tentang potensi bencana yang ada dan cara penanggulangannya. Dalam

pameran kali ini BPBD juga mempublikasikan tagline “Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita” dan “#SIAPUNTUKSELAMAT” dengan tujuan ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa bencana alam yang terjadi juga ada unsur kelalaian dari ulah manusia dalam menjaga alam/lingkungan hidup dan untuk selamat dari bencana kuncinya dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar.

Melalui kegiatan pameran pada Event Jateng Fair ini BPBD Provinsi Jawa Tengah berharap dapat mengenalkan lembaga BPBD sekaligus menyebarluaskan informasi dan pengetahuan kebencanaan kepada seluruh kalangan masyarakat. Dengan begitu akan semakin banyak masyarakat yang mengenal peran lembaga BPBD dan menyadari akan pentingnya pengetahuan tentang penanggulangan bencana karena mereka hidup di Jawa Tengah yang sebagian besar wilayahnya termasuk daerah rawan bencana.

2) Tujuan

Pameran Pembangunan pada Event Jateng Fair 2019 yang diikuti oleh BPBD memiliki maksud dan tujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah serta menyampaikan pengetahuan kebencanaan dengan muatan “pesan” yaitu :

a) *Living Harmony with Disaster*

Living Harmony with Disaster atau hidup harmoni/berdampingan dengan bencana dimaksudkan sebagai warga Jawa Tengah harus memahami bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah dengan ancaman bencana tertinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, masyarakatnya harus mempersiapkan diri

sebaik-baiknya dengan pengetahuan tentang kebencanaan meliputi : jenis bencana, cara untuk mengurangi dampak dari bencana, ataupun bagaimana dan apa yang harus dilakukan ketika bencana tertentu terjadi sewaktu-waktu.

b) Desa Tangguh Bencana (DESTANA)

Sejalan dengan visi BPBD Provinsi Jawa Tengah yaitu Mewujudkan Masyarakat Jawa Tengah yang Tangguh dalam Penanggulangan Bencana, maka BPBD mewujudkannya dalam beberapa program/kegiatan diantaranya adalah pembentukan Desa Tangguh Bencana. Desa Tangguh Bencana merupakan program yang menginisiasi suatu proses pembangunan dalam rangka pengurangan risiko bencana berbasis komunitas melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, dengan harapan masyarakat tidak saja menjadi objek dari proses tetapi dapat terlibat secara aktif dalam mengkaji, menganalisa, menangani, memantau dan mengevaluasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana di daerahnya dengan memaksimalkan sumber daya lokal yang ada.

c) Menuju Jawa Tengah Tangguh

Melalui program DESTANA diharapkan Jawa Tengah akan semakin tangguh bencana, karena sebagian besar masyarakat di wilayah Jawa Tengah ikut berperan aktif dalam penanganan bencana.

3) Pelaksanaan

Tema	: Pameran Pembangunan “Glorious
pameran	Borobudur” (Event Jateng Fair 2019)
Waktu	
Kegiatan	

Jangka waktu pelaksanaan	: 17 (tujuh belas) hari Mulai tanggal 28 Juni s.d. 14 Juli 2019
Jadwal	: - Senin – Kamis (Pukul 16.00 – 22.00 WIB) - Jum'at – Sabtu (Pukul 16.00 – 23.00 WIB) - Minggu (Pukul 11.00 – 23.00 WIB)
Tempat	: Gedung Bale Agung Merbabu PRPP Jawa Tengah
Panitia	: 80 orang dari BPBD Provinsi Jawa Tengah

4) Hasil

Pameran Pembangunan Jawa Tengah yang merupakan kegiatan utama pada Event Jateng Fair 2019 menjadi sebuah kompetisi bagi para pelaku usaha dan lembaga/instansi di Jawa Tengah yang ingin menampilkan produk unggulan dan hasil kinerja masing-masing. Konsistensi BPBD Provinsi Jawa Tengah yang setiap tahunnya ikut serta dalam Event Jateng Fair didasari atas komitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat, yang tujuannya agar masyarakat tahu dan mengenal Lembaga BPBD yang selalu siap siaga untuk masyarakat dalam menanggulangi bencana. Selain itu, melalui event ini BPBD juga ingin menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran akan ancaman bencana dan mengetahui cara menanggulangi dan menghadapi bencana. Oleh sebab itu, BPBD sangat antusias untuk selalu ikut serta memeriahkan Event Jateng Fair dengan selalu berusaha memberikan yang terbaik.

5) Dokumentasi



Gambar 41 Pameran Pembangunan pada Event Jateng Fair 2019

Tabel 44
Kegiatan Subbagian Program

No	KEGIATAN / Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
a	Forum Perangkat Daerah Bidang Kebencanaan	Jum'at 8 Maret 2019	Semarang (Kantor BPBD Prov. Jateng)	150 Orang
b	Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Program Kegiatan Penanggulangan Bencana Tahun 2020	Kamis, 28 Maret 2019	Solo (Hotel Lor In Syariah)	100 Orang
c	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Daerah Tahun 2019 s.d. 2023	Selasa, 17 September 2019	Semarang (Kantor BPBD Prov. Jateng)	75 Orang

No	KEGIATAN / Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
d	Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Bidang Kebencanaan Tahun 2019	Rabu - Kamis, 2 - 3 Oktober 2019	Salatiga (Hotel Grand Wahid)	70 Orang
e	Rakor Evaluasi Penanganan Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kesiapan Menghadapi Musim Penghujan 2019 - 2020	Minggu - Senin, 20 - 21 Oktober 2019	Kabupaten Tegal (Hotel Guciku)	33 Orang
f	Workshop dan Bintek dengan tema "Peluang dan Tantangan Penggunaan Media Sosial Dalam Penyediaan Informasi Publik"	Kamis, 28 November 2019	Semarang (Kantor BPBD Prov. Jateng)	70 Orang
g	Rakor Sinergi Perencanaan Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana	Kamis- Jum'at, 5-6 Desember 2019	Semarang (HOTEL ASTON INN PANDANARAN)	34 Orang
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
a	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Bencana Untuk Peningkatan	Selasa, 30 Juli 2019	Kebumen (Mexolie Hotel Kebumen)	100 Orang

No	KEGIATAN / Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
	Ketangguhan Masyarakat			
3	Pelayanan Informasi Perangkat Daerah			
a	Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Diseminasi Informasi Bencana serta Peningkatan Kapasitas SDM	Kamis, 11 Juli 2019	Semarang (Kantor BPBD Prov. Jateng)	100 Orang

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
JAWA TENGAH

5.1 Kejadian Bencana di Jawa Tengah

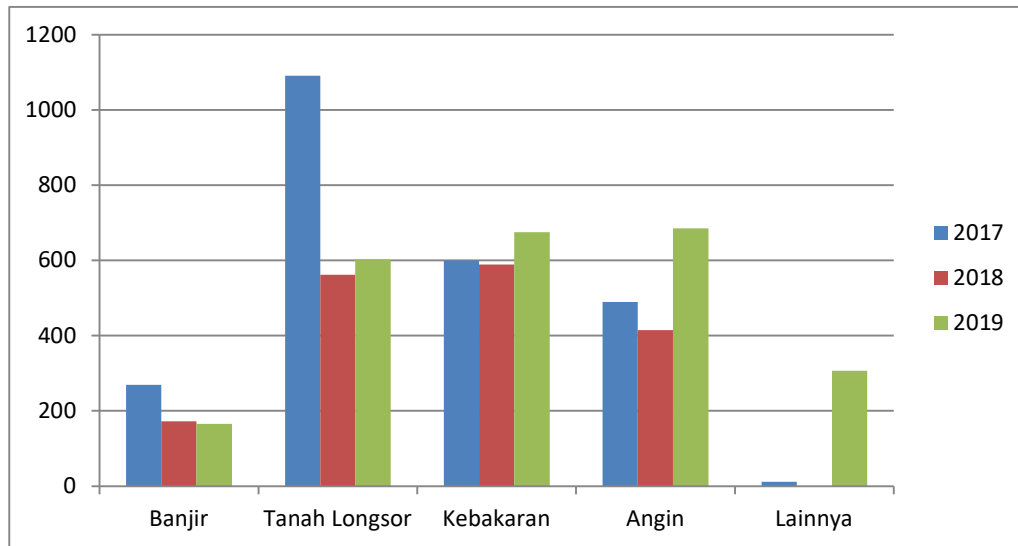
Data kejadian bencana di Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2019, tercatat sebanyak **2.437 (dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh)** kejadian bencana, dengan taksiran kerugian akibat bencana mencapai Rp 80.933.855.000,-. Kejadian bencana yang paling dominan dilaporkan adalah bencana Angin Putting Beliung yaitu 686 kejadian atau 28.1%. Sedangkan dari aspek kerusakan/kerugian akibat bencana, jumlah kerugian terbesar akibat bencana adalah bencana angin putting beliung dengan taksiran sebesar Rp 15.104.098.000,-. Rekapitulasi kejadian bencana dan taksiran kerugian di Jawa Tengah selama tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 45
Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Jawa Tengah 2019

NO	JENIS KEJADIAN	JMH KEJ	%	MD	KERUSAKAN RUMAH			TAKSIRAN KERUGIAN (Rp.000,-)
					RB	RS	RR	
1.	Angin	686	28.1	7	895	1683	8624	15.104.098
2.	Banjir	166	6.8	4	2	5	3	2.764.345
3.	Kebakaran	675	27.7	9	297	144	235	52.359.650
4.	Tanah Longsor	603	24.7	12	56	61	383	7.562.427
5.	Gempa Bumi	5	0,2	0	2	0	5	65.000
6.	Kebakaran Lahan dan Hutan	294	12.2	6	0	0	2	3.078.335
7.	Gelombang Pasang/ Abrasi	6	0,2	0	1	1	0	0
8.	Erupsi Gunung Berapi	2	0,1	0	0	0	0	0
TOTAL		2437	100	38	1253	1894	9216	80.933.855

* Laporan sampai dengan 31 Desember 2019

Dibandingkan dengan 3 (tiga) tahun terakhir, kejadian bencana di Jawa Tengah, adalah sebagai berikut



Gambar 42 Perbandingan Kejadian Bencana Jateng

Tabel 46
Perbandingan Kejadian Bencana 2017-2019

Bencana	2017	Kerugian (000)	2018	Kerugian (000)	2019	Kerugian (000)
1	2	3	4	5	6	7
Banjir	270	7.731.340	172	2.924.463	166	2.764.345
Tanah Longsor	1.091	21.025.867	562	5.117.186	603	7.562.427
Kebakaran	600	40.622.373	590	34.166.505	675	52.359.650
Angin	490	8.016.727	415	5.462.366	686	15.104.098
Lainnya	12	9.771.788	-	-	307	
	2.463	87.168.095	1.751	47.792.520	2.437	80.933.855

5.2 Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Tahun 2019

4.2.1 Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah dilakukan secara simultan dan bekerjasama baik lintas sektor maupun lintas wilayah. Komitmen dan kerjasama para pemangku kepentingan PB, diwujudkan dalam beberapa aspek, baik

kerjasama lingkup kelembagaan maupun teknis operasional penyelenggaraan penanggulangan. Sebagai landasan operasional masih didasarkan pada Instruksi Gubernur No. 360/009205 tanggal 30 Juni 2015 tentang Penanganan Darurat Bencana, bahwa seluruh pemangku kepentingan PB di Jawa Tengah agar :

1. Melaksanakan PB di seluruh wilayah Jateng terhadap seluruh ancaman bencana yang mengancam dan menyebabkan kehilangan jiwa dan harta benda serta kerusakan infrastruktur vital mulai dari status siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan dini.
2. Melakukan kolaborasi, koordinasi dan kerjasama untuk melaksanakan penanganan darurat bencana;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk kegiatan penanganan darurat bencana

Sebagai tindaklanjut Instruksi tersebut, maka ketika terjadi bencana, pemangku kepentingan Penanggulangan Bencana (PB) Daerah wajib :

1. Melaporkan ke Kepala Daerah (Bupati/Walikota) sebagai penanggungjawab pertama dalam penanganan bencana.
2. Mengadakan rapat dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan untuk menggerakkan sumberdaya yang dimiliki.
3. Menunjuk komandan Penanganan Darurat (Incident Commander) pada setiap kejadian bencana/kedaruratan.
4. Membentuk klaster sesuai kebutuhan
5. Jika satu kabupaten/kota terdampak, maka kabupaten/kota terdekat segera merapat untuk memberikan dukungan dan bantuan
6. Melakukan upaya penanggulangan bencana sejak dini untuk mencegah meluasnya dampak bencana
7. Memprioritaskan keselamatan jiwa, dan kelompok rentan.

8. Memberdayakan potensi masyarakat dan dunia usaha secara optimal.

9. Memperhatikan kearifan lokal dan Norma yang berlaku.

4.2.2 Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor

Bencana banjir, tanah longsor merupakan bencana hidrometeorologis yang selama ini mendominasi jumlah kejadian bencana. Tingkat ancaman bencana ini hampir merata di seluruh Kabupaten/Kota. Para pemangku kepentingan PB di kabupaten/kota terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan menghadapi ancaman bencana tersebut. Bencana tersebut selalu menjadi pemberitaan baik di awal tahun dan akhir tahun seiring dengan datangnya musim penghujan.

Langkah-langkah Antisipasi dan kesiapan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadapi ancaman bencana di Jawa Tengah, antara lain adalah:

1. Menerbitkan Surat Gubernur Jateng kepada Bupati/Walikota Se Jawa Tengah perihal Antisipasi Dampak Musim Hujan Tahun 2019-2020 di Jateng, untuk mengambil langkah-langkah:
 - a. Mengadakan Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Kekeringan, Kebakaran Lahan dan Hutan Serta Kesiapan Menghadapi Musim Penghujan 2019 pada tanggal 20 – 21 Oktober 2019 di Kab. Tegal;
 - b. Mengaktifkan posko siaga bencana dengan melibatkan TNI, POLRI, SKPD terkait, organisasi relawan serta masyarakat;
 - c. Mempublikasikan nomor posko siaga bencana melalui media;
 - d. Memperbarui inventarisasi data rawan bencana banjir dan tanah longsor;
 - e. Menggelar apel siaga bencana dan gerakan resik-resik kali, saluran dan lingkungan;
 - f. Mengidentifikasi tanggul-tanggul kritis dan melaporkan kepada Kementerian PU/Satker BBWS;

2. Dalam rangka percepatan pelaksanaan penanganan darurat bencana, Bupati/Walikota agar menerbitkan status siaga darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung sesuai rekomendasi dari BMKG;
 3. Menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah (dalam proses) tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Angin, Banjir dan Tanah Longsor di Prov. Jawa Tengah;
 4. Mengumumkan nomor Posko/Nomor BPBD Kabupaten/Kota dan instansi terkait melalui media :
 - a. Media massa;
 - b. Sosial Media BPBD Prov Jawa Tengah; twitter, whatsapp, facebook, instagram.
 5. Pengadaan, dan Distribusi Logistik/Material Kebencanaan di 35 Kabupaten/Kota;
 6. Membuka dan mengaktifkan posko bencana banjir dan tanah longsor 24 jam di BPBD Prov Jawa Tengah, SKPD teknis dan BPBD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Saluran yang dapat diakses dalam rangka percepatan pelaporan dan respon bencana antara lain:
 - a. SMS : 081 21556 495
 - b. Whatapps : 088 1380 9409
 - c. Telp/faks : 024-3562293
 - d. Website : www.bpbj.jatengprov.go.id
 7. Pemutakhiran data rawan bencana banjir dan tanah longsor di 35 kabupaten/kota
 8. Dana Tak Terduga Gubernur Jawa Tengah TA 2019 Rp. 23 M
- Selama rentang tahun 2019 dari Januari hingga Desember 2019, banyak terjadi bencana besar di daerah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data Pusdalops PB Provinsi Jawa Tengah berikut

kejadian menonjol banjir dan tanah longsor di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah beserta penanganannya:

1. Penanganan Bencana Banjir di Kab. Purworejo

Hujan deras dengan intensitas tinggi terjadi di 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Purworejo pada hari Rabu, 16 Januari 2019 pukul 04.00 WIB, yang mengakibatkan debit Sungai Dulang Meluap dan memasuki pemukiman rumah warga.

Tabel 47
Wilayah Terdampak Banjir Kab. Purworejo

No	Kecamatan	Desa	Lokasi lain	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Butuh	Wironatan Klepu Tegalgondo Lubanglor Lubangkidul Lubangsampan g Wonorejokulon Sidomulyo Kedungagung Kedungmulyo Wironatan		– Air memasuki pemukiman tinggi 50-75cm. Pengungsi : 39 jiwa – 20 rumah terendam dengan ketinggian 20 cm
2	Ngombol	Wingko Sanggrahan	Kali Sirinding	Meluap dan mulai masuk ke jalan Desa
3	Grabag			
4	Purwodadi			
5	Pituruh			
6	Banyuurip			
7	Bayan			

Kejadian bencana banjir menggenang 17 (tujuh belas) Desa di 7 (tujuh) Kecamatan, sementara masyarakat yang terdampak sejumlah 270 KK/600 Jiwa dengan ketinggian air kurang lebih 60 cm – 120 cm. BPBD melakukan asesment dan evakuasi warga terdampak banjir bersama anggota Koramil dan anggota Polres ke

tempat pengungsian serta mengirim bantuan logistik untuk dapur umum dan mengirim sejumlah selimut untuk warga yang mengungsi.



Gambar 43 Banjir 7 Kecamatan di Kabupaten Purworejo

2. Penanganan Bencana Banjir di Kab. Kebumen

Hujan deras yang mengguyur daerah Kab. Kebumen hari Rabu, 16 Januari 2019 mengakibatkan 23 (dua puluh tiga) Desa dari 9 Kecamatan di Kab. Kebumen tergenang air dengan jumlah puncak pengungsian mencapai 2.542 Jiwa yang tersebar di beberapa titik.

Tabel 48
Wilayah Terdampak Banjir Kab. Kebumen

No.	Kecamatan	Desa	Keterangan
1	2	3	4
1	Karanganyar	Wanareja	Tanggul jebol (pxl = 2x3m) 7 rumah terendam dan 2 rumah rusak ringan mengakibatkan sungai meluap.
		Meles	
		Karangkemiri	
		Sidomulyo	
2	Buayan	Plarangan	Banjir didepan RSU Purbowangi
		Purbowangi	
		Rangkah	
		Jogomulyo	
3	Pejagoan	Buayan	650 jiwa terdampak banjir, 28 titik pengungsian (323 kk, 1116 Jiwa mengungsi)
		Aditirto	1 tanggul jebol (P 6m , L 3m, T 3m)

No.	Kecamatan	Desa	Keterangan
1	2	3	4
4	Adimulyo	Caruban	Tanggul jebol
		Arjosari	
5	Kebumen	Jatisari	Banjir akibat luapan sungai Kedungbener
		Sumberdadi	1 titik pengungsian (200 KK , 1000 Jiwa mengungsi)
		Roworejo	426 jiwa mengungsi
6	Sruweng	Sidoagung	Jalan tidak bisa dilalui karena banjir dan 1 jembatan rusak
		Karangpule	Banjir berakibat 14 rumah terendam
7	Kutowinangun	Karangsari	
		Kuwarisan	
8	Klirong	Kedungwinangun	
9	Ayah	Demangsari	Banjir karena luapan sungai menggenangi sawah, rumah dan sebagian jalan raya
		Pasir	
		Ayah	

BPBD Kab. Kebumen meluncur ke lokasi Kejadian Bencana mengerahkan beberapa personil untuk melakukan assesment dan dilanjutkan dengan melakukan evakuasi warga terdampak banjir dengan perahu karet dan kendaraan truk. Dapur umum dilaksanakan di 6 titik yaitu :

- a) Kec. Kuwarasan : Desa Mangli dan Desa Purwodadi
- b) Kec. Buayan : Desa Rangkah, Desa Rogodadi, Desa Buayan





Gambar 44 Banjir 9 Kecamatan di Kabupaten Kebumen

3. Penanganan Banjir di Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan

Hujan lebat di daerah Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan mengakibatkan Parampet Sungai Meduri jebol dan roboh selebar 15 meter dan menggenangi pemukiman setinggi 20 – 70 cm. Banjir terjadi di hamper seluruh wilayah Pekalongan pada hari Minggu, 27 Januari 2019 pukul 00.30 WIB.

Tabel 49
Wilayah Terdampak Banjir
Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan

No.	Kecamatan	Desa
1	2	3
Kab. Pekalongan		
1	Kedungwuni	Ambokembang
		Pekajangan
		Tangkil Kulon
		Kedungwuni Timur
2	Tirto	Pacar
		Samborejo
		Karangjampo
		Tegaldowo
		Ngaliyan
		Curug
		Pandanarum
		Tanjung
		Jeruksari
3	Buaran	Simbangkulon
4	Wonokerto	Sijambe
		Pesanggrahan
		Wonokerto Timur
		Wonokerto Barat
Kota Pekalongan		

No.	Kecamatan	Desa
1	2	3
1	Pekalongan Barat	
2	Pekalongan Timur	
3	Pekalongan Utara	
4	Pekalongan Selatan	

Tabel 50
Titik Pengungsian Banjir
Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan

No.	Kecamatan	Desa	Lokasi	Pengungsi (Jiwa)
1	2	3	4	5
Kab. Pekalongan				
1	Buaran	Simbangkulon	Mushola Al Wahab	142
			Masjid Jami Simbang	100
			Rumah Mas Ali	50
			Gedung TPQ Al Magtab	369
			Belakang Koramil Buaran	40
			TPQ Al Amir	60
2	Tirto	Sambirejo	Masjid Jami	200
			Dk. Siringgit	300
			Mushola Baitul Musahidin	50
		Karangjampo	Masjid Dupantex	288
			Mushola Al. Amin	10
			Mushola Nurussalam	27
			Mushola Al Hikmah	25
			Mushola Nurul Iman	40
			Mushola Nurul Huda	42
			Mushola Al Falah	60
			Mushola Al Fata	42

No.	Kecamatan	Desa	Lokasi	Pengungsi (Jiwa)
1	2	3	4	5
			TPQ Al Hidayah	8
			Lap.Badminton	16
			Rumah Ibu Maimun	40
			Pos Pulosari	70
			Mushola Nurul Islam	30
			Sekitar tanggul	70
		Tegaldowo	TPQ / Masjid	200
Kota Pekalongan				
			Markas PMI Kota Pekalongan,	168
			Masjid Jami Setono	250
			Rumah Dinas Lurah Karangmalang Setono	25
			Masjid Al Karomah	500
			Stadion Kraton	
			Mushola Assunah Krapyak Kidul	150
			Ponpes Assyarifiah Krapyak Lor	
			Masjid Perum BRD Pringrejo	40
			Mushola Baitul Makmur Depan SMP 17 Degayu	28
			Kel. Tirto	300
			Samjanga	100
			TK Mashitoh	50
			Aula Kec. Bayat	52
			Kedung Tirto	
			Alfalah Tirto	158
			Al Saidah BRD	40

No.	Kecamatan	Desa	Lokasi	Pengungsi (Jiwa)
1	2	3	4	5
			Arrorym Kh. Majan	60
			Al Ikhsan Tirto	130
			Mushola Panjang	40

Data pengungsian bersifat dinamis karena jika malam hari pengungsi datang dan siang hari pengungsi kembali kerumah untuk melakukan aktifitas pembersihan rumah. Jumlah Keseluruhan pengungsi per tanggal 1 Februari 2019 Pukul 22.21 WIB untuk Kabupaten Pekalongan sebanyak 540 Jiwa (Data pengungsi bersifat dinamis dan pengungsi sebagian sudah kembali ke rumah masing-masing). Untuk Kota Pekalongan total keseluruhan sementara pengungsi sebanyak 2.091 Jiwa. (data masih terus berubah).

Tidak ada korban jiwa di kejadian ini, dan kerugian masih dalam perhitungan. BPBD Kota Pekalongan terus melakukan pendataan korban terdampak banjir serta titik-titik pengungsian, dan Mendirikan Dapur Umum di GOR Jatayu dan Kantor BPBD untuk sarapan korban terdampak banjir dengan kapasitas layanan 3.500 nasi bungkus. Hingga pada tanggal 2 Februari 2019 jumlah pengungsi tersisa 137 jiwa karena sudah banyak yang kembali kerumah masing – masing.



Kabupaten Pekaongan



Kota Pekalongan

Gambar 45 Banjir di Kabupaten Pekalonga dan Kota Pekalongan

4. Penanganan Bajiir di Kab. Batang

Banjir di Kab. Batang terjadi pada hari Minggu, 27 Januari 2019, Pukul 00.30 WIB dikarenakan hujan lebat dengan intensitas tinggi yang menyebabkan banjir di beberapa titik:

- a) Pendopo Kab. Batang
- b) Kantor Kecamatan Batang
- c) Masjid Karangasari Karangasem Utara
- d) Kantor Kelurahan Karangasem Utara
- e) Masjid Kidanglor
- f) Lapangan desa Klidanglor
- g) Madrasah Kidanglor

Dampak yang dihasilkan Banjir area pantura dan pemukiman dengan ketinggian air $\pm 50 \text{ cm} - 1 \text{ m}$. serta terdapat juga jembatan ambrol di Desa Cepagan Kec. Warung Asem. Sementara di pengungsian sudah terdapat ± 250 Orang, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan kerugian dalam Penghitungan.

BPBD Kab. Batang dibantu oleh PMI telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial serta lembaga lain untuk membagi tugas penanganan dan pelayanan warga terdampak serta melakukan assessment dan mengevakuasi warga terdampak banjir.



Gambar 46 Banjir di Kabupaten Batang

5. Penanganan Bencana Tanah Longsor di Kab. Banjarnegara

Bencana tanah longsor di Kab. Banjarnegara pada 17 Desember 2019 pukul 15.00 WIB di Dusun Tekidadi RT3 RW1 Desa Sigaluh dan Dusun Prigi Krajan RT1/RW1 Desa Prigi Kec. Sigaluh. Dampak dari kejadian ini adalah 1 pertokoan rusak berat, 1 saluran irigasi, 2 rumah rusak berat, 2 KK/7 Jiwa mengungsi. Dengan ditaksir kerugian sekitar Rp 100.000.000,-. BPBD Kab. Banjarnegara melakukan assessment, pembuatan saluran air, pembersihan material dan pembersihan material.



Gambar 47 Banjir di Kabupaten Banjarnegara

6. Erupsi Gunung Api

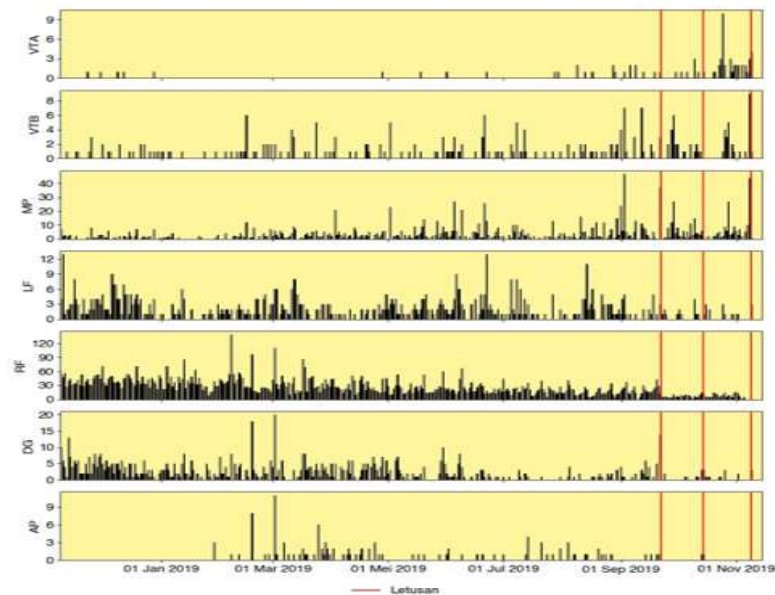
a. Erupsi Gunung Merapi

Paska letusan 14 Oktober 2019, data pemantauan mengalami peningkatan pada 25 Oktober 2019 berupa kenaikan jumlah gempa vulkano-tektunik dalam (VTA) mencapai 12 kali. Peningkatan tersebut diikuti dengan kenaikan gempa dangkal pada tanggal 26-28 Oktober. Pada tanggal 28 Oktober jumlah gempa vulkano-tektunik dangkal (VTB) mencapai 5 kali dan multi-phase (MP) mencapai 27 kali. Setelah itu kegempaan menurun kembali dengan jumlah rata-rata gempa VTA dan VTB 1 kali/hari dan MP sekitar 5 kali/hari. Berdasarkan foto drone tanggal 30 Oktober 2019 di pusat kubah lava teramati material baru berupa sumbat lava yang terangkat yang diduga terkait dengan peningkatan aktivitas pada 25-28 Oktober 2019. Aktivitas kegempaan kembali meningkat pada tanggal 8 November 2019 dimana tercatat gempa VTA 3 kali, VTB 9 kali, dan MP 44 kali.

Pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 pukul 06.21 WIB terjadi letusan terekam di seismogram dengan amplitudo 65 mm dan durasi 160 detik. Awan panas meluncur dengan jarak sekitar 2 km ke arah K. Gendol. Kolom asap letusan setinggi ± 1500 m dari puncak. Untuk mengantisipasi gangguan abu vulkanik terhadap penerbangan maka VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation) diterbitkan dengan kode warna Orange. Hujan abu dilaporkan terjadi di sekitar G. Merapi dengan arah dominan ke sektor Barat sejauh 15 km dari puncak. Wilayah yang terdampak hujan abu tipis seperti di Wonolelo, Sawangan, Kabupaten Magelang dan Tlogolele, Selo, Kabupaten Boyolali.



Lampiran 1.



Gambar 48 Erupsi Merapi dan Grafik Seismisitas 14 Okt 2019

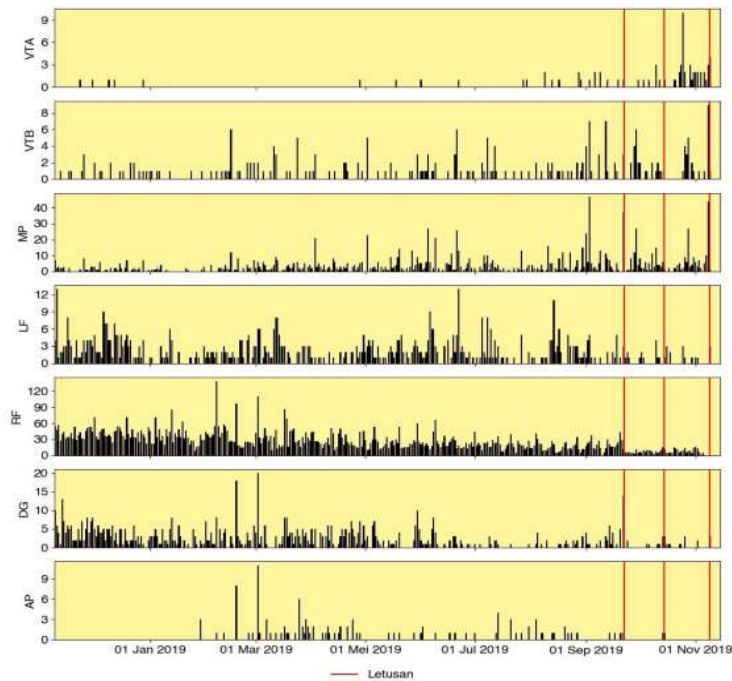
Paska letusan 9 November 2019, pada tanggal 15-16 November 2019 kegempaan kembali meningkat. Seismograf mencatat gempa rata-rata vulkano-tektunik dalam (VTA) 15 kali/hari, dan multiphase (MP) 75 kali/hari. Pada tanggal 17 November pukul 00.00-11.00 WIB tercatat gempa VTA 3 kali, VTB 4 kali, dan MP 16 kali. Peningkatan kegempaan ini diduga mencerminkan akumulasi

tekanan gas di bawah permukaan kubah yang berasal dari dapur magma di kedalaman > 3 km.

Pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 pukul 10:46 WIB terjadi letusan terekam di seismogram dengan amplitudo 70 mm dan durasi 155 detik. Awan panas meluncur dengan jarak < 1 km ke arah K. Gendol. Kolom asap letusan setinggi ± 1000 m dari puncak. Untuk mengantisipasi gangguan abu vulkanik terhadap penerbangan maka VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation) diterbitkan dengan kode warna Orange. Hujan abu dilaporkan terjadi di sekitar G. Merapi dengan arah dominan ke sektor Barat sejauh 15 km dari puncak yaitu di sekitar wilayah Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Kejadian letusan semacam ini masih dapat terus terjadi sebagai indikasi bahwa suplai magma dari dapur magma masih berlangsung. Ancaman bahaya letusan ini berupa awanpanas yang bersumber dari bongkaran material kubah lava dan lontaran material vulkanik dengan jangkauan < 3 km berdasarkan volume kubah yang sebesar 416.000 m³ berdasarkan data drone 30 Oktober 2019.



Lampiran 1.



Gambar 49 Erupsi Merapi dan Grafik Seismisitas 9 Nov 2019

Adapun Wilayah Jawa Tengah Yang terdampak meliputi:

1) Kab. Boyolali

Dampak Erupsi Gunung Merapi di Kab. Boyolali pada 14 Oktober 2019 pukul 16.31 WIB terjadi letusan awan panas dengan ketinggian kolom asap 3000m dengan amplitudo 75 mm dengan durasi 270 detik. Berdasarkan analisa foto udara tanggal 19 September 2019 sebesar 468.000 m² (berdasarkan laporan Aktivitas Gunung Merapi tanggal 6- 12 September 2019). Saat ini posisi kubah lava masih dalam kondisi stabil. Radius 3 km dari puncak G. Merapi tidak diperkenankan untuk aktivitas warga.

Berdasarkan Hasil Survei TRC BPBD Kab. Boyolali di, Dukuh Sepi Desa Jrakah , Dukuh Stabelan Desa Tlogolele, Desa Klakah Kec. Selo, terjadi hujan abu namun untuk saat ini tidak ada

warga yang mengungsi. Saat ini warga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan berjaga setiap malam.

2) Kab. Magelang

Dampak Erupsi Gunung Merapi di Kab. Magelang pada 14 Oktober 2019 pukul 16.31 WIB terjadi letusan awan panas dengan ketinggian kolom asap 3000m dengan amplitudo 75 mm dengan durasi 270 detik. Berdasarkan analisa foto udara tanggal 19 September 2019 sebesar 468.000 m² (berdasarkan laporan Aktivitas Gunung Merapi tanggal 6 - 12 September 2019). Saat ini posisi kubah lava masih dalam kondisi stabil. Radius 3 km dari puncak G. Merapi tidak diperkenankan untuk aktivitas warga. Sebaran abu vulkanik terpantau di Kab. Magelang meliputi:

Tabel 51
Dampak Abu Vulkanik Erupsi G. Merapi

No.	Kecamatan	Desa
1	2	3
1	Srumbung	Ngargosoko
		Mranggen
		Srumbung
2	Dukun	Sumber
		Talun
		Ngargomulyo
		Kalibening
		Mangunsoko
		Ngadipuro
		Dukun
3	Salam	Sucen
		Jumoyo
4	Sawangan	Sawangan
5	Muntilan	Tamanagung
		Muntilan
6	Mungkid	Bojong
		Pabelan

b. Langkah – Langkah Provinsi Jawa Tengah

- 1) TRC BPBD Kab. Boyolali mendistribusikan masker untuk warga di Dukuh Sepi Desa Jrasah, Dukuh Stabelan Desa Tlogolele, Desa Klakah Kec. Selo berjumlah 50 pack untuk masing-masing Desa.
- 2) BPBD Kab. Magelang saat ini telah melakukan penyisiran di 4 Kecamatan 9 Desa terdampak bencana dan telah mendistribusikan 2.000 masker sebagai antisipasi gangguan pernafasan akibat sebaran abu vulkanik dan melakukan Sosialisasi melalui Camat dan Kepala Desa agar masyarakat tetap tenang dan menunggu informasi serta instruksi dari sumber-sumber yang bisa dipercaya seperti BMKG dan update informasi PUSDALOPS BPBD Kab. Magelang.
- 3) BPBD Provinsi Jawa Tengah melalui Kabupaten Magelang dan Boyolali melakukan pemantauan perkembangan Erupsi G. Merapi.

Erupsi G. Merapi pada akhir tahun 2019 tidak sebesar dampak erupsi tahun 2018 dan sebelumnya, dampak yang dirasakan masyarakat langsung adalah abu dari debu vulkanik yang sangat mengganggu aktifitas sehari – hari masyarakat. BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD Kab/Kota Terdampak erupsi Gunung Merapi telah berkoordinasi dan telah membagikan masker kepada masyarakat terdampak dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjauhi puncak gunung merapi dan menyarankan untuk menutup jalur pendakian G. Merapi.

4.2.3 Gempa Bumi di Jawa Tengah

1. Gempa Bumi Kab. Jepara

Gempa bumi mengguncang Kab. Jepara pada tanggal 22 Mei 2019 pukul 11.22 WIB. Lokasi kejadian Antara Desa Pule dan Desa Bandung Kec. Mayong. Dari analisa BMKG diperoleh parameter gempa bumi dengan kekuatan Magnitudo 4,2 SR, pusat gempa bumi ini berada di darat pada Titik koordinat 6.69 Lintang Selatan dan 110.78 Bujur Timur (antara Desa Pule – Bandung, Kec. Mayong). Getaran dirasakan hingga Kab. Demak dan Kab. Kudus.

Tabel 52
Dampak Gempa Bumi di Kab. Jepara

No.	Kecamatan	Desa	Dukuh	Dampak
1	2	3	4	5
1	Mayong	Pule	Tengger 02/02	Rumah Milik Ibu Sumirah (60 Th), Janda Rumahnya Mengalami genting Berjatuhan kurang lebih 150 genting.
				Rumah milik bpk. Ahmad Rifai (28 TH) Rumahnya mengalami genting Berjatuhan kurang lebih 15 genting.
			Krajan 02/01	Rumah milik Samrotul Huda (40 Th) Rumahnya mengalami 5 genting jatuh
				Musholla mengalami genting kerpas Berjatuhan
			Krajan 03/01	Rumah milik Bpk. Abdul Kalim (40Th) rumahnya mengalami genting kerpas Berjatuhan kurang lebih 20 genting

2. Gempa Bumi Kab. Cilacap

a. Terjadi gempa dengan Magnitude 5.7 SR, di 8.51 LS, 108.86 BT (88 km Barat Daya Cilacap) Jawa Tengah dengan kedalaman 10 km di rasakan di Wilayah Kab. Cilacap. Gempa terjadi Pada Minggu, 9 Juni 2019 Pukul 16.32.22 WIB. BPBD Kab. Cilacap terus berkoordinasi dengan UPT BPBD di beberapa kecamatan di wilayah Kab. Cilacap terkait perkembangan kejadian gempa tersebut. Tidak ada kerusakan dan korban jiwa dalam bencana gempa bumi dimaksud.

b. Terjadi gempa bumi pada 14 Oktober 2019 pukul 18.33 WIB. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 8.38 LS dan 109.30 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 79 km arah Tenggara Kota Cilacap, Jawa Tengah pada kedalaman 75 km. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktifitas subduksi lempeng Indo-Australia yang menunjam dibawah lempeng Eurasia. Dari hasil pemutakhiran analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter Magnitudo sebesar 4,8 SR. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan sesar naik (*thrust fault*).

Sesuai dengan informasi yang kami terima dari BMKG, hasil analisis pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI. Guncangan gempa bumi dirasakan di daerah Kab. Bantul, Kab. Kulonprogo dan Kota Yogyakarta (Prov. DIY) serta Kab. Purworejo, Kab. Cilacap dan Kab. Kebumen dengan level II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang). Dari hasil koordinasi dengan BPBD Kab. wilayah terdampak, hingga saat ini belum ada laporan mengenai dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut, masyarakat tetap beraktivitas seperti biasanya.

- c. Hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019, pada pukul 15.21 WIB, sebagian masyarakat Cilacap dan sekitarnya dikejutkan dengan adanya guncangan gempa bumi. Dari hasil analisa BMKG diperoleh parameter gempa bumi dengan kekuatan $M=4.1$ SR Pusat gempa bumi ini berada di laut pada koordinat 8.52 Lintang Selatan dan 108.99 Bujur Timur, sekitar 88 km Barat Daya Cilacap, pada kedalaman 16 km. Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat penyesaran di bawah laut di Selatan Pulau Jawa. Hingga pukul 16:00 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan terdapat satu gempa bumi susulan dengan magnitudo 4,1 namun tidak dirasakan. Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
- d. Terjadi gempa bumi 3,7 SR pada 14 September 2019 pukul 05.30 WIB berpusat di Langen Kota Banjar Jabar yang mengakibatkan tembok/dinding batako mengalami retak” di rumah semi permanen ukuran 6×9 m di bagian samping dan belakang ambrol dan sudah tidak layak huni. Lokasi kejadian di Dusun Neglasari 02/06 Desa Panulisan Timur Kec. Dayeuhluhur Kab. Cilacap. Kerugian diperkirakan Rp. 20.000.000,-. Korban 2 jiwa saat ini mengungsi kerumah saudara. BPBD Kab. Cilacap melakukan assessment.

4.2.4 Bencana Kekeringan

Awal Musim kemarau tahun 2019 berawal dari akhir bulan April (Minggu IV April 2019) yang di mulai dari sebagian besar Kab. Blora, Rembang, Wonogiri, sebagian utara Kab. Pati, sebagian kecil wilayah Kab. Jepara dan Blora. Puncak musim kemarau tahun 2019 sebagian besar terjadi pada bulan Agustus s.d September 2019. Wilayah terpanjang mengalami kekeringan tahun 2019

terjadi selama 21 Dasarian (7 Bulan) adalah Kab. Rembang bagian timur, Pesisir utara kab. Pati, Sebaian Kecil wilayah Utara Jepara. Sedangkan wilayah terpendek kekeringan tahun 2019 terjadi selama 9 Dasarian (3 Bulan) meliputi Wilayah Selatan Kab. Cilacap. Periode musim kemarau tahun 2019 relatif lebih panjang dan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya.

Musim kemarau 2019 dampak menyebabkan 31 Kab/Kota di Jawa Tengah mengalami kekeringan/kesulitan air bersih. Wilayah terdampak kekeringan meliputi 341 Kecamatan, 1.491 Desa, 2.500 Dusun dengan jumlah warga terdampak kekeringan 306.057 KK (1.075.847 Jiwa)

Tabel 53
Daerah Potensi Kekeringan di Jateng

No	Kab/Kota	Jumlah Tanki Yang sudah di dropping				Total	
		APBD		CSR	Lainnya	Tangki	Liter
		Provinsi	Kab/Kota				
		Tangki	Tangki				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cilacap		167	855		1,022	5,115,000
2	Banyumas		2,595			2,595	12,973,000
3	Purbalingga		2,278	2,114		4,392	19,359,000
4	Banjarnegara	100	683	290	586	1,659	7,125,000
5	Kebumen		1,080	813	228	2,121	9,552,000
6	Purworejo		2,646	229	290	3,165	15,825,000
7	Wonosobo		22			22	110,000
8	Magelang		272		23	306	1,395,000
9	Boyolali		1,300	21	2	1,323	6,615,000
10	Klaten		619			619	3,095,000

No	Kab/Kota	Jumlah Tanki Yang sudah di droping				Total	
		APBD		CSR	Lainnya	Tangki	Liter
		Provinsi	Kab/Kota				
		Tangki	Tangki				
11	Sukoharjo		1,072	47	15	1,134	4,646,000
12	Wonogiri	100		1,827	217	2,144	725,000
13	Karanganyar		403			403	2,375,000
14	Sragen	100	1,362	4,405	576	6,443	40,326,000
15	Grobogan	100	1,313	567	491	2,471	11,311,000
16	Blora		1,245	410		1,655	8,275,000
17	Rembang	286	646			932	3,230,000
18	Pati	300	1,362			1,562	7,810,000
19	Kudus		404	399	121	924	4,620,000
20	Jepara		136	546	48	730	3,634,000
21	Demak		707		240	947	4,735,000
22	Kab. Semarang	100	576			678	2,890,000
23	Temanggung	100	636	581	70	1,387	6,935,000
24	Kendal	300	59	28		387	391,000
25	Batang		6	6		12	60,000
26	Pekalongan		602			602	2,927,000
27	Pemalang		833	10	5	848	2,200,000
28	Kab. Tegal		38		172	210	999,000
29	Brebes		157	399	180	736	3,347,000
30	Kota Surakarta		30	12		42	278,000
31	Kota Semarang		29	17		46	230,000

No	Kab/Kota	Jumlah Tanki Yang sudah di dropping				Total	
		APBD		CSR	Lainnya	Tangki	Liter
		Provinsi	Kab/Kota				
		Tangki	Tangki				
32	Kota Pekalongan		1			1	5,000
TOTAL		1,486	23,279	13,576	3,264	41,518	193,113,000

1. Upaya Kesiapan Penanganan Kekeringan yang Dilakukan

- a. Surat Edaran Kepala Pelaksana Harian kepada Kepala Pelaksana BPBD Kab/Kota se-Jawa Tengah, Nomor 525.73/3363/2019, tanggal 23 April 2019, perihal Antisipasi Menghadapi Dampak Musim Kemarau 2019 agar mengidentifikasi daerah rawan kekeringan serta strategi dan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Hasil identifikasi dan inventarisasi data potensi rawan terdampak kekeringan Tahun 2019 di Kabupate/Kota, bahwa sebanyak **31 Kabupaten di 287 kecamatan dan 1.319 desa (2,056,287 jiwa / 545,851 KK).**
- b. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi di Lor In Hotel Surakarta, yang melibatkan unsur BPBD Kabupaten/Kota dan PMI se-Jawa Tengah, pada tanggal 23 - 24 Mei 2019
- c. Menyelenggarakan Rapat Pemantapan di Kyriad Grand Master Hotel Purwodadi, yang melibatkan unsur BPBD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, pada tanggal 24 - 25 Juni 2019
- d. Menganggarkan di DPA SKPD BPBD Prov. Jawa Tengah untuk Dropping Air Bersih, **sebanyak Rp. 320 Juta dengan alokasi sebanyak kurang lebih 1.200 tanki air bersih**

- e. Dana Belanja Tak Terduga Gubernur Jawa Tengah TA 2019 sebesar **Rp. 23 Milyar** untuk penanganan bencana se Jawa Tengah, (diantaranya untuk Penanganan Darurat Kekeringan).
- f. Menghimbau kepada Pemkab/Kota kalau perlu segera Menerbitkan Surat Keputusan tentang Status Siaga Darurat Kekeringan, berdasarkan rekomendasi dari BMKG
- g. Menyiagakan sarpras berupa mobil tangki air baik di Provinsi maupun Kab/kota

2. Upaya Penanganan Kekeringan yang Dilakukan

- a. Salah satu upaya yang dilakukan oleh BPBD Provinsi dan BPBD Kab/Kota untuk meminimalisir dampak kekeringan adalah dengan melakukan dropping air bersih.
- b. BPBD Prov Jawa Tengah mencatat bahwa 31 Kab/kota terdampak kekeringan, meliputi 341 kecamatan (59,51%) dan 1.491 desa/Kelurahan (17,42%) dan jumlah KK terdampak 306.057 KK.
- c. Sampai dengan 24 Oktober 2019, total tangki air yang tersalurkan adalah 26.117 tangki air atau setara dengan 130.585.000 liter air, dengan rincian sbb:
 - 1) BPBD Prov (APBD Prov) : 1.090 Tangki (4,17%)
 - 2) BPBD Kab/Kota (APBD Kab.Kota) : 16.427 Tangki (62,89%)
 - 3) CSR : 6.457 Tangki (24,72%)
 - 4) Lainnya : 2.143 (8,20%)
- d. BPBD Provinsi Jawa Tengah pada anggaran tahun 2019 sejumlah Rp 320.000.000,- dan telah terdistribusi 1.090 tangki air (Rp. 260.000.000,-) untuk 9 Kabupaten terdampak kekeringan yang telah mengajukan permohonan bantuan tangki air, yaitu:
 - 1) Kab. Pati : 200 tangki

- 2) Kab. Grobogan : 100 tangki
 - 3) Kab. Wonogiri : 100 tangki
 - 4) Kab. Kendal : 200 tangki
 - 5) Kab. Temanggung : 100 tangki
 - 6) Kab. Banjarnegara : 100 tangki
 - 7) Kab. Rembang : 100 tangki
 - 8) Kab. Sragen : 90 tangki
 - 9) Kab. Semarang : 100 tangki
- e. Mekanisme untuk pengajuan bantuan dropping air bersih dari pemerintah Kab/kota ke Pem Provinsi dalam rangka penanggulangan bencana kekeringan dilakukan berdasarkan atas
- 1) Usulan BPBD Kabupaten/Kota
 - 2) Surat Pernyataan Bencana/Siaga darurat Kekeringan dari Bupati/ Walikota
 - 3) Wilayah terdampak
 - 4) Jumlah kebutuhan
- f. Kami mengucapkan terimakasih atas informasi yang diberikan baik oleh BPBD dan BMKG sehingga upaya penanggulangan bencana kekeringan dapat dilaksanakan dengan baik.

Tabel 54
Daerah Terdampak Kekeringan Jawa Tengah

No	Kab/Kota	Kec	Desa	Dusun	Jumlah Terdampak	
					KK	Jiwa
1	2	3	4	5	6	7
1	Cilacap	20	105	240	35,821	107,466
2	Banyumas	21	91	76	21,686	80,879
3	Purbalingga	15	104	329	3,199	23,448
4	Banjarnegara	11	43	140	16,877	75,152

No	Kab/Kota	Kec	Desa	Dusun	Jumlah Terdampak	
					KK	Jiwa
1	2	3	4	5	6	7
5	Kebumen	18	93		9,612	39,279
6	Purworejo	12	70	363	41,880	138,218
7	Wonosobo	2	2	2	350	1,040
8	Magelang	8	24	41	2,632	6,847
9	Boyolali	12	45	64	2,551	17,064
10	Klaten	7	24			
11	Sukoharjo	3	17	25	6,395	21,124
12	Wonogiri	8	50	198	58,375	233,500
13	Karanganyar	4	7	17	1,326	4,556
14	Sragen	9	62	441	22,378	80,681
15	Grobogan	19	128	341	21,218	56,498
16	Blora	16	192			
17	Rembang	14	67	31		
18	Pati	14	143		1,669	6,053
19	Kudus	6	27	2		
20	Jepara	15	36	94	6,790	24,131
21	Demak	13	56		19,746	98,672
22	Kab. Semarang	13	45	124	20,063	64,338
23	Temanggung	14	55	103	12,781	74,819
24	Kendal	8	14	19	263	
25	Batang	1	1	3		
26	Pekalongan	13	37	30	12,624	42,725

No	Kab/Kota	Kec	Desa	Dusun	Jumlah Terdampak	
					KK	Jiwa
1	2	3	4	5	6	7
27	Pemalang	4	16	55	11,293	3,335
28	Kab. Tegal	10	39	74	22,139	76,814
29	Brebes	15	68	310	44,123	140,642
30	Kota Surakarta	2	6	20	1,847	7,331
31	Kota Semarang	7	13	14		
32	Kota Pekalongan	1	1	-	-	-
TOTAL		335	1,681	3,156	397,638	1,424,612

4.2.5 Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan

Kebakaran hutan dan lahan di Jawa Tengah cukup banyak sebagai dampak musim kemarau yang relatif panjang dan kering. Perhutani Jateng mengelola hutan (lindung dan produksi) yang terbagi dalam 20 KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) dan 5 (lima) dari 20 (dua puluh) KPH di Jateng melaporkan kejadian kebakaran hutan dan lahan, yang berdampak ± 969 Ha hutan dan lahan, dengan rincian :

1. KPH Pekalongan Barat : ± 329 ha
2. KPH Kedu Utara : ± 246 ha
3. KPH Surakarta : ± 222 ha
4. KPH Banyumas Timur : ± 93 ha
5. KPH Pekalongan Timur : ± 79 ha

Total : 969 ha

Terdapat 26 Kab/Kota terdampak Karhutla dan terdapat sebanyak 116 Ha persawahan terbakar dan 1.720 Ha hutan terbakar (969 Ha lahan perhutani dan 751 Ha non Perhutani).

Tabel 55

Penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan Jawa Tengah

No.	GUNUNG API	PENANGANAN
1	2	3
1	MERBABU	1. Sejak 22 September 2019 hingga 6 hari kedepan mengirimkan 60 Orang personil setiap harinya guna assessment dan Pemadaman api 2. Penangan dibagi menjadi dua yaitu penangan pipa jaringan air yang terbakar dan penangan karhutla. Untuk pemasangan pipa air yang terbakar akan dilakukan setelah api benar benar padam. 3. Untuk assessment Panjang pipa yang terbakar dan luasan lahan yang terbakar akan dilaksanakan besok pagi
2	SLAMET	WIL. TEGAL 1. Tim 1 melanjutkan pembuatan sket api pada lereng barat igir tipis, titik api masih terdapat di lereng barat igir tipis. 2. Tim 2 melakukan penyelurusan dan pendinginan area terbakar dari jalur 2 sampai jalur 1. 3. Tim 3 melakukan pemetaan wilayah terbakar oleh tim perhutani, untuk hasil belum diketahui. 4. Jumlah total tim yang melakukan pemadaman KARHUTLA sebanyak 107 orang. 5. Kendala yang dihadapi yaitu sulitnya akses menuju lokasi area yang terbakar.

No.	GUNUNG API	PENANGANAN
1	2	3
		Rencana giat hari ini 24 September 2019 : 6. Tim 1 melanjutkan pemadaman dan pembuatan sekat api di igir tipis. 7. Tim 2 melakukan penelusuran dan pendinginan area terbakar yang sudah dipadamkan dari jalur 2 ke jalur 1. 8. Personil yang bertugas 50 orang WIL. BANYUMAS 1. Hari Jumat, 21 September 2019, Bupati Banyumas meninjau lokasi dan ikut bergabung dalam Rapat Koordinasi dan menghasilkan kesepakatan Incident Commander di pegang oleh Komandan Kodim 0701 Wijaya Kusuma dan Deputy Commander dipegang oleh Kepala Pelaksana BPBD Banyumas; 2. Daerah petak yang terbakar diidentifikasi di Petak 58D-11 dan 58D-12 yang didominasi oleh tumbuhan Andaman (karakteristik mirip tanaman gambut) dan rimba alam (Sumber : Petugas Perhutani); 3. Dilaporkan bahwa pada hari Sabtu, 21 September, api telah menyebar ke jalur Kalipagu dan kawasan Kebun Raya Baturraden; 4. Posko Lapangan Karhutla Kab. Banyumas telah dipindahkan ke Kantor Asper

No.	GUNUNG API	PENANGANAN
1	2	3
		Perhutani BKPH Gunung Slamet Barat pintu masuk Wana Wisata Palawi Baturraden, dengan melibatkan Personil gabungan dari Unsur TNI-Polri, Relawan dan Masyarakat; 5. Tim Survei (5 Orang) telah dikirimkan dari arah Kalipagu, Desa Ketenger, Kec. Baturraden untuk mengecek titik api, memperkirakan jalur api, dan mencari alternatif jalur pemadaman api; 6. Posko Gabungan Karhutla didirikan oleh BPBD Kab. Banyumas, TNI-POLRI dan Komunitas Relawan dengan total Personil mencapai 181 Orang; 7. Penanganan Karhutla Lereng Barat Selatan Gunung Slamet (Update Sabtu, 21 Sept 2019 : 09:15 WIB.) WIL. PURBALINGGA 1. Lokasi Kebakaran Hutan Lindung pada ketinggian 1.800 mdpl, Petak 58A wilayah kerja Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Serang, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Gunung Slamet Timur Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Timur. Wilayah Administratif turut Desa Kutabawa, Kec. Karangreja, Kab. Purbalingga.

No.	GUNUNG API	PENANGANAN
1	2	3
		2. Spesifikasi lokasi berada pada koordinat 7°13'59,23" LS dan 109°15'27,34" BT sampai dengan 7°13'55,79" LS dan 109°15'12,16" BT. 3. Selanjutnya Tim melakukan rapat strategi penanganan pada hari Jumat 13 September 2019 dipimpin langsung oleh Adm Banyumas Timur dan Dandim Purbalingga. 4. Kekuatan Personil Gabungan : 626 orang terdiri dari TNI : 76, POLRI : 104, Perhutani : 47, BATALYON 406 : 23, BPBD : 5, Kec. Karangreja : 4, Satpol PP : 15, SAR Purbalingga : 25, PRC (Purbalingga Reaksi Cepat) : 8, SAR Perwira : 3, TAGANA : 30, Puskemas Karangreja : 3, AREMBA : 20, UBALOKA : 1, EDELWIS : 15, BANSER : 18, Pemuda Pancasila : 10, Warga Dsn. Bambang : 200, Bela Negara : 6, PMI : 13.
3	SINDORO	1. 23 September 2019, Pukul 22.00 - 23.30 WIB telah dilakukan penadaman manual oleh relawan pajero 10 orang, kemudian pusdalops bersama kalak BPBD sudah berkoordinasi dengan TNI, POLRI dan perhutani untuk pelaksanaan pemadaman yang di dahului dengan apel dan pembagian sru.

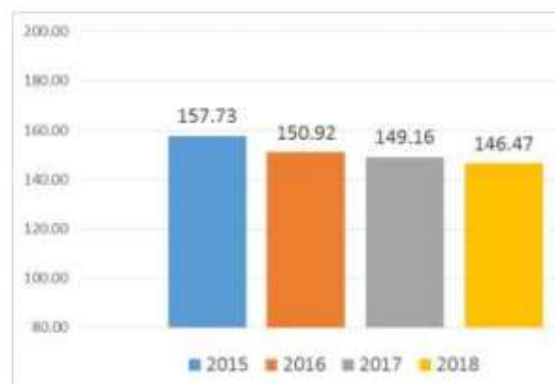
No.	GUNUNG API	PENANGANAN
1	2	3
		2. 24 September 2019 pukul 08.00 WIB Telah naik 5 sru untuk pemetaan ulang dan pemadaman secara manual adapun personil yang terlibat berjumlah 113 orang terdiri dari TNI, POLRI, Relawan Pajero Sindoro, Perhutani, LHK, Relawan bascame banaran lengkong, BPBD.
4	SUMBING	1. Pengendalian di lakukan dalam dua jalur, jalur banaran dan jalur walitis 2. Jalur banaran terdiri dari 52 Orang relawan 3. Jalur walitis terbagi menjadi 2 Tim dengan jumlah relawan 38 Orang 4. Pemberangkatan tim dimulai pukul 07.30 Wib di lakukan upaya pemadaman dan pembuatan sekat bakar di jalur banaran (pos 3 / petak 23-3) api berhasil di padamkan. di jalur walitis upaya pembuatan jalur rintisan menuju titik api dan sekat bakar 5. kunjungan Bapak Kapolda Jawa Tengah ke posko utama dengan didampingi oleh Kapolres Temanggung, Komandan Kodim 0706 Temanggung, Kalaksa BPBD Kab. Temanggung pada tanggal 23 September 2019

No.	GUNUNG API	PENANGANAN
1	2	3
		6. Apel malam dilaksanakan pada pukul 18.10 WIB bertempat di Pos Banaran 7. Jumlah personil yang terlibat pengendalian kebakaran berjumlah 227 orang terdiri dari Perhutani, Base Camp Banaran, BPBD Tmg MPA Taruna Agni, CDK IX DLHK Jateng, SAR Kab Temanggung, Pemdes Banaran, PMI, Koramil Tembarak, Kodim 0706, Stickpala, BC Prau igirmanak, SAR Linmas, DLL.

5.3 Hari Kesiapsiagaan Nasional (HKBN) 2019

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 27 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 34.257.865 (BPS 2018) dan kepadatan penduduk mencapai 1053 Jiwa per kilometer persegi. Wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki Gunung Api aktif sebanyak 5 yakni Slamet, Dieng, Sundoro, Sumbing, dan Merapi. Selain itu, Jawa Tengah pula dilintasi oleh beberapa sesar aktif yaitu Sesar Baribis Kendeng, Sesar Ajibarang, Sesar Ungaran, Sesar Merapi-Merbabu, Sesar Muria, dan Sesar Pat Thrust. Pada selatan Jawa Tengah juga terdapat Zona Megathrust Jawa dengan Segmen Jawa Tengah. Kondisi ini yang menyebabkan wilayah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berada dalam kelas risiko sedang hingga tinggi, dengan semua jenis ancaman dimiliki provinsi ini.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2018, Provinsi Jawa Tengah memiliki indeks risiko 146.47 (tinggi) dan dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota terdapat 17 (tujuh Belas) Kabupaten/Kota risiko tinggi dan 18 risiko sedang.



Gambar 50 Grafik Nilai IRBI Jateng 2015 - 2018

Hasil survei di Jepang, pada kejadian gempa Great Hanshin Awaji 1995, menunjukkan bahwa presentase korban selamat karena:

1. Diri Sendiri Sebesar 35%,
2. Anggota Keluarga 31,9 %,

3. Teman/Tetangga 28,1%,
4. Orang Lewat 2,60%,
5. Tim SAR 1,70%, dan
6. lain-Lain 0,90%.

Berdasarkan data tersebut, sangat jelas bahwa faktor utama yang paling menentukan adalah penguasaan pengetahuan yang dimiliki oleh “diri sendiri” untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman risiko bencana. Oleh sebab itu, edukasi untuk meningkatkan pemahaman risiko tidak hanya tentang konsep namun juga Latihan Kesiapsiagaan Bencana. **Siap, Untuk Selamat!** merupakan pesan utama bersama yang akan didorong dalam proses penyadaran (*awareness*) dalam peningkatan kemampuan diri sendiri. Proses penyadaran tersebut berguna agar setiap orang dapat memahami risiko, mampu mengelola ancaman dan, pada gilirannya, berkontribusi dalam mendorong ketangguhan masyarakat dari ancaman bahaya bencana. Di samping itu, kohesi sosial, gotong royong, dan saling percaya merupakan nilai perekat modal sosial yang telah teruji dan terus dipupuk, baik kemampuan perorangan dan masyarakat secara kolektif, untuk mempersiapkan, merespon, dan bangkit dari keterpurukan akibat bencana.

Pencanangan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional dilaksanakan pada tanggal 26 April dengan pertimbangan bahwa pada tanggal tersebut UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disahkan. Undang-Undang No 24 Tahun 2007 merupakan perangkat hukum pertama yang mengubah paradigma penanggulangan bencana dari responsive ke preventif (pengelolaan risiko bencana). Dalam rangka 10 tahun lahirnya Undang-Undang tersebut, maka BNPB bersama seluruh instansi berwenang Kementerian/Lembaga, pihak lembaga usaha, dan lembaga internasional/nasional terkait akan berfokus melaksanakan kegiatan pendahuluan Latihan Kesiapsiagaan Bencana serentak dengan memastikan tersampainya edukasi pengetahuan secara garis besar kepada masyarakat tentang bagaimana merespon ancaman melalui latihan

kesiapsiagaan dengan melaksanakan evakuasi mandiri, uji sirene peringatan dini, dan uji shelter yang sesuai ancaman masing-masing di daerahnya. Waktu pelaksanaan kegiatan ditetapkan pada tanggal 26 April 2019.

Di Jawa Tengah kegiatan HKBN dilakukan antara lain melakukan simulasi penanganan darurat di gedung-gedung pemerintah, talkshow yang diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan PB di Jawa Tengah.



Gambar 51 Persiapan dan Peringatan HKBN 2019

5.4 Dukungan Event Pemangku Kepentingan PB

4.4.1 Jateng Fair 2019

1. Nama Event : Jateng Fair 2019
2. Penyelenggara : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
3. Pelaksanaan 28 Juni s/d 14 Juli 2019 di PRPP, di Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jl. Anjasgoro Tawang Sari Semarang

4. Bentuk dukungan :

a) Stand Pameran.

Pada event ini BPBD Prov. Jateng diberikan tempat di Bale Agung Marbabu dengan tema pameran “Glorius Borobudur”. Subsansi pameran adalah dokumentasi program kegiatan BPBD Prov. Jateng.

b) Dapur Umum Lapangan

Dalam rangka pembelajaran dan sosialisasi Kegiatan Penanggulangan Bencana kepada masyarakat, BPBD Prov. Jateng menyelenggarakan dapur umum lapangan dengan aktifitas memasak makanan siap santap dan menyajikan kepada pengunjung PRPP secara Gratis. Tujuan penyelenggaraan Dapur Umum Lapangan ini adalah agar masyarakat mengetahui dan memahami mekanisme penyediaan dan pemenuhan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.

5. Hasil

- a) BPBD Prov. Jateng mendapat penghargaan menjadi Juara ke-2 Stand terbaik untuk Kategori Organisasi Pemerintah Daerah dan Instansi.
- b) Dapur Umum Lapangan, Antusias dan perhatian masyarakat sangat tinggi terhadap hasil masakan dapur umum lapangan. Berapapun makanan yang disediakan dari tim dapur umum selalu ramai pengunjung dan habis, Selain itu pengunjung

dapat belajar tentang mekanisme penyediaan dan pemenuhan logistik/kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.

6. Foto Dokumentasi



Gambar 52 Stand Pameran PRPP Jateng Fair 2019

4.4.2 Pesta Rakyat Jawa Tengah 2019

1. Nama Event : Pesta Rakyat Jawa Tengah 2019
2. Penyelenggara : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
3. Pelaksanaan: 23 – 25 Agustus 2019, di Alun-alun Giri Krida Bakti Wonogiri
4. Bentuk dukungan :
Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ke-69 tahun 2019 BPBD Prov. Jateng berpartisipasi dalam kegiatan Dapur Umum Lapangan.
5. Hasil
Dapur Umum Lapangan
Tim dapur umum lapangan BPBD Prov. Jateng menyajikan masakan siap santap. Hasil masakan dibagikan secara gratis kepada pengunjung dengan persyaratan khusus yaitu belajar tentang Penanggulangan Bencana. Tim DU BPBD Prov. Jateng dibantu oleh beberapa pihak, diantaranya Tim Dapur Umum BPBD Kabupaten/Kota.
6. Foto Dokumentasi



Gambar 53 Dukungan BPBD untuk Pesta Rakyat Jawa Tengah

4.4.3 Kongres Sampah 2019

1. Nama Event : Kongres Sampah 2019
2. Penyelenggara : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
3. Pelaksanaan: 12-13 Oktober 2019, di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang
4. Bentuk dukungan :

Dalam rangka bentuk dukungan deklarasi kongres sampah BPBD Provinsi Jawa Tengah mendukung 1 (satu) buah mobil tangki, 1 (satu) mobil toilet dan 4 (empat) tenda pleton untuk menunjang kegiatan kongres sampah.

5. Hasil

Komitmen itu diwujudkan dalam bentuk deklarasi Maklumat Kongres Sampah Tahun 2019 yang terdiri dari lima poin, yaitu :

- a. Persoalan sampah dari waktu ke waktu tidak hanya mengganggu pandangan mata tetapi sudah masuk ke ruang kehidupan, mulai dari masalah kesehatan, psikologi,
- b. lingkungan hidup, kekumuhan, dan kerusakan ekosistem, serta bencana alam.
- c. Persoalan sampah semakin hari semakin besar, sementara solusinya semakin hari semakin kompleks dan belum terlihat titik terangnya, sehingga Jawa Tengah mengalami darurat sampah.
- d. Darurat sampah memaksa seluruh pemangku kepentingan untuk segera dan secara masif melakukan konsolidasi dan mensinergikan seluruh regulasi, kebijakan dan program pengelolaan sampah.
- e. Darurat sampah memaksa kita untuk mengubah perilaku masa bodoh menjadi peduli untuk pengurangan sampah (ngelongi), penggunaan sampah yang efektif (nganggo) dan daur ulang
- f. sampah (ngolah) yang disebut sebagai Jateng Gayeng Telung NG.
- g. Jateng Gayeng Telung NG merupakan wujud dari Gerakan Sampah Membawa Berkah.

6. Dokumentasi



Gambar 54 Kongres Sampah 2019

5.5 Alokasi Dana PB di Jawa Tengah

4.5.1 APBD Provinsi Jawa Tengah

Kejadian bencana berdampak pada seluruh sector pembangunan dan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama pada seluruh sektor pemerintahan melalui pendanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Program dan kegiatan penyelenggaraan PB di Jawa Tengah terdistribusi di beberapa SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sedangkan BPBD Provinsi Jawa Tengah sebagai *leading sector* bidang penanggulangan bencana. Sebagai *leading sector*, BPBD Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan identifikasi SKPD yang mempunyai program/kegiatan yang terkait penyelenggaraan PB

1. SKPD Badan;
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
 - b. Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD);
 - c. Badan Kesbangpol
2. SKPD Dinas, yaitu:
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Sosial;
 - c. Dinas Energi Sumberdaya Mineral (ESDM);
 - d. Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang ;
 - e. Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang;
 - f. Dinas Pendidikan;
 - g. Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya;
 - h. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - j. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pelaksanaan program dan kegiatan terkait penanggulangan bencana, dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

masing-masing SKPD. Berikut ini hasil inventarisasi program dan kegiatan SKPD yang mendukung penyelenggaraan PB di Jateng.

Tabel 56
Alokasi Dana PB di Provinsi Jawa Tengah 2019

No	SKPD PROV JAWA TENGAH	Anggaran (.000)
1	2	3
1.	BPBD	17,930,000
2.	Badan Kesbangpol	13,179,263
3.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	23,000,000
4.	Dinas Sosial	2,000,000
5.	Dinas Perhubungan	525,000
6.	Dinas Kesehatan	614,546
7.	Dinas Pendidikan	60,000
8.	Dinas Energi Sumberdaya Mineral (ESDM)	7,424,200
9.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Penataan Ruang	50,168,785
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1,800,000
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	27,652,446
12	Biro Kesra Setda Prov Jateng	904,620
	JUMLAH (dana PB Jateng)	145,258,860

Nilai perbandingan alokasi anggaran untuk PB dengan APBD Provinsi Jawa Tengah sebenarnya masih belum ideal. Dalam beberapa hasil kajian ditingkat nasional, anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah 0.55% dari APBD. Oleh sebab itu di Jawa Tengah masih perlu adanya peningkatan alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana agar dapat mendekati 1 %. Salah satu alternative lain adalah dengan mengajak seluruh SKPD untuk menginformasikan program dan kegiatan yang diampu SKPD yang menunjang upaya pengurangan risiko bencana di Jawa Tengah. Gambaran perkembangan alokasi

anggaran PB di Jawa Tengah 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 57
Alokasi Dana PB Provinsi Jawa Tengah 2013 - 2019

No	TA	ANGGARAN	APBD	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 3/4 x 100%
1	2013	69.932.087.000	13.343.358.327.000	0.52
2	2014	84.808.624.000	15.159.741.864.000	0.55
3	2015	96.803.315.585	17.097.686.334.000	0.56
4	2016	96.207.526.000	21.155.201.299.000	0.45
5	2017	134.234.802.000	23.955.179.003.000	0.56
6	2018	254.901.930.500	24.993.659.858.000	1.02
7	2019	145.258.860.000	26.340.639.488.000	0.55

4.5.2 Bantuan Gubernur Jawa Tengah

Bantuan Gubernur Jawa Tengah untuk masyarakat terdampak bencana berasal dari rekening belanja tidak terduga Gubernur Jawa Tengah untuk masyarakat terdampak bencana tahun 2019. Besarnya bantuan Gubernur untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana berpedoman pada Pergub 77 tahun 2014 tentang Perubahan atas Pergub No 78 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Prov Jawa Tengah. Untuk dapat mencairkan dana bantuan ini, maka terdapat beberapa syarat dan kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Minimal 5 (lima) orang meninggal dan atau luka berat dalam waktu bersamaan di 1 kejadian bencana di 1 (satu) wilayah.
 2. Minimal 5 (lima) unit rumah/tempat usaha roboh/rusak berat/tidak layak huni di 1 kejadian bencana di 1 (satu) wilayah.
- Jika persyaratan tersebut terpenuhi, maka BPBD Kabupaten/Kota dapat mengajukan bantuan kepada Pemerintah Prov Jateng melalui

BPBD Prov Jateng untuk memperoleh bantuan tidak terduga Gubernur. Besarnya nilai bantuan Gubernur sesuai dengan Pergub 77 tahun 2014 adalah sbb.

Tabel 58
Kriteria dan Nilai Bantuan Bencana (Pergub 77 Tahun 2014)

No	KRITERIA	JUMLAH BANTUAN
1	2	3
1	Korban meninggal dunia	: Rp. 10.000.000,-
2	Korban luka berat dan dirawat di RS	: Rp. 7.500.000,-
3	Pemilik/penyewa rumah roboh/terbakar habis	: Rp. 15.000.000,-
4	Pemilik/penyewa rumah Rusak Berat	: Rp. 10.000.000,-
5	Tempat ibadah roboh	: Rp. 20.000.000,-
6	Tempat ibadah rusak berat	: Rp. 10.000.000,-
7	Antisipasi kekeringan	: Rp. 300.000,- per tangki kebutuhan per desa/kelurahan
8	Pembangunan sarana prasarana darurat yang diajukan Kab/Kota	: 50% RAB
9	Bantuan Beras : a) 5 Ton untuk konsumsi penduduk yang bergotong-royong atau yang tidak dapat bekerja b) 15 Ton untuk daerah yang terisolir	

Periode Januari – Desember 2019, Gubernur Jawa Tengah telah memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di 9 (sembilan) kabupaten, yaitu:

Tabel 59
Bantuan Gubernur Jawa Tengah 2019

No	Kabupaten	Jenis Bencana	Tanggal Kejadian	Rincian	Total
1	2	3		4	5
1	Cilacap	Angin	26 Januari 2018	2 Rumah Roboh x Rp. 15.000.000	30,000,000
				17 Rumah Rusak Berat x Rp. 10.000.000	170,000,000

No	Kabupaten	Jenis Bencana	Tanggal Kejadian	Rincian	Total
1	2	3		4	5
2	Cilacap	Angin	2 Februari 2018	4 Rumah Roboh x Rp. 15.000.000	60,000,000
				16 Rumah Rusak Berat x Rp. 10.000.000	160,000,000
3	Banjarnegara	Gerakan Tanah	8 Januari 2017	180 Rumah Rusak Berat x Rp. 10.000.000	1,800,000,000
4	Purbalingga	Tanah Longsor	22 Februari 2018	4 MD x Rp. 10.000.000	40,000,000
				1 Luka Berat x Rp. 7.500.000	7,500,000
5	Kota Pekalongan	Kebakaran Pasar	24 Februari 2018	1,500,000,000	1,500,000,000
6	Banjarnegara	Gempa Bumi	18 April 2018	238 Rumah RB x Rp. 10.000.000	2,380,000,000
				5 Tempat Ibadah x Rp. 10.000.000	50,000,000
7	Kebumen	Banjir Longsor	Desember 2018	5 Rumah RB x Rp. 15.000.000	85,000,000
				1 Rumah Rusak Berat x Rp. 10.000.000	
8	Blora	Angin dan kebakaran		10 Rumah RB x Rp. 15.000.000	150,000,000
9	Semarang	Kebakaran	Desember 2018	5 Rumah Terbakar Habis x 15.000.000	75,000,000
10	Grobogan	Kebakaran	23 Agustus 2018	13 Rumah Terbakar Habis x Rp. 15.000.000	1,080,000,000
		Angin		3 Rumah Rusak Berat x	

No	Kabupaten	Jenis Bencana	Tanggal Kejadian	Rincian	Total
1	2	3		4	5
			24 Agustus 2018	Rp. 10.000.000 57 Rumah Roboh x 15.000.000	
11	Banjarnegara	Tanah Gerak	6 Februari 2019	23 Rumah Roboh x Rp. 15.000.000 1 Unit Mushola Roboh x Rp. 10.000.000	355,000,000
12	Kendal	Kebakaran	4 Maret 2019	18 Rumah Terbakar Habis x 15.000.000	270,000,000
BTT TOTAL					8,212,500,000

4.5.3 APBN TA 2019

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh dana hibah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pengelolaan dana hibah ini dilaksanakan pada tahun 2019 oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk monitoring dan evaluasi pada 2 (dua) kabupaten penerima hibah yaitu Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri.

Dana hibah masuk pada Kegiatan Sinergitas Multi Sektor Pasca Bencanadi Jawa Tengah dengan melibatkan pihak terkait yaitu Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, Dinas Bina Marga dan Cipkataru, BPKP Perwakilan Jawa Tengah dan Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta

BPBD Kabupaten Penerima Hibah untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Jawa Tengah.

Secara umum kegiatan ini dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman dalam tahapan pemulihan dan rekonstruksi kembali sarana dan prasarana umum terdampak bencana perlu inventarisasi dan dokumentasi guna mengukur keberhasilan dengan cara koordinasi, konsultasi dan evaluasi dengan para pemangku kepentingan penanggulangan bencana, yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Provinsi Jawa Tengah berkewajiban untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai komando untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan sinergitas multi sektor pasca bencana dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan dalam bentuk rapat koordinasi ataupun forum diskusi terfokus sebagai wadah sosialisasi, monitoring dan evaluasi guna menyelesaikan tantangan/masalah ataupun sharring pengalaman dalam pengelolaan dana hibah daerah yang diperoleh pada masing-masing pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan melibatkan semua pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Jawa Tengah.

Kegiatan sinergitas multi sektor pasca bencana di Jawa Tengah, juga merupakan sharring pendanaan APBD Provinsi Jawa Tengah untuk pendampingan pengelolaan pelaksanaan dana hibah daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Jawa Tengah dan kegiatan. Rencana dan tindaklanjut dari hibah anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Pekalongan antara lain:

- a. Pelaksanaan Kegiatan Sinergitas Multisektor pascabencana di Jawa Tengah berjalan dengan baik sesuai rencana dan mendukung pengelolaan dana hibah daerah dari pemerintah pusat (Kementrian Keuangan RI) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka bantuan pendanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Jawa Tengah
- b. Sharring pendanaan APBD Provinsi Jawa Tengah untuk pendampingan pengelolaan pelaksanaan dana hibah daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Jawa Tengah dan kegiatan.

Tabel 60
Alokasi Dana RR di Kabupaten/Kota Jawa Tengah

No	Kabupaten	Jumlah	Paket Pekerjaan
1	2	3	4
1	Klaten	15.675.000.000	2 Jembatan
2	Wonogiri	33.433.900.000	2 Desa Hunian Tetap dan 1 Jembatan serta 2 Talud
	JUMLAH	49.108.900.000	

2. BPBD Kabupaten/Kota

Tabel 61
Alokasi Dana PB di Kabupaten/Kota Jawa Tengah

No.	Kab/Kota	TA 2019				Total
		Sekretariat	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kedaruratan Logistik	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cilacap	3.082.175.650	1.203.390.000	451.450.000	2.670.915.500	7.407.881.150
2.	Banyumas	4.275.000.000	725.000.000	2.150.000.000	350.000.000	7.500.000.000
3.	Purbalingga	-	-	-	-	4,307,425,000
4.	Barjarnegara	753.000.000	440.000.000	100.000.000	35.000.000	1.328.000.000
5.	Kebumen	1.929.490.000	2.796.545.000	3.028.447.000	-	7.754.482.000
6.	**Purworejo	-	-	-	-	6,153,164,710
7.	Wonosobo	762.000.000	1.050.000.000	750.000.000	50.000.000	2.612.000.000
8.	**Magelang	-	-	-	-	8,408,055,460
9.	Boyolali	2.759.682.000	261.850.000	2.131.013.000	32.545.000	5.185.090.000
10.	Klaten	3.324.310.000	1.131.690.000	1.799.000.000	425.000.000	6.680.000.000
11.	Sukoharjo	1.040.025.000	508.500.000	147.000.000	83.000.000	1.778.525.000
12.	**Wonogiri	-	-	-	-	2,672,458,000
13.	Karanganyar	5.110.000.000	730.000.000	1.861.000.000	120.000.000	7.821.000.000
14.	**Sragen	-	-	-	-	2,297,380,000
15.	Grobogan	2.421.065.002	792.585.000	467.350.000	4.249.000.000	7.929.500.002
16.	Blora	3.249.632.418	291.260.000	1.316.117.000	30.000.000	4.887.009.418
17.	**Rembang	-	-	-	-	6,153,175,000
18.	**Pati	-	-	-	-	4,651,790,000
19.	Kudus	1.564.610.000	630.790.000	457.144.000	150.000.000	2.802.544.000

No.	Kab/Kota	TA 2019				
		Sekretariat	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kedaruratan Logistik	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Total
1	2	3	4	5	6	7
20.	**Jepara	-	-	-	-	3,730,299,000
21.	**Demak	-	-	-	-	5,469,197,000
22.	Semarang	1.212.582.000	335.550.000	395.794.000	844.313.000	2.788.239.000
23.	**Temanggung	-	-	-	-	6,214,954,725
24.	**Kendal	-	-	-	-	4,270,007,619
25.	Batang	452.116.000	176.950.000	626.965.867	200.000.000	1.456.031.867
26.	**Pekalongan	-	-	-	-	23,100,163,000
27.	Pemalang	1.873.000.000	880.000.000	920.000.000	870.000.000	4.543.000.000
28.	**Tegal	-	-	-	-	4,385,581,810
29.	Brebes	2.050.013.560	1.000.000.010	749.987.010	199.999.420	4.000.000.000
30.	**Kota Surakarta	-	-	-	-	9,400,318,750
31.	**Kota Semarang	-	-	-	-	14,373,224,000
32.	**Kota Pekalongan	-	-	-	-	3,017,741,000
33.	**Kota Tegal	-	-	-	-	3,320,468,000
34.	*Satpol PP Kota Salatiga	-	-	-	-	320.000.000
35.	*Satpol PP Kota Magelang	-	-	-	-	-

Keterangan :

* Tugas pokok dan fungsi PB bergabung dengan Satpol PP karena belum membentuk BPBD

**** Anggaran Tahun 2018**

Alokasi dana APBD Kabupaten/Kota untuk penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan BPBD Kab/Kota cukup beragam. Hal ini dipengaruhi beberapa antara lain:

- a. Jumlah APBD pada masing-masing Kabupaten/kota,
- b. Prioritas penanggulangan bencana
- c. Kelembagaan BPBD dan personel BPBD.

5.6 Data Personel BPBD Kabupaten/Kota

Jumlah personel sumberdaya manusia di BPBD Kabupaten/Kota cukup bervariasi. Personel tersebut dapat dikelompokkan menjadi kelompok PNS dan Non PNS. Rekapitulasi jumlah personel BPBD berdasarkan pendidikan adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 62
Pegawai BPBD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah

No	Kab/Kota	Tipe BPBD	Pegawai		
			PNS	NON PNS	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Cilacap	A	49	45	94
2	Banyumas	A	16	32	48
3	*Purbalingga	B	14	22	36
4	Banjarnegara	A	17	17	34
5	Kebumen	A	24	16	40
6	*Purworejo	A	30	39	69
7	Wonosobo	B	24	30	54
8	*Magelang	A	26	22	48
9	Boyolali	A	21	27	48
10	Klaten	A	28	24	52
11	Sukoharjo	B	12	9	21
12	*Wonogiri	B	14	13	27
13	*Karanganyar	B	21	42	63
14	*Sragen	B	11	27	38
15	Grobogan	A	21	33	54
16	Blora	B	11	13	24
17	*Rembang	A	32	15	47
18	*Pati	A	28	11	39
19	Kudus	B	12	1	13
20	*Jepara	B	13	20	33
21	*Demak	A	20	14	34
22	Semarang	B	14	16	30
23	*Temanggung	B	14	24	38
24	*Kendal	B	15	16	31
25	Batang	B	13	1	14

No	Kab/Kota	Tipe BPBD	Pegawai		
			PNS	NON PNS	Jumlah
1	2	3	4	5	6
26	*Pekalongan	B	16	12	28
27	Pemalang	A	18	14	32
28	*Tegal	A	30	2	32
29	Brebes	A	18	20	38
30	*Kota Surakarta	B	18	15	33
31	*Kota Semarang	A	50	-	50
32	*Kota Pekalongan	B	10	17	27
33	*Kota Tegal	B	5	10	15
JUMLAH		33	665	619	1284

Keterangan :

* Jumlah pegawai PNS dan Non PNS tahun 2018

5.7 Sinergi Penanggulangan Bencana

4.7.1 Bantuan Bencana dari Provinsi Jawa Tengah

Dalam Tahun 2019 telah banyak terjadi bencana dan ada beberapa bencana skala Nasional yang butuh bantuan banyak pihak selain dari Pemerintah, Dunia Usaha dan Swadaya Masyarakat.

Provinsi Jawa Tengah melalui perintah langsung dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginstruksikan untuk memberikan bantuan kepada Pemerintah Provinsi/Kab/Kota terdampak bencana yang dananya di himpun dari dana Pemprov, Dunia Usaha dan Masyarakat Jawa Tengah.

Beberapa kejadian bencana dimana Jawa Tengah ikut berperan aktif membantu korban bencana dari bantuan personil, material dan bantuan pendanaan berupa logistik, antara lain:

1. Bantuan Banjir Bandang Sentani

a. Kronologi

Beberapa waktu sebelum munculnya banjir ini, kawasan Sentani telah diguyur hujan deras pada pukul 17.00 WIT. Karena curah hujan ekstrem (235,1 milimeter per hari) memang turun sebelum banjir bandang. Hujan sempat turun secara fluktuatif, sampai pada akhirnya antara pukul 22.00-00.00 WIT, hujan deras yang terjadi di sekitar pehuluan di Pegunungan Cycloop menyebabkan longsor menahan alur-alur sungai sehingga dampak banjir ini semakin parah serta ada gelondongan kayu dan bebatuan sedimen yang dialurkan ke hilirnya.

Di daerah Jalan Doyo di Jayapura, banjir itu membawa sebuah gelondongan kayu besar yang menghalangi jalan dan lebih dari itu, material banjir berupa lumpur setinggi 40-50 meter serta sampah yang berhamburan dari bukit Cycloop juga ikut turun. Banjir ini melanda utara dan selatan Jayapura, dan Sentani dengan luas daerah tangkapan air banjir 15.199,83 hektar. 9 (Sembilan) kelurahan di Jayapura menjadi lokasi terdampak banjir dan daerah yang terdampak paling parah adalah kawasan kelurahan Donbosolo, Doyobaru dan Hime Kombe.

b. Dampak:

Jumlah korban jiwa sejauh ini mencapai 83 orang. 75 orang luka ringan dan 84 orang luka berat. Korban terbanyak berasal dari Distrik Sentani. Adapun korban hilang yang dilaporkan kepada posko-posko setempat berjumlah 74 orang. Namun dari 74 korban ini masih akan dicocokkan lagi ke 40 jenazah RS Bhayangkara setempat. Seminggu setelah banjir itu terjadi, pada 25 Maret 2019 sebanyak 112 orang didapati meninggal dunia. 105 orang di Kabupaten Jayapura, dan 7 di Kodya. Per

Mei 2019, diketahui 153 orang luka berat, 768 orang luka ringan, dan 17 orang masih belum ditemukan.

Selain korban jiwa kerusakan juga terjadi menyebabkan 350 rumah rusak terseret arus air, 3 jembatan, 8 drainase, 4 jalan, 2 gereja, 1 masjid, 8 sekolah, 104 ruko, dan 1 pasar kesemuanya mengalami rusak berat dan 4.273 warga mengungsi. Peristiwa banjir ini membuat sebanyak 11.725 keluarga terdampak. Sampai Mei 2019, 1.639 rumah warga di pinggiran Sentani masih tergenang air karena danau meluap. Total kerugian banjir bandang di Kabupaten Jayapura ini dilaporkan mencapai Rp 506 miliar. Sementara dana pemulihan banjir bandang Sentani diperkirakan Rp 1,7 triliun.

c. Bantuan Kemanusiaan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyerahkan bantuan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah kepada korban bencana alam di Kabupaten Jayapura. Bantuan itu diserahkan secara simbolis oleh kepala BPBD provinsi Jawa Tengah yang diterima oleh Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro di Kantor Bupati Jayapura. Bantuan kepada korban bencana alam di Kabupaten Jayapura itu atas perintah langsung dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sesaat setelah terjadinya bencana alam menimpa Kabupaten Jayapura beberapa waktu yang lalu. Bantuan 1 Miliar ini dihimpun dari dana donator OPD, BUMN dan CSR dunia usaha di Jawa Tengah dengan rincian:

1) Bank Jateng	: Rp 500.000.000,-
2) Baznas Provinsi Jateng	: Rp 150.000.000,-
3) Rumah Sakit Tlogorejo	: Rp 50.000.000,-
4) PLN Divre Jateng & DIY	: Rp 50.000.000,-
5) PMI Prov. Jateng	: Rp 250.000.000,- (Barang)
Total	: Rp 1.000.000.000,-

Sementara itu wakil bupati Jayapura Giri wijayantoro dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sudah ikut membantu meringankan beban yang dialami oleh masyarakat di Kabupaten Jayapura khususnya mereka yang terkena dampak dari bencana alam yang terjadi beberapa waktu yang lalu.

d. Dokumentasi



Gambar 55 Penyerahan Bantuan Jateng Ke Sentani

2. Bantuan Bencana Gempa Bumi Halmahera Selatan

a. Kronologi

Dilihat dari episentrum dan kedalamannya, gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang diduga kuat dipicu oleh sesar aktif. Sesar yang diduga memicu gempa ini adalah Sesar Sorong-Bacan dengan mekanisme sesar geser mendatar. Sesar ini adalah satu dari tiga sistem sesar yang berada di kawasan Halmahera Selatan yang merupakan percabangan dari Sesar Sorong yang melintas dari timur membelah bagian atas kepala burung di Papua Barat. Sesar Sorong sendiri merupakan sesar geser aktif di pembatas lempeng benua Australia dengan Filipina yang bergerak ke barat dengan kecepatan 32 mm/tahun.

Gempa bermagnitudo 7,2 SR yang melanda Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Indonesia pada tanggal 14

Juli 2019, Pukul 16.10 WIB, pusat gempa berada di darat 63 km timur laut Kota Labuha dengan kedalaman 29 km. Guncangan gempa ini dirasakan hingga Ambon, Namlea, Tobelo, Sorong bahkan Manado dan Gorontalo. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat guncangan terkuat dirasakan di sebagian besar wilayah Halmahera Selatan berupa guncangan V-VI MMI. Kemudian di Obi, Kota Ternate, Namlea dan Weda IV-V MMI. Serta II-III MMI di Masohi, Ambon, Taliabu, Maba, Sorong, Misol Barat, Manado, Bolaang Mongondow dan Gorontalo. Hingga 15 Juli 2019, pukul 05.00 WIB telah terjadi gempa susulan sebanyak 61 kali, 28 diantaranya dapat dirasakan. Gempa susulan terbesar bermagnitudo 5,8 pada 14 Juli, pukul 16.43 WIB.

b. Dampak

Gempa ini menyebabkan 6 orang tewas diantaranya berasal dari desa Papaceda, Gane Dalam, Ranga-Ranga dan Yomen, Halmahera Selatan. Gempa ini juga menyebabkan ratusan rumah rusak diantaranya yang terparah berada di desa Gane Luar, sebanyak 380 rumah rusak berat. Lalu di desa Ranga-Ranga 300 rumah, 131 rumah di desa Lemo-Lemo dan 90 rumah di desa Tomara. Selain itu 6 unit sekolah dan 3 tempat ibadah rusak. Rumah dinas Polsek Labuha juga dilaporkan rusak. Sedangkan di desa Dowora, Kecamatan Gane Barat Selatan 20 unit rumah dilaporkan rusak berat dan jalan terbelah. Sementara 6 unit rumah rusak ringan di desa Dolik, Kecamatan Gane Barat Utara.

c. Bantuan Kemanusiaan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan Rp 1,24 Miliar untuk memperbaiki wilayah terdampak gempa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara (Malut) sebagai wujud kepeduliannya terhadap musibah yang dialami masyarakat di daerah tersebut. Dana Rp 1,24 Miliar itu akan difokuskan untuk merehabilitasi sarana ibadah di sejumlah daerah terdampak gempa di Halmahera Selatan, seperti di wilayah Gane Barat dan Gane Timur. Besarnya anggaran bantuan Jateng terhimpun dari OPD, BUMD dan CRS di Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut:

1) Baznas Prov. Jateng	: Rp 300.000.000,-
2) PMI Provinsi Jawa Tenga	: Rp 100.000.000,-
3) Jateng Peduli	: Rp 150.000.000,-
4) SMK/SMA	: Rp 500.000.000,-
5) Korpri Peduli	: Rp 50.000.000,-
6) PLN Tanjung Jati	: Rp 75.000.000,-
7) Rumah Zakat	: Rp 30.000.000,-
8) Bank Indonesia (BI)	: Rp 15.000.000,-
9) SBI Holcim	: Rp 20.000.000,-
10) Sambal Telor Asin (dunia usaha)	: Rp 5.000.000,-
Total	: Rp 1.245.000.000,-

Rehabilitasi sarana ibadah di daerah terdampak gempa menjadi prioritas dari Pemprov Malut, selain hunian sementara dan infrastruktur dasar lainnya agar masyarakat tidak kesulitan melaksanakan ibadah, setelah tempat ibadah mereka hancur akibat gempa 7,2 SR pada 14 Juli lalu dan 2.000 lebih yang mengalami rusak berat dan ringan.

d. Dokumentasi



Gambar 56 Bantuan Kemanusiaan BPBD Prov. Jateng untuk warga Halmahela Selatan, Maluku

3. Bantuan Bencana Gempa Bumi Ambon

a. Kronologi

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa bumi 6,5 SR ini berpusat di darat. Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi dangkal. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa itu dibangkitkan oleh deformasi batuan dengan mekanisme pergerakan dari struktur sesar mendatar (*strike slip fault*). Gempa Bumi Maluku 2019 adalah sebuah gempa dengan magnitudo 6,5 SR pada tanggal 26 September 2019, Pukul 06.46 WIB. Pusat gempa berjarak 42 km Timur Laut Kota Ambon, Maluku, Indonesia dengan kedalaman 10 Km.

b. Dampak

BPBD Provinsi Maluku mencatat total rumah rusak mencapai 2.675 unit per 29 September 2019 malam. Dari jumlah tersebut, 852 di antaranya mengalami rusak berat. Kerusakan rumah tertinggi berada di Kabupaten Maluku Tengah, dengan rincian sebagai berikut Maluku Tengah rusak berat (RB) 658 unit, rusak sedang (RS) 385, rusak ringan (RR) 888; Kabupaten Seram Bagian Barat RB 109, RS 163 dan RR 31 dan Kota

Ambon RB 85, RS 135 dan RR 221. Sedangkan kerusakan di sektor lain, fasilitas umum dan sosial sebanyak 87 unit.

Dampak lain berupa pengungsian yang masih terjadi hingga kini. Sebagian masyarakat masih enggan untuk kembali ke rumah karena khawatir dengan gempa susulan. BPBD Provinsi Maluku mencatat total penyintas berjumlah 247.239 jiwa, dengan rincian Kabupaten Seram Bagian Barat 111.434 jiwa, Maluku Tengah 108.000 jiwa dan Kota Ambon 27.805. Sementara itu, korban luka-luka di Maluku Tengah berjumlah 114 jiwa, Seram Bagian Barat 30 dan Kota Ambon 22.

Di Kabupaten Seram Bagian Barat, 12 orang mengalami luka berat dan sisanya luka ringan. Jumlah korban meninggal bertambah 2 orang sehingga total meninggal hingga malam ini berjumlah 30 jiwa. Hingga kini ketiga wilayah terdampak telah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi. Masing-masing wilayah menetapkan masa khusus tersebut selama 14 hari terhitung dari 26 September 2019 hingga 9 Oktober 2019. Di wilayah Kota Ambon, 5 kecamatan terdampak yaitu Kecamatan Nusaniwe, Sirimau, Baguala, Teluk ambon, Leitimur Selatan. Penyintas tertinggi berada di Kecamatan Baguala. Sedangkan di Maluku Tengah, kecamatan terdampak yaitu 3 kecamatan, Salahutu, Pulau Haruku dan Leihitu. Sementara itu di Seram Bagian Barat, 5 kecamatan terdampak di Kairatu, Seram Barat, Inamosol, Amaratu dan Kairatu Barat.

c. Bantuan Kemanusiaan

BPBD Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan kepada korban bencana gempa bumi di Ambon, Maluku sejumlah Rp 500.000.000,- dari beberpa BUMD dan CSR dunia usaha di Jawa tengah dengan rincian sebagai berikut:

1) Bank Jateng	: Rp 50.000.000,-
2) Baznas Prov. Jateng	: Rp 50.000.000,-
3) PLN DIVERE Jaeng & DIY	: Rp 25.000.000,-
4) Jateng Peduli	: Rp 100.000.000,-
5) SMK/SMA	: Rp 100.000.000,-
6) Korpri Peduli	: Rp 50.000.000,-
7) PLN Tanjung Jati	: Rp 50.000.000,-
8) Baznas Nurul Hayat	: Rp 5.000.000,-
9) Semen Gresik	: Rp 20.000.000,-
Total	: Rp 450.000.000,-

d. Dokumentasi



Gambar 57 Bantuan Kemanusiaan Korban Gempa Bumi Ambon

4.7.2 MOU Penyelamatan Danau Rawa Pening

Rawa Pening (pening adalah salah satu varian bahasa Jawa untuk "bening") merupakan danau alam di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dengan luas 2.670 hektare ia menempati wilayah Kecamatan Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyubiru. Rawa Pening terletak di cekungan terendah lereng Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran. Danau ini dangkal dan

menjadi hulu bagi Sungai Tuntang. Danau ini mengalami pendangkalan yang pesat. Pernah menjadi tempat mencari ikan, kini hampir seluruh permukaan rawa ini tertutup eceng gondok. Gulma ini juga sudah menutupi Sungai Tuntang, terutama di bagian hulu. Usaha mengatasi spesies invasif ini dilakukan dengan melakukan pembersihan serta pelatihan pemanfaatan eceng gondok dalam kerajinan, namun tekanan populasi tumbuhan ini sangat tinggi.

Perencanaan revitalisasi danau rawa pening BPBD Provinsi Jawa Tengah bersama BNPB Jakarta, Kementerian, Lembaga serta dukungan dari Gubernur Jawa Tengah untuk melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Revitalisasi rawa pening dan DAS Tuntang. BPBD dan BNPB telah melaksanakan rapat koordinasi dan pembahasan tindak lanjut penandatanganan revitalisasi danau rawa pening yang dilaksanakan di Jakarta tepatnya di kantor BNPB Jakarta.

Serta telah dibuatkan Keputusan Gubernur No. 610/44 tahun 2018 tentang pembentukan tim pengelolaan danau rawa pening Provinsi Jawa Tengah, dimana dalam pelaksanaan tugas dibagi menjadi beberapa kelompok kerja antara lain:

1. Kelompok Kerja I penataan ruang dan pengembangan kawasan
2. Kelompok kerja II pembangunan infrastruktur
3. Kelompok Kerja III keselarasan lingkungan
4. Kelompok Kerja IV pemberdayaan masyarakat dan kementerian
5. Kelompok Kerja V investasi perizinan



Gambar 58 Penandatanganan Nota Kesepakatan Revitalisasi Danau Rawa Pening

4.7.3 Ekspedisi Desa Tangguh Bencana Tsunami Selatan Jawa

Dalam tahun 2019 BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengadakan kegiatan Ekspedisi Desa Tangguh Bencana (Destana) Tsunami. Kegiatan berlangsung di 4 Kabupaten yang berada di pesisir pantai selatan Jawa, yaitu Kabupaten Wonogiri, Purworejo, Kebumen dan Cilacap. Ekspedisi Destana Tsunami diikuti oleh 80 orang tim pusat, 75 tim provinsi, dan 45 tim dari kabupaten dengan melibatkan lebih dari 200 orang relawan. Dalam kegiatan Ekspedisi Destana Tsunami berasal dari berbagai kalangan seperti akademisi, dunia usaha, media, pemerintah dan berbagai organisasi dan komunitas relawan.

Komunitas relawan yang terlibat di antaranya seperti Pramuka, Palang Merah Indonesia (PMI), Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Lembaga Penanggulangan Bencana Nahdlatul Ulama (LPBNU) Jateng, Unit Layanan Inklusi Disabilitas (LIDi) Jateng. Selain itu ada pula dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), SAR Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), SARDA Jateng, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), ORARI, RUMAH ZAKAT, dan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB). Kegiatan tersebut berlangsung selama 6 hari mulai dari 28 Juli sampai dengan 2 Agustus 2019.

Khusus untuk Kabupaten Wonogiri sendiri sudah berlangsung sejak 25 Juli 2019 berlokasi di Desa Songbanyu, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Ekspedisi yang berlangsung di 4 Kabupaten di Jawa Tengah tersebut diikuti sebanyak 114 desa rawan bencana di 22 Kecamatan. Kegiatan Ekspedisi Destana

Tsunami di Kabupaten Wonogiri berada di 3 Desa dan 10 sekolahan. Kurang lebih melibatkan 400 orang dengan tingkat kehadiran mencapai 100 persen.



Gambar 59 Bantuan Kemanusiaan Korban Gempa Bumi Ambon

4.7.4 Desa dampingan penanggulangan kemiskinan

Tabel 63
Hasil Intervensi Desa Dampingan

HASIL ASSESMENT THD DESA DAMPINGAN	RENCANA INTERVENSI KEGIATAN	INTERVENSI KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN	PROGRES/TINDAK LANJUT
1	2	3	4
1. Profile Desa Seboro : a. Luas wilayah Desa 1.501 Ha; b. Jumlah total penduduk desa 7.516 jiwa (1.825 KK); c. Sebagian besar struktur tanah di Desa Seboro adalah lempung sehingga rawan terhadap bencana longsor, saat ini ada 12 KK yang terancam tanah longsor sehingga diusulkan untuk direlokasi; d. tahun 2018 Desa Seboro mendapatkan dana desa sebesar Rp. 1,491 M (terbesar se Kabupaten Kebumen); e. sudah ada Balai Penyuluhan Pertanian sejak tahun 2012; f. sudah ada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kelurahan (TSKK); g. telah terbentuk Gapoktan; h. telah terbentuk Sadang Trail Solidarity dengan anggota aktif sebanyak 35 orang; i. sudah diselenggarakan soisalisasi Desa Tangguh	Untuk keluar dari status /kategori miskin, selain penyediaan sanitasi (jamban) masih diperlukan kegiatan yang dapat di laksanakan baik oleh provinsi maupun kabupaten yaitu Penataan infrastruktur (BPBD Kabupaten Kebumen telah membantu dengan pemberian Bronjong pengaman tebing/jalan)	Rakor Tindak Lanjut penanganan desa binaan (Penanggulangan Kemiskinan desa Seboro melalui Gerakan Jambanisasi) pada Hari/Tanggal : Kamis /26 sept 2019 Tempat : BPBD kab Kebumen Peserta Rapat : 1. BPBD Provinsi Jawa Tengah 2. BPBD Kab. Kebumen 3. OPD terkait kab kebumen 4. PMI Kab Kebumen 5. Forum PRB Kab Kebumen 6. Camat Seboro 7. Kades Sadang ➤ Hasil rapat	Sebanyak 275 Unit senilai Rp. 178.750.000,- (@Rp. 650.000,-) dengan rincian : 1. 20 unit dari Baznas Kabupaten Kebumen 2. 115 unit bantuan baznas Provinsi 3. 140 unit dari BPBD Kab, BPBD Prov, Donatur dan Swadaya masyarakat

HASIL ASSESMENT THD DESA DAMPINGAN	RENCANA INTERVENSI KEGIATAN	INTERVENSI KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN	PROGRES/TINDAK LANJUT
1	2	3	4
Bencana (Destana) oleg BPBD Kab. Kebumen; j. mempunyai sentra buah durian dan kelengkeng; k. mempunyai destinasi pariwisata : 1) Wisata air berupa River Tubing yang mendukung Geopark Karangsambung – Karang Bolong; 2) Wisata Embung “Selo Asri” 3) Situs sejarah dan Museum; 4) Air Terjun; 5) Wisata Hutan, Taman Nasional.		Dana bantuan dari Baznas kab. Kebumen Rp.13.000.000,- utk 20 jamban bntn Baznas Kab Kbumen dan Rp. 75.000.000,- bntn Baznas Prov Jateng	
2. Jumlah penduduk miskin 2.972 jiwa (743 KK : 159 RTM, 584 RTHM);			
3. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m ² /orang berjumlah 32 RTM;			
4. Lantai tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu murahan a. Rumah Lantai Tanah : 60 RTM b. lantai semen : 85 RTM			
5. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa dipleser a. Dinding tembok tidak dipleser sebanyak 80 RTM b. Tembok gedhek 11 RTM	Untuk keluar dari status /kategori miskin, selain penyediaan sanitasi (jamban) masih diperlukan kegiatan yang dapat di laksanakan baik oleh provinsi maupun		

HASIL ASSESMENT THD DESA DAMPINGAN	RENCANA INTERVENSI KEGIATAN	INTERVENSI KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN	PROGRES/TINDAK LANJUT
1	2	3	4
	kabupaten yaitu : Bedah Rumah Tidak layak huni (RTLH) sebanyak 183 unit		
6. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain a. Jamban keluarga : 803 KK dengan perincian ➤ rumah memiliki jamban belum punya septic tank sebanyak 357 KK. ➤ rumah belum memiliki jamban dan septic tank sebanyak 446 KK b. MCK umum 7 unit	1. Diperlukan septictank komunal untuk jamban yang belum berseptictank sejumlah 357 KK/rumah, sampai saat ini belum tertangani 2. Menuntaskan program jambanisasi di tahun 2020 agar ds. Seboro terbebas dari BAB-ODF oleh OPD pengampu yaitu melalui : a. Jambanisasi oleh Dinas Kesehatan sejumlah sisa KK miskin yang belum berjamban Pembangunan Septictank Komunal oleh DPU-PR		1. Progres Pelaksanaan Gerakan Jambanisasi tahun 2019 oleh BPBD Prov.Jateng, BPBD Kab. Kebumen, Basnas, dll baru bs menyelesaikan sebanyak 275 unit dari 803 yang belum memiliki jamban dan atau septictank dengan progress (34,24%) Tindak lanjut untuk mencapai kriteria masyarakat bebas buang air besar (bebas BAD-ODF) msh diperlukan pembangunan Jamban sejumlah

HASIL ASSESMENT THD DESA DAMPINGAN	RENCANA INTERVENSI KEGIATAN	INTERVENSI KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN	PROGRES/TINDAK LANJUT
1	2	3	4
			KK miskin yg blm memiliki Jamban.
7. penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, warga desa sudah menggunakan Listrik PLN sebanyak 1.574 Unit	Untuk keluar dari status /kategori miskin, selain penyediaan sanitasi (jamban) masih diperlukan kegiatan yang dapat di laksanakan baik oleh provinsi maupun kabupaten yaitu Penyambungan listrik (meterisasi) bagi 634 KK yang belum memiliki meteran sendiri		
8. Sumber air minum berasal Dari sumur/mata air tidak terlindungi /sungai/air hujan yaitu : a. Mata air : 7 unit (1.000 KK) b. Sumur gali : 575 (575 KK) c. Sungai : 7 unit (250 KK)	Untuk keluar dari status /kategori miskin, selain penyediaan sanitasi (jamban) masih diperlukan kegiatan yang dapat di laksanakan baik oleh provinsi maupun kabupaten yaitu Penataan Sumber daya Air bersih		
9. Bahan bakar untuk memasak Se-hari-Hari adalah Kayu bakar sebanyak 146 KK			
10. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu minggu sekali sebanyak 120 RTM			
11. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun adalah : a. Ada 129 RTM			

HASIL ASSESMENT THD DESA DAMPINGAN	RENCANA INTERVENSI KEGIATAN	INTERVENSI KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN	PROGRES/TINDAK LANJUT
1	2	3	4
b. Tidak mampu 22 RTM			
12. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari yaitu : a. <= 2 kali sehari : 3 RTM b. >= 3 kali sehari : 150 RTM			
13. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/poliklinik yaitu : a. Puskesmas : 45 RTM b. Pustu : 24 RTM c. PKD : 45 RTM			
14. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 m ² , buruh tani, nelayan buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan adalah : a. <= 500.000 : 126 RTM b. 500.000 – 750.000 : 26 RTM			
15. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD adalah : a. SD Sederajat : 105 RTM b. Tidak tamat SD : 40 RTM c. Tidak pernah sekolah : 3 RTM			
16. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti			

HASIL ASSESMENT THD DESA DAMPINGAN	RENCANA INTERVENSI KEGIATAN	INTERVENSI KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN	PROGRES/TINDAK LANJUT
1	2	3	4
sepeda motor kredit/non kredit/emas,ternak,kapal motor, atau barang modal lainnya. Penduduk yang memiliki harta benda senilai : <= 500.000 : 126 RTM 5 Juta - 10 juta : 13 RTM			

Tabel 64

Evaluasi Pengembangan Potensi Desa

NO	HASIL INVENTARISASI POTENSI DESA (Satuan Kuantitatif)	PERMASALAHAN	KONDISI SETELAH INTERVENSI
1	2	3	4
1.	a. Wisata air berupa River Tubing yang mendukung Geopark Karangsambung – Karang Bolong; b. Wisata Embung “Selo Asri” c. Situs sejarah dan Museum; d. Air Terjun; 4 titik, di lokasi perdukahan	Perlu mendorong Tenaga Kesejahteraan Sosial Kelurahan (TSKK), pendamping/Fasilitator dari Disporapar, budayawan/tokoh adat/dukuh dan kelompok pecinta lingkungan setempat	- Rapat pembahasan pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah melalui program 1 (satu) OPD 1 (satu) Desa Binaan pada Desa Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen pada : Hari : Kamis Tanggal : 25 Juli 2019 Tempat : Ruang rapat Sekda kab. Kebumen dengan hasil telah dilaksanakan pembinaan sentra kelengkeng oleh Bank Jateng. Untuk Potensi lainnya perlu dilakukan pendekatan dengan OPD-OPD terkait. - BPBD Provinsi Jawa Tengah juga telah memberikan bantuan Tenda (1 set) dan Genset (1 unit) beserta petugas pendampingan bantuan tersebut.
2.	Bantuan Dasar Samodra yang umurnya ratusan juta tahun (untuk penelitian Geologi namanya Watu kelir), 1 titik		
3.	Umbi Porang (istilah/nama Desa Badur), 1-100 titik di lahan-lahan milik warga	- Sudah ada Balai Penyuluhan Pertanian, dan Gapoktan namun belum dimaksimalkan - Perlu adanya pendampingan kepada petani Umbi Porang untuk pemasaran Umbi Porang yang lebih menguntungkan	
4.	Tenun	Perlu adanya pendampingan & pelatihan pengembangan tenun kepada warga/PKK agar	

NO	HASIL INVENTARISASI POTENSI DESA (Satuan Kuantitatif)	PERMASALAHAN	KONDISI SETELAH INTERVENSI
1	2	3	4
		lebih terarah dan lebih menguntungkan	
5.	Makanan Khas (rengginan, kacang umpet, kacang telor, aneka keripik singkong dan pisang)	Perlu adanya pendampingan & pelatihan keterampilan kepada warga/unit usaha perumahan untuk pemasaran yang lebih menguntungkan	
6.	Kopi, Agronya kelengkeng itoh	▪ Gapoktan perlu ada pelatihan dan praktek-praktek pembuatan serta pemasarannya ▪ Perlu adanya bantuan pupuk dan obat obatan agar pohon kelengkeng dapat berbuah dengan optimal;	

Tabel 65

Evaluasi Perkembangan Karakteristik Masyarakat dengan Tingkat Kesejahteraan Rendah

NO	KARAKTERISTIK MASYARAKAT DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN RENDAH	KONDISI AWAL (Volume/Satuan)	KONDISI SETELAH INTERVENSI (Volume/Satuan)
1	2	3	4
1.	Tidak masuk dalam kepesertaan program-program pemerintah.		
	a. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS)	993	1.081
	b. Kartu Indonesia Pintar (KIP)/ Bantuan Siswa Miskin (BSM)	700	762
	c. Kartu Indonesia Sehat (KIS)/ BPJS Kesehatan PBI/ Jamkesmas	4.396	4.787
	d. BPJS Kesehatan Peserta Mandiri	500	545
	e. Program Keluarga Harapan	1.612	1.755
	f. Beras untuk Orang Miskin (Raskin)/Rastra/BPNT	974	1.061
2.	Anggota keluarga yang tidak memiliki kartu identitas (KTP, Akte Kelahiran dan Kartu Pelajar)	780	711
3.	Anak yang tidak bersekolah pada Usia sekolah (7-18 tahun)	500	456
4.	Anggota rumah tangga yang memiliki penyakit kronis dan disabilitas.		
	a. Penyakit kronis	60	60
	b. Disabilitas (cacat)	48	48

NO	KARAKTERISTIK MASYARAKAT DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN RENDAH	KONDISI AWAL (Volume/Satuan)	KONDISI SETELAH INTERVENSI (Volume/Satuan)
1	2	3	4
5.	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)		
	a. Prioritas 1	116	131
	b. Prioritas 2	232	150
	c. Prioritas 3	174	94
6.	Sumber air minum (sumur/ mata air) yang tidak terlindungi.	2.119	
7.	Tidak memiliki fasilitas tempat BAB (jamban).	803	466
8.	Sumber penerangan utama bukan listrik.	0	0
9.	Kepala rumah tangga yang tidak bekerja	455	455

5.8 Prestasi dan Penghargaan 2019

4.8.1 Jateng Fair 2019

Jateng Fair 2019 dilaksanakan pada tanggal 28 Juni s/d 14 Juli 2019. Di Pusat Rekreasi dan Pameran Pembangunan (PRPP) Prov Jawa Tengah. Kembali BPBD Provinsi Jawa Tengah dipercaya menjadi Juara II dalam pameran Stand di PRPP dengan Tema Stand terbaik untuk SKPD yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Jateng Fair dilaksanakan sebagai sarana untuk memberikan informasi sekaligus sosialisasi hasil-hasil pembangunan di Jawa Tengah kepada masyarakat. Kegiatan pameran ini merupakan event tahunan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan diikuti oleh berbagai instansi, antara lain SKPD Prov Jawa Tengah, BUMD, 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan para mitra kerja/pemangku kepentingan di Jawa Tengah.



Gambar 60 Penghargaan Jateng Fair 2019

4.8.2 Jambore Relawan Bulan PRB Bangka Belitung

Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sudah dilakukan sejak tahun 2013 dan sudah dilakukan 7 kali dari Mataram, Bengkulu, Solo, Manado, Sorong terakhir ke Medan. Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana ini merupakan sarana untuk memperkuat pemahaman pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat terhadap aktivitas PRB sebagai bagian dari investasi untuk ketangguhan. Tema yang diangkat pada Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Tahun 2019 adalah “Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Ekosistem dan Investasi”.

Acara rangkaian puncak peringatan bulan PRB Nasional akan dilakukan dari tanggal 11-13 Oktober 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kegiatan yang diadakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini diikuti oleh BPBD Provinsi dan Kab/Kota di seluruh Indonesia. Selain kegiatan yang berfokus pengurangan risiko bencana pada masyarakat langsung melalui sosialisasi dan turun langsung kelapangan, BNPB juga mengadakan lomba yang diikuti oleh masyarakat dan penggiat kebencanaan termasuk BPBD Provinsi Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah berhasil merebut 3 (tiga) kejuaraan lomba kebencanaan antara lain adalah:

1. Juara 1 Lomba Desk Relawan;
2. Juara 1 Lomba Cerdas Cermat;
3. Juara 1 Lomba Penulisan Melalui Media Sosial.



Gambar 61 Penghargaan Jambore Relawan (PRB) 2019

5.9 Tantangan, Permasalahan dan Solusi

Wilayah Jawa Tengah yang rawan dan berisiko terhadap bencana sebagian besar ditempati masyarakat sebagai tempat tinggal. Permasalahan kepemilikan lahan dan tidak ada pilihan lokasi lain menjadi penyebab klasik sehingga berpotensi terjadi korban yang cukup banyak ketika terjadi bencana. Untuk itu, dengan pendekatan kearifan local, dan didukung dengan pembentukan Desa Tangguh Bencana, pemasangan alat peringatan dini bencana, diharapkan mampu memperkecil jumlah masyarakat yang terdampak bencana.

Kelembagaan BPBD sebagai amanat UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana beserta peraturan turunannya belum dilaksanakan secara penuh oleh kabupaten/kota. Pembentukan BPBD sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam penanganan bencana belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan di daerah. BPBD dibentuk sebagai leading sektor dalam penanggulangan bencana dengan peran SKPD teknis tetap sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tanggungjawab penanggulangan bencana bukan hanya pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha. Dalam konteks pengurangan risiko bencana, dunia usaha dinilai belum mempunyai peran yang optimal karena kehadirannya masih bertumpu saat tanggap darurat dengan bantuan-bantuan bencana yang dibutuhkan masyarakat pada saat itu. Jika dikelola dengan baik, para pelaku dunia usaha sebenarnya dapat menggunakan dana CSR penanganan bencana sejak pra bencana melalui program pengurangan risiko bencana.

Ditingkat kabupaten/kota, pembentukan BPBD kabupaten/Kota masih mempunyai permasalahan tersendiri. Alokasi anggaran Pemerintah Kab/Kota untuk penyediaan stok logistik kebencanaan minim, begitu pula dengan sarana dan prasarana PB, kapasitas dan kapabilitas personel BPBD juga belum ideal. Dengan kata lain, kapasitas sumberdaya PB (jumlah, kondisi, dan distribusi sumberdaya belum merata) dibandingkan dengan cakupan wilayah yang harus ditangani dan tingkat risiko bencana

maka rasio kecukupan peralatan harus dipertimbangkan kembali dalam upaya pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana merupakan paradigma penanggulangan bencana dalam rangka mengurangi risiko bencana sejak dini, sehingga alam kerangka pembangunan maka pembangunan harus berwawasan risiko bencana agar hasil-hasil pembangunan dapat lestari dan tidak menjadi penyebab dari dampak bencana. Beberapa permasalahan selama tahun 2019, terangkum pada tabel berikut ini.

Tabel 66
Tantangan Permasalahan dan Solusi PB

No	TANTANGAN DAN PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3
1	Terdapat 2 (dua) Kota yang belum membentuk BPBD berdasar Perda, yaitu Kota Magelang dan Kota Salatiga	Pemerintah Prov Jateng melalui Gubernur membuat Surat Edaran pembentukan BPBD kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota, serta advokasi untuk pembentukan BPBD
2	Belum seluruh BPBD Kabupaten/Kota mempunyai dan menyusun Perda tentang Penyelenggaraan PB. 16 Kab/Kota yang mempunyai perda penyelenggaraan PB	Perlu advokasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan PB di Kabupaten/ Kota untuk disusun melalui Perda tentang Penyelenggaraan PB
3	Alokasi dana PB masih terbatas, sehingga perbandingan dana PB dengan APBD Kabupaten /Kota belum ideal	Perlu penambahan anggaran penanggulangan bencana agar memenuhi/mendekati ideal (alokasi dana PB 1 % dari APBD) Menggandeng lembaga donor untuk ikut serta dalam PB
4	Belum seluruh BPBD mempunyai gedung dengan kapasitas yang besar untuk logistik, peralatan, sarana/prasarana PB dan Pusedalops	1) Mendorong Pemerintah Kab/Kota untuk mengalokasikan anggaran pembangunan Gedung BPBD melalui APBD 2) Mengusulkan pembangunan Gedung melalui dana Tugas Pembantuan (TP) melalui APBN Kementerian Dalam Negeri cq. Dirjen PUM dengan Rekomendasi Gubernur 3) Optimalisasi asset daerah
5	Sumberdaya Manusia di BPBD sangat terbatas, baik secara kuantitas maupun kualitas	1) Melakukan rekrutmen pegawai <i>outsourcing</i> sesuai dengan

No	TANTANGAN DAN PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3
		kompetensi yang dibutuhkan dan ketentuan regulasi, 2) Membuka kesempatan untuk pelajar/ mahasiswa magang 3) Melakukan <i>in house training</i> dan optimalisasi personil 4) Pemberdayaan relawan PB untuk membantu kegiatan PB dilapangan
6	Penyediaan Logistik dan peralatan PB	1) <i>Back up</i> pengadaan logistik untuk buffer stock kab/kota dari BPBD Provinsi dan BNPB 2) Optimalisasi/bekerjasama dengan SKPD/ instansi yang mempunyai 3) Memberdayakan potensi dunia usaha untuk ikut serta membantu dalam logistik maupun sarana prasarana PB
7	Kerjasama PB (Dunia usaha, Media massa) Dunia usaha di Jateng sangat besar dan sangat potensial untuk ikut serta dalam PB melalui CSR	1) Peningkatan Kepedulian Dunia Usaha Melalui Dana CSR Khususnya Untuk PRB selain pada tanggap darurat

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Supporting Gubernur Jateng yang selalu menjadi motivator dan pemimpin di lapangan menjadi kunci keberhasilan penanganan bencana di Jateng;
2. Kejadian bencana Jawa Tengah tercatat sebanyak 2.437 kejadian, dengan taksiran kerugian sebesar Rp. 80,93M. Dari data yang ada, yang tertinggi adalah bencana angin putting beliung;
3. Pemasangan EWS, dan pembentukan desa tangguh bencana menjadi salah satu tolok ukur yang bisa menyelamatkan masyarakat dari bencana;
4. Komitmen, kebersamaan dan sinergitas antar pemimpin relawan, dan dunia usaha sangat sangat membantuk dalam penanganan bencana di Jawa Tengah;
5. Kekompakan dan komitmen BPBD Se Jateng menjadi modal utama dalam mendorong kecepatan penanganan bencana di Jawa Tengah.

5.2 Saran

1. BNPB perlu mendorong percepatan untuk pembentukan Desa tangguh bencana di seluruh Indonesia, dengan diikuti pemasangan EWS dan petunjuk jalur evakuasi dengan prioritas untuk daerah rawan tsunami, gunung api dan tanah longsor
2. Segera diwujudkan regulasi tentang dasar hukum pembentukan BPBD sesuai dengan amanat PP No 18 tahun 2016 pasal 117.
3. Segera diwujudkan adanya dana alokasi khusus bagi BPBD se Indonesia untuk mitigasi, dalam rangka meminimalisasi korban dampak bencana
4. Peningkatan kerjasama dengan pihak lain (NGO, pusat studi, perguruan tinggi) perlu dikembangkan lebih lanjut baik secara formal

nota kesepahaman /MOU dengan BPBD Prov Jawa Tengah maupun secara non formal

Demikian laporan pelaksanaan program kerja BPBD tahun 2018 yang dapat kami laporkan. Semoga bermanfaat.
Salam Tangguh dan Salam Kemanusiaan.

BAB VI

LAMPIRAN

1. Indeks Risiko Bencana Tahun 2019, Tingkat Provinsi Jawa Tengah
2. Peta Potensi Terdampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kab/Kota Se-Jateng 2018-2019

Urutan kelas risiko dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 67
Indeks Risiko Bencana Indonesia

No	PROVINSI	Indeks Risiko 2013**			Indeks Risiko 2018**		
		Skor	Kelas	Ranking	Skor	Kelas	Ranking
1	2						
1	Aceh	160	Tinggi	1	157.56	Tinggi	8
2	Sumatera Utara	150	Tinggi	2	145.25	Tinggi	19
3	Sumatera Barat	153	Tinggi	3	151.56	Tinggi	13
4	Riau	147	Tinggi	4	147.27	Tinggi	15
5	Jambi	142	Sedang	5	138.64	Sedang	28
6	Sumatera Selatan	142	Sedang	6	139.67	Sedang	27
7	Bengkulu	172	Tinggi	7	163.29	Tinggi	2
8	Lampung	153	Tinggi	8	149.96	Tinggi	14
9	Bangka Belitung	162	Tinggi	9	161.54	Tinggi	4
10	Kepulauan Riau	116	Sedang	10	116.40	Sedang	33
11	DKI Jakarta	103	Sedang	11	72.12	Sedang	35
12	Jawa Barat	166	Tinggi	12	152.13	Tinggi	12
13	Jawa Tengah	158	Tinggi	13	146.47	Tinggi	17
14	DI Yogyakarta	165	Tinggi	14	142.24	Sedang	24
15	Jawa Timur	171	Tinggi	15	152.40	Tinggi	11
16	Banten	180	Tinggi	16	173.81	Tinggi	1
17	Bali	170	Tinggi	17	145.24	Tinggi	20
18	Nusa Tenggara Barat	172	Tinggi	18	139.92	Sedang	26
19	Nusa Tenggara Timur	156	Tinggi	19	142.43	Sedang	23
20	Kalimantan Barat	157	Tinggi	20	138.49	Sedang	29
21	Kalimantan Tengah	141	Sedang	21	133.00	Sedang	30
22	Kalimantan Selatan	152	Tinggi	22	145.21	Tinggi	21
23	Kalimantan Timur	165	Tinggi	23	155.49	Tinggi	9
24	Sulawesi Utara	151	Tinggi	24	141.45	Sedang	25
25	Sulawesi Tengah	158	Tinggi	25	146.39	Tinggi	18

No	PROVINSI	Indeks Risiko 2013**			Indeks Risiko 2018**		
		Skor	Kelas	Ranking	Skor	Kelas	Ranking
1	2						
26	Sulawesi Selatan	167	Tinggi	26	160.05	Tinggi	6
27	Sulawesi Tenggara	169	Tinggi	27	158.26	Tinggi	7
28	Gorontalo	140	Sedang	28	130.44	Sedang	31
29	Sulawesi Barat	191	Tinggi	29	162.92	Tinggi	3
30	Maluku	179	Tinggi	30	160.42	Tinggi	5
31	Maluku Utara	169	Tinggi	31	146.95	Tinggi	16
32	Papua Barat	154	Tinggi	32	143.27	Sedang	22
33	Papua	125	Sedang	33	122.93	Sedang	32
34	Kalimantan Utara	-	-	-	153.72	Tinggi	10

Sumber: * = BNPB, IRBI Tahun 2013, ** BNPB IRBI 2018

